

**SEJARAH KEJUANGAN DAN KEPAPHLAWANAN
SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH
YANG DIPERTUAN BESAR
KERAJAAN RIAU-LINGGA-HOHOR-PAHANG
(1761—1812)**

**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DAN
PEMERINRAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2012**

**SEJARAH KEJUANGAN DAN KEPAPHLAWANAN
SULTAN MAHMUD RI'AYAT SYAH
YANG DIPERTUAN BESAR
KERAJAAN RIAU-LINGGA-JOHOR-PAHANG
(1761—1812)**

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**SEJARAH KEJUANGAN DAN KEPAPHLAWANAN
SULTAN MAHMUD RI'AYAT SYAH
YANG DIPERTUAN BESAR
KERAJAAN RIAU-LINGGA-JOHOR-PAHANG
(1761—1812)**

Tim Penulis dan Penyelaras

Ketua:

Drs. Haji Abdul Malik, M.Pd.

Wakil Ketua:

Drs. Haji Abdul Kadir Ibrahim, M.T.

Anggota:

Haji Rida K Liamsi

Dr. Haji Azam Awang, M.Si.

Drs. Al Azhar, M.Si.

Dra. Anastasia Wiwik Swastiwi, M.A.

Drs. Suarman

Raja Malik Hafrizal

Tengku Moh. Fuad

**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAIK-LINGGA
2012**

Tim Perumus dan Penyusun:
Keputusan Bupati Lingga, Nomor: 179/ KPTS/ 2012, 4 Mei 2012

Pelindung:
H. Daria
(Bupati Lingga)

Penasehat:
Drs. Abu Hasyim
(Wakil Bupati Lingga)

Drs. Kamaruddin
(Sekretaris Daerah Lingga)

Penanggungjawab:
Drs. Junaidi
(Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga)

Ketua:
Drs. Haji Abdul Malik, M.Pd.

Wakil Ketua:
Drs. Haji Abdul Kadir Ibrahim, M.T.
Drs. Suarman

Sekretaris:
Ir. Muhammad Ishak, M.M.

Wakil Sekretaris:
Kamarulzaman, S.Pd.I

Anggota:
Haji Rida K Liamsi
Drs. Al Azhar, M.Si.
Dr. Haji Azam Awang, M.Si.
Raja Malik Hafrizal
Tengku Muhammad Fuad
Tengku Husein
Aswandi, S.S.
Said Adnan
Dra. Anastasia Wiwik Swastiwi, M.A.

SEKAPUR SIRIH

BUPATI KABUPATEN LINGGA

Bismillahir rahmaanirrahiim. Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Pertama-tama kita mengucapkan segala puji bagi Allah s.w.t., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat memberikan darmabakti kepada bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. *Alhamdu lillaahi rabbil'amin.* Selawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad s.a.w., *Allahumma shalli'ala saiyidina Muhammad wa'ala 'ali saiyidina Muhammad.* Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan dapat berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara sehingga Negara Indonesia tercinta mencapai kemajuannya dan tetap jaya.

Mengawali kata sambutan saya ini, marilah kita mengingat kembali sebuah ungkapan sakral yang mengatakan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa-jasa pahlawannya”. Kita niscayalah sebagai bangsa yang besar, berbudaya, beradab, beradat-istiadat, dan bersatu-padu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita adalah bangsa yang berkeyainan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita niscayalah tidak sudi dikatakan oleh siapa pun sebagai orang yang tidak dapat mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawannya. Kita niscayalah pula sebagai bangsa yang dapat menghargai, mengenang, meneruskan, dan menauladani jasa-jasa pahlawan bangsa. Kita adalah bangsa yang berbudi-bahasa, yang tahu, sadar, dan dapat membalas budi pahlawan bangsa dengan cara, peluang, dan kesempatan kita masing-masing dengan pantas dan patut sebagai anak bangsa Indonesia tercinta.

Saya selaku Bupati Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama pemerintah dan rakyat Kabupaten Lingga, sudah sejak lama mengikhtikarkan dengan cara-cara terhormat untuk menyiasati dan selanjutnya berbuat nyata bagi mengenang dan menghargai jasa-jasa anak bangsa yang terbaik pada masanya, yang darmabaktinya dan perjuangannya melampauwi masa hidupnya bagi bangsa dan negara Indonesia untuk disiapkan berkas riwayat kejuangan, keperintisan, dan kepahlawanannya dalam segala aspek hidup dan kehidupan, baik di tengah masyarakat maupun sebagai kepala negara dan pemerintahan. Anak bangsa terbaik yang kita maksudkan di sini adalah yang semasa kanak-kanak (kecilnya) dinamakan Raja Mahmud bin Sultan Abdul Jalil Mu'azam Syah bin Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah bin Sultan Abdul Jalil Ri'ayat Syah. Sejak kecil pula dalam usia lebih kurang dua tahun, sudah yatim-piatu, dan dilantik menjadi Yang Dipertuan Besar atau Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dengan gelar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah atau dipanggil juga Sultan Mahmud Syah III, yang memikul

amanah sebagai Raja/Sultan (Yang Dipertuan Besar) lebih kurang 51 tahun sejak 1671 s.d. 12 Januari 1812 M.

Berdasarkan catatan-catatan sumber-sumber sejarah dan percakapan-percakapan di tengah masyarakat, baik di Kepulauan Riau, Malaysia, maupun beberapa daerah yang dulu termasuk dalam kawasan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, dapat dipercayai dan diyakini secara ilmiah bahwa Baginda Sultan Mahmud Ri'ayat Syah begitu hebat dan berhasil menjayakan bangsa dan negeri dalam berbagai-bagai sendi hidup dan kehidupan bagi bangsa dan negara. Beliau adalah pejuang sejati bagi bangsa dan negara. Tentu perjuangan yang dimaksudkan adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan marwah Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dari kemiskinan, keterbelakangan, dan penjajahan, yang pada akhirnya termasuk secara nyata dan terbukti sebagai perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dengan kata lain, Baginda telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan kebebasan dari segala bentuk penjajahan sehingga tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, makmur, dan sejahtera.

Bagi kita dewasa ini mesti dan tentunya dapat memahami bahwatokoh kita di masa lampau telah melakukan perjuangan dalam beragam strategi yang ditempuh untuk mencapai kemerdekaan, ada yang melalui perjuangan fisik sehingga mengakibatkan jatuhnya korban nyawa atau hilangnya harta-benda dan juga melalui jalan diplomatik sehingga mengorbankan diri dalam pengasingan atau penjara. Strategi lainnya yang tentu tak kalah penting, sama saja besar dan luar biasanya bagi bangsa dan negara, adalah perjuangan nonfisik, misalnya dalam pemerintahan, politik, ekonomi, kebudayaan, peradaban, atau lainnya yang serupa itu. Di samping itu juga ada strategi yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kerajaan kita di masa lampau, yakni memindahkan pusat ibukota (pemerintahan) kerajaan (kesultanan) dari daerah satu ke daerah lainnya atau ke suatu tempat yang strategis sehingga penjajah, dalam hal ini Belanda, tidak dapat menjangkau apatah lagi hendak melumpuhkan kerajaan yang merdeka dan berdaulat.

Tiga strategi inilah yang dipergunakan oleh bangsa Indonesia demi mempertahankan kekuasaannya, dan sebenarnya strategi ini telah dipergunakan oleh sultan-sultan Melayu tempo dulu dalam menghadapi penjajah. Salah satu sultan Melayu yang sangat berjasa bagi masyarakat yang berada di bawah kekuasaan kesultanan Melayu saat itu (Riau-Lingga-Johor-Pahang serta wilayah pantai timur Sumatera bagian tengah dan pulau-pulau sekitarnya serta Sukadana-Kalimantan) adalah Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (1761—1812) yang makamnya berada di halaman bagian belakang Masjid Jami' Sultan Lingga di Daik, Kabupaten Lingga.

Sejarah perjuangannya bisa kita baca melalui buku-buku sejarah Melayu (sumber-sumber primer) baik yang ditulis oleh sejarawan atau pengarang dalam negeri, maupun luar negeri misalnya Malaysia, Singapura, ataupun beberapa negara di dunia, khususnya Belanda. Juga kita dapati dari kisah-kisah atau cerita-cerita, hikayat, syair, puisi, cerpen, dan novel serta bukti-bukti otentik berupa tinggalan bersejarah (benda cagar budaya atau situs) sebagai monumen dari jasa-

jasanya yang masih dapat kita saksikan sehingga dewasa ini di Hulu Sungai Carang (Riau)—Kota Tanjungpinang (Pulau Bintan), di Pulau Penyengat, dan tentu juga di beberapa kawasan di Indonesia lainnya, antara lain, di Mempawah dan Sukadana (Kalimantan), Singapura, dan Malaysia.

Sejarah mencatat itulah kebijakan monumental antara lain yang dilakukan oleh Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (Sultan Mahmud Syah III) yakni setelah berkedudukan di Pulau Galang Besar—Pulau Biram Dewa, Hulu Sungai Riau (Carang), Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang sekarang) selama lebih kurang 26 tahun (1761—1787)—selepas mengalahkan Belanda di Tanjungpinang dan sekitarnya—segera memindahkan pusat Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang ke Lingga. Di Lingga beliau memimpin negeri selama lebih kurang 25 tahun (1787—1812). Baginda selama menerajui Kerajaan sebagai Yang Dipertuan Besar/Sultan (setara Kepala Negara dan Pemerintahan dewasa ini) selama 51 tahun, yang wujud membangun kemajuan dan kejayaan kerajaan di Hulu Riau-Sungai Carang, Lingga, dan Pulau Penyengat. Alhasil, ketika masa pemerintahan Baginda-lah Hulu Riau dicatat penuh dengan kemajuan dikenal sebagai “Kota Raja” dan “Istana Kota Piring”, dan di Daik-Lingga dikenal sebagai “Bunda Tanah Melayu” dan Pulau Penyengat (Mars) sebagai “Pulau Mas Kawin” atau “Pulau Indera Sakti” yang maju dalam kebudayaan dan tamadun Melayu.

Sebagaimana dijelas di atas Sultan Mahmud Syah sudah berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Dapat kita tambahkan lagi bahwa juga jasa-jasanya melakukan perjuangan melawan penjajah dan mempersatukan kembali keutuhan sultan-sultan bangsa Melayu di bawah satu komando perjuangan.

Seiring dengan terbukanya kesempatan dari Pemerintah Indonesia untuk memberikan apresiasi kepada para pejuang kemerdekaan menjadi pahlawan nasional, maka tidaklah berlebihan jika Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah juga ditempatkan sebagai Pahlawan Nasional dari bangsa Melayu yang merupakan integral dari sejarah bangsa Indonesia.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Lingga sangat mendukung upaya untuk menjadikan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (Sultan Mahmud Syah III) menjadi Pahlawan Nasional Indonesia dari bangsa Melayu, khususnya Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melanjutkan upaya itu antara lain saya mengadakan pertemuan dan memimpin rapat dengan sejumlah tokoh, meliputi sejarawan, budayawan, tokoh masyarakat, akademisi yang dikenal luas di Kepulauan Riau dan, bahkan, Indonesia dan pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga di Kota Tanjungpinang pada 2 Mei 2012. Intinya rapat itu membicarakan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan berbagai rencana yang akan dilakukan dalam rangka penyiapan berkas (buku) sejarah Keperintisan, Kejuangan, dan Kepahlawanan (darmabakti) Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah kepada bangsa dan negara untuk diusulkan menjadi Pahlawan Nasional pada awal 2013. Dalam rapat itu disusunlah langkah-langkah yang harus dilakukan dan pembentukan Tim Perumus dan

Penyusunan Buku Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang (1761-1812).

Tim tersebut akhirnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga, Nomor 179/ KPTS/ 2012 tanggal 4 Mei 2012. Adapun susunan Tim dimaksud sebagaimana terlampir dalam buku ini. Dan, kiranya dalam rapat selanjutnya bersama para Tim Perumus dan Penyusunan buku dimaksud telah ditetapkan bidang-bidang bahasan yang berkait-erat sekali dengan jasa-jasa atau perjuangan, darmabakti yang luar biasa yang sudah diwujudkan oleh Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Pada rapat tersebut telah disepakati pula pembentukan Tim Penulis dan Penyelaras, yang nama-namanya sebagaimana tertera dalam buku ini.

Setelah itu tim terus bekerja secara maksimal. Maka pada 5 September 2012 di Tanjungpinang dilaksanakan rapat Tim Perumus dan Penyusun dan Tim Penulis dan Penyelaras, yang membahas hasil-hasil yang sudah ditulis dan disusun sebagai draf sebuah buku yang lengkap tentang Sultan Mahmud dimaksud. Rapat tersebut sekaligus melengkapi dan menyempurnakan isi buku. Juga ditetapkan bahwa pada 2 Oktober 2012 dilaksanakan Seminar tentang Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang (1761—1812) di Daik-Lingga dan Seminar Nasional 10 Desember 2012 di Jakarta. Pada 7 November 2012 digelar lagi rapat Tim Penulis dan Penyelaras untuk mendapatkan isi buku sebagaimana patutnya. Selanjutnya, pada 10 Desember 2012 di Jakarta tim tersebut telah mendapatkan informasi dan hasil-hasilnya yang dapat diambil untuk lebih melengkapi isi buku yang sudah disiapkan oleh Tim Penyusunan buku dimaksud.

Alhamdulillah, kedua seminar tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan sukses dan buku *Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang (1761—1812)* sudah siap disusun sebagaimana patutnya yakni buku ini. Isi buku ini bisa dijadikan sumber atau rujukan bagi kita anak bangsa untuk memahami lebih mendalam perjuangan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah salah seorang putra terbaik bangsa yang memang pantas dan patut menjadi Pahlawan Nasional Indonesia.

Akhirnya, buku yang sudah disusun dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga tersebut beserta berkas lainnya dengan Surat Bupati Lingga, Nomor: 556/DISBUDPAR/993 tanggal 19 Desember 2012 diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga pada 24 Desember 2012. Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lingga pada 26 Desember 2012 saya selaku Bupati Lingga menyampaikan pidato pengusulan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah di depan DPRD untuk mendapatkan persetujuan pengusulannya. Pada akhirnya DPRD Kabupaten Lingga pun dapat menyetujui Pengusulan Sultan Mamud Ri'ayat Syah (Sultan Mahmud Syah III) untuk menjadi Pahlawan Nasional dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, Nomor:

31/KPTS/DPRD/XII/2012, tentang Pengusulan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah sebagai Pahlawan Nasional, tanggal 27 Desember 2012.

Sebelum mengakhiri sambutan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memprakarsai dan berusaha membuka tabir sejarah bangsa Melayu di Indonesia dengan tokoh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, baik yang ada di daerah maupun nasional. Semoga Allah s.w.t. memberi ganjaran pahala dan kemuliaan atas usaha ini.

Demikianlah yang dapat disampaikan dan sebagai bangsa Melayu Indonesia, saya akhiri sambutan ini dengan se bait pantun sebagai berikut:

*Kerajaan Riau-Lingga Kesultanan Melayu
Istana Kenanga sangatlah terkenal
Sultan Mahmud Ri'ayat Syah pemersatu Melayu
Menjayakan bangsa Pahlawan Nasional*

Semoga Allah s.w.t., Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi kita semua, memberkahi dan meridhai apa-apa yang sudah kita kerjakan, kita ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh, dan tulus-keikhlas bagi mengangkat Sultan Mahmud Ri'ayat Syah menjadi Pahlawan Nasional Indonesia ini. Akhirnya, saya ucapkan mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan, *billahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wa baarakatuh.*

Daik-Lingga, 31 Desember 2012

BUPATI LINGGA,

H. DARIA

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik *Allah Azza wa Jalla*, Tuhan seru sekalian alam, yang tiada tuhan selain Dia. Berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya jualah buku ini selesai ditulis. Selawat dan salam kita tujukan kepada Junjungan Alam, Nabi Muhammad s.a.w., para ahli keluarga Baginda, sahabat-sahabat Baginda, dan para pengikut Baginda sampai ke akhir zaman. Berkat perjuangan Baginda Rasulullah s.a.w., kita memperoleh cahaya gemilang ilmu-pengetahuan sebagai alat untuk kehidupan di dunia sampai setakat ini dan untuk bekal hidup di alam yang kekal abadi di akhirat kelak seperti yang diajarkan Baginda kepada seluruh umat zaman-berzaman.

Buku ini mengungkapkan riwayat hidup dan perjuangan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, Yang Dipertuan Besar Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang, yang berkuasa pada rentang masa 1761 sampai dengan 1812. Sultan yang mampu bersemayam di singgasana kekuasaan sejak masih balita, selama kurang lebih 51 tahun, sampai mangkatnya ini ternyata telah menunjukkan prestasi kepemimpinan yang sungguh mengagumkan sehingga sangat patut dan layak untuk ditauladani oleh setiap generasi bangsa kita jika memang bakti kepemimpinan ditujukan kepada matlamat mulia agar terjunjung dan tersanjungnya martabat dan marwah bangsa dan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan tercapainya kemakmuran negara.

Sebagai sultan besar dari kerajaan besar—wilayah kekuasaan beliau terdiri atas tiga negara sekarang: (sebagian) Indonesia, (sebagian) Malaysia, dan Singapura—Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah telah mendedikasikan seluruh hidup dan masa kepemimpinannya untuk meletakkan dasar, membangun, memperjuangkan, dan mempertahankan kejayaan bangsa dan negaranya. Beliau tak pernah rela kedaulatan bangsa dan negaranya terjejas atau dan terjajah oleh pihak mana pun walau betapa besar pun kuasa pihak-pihak yang coba mencabar atau menantanginya, termasuklah Belanda dan Inggris yang sangat bernafsu untuk menaklukkan Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang pada masa pemerintahannya.

Tak seinci pun tanah airnya dan tak seorang pun anak bangsanya boleh dikuasai oleh pihak asing nampaknya telah menjadi harga mati yang terus dan terus diperjuangkan oleh Sultan Mahmud Ria'yat Syah sampai akhir masa kepemimpinannya. Pelbagai strategi, siasat, dan taktik yang canggih diterapkannya dalam kebijakan kepemimpinannya demi menjulangkan visi dan misinya menjaga keutuhan bangsa dan negaranya. Dalam keadaan upaya licik dan picik pihak asing yang telah melampaui batas yang dapat ditoleransikan, beliau secara sadar sesadar-

sadarnya dan bertanggung jawab memerangi pihak musuh itu, setelah jalan diplomasi tak lagi efektif untuk dilakukan. Bahkan, dalam memerangi musuh beliau tak sekadar menanti kehadiran lawan di pusat kekuasaannya, tetapi dikejar dan diburunya sampai ke sarang musuh. Peristiwa Perang Riau (1782—1784) menjadi bukti begitu membajanya lagi membaranya semangat Sultan Mahmud Ria'yat Syah ketika telah berdepan dengan para pengaru (pengacau) walau beliau dengan takdir Allah harus kehilangan ayah saudara (paman)-nya, Raja Haji Fisabillah, yang gugur sebagai syuhada yang gagah berani di Teluk Ketapang, Melaka, markas Belanda.

Tak hanya kala itu saja Kompeni Belanda dipermaluinya, tetapi sekali lagi pada 1787 satu garnizon Belanda di Tanjungpinang diranapkannya sehingga pihak musuh yang masih hidup harus melarikan diri dengan pakaian sehelai sepinggang, termasuk pimpinannya Residen Belanda di Tanjungpinang—David Ruhde—yang dengan wajah tertunduk harus kembali ke Melaka, markas Belanda kala itu. “Silalah berbisnis secara beradab dengan semangat saling menjunjung martabat, tetapi begitu kalian berubah menjadi biadab dengan menganggap kami bangsa yang lemah; langkah dulu mayat Beta!” begitu pasti sikap dan mantapnya patriotisme seorang penguasa berwibawa yang juga dikenal dengan nama Sultan Mahmud Syah III ini.

Inilah yang paling mendukung visi dan misi kepemimpinan beliau yang cemerlang. Sultan yang visioner itu mampu menjaga perpaduan dan keutuhan bawahan dan seluruh rakyatnya. Sikap dan tindakannya selalu dipedomani. Kata-katanya senantiasa didengar. Kewibawaan dan kepiawaiannya membangkitkan resa dan rasa bangga bagi kesemuanya: bawahan dan rakyat sekaliannya. Oleh sebab itu, beliau sangat dicintai oleh semua bawahan dan seluruh rakyatnya. Itulah kunci keberhasilan kepemimpinannya. Penerapan sistem pemerintahan yang berotonomi penuh bagi semua wilayah dan daerah takluk kerajaannya—bahkan di dalam sistem pemerintahan monarki absolut ketika itu—memungkinkan semua pemimpin di bawahnya dan rakyat sekaliannya sangat kreatif dan rela bekerja keras mengejar kemajuan. Itu juga kiat keanggunan kepemimpinan sultan, yang semenjak kecil telah yatim piatu ini, yang sungguh menakjubkan. Jadi, otonomi daerah yang diterapkan dalam pemerintahan modern sekarang bukanlah sesuatu yang baru jika kita merujuk kebijakan Sultan Mahmud Ria'yat Syah. Begitu juga dengan pembauran (fluralistik) kebangsaan, sudah dimulai dan diterapkannya wujud di dalam masyarakat Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang, yang dikenal dengan Sumpah Setia Melayu-Bugis dan berbilang kaum.

Baginda telah menunjukkan pula bagaimana hasil-hasil bumi berupa timah harus ditambang dan diolah dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perkebunan karet, sagu, gambir, kelapa, padi, dan sebagainya mestilah dikembangkan secara elok sehingga menjadikan petani berkecukupan dan sejahtera dan rakyat sekaliannya menjadi mudah mendapatkan berbagai keperluan rumah tangga. Baginda telah mewariskan pula sikap dan tindakan sebagai orang yang hidup di negeri yang terdiri atas pulau-pulau dan lautan (bahari). Lihatlah kemampuannya menciptakan bandar-bandar pelabuhan bagi aktivitas perdagangan dunia di dalam kawasan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Tak kalah hebat, armada-armada atau kapal-kapal perang ratusan buah dimiliki Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Laut dan selat, termasuk Selat Malaka yang menjadi lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, mampu dikelola dan ditaklukkannya.

Alhasil, pelbagai perjuangan pembangunan, pembaharuan, dan kemajuan yang direncanakan, dicanangkan, dan dilaksanakannya meliputi pelbagai bidang: politik, pemerintahan, pertahanan-keamanan, ekonomi dan perdagangan, agama, dan sosial-budaya—walau dihadang dengan pelbagai tekanan oleh pihak asing—berhasil diraih dengan gemilang.

Kita sebagai anak bangsa dan pemerintah (Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat) niscayalah dapat percaya dan berkeyakinan dengan sepenuh akal pikiran, pertimbangan secara mendalam dan meresapi secara sungguh-sungguh di lubuk hati yang paling suci bahwa almarhum Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ria'ayat Syah atau selalu dipanggil pula Sultan Mahmud Syah III—yang selepas Baginda mangkat (wafat) bergelar Marhum Masjid—sesuai dan sejalan (berdasarkan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan niscayalah dapat ditetapkan, diangkat, dan diberikan Gelar Pahlawan Nasional. Karena perjuangan dan pengabdian yang sudah didarmabaktikan ketika Baginda menjadi Yang Dipertuan Besar Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang selama lebih kurang 51 tahun (1761—1812) dapat memenuhi (sesuai) dan sejalan penegasan UU RI di atas, khususnya pada bagian *Menimbang*:

- a. Bahwa setiap setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehingga patut

mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang didarmabaktikan bagi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Banwa penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan oleh negara dalam bentuk gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan untuk menumbuhkan kebangsaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan darmabakti kepada bangsa dan negara.

Undang-Undang Republik Indonesia tersebut, tepatnya dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat (4) menjelaskan maksud Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, menjadi berbesar hatilah kita bahwa Sultan Mahmud Ri'ayat Syah adalah salah seorang putra terbaik bangsa yang sudah dilahirkan pada zamannya, ditakdirkan oleh Allah s.w.t., Tuhan Yang Maha Esa, dapat dan mampu dalam memberi darmabakti secara besar dan luar biasa terhadap segala aspek hidup dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan, buku *Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Ria'ayat Syah Yang Dipertuan Besar Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang (1761—1812): Cemerlang dan Gemilang Menjayakan Negeri* ini ditulis sebagai bentuk apresiasi anak bangsa—yang pada 2012 tepat 200 tahun setelah wafatnya Baginda Sultan Mahmud Ri'ayat Syah pada 12 Januari 1812—atas perjuangan pendahulu bangsa dan negara yang sangat membanggakan kita semua, bangsa dan negara Indonesia, bahkan, juga Malaysia dan Singapura sampai setakat ini. Selain itu, dengan segala dedikasi dan loyalitasnya kepada bangsa dan negara, kita sangat-sangat berharap Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dapat diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada 2013 oleh Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga segalanya dimudahkan Allah s.w.t. hendaknya dan kelak diberi keberkahan kepada almarhum dan kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sungguh Sultan Mahmud Ria'yat Syah sebagai Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sejatinya bukanlah sultan yang biasa-biasa saja. Selain sebagai pemimpin

kerajaan besar pada masa lampau, beliau telah menyelesaikan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepemimpinannya (darmabaktinya) dengan cemerlang dan gemilang. Penghargaan terhadap jasa-jasa dan nilai-nilai kejuangan yang diwariskannya adalah bukti bahwa beliau memang patut ditauladani dan dikenang. Baginda sukses besar dalam pentadbiran pemerintahan, politik, perdagangan, kebudayaan, agama dan sosial kemasyarakatan bagi kemajuan negeri dan segenap rakyatnya. Dengan kata lain, beliau telah berhasil dengan cemerlang dan gemilang dalam menjayakan negeri tetap merdeka, berdaulat, dan bermarwah sehingga tak dapat ditundukkan dan dijajah oleh Kolonial Belanda. Perlawanan akbar terhadap penjajahan dan kezaliman dari bangsa penjajah Baginda dilawannya tanpa pernah menyerah, bahkan, Baginda meraih kemenangan akbar dan dicatat sejarah dengan tinta emas. Maka tak heran bila Belanda menggelarnya sebagai musuh! Dengan demikian, sudah sepantasnya dan sepatutnya jika pemimpin besar seperti Yang Dipertuan Besar Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang (dewasa ini dapat samakan dengan Kepala Negara dan Pemerintahan) dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional.

Di pucuk itu semua, kita sebagai anak bangsa memohon pula kepada Allah Yang Maha Pangasih dan Penyayang, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar segala perjuangan dan pengabdian (darmabakti) Baginda secara terus-menerus sepanjang hidupnya untuk negeri dan rakyat (negara dan bangsa) dijadikan sebagai amal saleh dan dibalas dengan pahala. Kita mohonkan pula kepada Allah atas segala perjaungan syahid (fi sabilillah) dan amal-salehnya agar beliau diampunkan segala dosa, dibebaskan dari azab kubur, azab neraka, serta dimudahkan dan disenangkan di hari pembalasan serta dimasukkan ke dalam surga atas keridaan Allah s.w.t. Kita mohon juga kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar ketauladanan, kejuangan, keperintisan, dan kepahlawanan yang sudah dibuktikan secara nyata dan monumental untuk negeri menjadi spirit dan tauladan pula bagi anak bangsa dalam era kemerdekaan, khususnya dewasa ini dan pada masa-masa mendatang di dalam alam Indonesia tercinta.

Akhirnya, kepada Bupati Lingga, Drs. H. Daria, dan Gubernur Kepulauan Riau, Drs. H. Muhammad Sani, dan jajarannya kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menyusun sebuah buku sejarah perjuangan seorang tokoh besar dan berjasa luar biasa terhadap perjalanan dan serangkaian perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Kepada semua pihak yang telah memberi sumbangsih pemikiran, tak lupa pula kami ucapkan terima

kasih. Jika ada kata-kata atau kalimat yang janggal, kurang mengena, tak pada tempatnya, bahkan mungkin masih kurang niscayalah tidak akan secuil pun mengurangi jasa-jasa besar dan luar biasa yang sudah dicurahkan oleh Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ria'yat Syah selama hidupnya untuk negeri, rakyat, bangsa, dan negara yang wujud dan nyata dirasakan hasilnya sehingga dewasa ini dan bila-bila masa pun. Untuk itu, kami mohon maaf. Kata pantun Melayu: *pisang emas bawa berlayar/masak sebiji di dalam peti/utang emas dapat dibayar/utang budi dibawa mati*. Dan, buku ini pun—wacana dan gagasannya sudah muncul sejak puluhan tahun yang lalu digagas sejak 2009 silam dan diprogramkan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Lingga pada 2012—akhirnya siap kami tulis bersempena menyongsong dan menyambut peringatan Hari Pahlawan Republik Indonesia 2012 dengan ikhtiar, harapan, dan doa kepada Allah semoga Baginda menjadi Pahlawan Nasional Indonesia pada 2013 M. bersamaan dengan 1434 H. Sekian dan terima kasih. *Billahi taufik wal-hidayah. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakaatuh*.

Daik-Lingga, Kepulauan Riau, 10 November 2012

Tim Penyusun

MUQADDIMAH

*Yang Dipertuan Besar Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-dan Pahang
—kini sebagai bagian kawasan ASEAN—*

*Mahmud Riayat Syah (Mahmud Syah III), adalah Sultan yang ke-15.
Baginda telah menjadi raja yang menerajui Kerajaan
dengan tugas-tugas mulia selalu Kepala Negara dan Pemerintahan
selama lebih kurang 51 tahun (1761-1812).*

*Baginda telah memimpin kerajaan dengan sukses besar
penuh kecemerlangan, kegemilangan dan kejayaan
sehingga ketokohnya patut menjadi panutan
dan spirit perjuangan dan pengabdian
oleh anak-anak bangsa selepasnya (dewasa ini)
kepada bangsa dan negara tercinta: Indonesia*

dengan penuh dedikasi, sepuh hati, tanpa pamrih dan tulus-ikhlas.

Perlu diungkapkan di muka ini bahwa

*Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang
pada awalnya adalah sebagai pewaris dan penerus
(membawa dan mengemban semangat besar)
daripada Kerajaan Bintan (1100-1158)*

yang berlanjut dengan pusat kerajaan di Temasik-Singapura (1158-1384).

*Dari Temasik Kerajaan Melayu beralih ke Malaka
yang amat dikenal sebagai Kerajaan Melayu Malaka
yang pada akhirnya bercorak Islam (1384-1511).*

*Raja/ Sultan Malaka tersebut diserang oleh Portugis
maka pindah ke Bintan lalu berlanjut ke Kampar (1511-1528).*

*Dari Kamparlah kemudian Raja atau Sultan
dari Pewaris Kerajaan Melayu Malaka memindahkan pusat kerajaan
atau dikatakan sebagai mendirikan kerajaa baru
yang bernama Kerajaan Johor (1529).*

*Dengan demikian maka dapat dijelaskan nama-nama
sebagai orang-orang besar yang memegang jabatan Raja/ Sultan
dalam Kerajaan Johor, yang selanjutnya dikenal dengan nama
Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang.*

*Adalah Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang ini
berdiri dan berlangsung dalam rentang masa
lebih kurang tiga abad (tahun 1528-1819).*

Adapun Raja/ Sultan kerajaan ini adalah sebagai berikut:

*Sultan pertama Alauddin Riayat Syah II (1528-1564),
kedua Muzaffar Syah (1564-1570), ketiga Abdul Jalil Syah (1570-1571),
keempat Ali Jalla Abdul Jalil Syah II (Raja Umar) (1571-1597),
kelima Alauddin Riayat Syah III (Raja Mansur) (1597-1615),
keenam Abdullah Muayat Syah (Raja Seberang) (1615-1623),*

*ketujuh Abdul Jalil Syah III (Raja Bujang) (1623-1677),
kedelapan Ibrahim Syah (Raja Ibrahim) (1677-1685),
kesembilan Mahmud Syah II (1685-1699),
kesepuluh Bendahara Tun Abdul Jalil
yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV (1699-1718),
ke sebelas Abdul Jalil Rahmat Syah (Raja Kecik) (1718-1722),
kedua belas Sulaiman Badrul Alamsyah (1722-1761),
ketigabelas Abdul Jalil Muazam Syah (Raja Di Baroh) (1761),
keempat belas Ahmad Riayat Syah (1761),
kelima belas Mahmud Ri'ayat Syah (Mahmud Syah III) (1761-1812),
keenam belas Abdul Rahman Muazam Syah (1812-1819).¹
Adalah Sultan Mahmud Riayat Syah (Sultan Mahmud Syah III)
selama kekuasaannya menjadi Yang Dipertuan Besar
Sultan Riau-Lingga-Johor-dan Pahang kurun waktu 1761-1812 (51 tahun),
telah terjadi perlawanan dengan Belanda, yang di dalam perlawanan-perlawanan itu
beberapa kali mengalami kemenangan besar
dan berakhir dengan perjanjian kedua belah pihak.
Adalah menurut sumber terdekat dengan masa itu,
ditulis oleh E. Netscher dalam bukunya
“De Nederlanders In Djohor En Siak 1602 tot 1865”
(Batavia Bruining & Wijt, 1870) yang diterjemahkan oleh Wan Ghalib
dengan judul “Belanda di Johor dan Siak 1602-1865
(Pemerintah Daerah Kabupaten Siak & Yayasan Arkeologi
dan Sejarah Bina Pusaka, 2002)
dan “Tuhfat al-Nafis” yang ditulis oleh Raja Ahmad bin Raja Haji dan
diselesaikan oleh Raja Ali Haji bin Raja Ahmad (terbit tahun 1869)
yang diubah-aksara “asing” oleh Virginia Matheson Hooker (1991).
Dalam kedua sumber itu—yang diseneraikan di dalam tulisan—
bahwa menjelaskan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah
adalah pembangkang dan musuh besar bagi Belanda.
Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, bahkan oleh Belanda ditegaskan adalah
sebagai orang yang paling bertanggungjawab
dan bersama Raja Haji dalam berperangan Riau dengan Belanda
sehingga Belanda kalah dalam tahun 1782-1784.
Dan dalam berperangan lanjutan di perairan Tanjungpinang dalam tahun 1787,
selepas gugurnya Raja Haji sebagai syuhada di Teluk Ketapang, Malaka,
maka Sultan Mahmud Ri'ayat Syah tampil sebagai pimpinannya,
sehingga Belanda sekali lagi kalah dan terusir
dengan wajah tertunduk dari Riau-Tanjungpinang ke Malaka.
Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, terus berupaya melakukan perlawanan
kepada Belanda, yang antara lain Hijrah ke Lingga
dan membentuk persekutuan beberapa kerajaan,
baik dalam taklukan Riau-Lingga-Johor-dan Pahang
ataupun kerajaan-kerajaan (kekuatan) lainnya.*

¹ Lihat Mardiana Nordin, 2008: hlm. 20-24.

Pastilah, Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, tidak pernah menyerah kalah di lapangan atau sebagai fakta, melainkan hanya dalam perjanjian dan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Riau dengan Belanda sama sekali tidak ada satupun yang terealisasi atau terlaksana! Karena itu tidak ada alasan sama sekali memberi inteperasi (penafsiran) tetang perjanjian itu dengan pendapat seolah-olah Sultan Mahmud menyerah kalah.

Pihak Belanda sebagaimana diungkapkan Netscher terus berupaya hendak menghukum Sultan Mahmud dan memandangnya sebagai Sultan yang tidak dapat menepati janji dalam memenuhi perjanjian yang ada dan nyatalah sebagai Sultan yang dalam tidak siap untuk melaksanakan isi perjanjian antara Belanda dengan Raja-raja dari Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang. Beliau dalam fakta dan kenyataan (wujud) tidak pernah menyerah kalah, apalagi takluk! Belanda tidak pernah dapat menawannya dan selamanya menganggapnya musuh!

Baginda dalam memimpin Kerajaan—berkedudukan Sebagai Yang Dipertuan Besar Sultan (yang dalam bahasa dewasa ini Dapat dikatakan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan) tentu disokong penuh oleh Yang Dipertuan Muda, raja-raja dan segenap lapisan rakyat²— telah berhasil menjadikan Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang dalam mencapai puncak kemajuan dan kejayaan berbagai-bagai bidang termasuk bidang ekonomidan perdagangan dunia. Sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat nyata terwujud.

Pengembangan agama Islam, kebudayaan dan tamadun Melayu tumbuh dan berkembang seiring kemajuan lainnya.

Sehingga ketika pusat Kerajaan dipindahkan ke Lingga, maka segera selepas itu Lingga pun mencapai kemajuan sebagai sebuah kota yang mencerminkan capaian kebudayaan dan peradaban. Atas kegemilangan itu, sehingga Lingga pun dikukuhkan sebagai Bunda Tanah Melayu. Berlanjutlah upaya Baginda

²Kata Raja Ali Haji (1808-1873), yang sebenarnya tak lain tak bukan adalah juga anak saudara, keponakan Sultan Mahmud Riayat Syah dalam *Gurindam Dua Belas* (1847): “Raja mufakat dengan menteri/ Seperti kebun berpagarkan duri// Betul hati kepada raja/ Tanda jadi sebarang kerja// Hukum ‘adil atas rakyat/ Tanda raja beroleh inayat// Hormat orang yang pandai/ Tanda asal berbuat bakti// Akhirat itu terlalu nyata/ kepada hati yang tiada buta”. Dengan demikian dapat ditangkap dan dipahami sebagai apa yang dikatakan dalam karya agungnya itu, sebagai menggambarkan perpaduan (sehati-setaut) anantara Sultan/Raja dengan pembesar-pembesar kerajaan dan segenap rakyat negeri. Sedikit banyak, Raja Ali Haji menulis karya itu, tentulah karena menyerap cerita dari ayahnya, Raja Ahmad bin Raja Haji (Saudara sepupu Sultan Mahmud Riayat Syah) tentang bagaimana harmonisasi antara Sultan dengan para raja dan rakyat di dalam Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang beserta daerah-daerah takluknya.

kemudian menjadikan Pulau Penyengat sebagai maskawin
 pernikahannya dengan Engku Puteri Raja Hamidah
 binti Raja Haji Fisabilillah.

Pernikahan itu dicatat sejarah sebagai rangkaian berbagai ikhtiar
 yang dilakukan Baginda Sultan Mahmud Ri'ayat Syah
 untuk terus menjaga keutuhan persatuan, kesatuan,
 persaudaraan dan pembauran suku-bangsa di
 dalam Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang.

Ternyata bukan sekedar menjadikan Pulau Penyengat
 sebagai maskawin pernikahannya
 dengan Engku Puteri Raja Hamidah tetapi segera membangun
 dan menjadikan pulau itu sebagai sebuah kota
 yang lengkap dengan masjid, perkantoran, istana,
 dan bangunan-bangunan lainnya

serta alun-alun, taman, parit dan seluruh sarana dan prasarana kota.

Pulau Penyengat dikenal sebagai Pulau Indera Sakti,
 yang akhirnya menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Melayu
 yang pada gilirannya ditegaskan sebagai
 Pusat Tamadun Melayu di Nusantara.

Pulau itu—di samping sebagai pusat penting, monumental,
 bersejarah, agung bagi tamadun Melayu di Indonesia (Nusantara),
 tetapi yang tak kalah penting adalah
 sebagai sebuah pulau yang satu-satunya dikenal sebagai
 Pulau Maskawin di seantero dunia—yang dewasa ini patutlah dijadikan
 Warisan Indonesia (Nusantara) dan sekaligus Warisan Dunia “World Heritage”
 yang ditetapkan oleh Unesco! Kita perlu memperjuangkannya!

Segala jasa-jasanya jelas amat berarti, besar,
 bersejarah, dan monumental (luar biasa)
 bagi bangsa Indonesia, Malaysia, dan Singapura
 sehingga akhirnya mencapai kemajuan di segala bidang
 sebagaimana dewasa ini.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat
 menghargai jasa-jasa pahlawannya”.

Dan, pahamiilah kita (anak bangsa dewasa ini)
 bahwa sesungguhnya masyarakat luas di Nusantara,
 khusus masyarakat Provinsi Kepulauan Riau,
 dan terlebih khususnya lagi
 masyarakat “Orang” Melayu di Provinsi Kepulauan Riau
 dan daerah-daerah Melayu bekas wilayah
 Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang
 beserta daerah-daerah takluknya niscayalah sudah sejak lama
 ingin lengkap dan bangga merasakan
 sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia.

Sebab mengapa, karena sudah sejak lama pula merindukan,
 mendambakandan mencita-citakan salah seorang putra terbaik bangsa

“Orang Melayu”

*dari kawasan Melayu Kepulauan Riau juga diangkat,
ditetapkan dan mendapat gelar Pahlawan Nasional
dari Presiden Republik Indonesia.*

*Semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang
merestui pekerjaan kita ini dalam upaya menghargai jasa-jasa pahlawan
sekaligus memberi penghormatan dan kehormatan yang patut*

kepada Yang Dipertuan Besar Sultan

Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang

Sultan Mahmud Ri'ayat Syah atau Sultan Mahmud Syah III.

*Sebagai anak bangsa (generasi penerus) yang hidup di alam Indonesia
yang merdeka dan berdaulat ini niscayalah sangat hormat, menghargai
dan menempatkan jasa kejuangan, keperintisan dan kepahlawanan
anak bangsa bernama Sultan Mahmud Ri'ayat Syah
sebagai generasi pendahulu.*

*Kita anak bangsa dewasa ini dan mendatang tentulah hendak
dikatakan sebagai orang yang dapat menghargai
dan mengenang budi-bahasa baik para pendahulunya.*

*Tentu kita tak hendak dikatakan sebagai orang
yang tiada dapat membalas budi*

dan apalagi sampai melupakan budi-bahasa pahlawan kita.

Indonesia merdeka dan berjaya karena pahlawan berjasa.

Kita ingin menjadi anak bangsa yang berbangsa.

Kata Raja Ali Haji (1808-1873) dalam

“Gurindam Dua Belas” (1847)

“Jika hendak mengenal orang berbangsa lihat kepada budi dan bahasa”.

Maknanya: Sultan Mahmud Ri'ayat Syah

sudah berbudi-bahasa, berjasa luar biasa kepada bangsa dan negara,

maka kita pun patut memahaminya dan menauladaninya

sembari berbuat budi-bahasa pula kepada bangsa

dan negara Indonesisa tercinta.

Jasa-jasa luar biasa dari kejuangan,

Keperintisan, dan kepahlawanannya bagi bangsa,

sungguh monumental,

yang di antaranya sudah dipaparkan dalam uraian demi uraian

sesuai dengan bagian-bagian tulisan yang

sudah disiapkan oleh Tim Penulis (Penyusun) buku ini.

Pastilah apa-apa jasa, budi-baik yang luar biasa bagi bangsa kita

yang sudah didarmabaktikan sepanjang hidup

Sultan Mahmud Ri'ayat Syah

tidak sepenuhnya dan tidak selengkapnyanya dapat ditulis

dan diuraikan dalam buku ini.

*Hal itu terjadi karena keterbatasan tim penulis sebagai manusia
yang tidak luput dari kealpaan, kekurangan, kesalahan, dan kesilapan.*

Namun, kita yakin dan paham bahwa apa-apa budi-bahasa,

*jasa luar biasa bagi bangsa
Yang sudah diukir oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah
yang sudah diuraikan dalam buku ini,
sudah dapat memberi pengetahuan dan pemahaman
secara mendalam dan meyakinkan kepada kita
untuk menghargainya secara elok, patut, dan pada tempatnya
di tengah bangsa dan negara Indonesia yang merdeka.
Sebaliknya, segala kelemahan dan kekurangan dalam buku ini
bukan sebagai kelemahan dan kekurangan budi-bahasa, jasa luar biasa,
pengabdian sang Baginda kepada negeri,
tetapi semata-mata sebagai kelemahan dan kekurangan tim penulis.
Dengan demikian, pastilah tidak akan mengurangi
sedikit pun dari keseluruhan jasa-jasa besar dan luar biasa
yang sudah didarmabaktikannya untuk bangsa dan negara Indonesia.
Maka, sekali lagi kita ingat dan paham bahwa
"bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat
menghargai jasa-jasa pahlawannya".
Oleh karena itu, sangatlah patut dan pantas anak bangsa
di alam Indonesia merdeka ini
dapat memberi penghormatan, penghargaan,
dan tanda jasa kepadanya.
Dengan itu, sudah sepatut dan waktunya
kita mengharapkan sepenuh hati
Presiden Republik Indonesia dapat mengangkat
dan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional
kepada Baginda Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (Sultan Mahmud Syah III),
Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang.
Kata zuriat Sultan Mahmud Ri'ayat Syah
Yang bergelar Yang Dipertuan Besar Sultan Kerajaan Riau
Tengku Husein dalam seminar nasional
"Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah"
di Museum Nasional, Jakarta, 10 Desember 2012,
bahwa mohon Pemerintah atau Presiden Republik Indonesia
dapat memberi dan mengangkat Sultan Mahmud Ri'ayat Syah
menjadi Pahlawan Nasional Indonesia.
Negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura begitu mengagungkan
jasa-jasa dan peran Sultan Mahmud Ri'ayat Syah yang berlaku di masa lampau.
Kata Tengku Husein lagi, jangan sampai negara tetangga kita terlebih dahulu
mengangkatnya menjadi pahlawan nasional bagi negara mereka.
Sultan Mahmud Ri'ayat Syah telah mengukuhkan negeri tetap merdeka.
Sekali merdeka tetap merdeka! Jayalah Indonesia!*

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH BUPATI KABUPATEN LINGGA	
PENGANTAR TIM PENULIS	
MUQADDIMAH	
DAFTAR ISI	
SELAYANG PANDANG KERAJAAN RIAU-LIGGA-JOHOR-PAHANG	
1. Bermula dari Bintan-Temasik-Malaka	
2. Kerajaan Melayu Riau-Johor atau Johor-Riau	
3. Raja Mahmud Ri'ayat Syah: Sang Sultan Besar	
4. Membangun Pusat Kerajaan di Lingga dan Menjadikan Penyengat sebagai Emas Kawin	
RIWAYAT HIDUP SULTAN MAHMUD RI'AYAT SYAH	
1. Sejak Kanak-Kanak Menjadi Sultan	
2. Pendidikan dan Pematangan Sultan	
3. Hubungan Darah dengan Raja Haji dan Daeng Kamboja	
4. Bibit Perperangan dengan Belanda	
5. Memilih Raja Haji Menjadi Yang Dipertuan Muda	
PEJUANG SEJATI BAGI NEGERI GEMILANG DAN JAYA	
1. Berperang dengan Belanda di Riau dan Teluk Ketapang	
2. Sultan Mahmud Tolak Keinginan Belanda Mengusir Bugis	
3. Membentuk Persekutuan dan Mengusir Belanda	
4. Demi Kedaulatan Negeri, Berhijrah ke Lingga	
5. Menyatukan Kerajaan-Kerajaan Melayu dan Menguasai Selat Malaka	
6. Membuka Pertambangan Timah dan Memakmurkan Negeri	
7. Penyengat sebagai Emas Kawin dan Tempat Pengembangan Tamadun Melayu	
8. Hijrah Berpencar dan Pelopor Otonomi Daerah	
9. Perenungan bagi Bangsa dari Sultan Mahmud Ri'ayat Syah	
PERAN SULTAN MAHMUD RI'AYAT SYAH	

DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

1. Pendahuluan
2. Cakal-Bakal Pemerintahan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah
3. Strategi Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dalam Menghadapi Belanda
4. Kepemimpinan Sultan Mahmud Riayat Syah dalam Memajukan Kerajaan

PERAN SULTAN MAHMUD RI'AYAT SYAH DALAM MEMAJUKAN PEREKONOMIAN NUSANTARA

1. Kemajuan Ekonomi Riau Merusak Monopoli VOC
2. Perdagangan dan Ekonomi Menuju Kegemilangan
3. Mencapai Puncak Kemajuan Ekonomi
4. Membangun Kembali Perdagangan dan Membuka Penambangan Timah
5. Penutup

PERAN SULTAN MAHMUD RI'AYAT SYAH MENJADIKAN KERAJAAN RIAU-LINGGA SEBAGAI PUNCAK TAMADUN MELAYU

1. Pendahuluan
2. Puncak Pertama: Tamadun Melayu-Budha Sriwijaya
3. Puncak Kedua: Tamadun Melayu-Islam Malaka
4. Puncak Ketiga: Tamadun Melayu-Islam Riau-Lingga-Johor-Pahang
5. Indera Keenam Seorang Pemimpin Besar
6. Perjuangan Memartabatkan Bangsa
7. Perhimpunan Pelanjut Perjuangan
8. Penutup

PERAN SULTAN MAHMUD RI'AYAT SYAH DALAM PENGEMBANGAN ISLAM

1. Istilah Sultan dalam Kerajaan Islam di Nusantara
2. Islam dari Kerajaan Melayu Malaka Sehingga Riau-Johor
3. Pengembangan Islam di Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang
4. Penguatan Pembinaan Agama Islam

PENUTUP KALAM BAGI SANG PAHLAWAN NASIONAL

DAFTAR PUSTAKA

SELAYANG PANDANG KERAJAAN RIAU-LINGGA-JOHOR-PAHANG

1. Bermula dari Bintan-Temasik-Malaka

Di antara Sultan Kerajaan Melayu—mulai dari Bintan, Temasik, Malaka sehingga Riau-Lingga-Johor-Pahang—Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (Sultan Mahmud Syah III) adalah yang paling berjaya dalam menjaga kedaulatan dan marwah negeri, mewujudkan kemakmuran, serta membangun kebudayaan dan peradaban Melayu. Di samping itu, Baginda juga berhasil membuat VOC-Belanda mengakui kepemimpinannya sebagai Sultan. Pada bagian lain, Baginda juga berjaya memosisikan diri sebagai sultan yang tak dapat ditaklukkan dan menjadi pembangkang, musuh, dan lawan Belanda yang paling disegani kompeni itu. Oleh karena itu, beberapa kali pecah peperangan antara Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dan Belanda, baik di Riau maupun di Malaka. Jasa besar, mulia, dan luar biasanya itu amatlah berkait-erat dengan keberadaan bangsa dan negara Indonesia sehingga dewasa ini. Menariknya lagi, oleh Malaysia beliau juga dipandang sebagai tokoh besar dan berjasa bagi kejayaan Malaysia. Dalam penulisan buku sejarah Malaysia, apabila ditarik dari Johor, Pahang, Selangor, Kelantan dan Malaka maka senantiasa dikait-hubungkan dengan Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah atau Sultan Mahmud Syah III. Bagaimanapun Baginda sejatinya dipandang sebagai Sultan yang telah berjasa tiada terkira di dalam kelanjutan, pertumbuhan-kembangan dan kemajuan di tanah semenanjung Melayu itu. Sehingga dengan demikian sungguh tak terbantahkan bahwa nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan Sultan sepanjang hidupnya bagi bangsa dan negara kita Indonesia dapat dipahami dalam uraian bagian-bagian selanjutnya dari buku ini. Bagian ini khusus menguraikan secara selayang pandang Sejarah Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang sehingga 12 Januari 1812.

Pemerian sekilas-pintas tentang sejarah Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dalam kaitannya dengan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, tak lain tak bukan, untuk mengetahui keberadaan kerajaan itu dan bagaimana peran yang dimainkan oleh para sultan dalam pengabdianya kepada negeri. Dengan kata lain, pemerian sekilas-pintas ini sebagai pembuka kalam sebelum sampai kepada senarai uraian tentang berbagai aktivitas dan kreativitas Sultan

Mahmud selaku Yang Dipertuan Besar Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang yang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya (mentadbirkan) sebagai kepala negara dan pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan dapat dipahami secara benar mengenai silsilah keturunan dan pemerintahan yang berkait erat dengan dirinya. Alhasil peran Baginda dalam memperjuangkan dan mempertahankan bangsa dapat diketahui sampai bila-bila masapun, yang selanjutnya dapat memberikan motivasi bagi sesiapa saja dalam mengekspresikan dan mengaktualisasi diri mewujudkan pengabdian secara tulus ikhlas kepada negeri dan masyarakat selama bentangan usia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah swt.

Kiranya taklah berlebihan bila dikatakan sampai saat ini tersergamnya Kerajaan Bentan jauh sebelum munculnya Kesultanan Malaka dan tatkala Singapura masih bernama Temasik, belumlah tersurat sebagaimana patutnya di dalam senaraian sejarah di tanah air. Begitu pula dengan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang yang kemudian disebut Kesultanan atau Kerajaan Riau. Padahal Kerajaan Bentan dan Kesultanan-Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang adalah bagian tak terpisahkan dengan adanya berbagai-bagai kerajaan Melayu, baik di Indonesia maupun Malaysia. Rentang masanya niscayalah bukanlah terbilang baru, melainkan sudah berabad yang lalu. Bagaimana tidak, sekitar 1100 M, telah dilantik Raja Kerajaan Bentan yang pertama, Asyhar-Aya, yang bergelar Raja Iskandar Syah. Bahkan Kerajaan Bentan itu diyakini telah wujud pada 300 S.M. lagi.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Raja Iskandar Syah tampil menjadi Raja Bentan pertama. Beliau beristerikan Wan Seri Beni dan dikaruniai putri yang dikenal dengan nama Putri Bentan. Paling tidak, menurut banyak sumber, tercatat ada tiga orang begitu dikenal sebagai raja kerajaan ini yakni Asyhar-Aya bergelar Raja Iskandar Syah (1100—1150 M), Ratu Wan Seri Beni (1150—1158), yang kemudian digantikan oleh menantunya Sang Nila Utama yang bergelar Seri Tri Buana dari Bukit Siguntang, Palembang, Sumatera Selatan. Beliau didampingi oleh Mangkubumi Demang Lebar Daun serta menteri hulubalang. Beliau diterima oleh Raja Bintan Wan Seri Beni, selanjutnya ditabalkan menjadi Raja Bintan. Pada akhirnya, Raja Seri Tri Buana memindahkan pusat Kerajaan Bentan ke Temasik yang sudah diberinya nama baru, yakni Singapura. Pemindahan itu terjadi dalam tahun 1158.

Menurut Ahmad dalam *Kerajaan Johor-Riau* setelah Wan Seri Beni menabalkan Seri Tri Buana atau Sang Nila Utama menjadi raja di Singapura, maka untuk melanjutkan pemerintahan

kerajaan di Bintan, diserahkan kepada Demang Lebar Daun. Dalam pada itu, putra Menteri Bupala dititahkan menjadi ketua di Bintan, bergelar Tun Telani, yang keturunannya berasal dari Bendahara Bintan. Selepas Seri Tri Buana, raja memerintah Singapura, antara lain Sri Pikrama Wira, Sri Rakna Wikrama, dan Paduka Sri Maharaja (Ahmad, 1986:viii-ix). Dalam kaitan ini, menurut buku *Sejarah Kerajaan Melayu Siak Sri Indra Pura*), ada catatan yang terputus tentang nama-nama raja Melayu Singapura sebagai kelanjutan Kerajaan Bintan. Baru tersebut lagi pada masa Raja terakhir yang bernama Perameswara Raja Kecil Besar yang dikalahkan Majapahit (1384 M). Karena kalah di Temasik (Singapura), maka dia beredar ke Malaka dan menjadi Raja Malaka pertama. Di Malaka, kelak raja itu masuk Islam, yang bernama Sultan Muhammad (1384—1414 M.), yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Syah (1414—1424 M.), Sultan Muzaffar Syah (14124—1444 M.), Sultan Mansyur Syah (1444—1477 M.), Sultan Alaidin Riayat Syah (1477— ? M.), dan Sultan Muhmud Syah (?—1511 M.). Pada 1511 M. itulah Kerajaan Malaka mengalami masa kehancuran, akibat serang Portugis. Sultan Mahmud Syah—yang kelak dikenal sebagai Sultan Mahmud Syah I—bersama putranya Raja Ahmad terpaksa meninggalkan Malaka dan menyelamatkan diri ke Bintan, selanjutnya ke Kampar (1972:9-15).

2. Kerajaan Melayu Riau-Johor atau Johor-Riau

Lebih lanjut dijelaskan oleh Ahmad, ketika berada di Bintan, Sultan Mahmud Syah I bersama putranya, Raja Ahmad, berkerajaan lagi, tetapi kembali Portugis menyerang. Maka, berpindahlah Sultan Mahmud Syah I ke Kampar. Beliau mangkat di Kampar (1527/1528) dan anaknya dengan Tun Fatimah, yang lahir di Bintan, Raja Ali dilantik menjadi Raja dengan gelar Sultan Alaudin Riayat Syah. Sultan ini kemudian meninggalkan Kampar dan berkerajaan di Tanah Semenanjung, di Kuala Johor. Penempatan pusat kerajaan di Kuala Johor itu dalam rangka hendak menyerang Portugis di Malaka demi tegaknya marwah Kesultanan Melayu kembali. Sultan Alauddin Ri'ayat Syah adalah Raja Johor yang pertama (1529—1550 M.). Menurut Ahmad lagi, setelah Sultan Alauddin Ri'ayat Syah mangkat, maka Baginda digantikan oleh adiknya Raja Abdullah yang bergelar Sultan Abdullah Ma'ayah Syah dan meninggal dunia di Tambelan pada 1623 M. Penggantinya adalah anak Sultan Alauddin Riayat Syah III yang bergelar Sultan Abdul Jalil Ri'ayat Syah III (1623—1673 M.) (Ahmad, 1986:ix).

Selepas itu orang yang menggantikan adalah putranya sendiri, yang bernama Raja Ibrahim dengan gelar Sultan Ibrahim Syah I. Sultan inilah yang mula-mula membuat tempat bersemayam di Riau, tetapi Baginda taklah ia sendirian, tetapi dibantu oleh Laksemana Tun Abdul Jamil. Sebagaimana dikatakan Hasan Junus, bahwaLaksemana Tun Abdul Jamil diperintah oleh sultan ini untuk membuka dan membangun Riau sebagai sebuah pelabuhan bebas bertempat di Sungai Carang, Pulau Bentan pada 1673 M. Waktu itu wilayah Kerajaan Johor masih meliputi kawasan yang luas, mulai beberapa tempat di Sungai Siak dan Sungai Kampar sampai ke Pulau Tujuh atau Natuna, mulai dari Trengganu sampai ke Bangka. Sungai Carang itu akhirnya dikenal dengan Hulu Riau (Junus, 2000:6).

Dalam kaitan ini, Ahmad menjelaskan lebih lanjut bahwa Sultan Ibrahim Syah, yang tak lain tak bukan adalah cucu Sultan Abdullah Ma'ayat Syah, berkerajaan di Riau dan wafat pada 1685 M. Seterusnya, putranya, Sultan Mahmud Syah II, menggantikannya menjadi sultan. Namun, ketika itu sultan ini baru berusia 10 tahun, maka baru ditabalkan pada 1675 M. dan kerajaan dipangku oleh Bendahara Paduka Raja. Selepas Bendahara ini meninggal pada 1688 M., beliau dilanjutkan oleh Bendahara Tun Pikrama Tun Habib Abdul Majid, yang bergelar Seri Maharaja. Selanjutnya, beliau pun membawa Sultan Mahmud Syah II meninggalkan Riau dan pindah ke Johor, berkerajaan di Kota Tinggi, Makam Tauhid (Ahmad, 1986:xii). Malangnya kata Shaharom Husain dalam pada 1691 M. Bendahara Paduka Raja yang bijaksana itu mangkat. Semenjak itulah Sultan Mahmud Syah II menduduki tahta Kerajaan Johor. Namun sayang sultan ini tak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, bahkan cenderung berperangai ganjil (aneh) dan bengis. Sampailah pada suatu hari, ketika Sultan Mahmud Syah II di atas julang hendak pergi ke masjid untuk bersembahyang Jumat, tiba-tiba datanglah Megat Seri Rama membunuhnya dan Seri Rama pun tewas juga tertikam keris sultan. Jenazah sultan yang disebut Marhum Mangkat Dijulang itu dimakamkan di Kota Tinggi. Peristiwa kematian sultan itu terjadi pada Safar 1111 bersamaan dengan 1699 M (Husain, 1995:24).

Dengan demikian menurut A. Samad Ahmad berakhirilah sultan yang berasal dari keturunan Sultan Melaka. Selanjutnya, kekuasaan berpindah ke keturunan Bendahara Tun Habib. Maka itu, anak Tun Habib, Bendahara Seri Maharaja Abdul Jalil akhirnya menggantikan kedudukan Sultan Mahmud Syah II yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Baginda kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Pancur, seterusnya pada 1708 M. berpindah kembali

ke Riau (Ulu Sungai Carang) dan kembali lagi ke Pancur pada 1715 M. Keadaan kerajaan selama Baginda menjadi Sultan Johor mendapat ancaman, utamanya dari Raja Kecil, dan akhirnya Baginda memindahkan pusat kerajaan ke Pahang. Namun, Pahang kemudian diserang oleh Raja Kecil (k) dari Pagaruyung yang kemudian menjadi Raja Siak. Karena Pahang kalah, Sultan Abdul Jalil Ri'ayat Syah pun hendak berpindah bersama keluarganya ke Riau. Namun, belum sampai terlaksana rencana itu, Baginda sudah dibunuh. Akan tetapi, anak-anaknya, Raja Sulaiman dan Raja Abdul Rahman beserta saudara perempuan, tetap dibawa pembesar kerajaan ke Riau (Ahmad, 1986:xii-xiv).

Selanjutnya Raja Kecil merebut tahta Johor dan mengakui bahwa dirinya adalah anak Marhum Mangkat Dijulang, sebagai pewaris sah Kerajaan Johor-Riau. Maka itu, dia pun menyingkirkan Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Dalam peristiwa ini, ternyata Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV, sebelum menyerahkan tahta Johor kepada Raja Kecil, telah terlebih dahulu mengikat perjanjian bahwa Raja Kecil akan memperistikan anaknya yang bernama Tengku Tengah dan Raja Kecil akan mendudukkan kembali sultan menjadi Bendahara. Kemudian dijelaskan Shaharom Husain bahwa Raja Kecil pun bertunangan dengan Tengku Tengah. Namun, tanpa disengaja akhirnya sultan melihat pula anak Abdul Jalil yang lain, yakni Tengku Kamariah, yang kemudian membuatnya jatuh hati. Baginda akhirnya batal menikah dengan Tengku Tengah, tetapi dengan Tengku Kamariah. Sultan ini berkedudukan di Johor dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dan pada masa itu Johor, Pahang, Riau, dan Lingga di bawah pemerintahannya (Husain, 1995:28-29).

Pada 1719 M Baginda memindahkan pusat pemerintahan dari Johor ke Riau lagi. Dalam pada itu, keturunan Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV, Tengku Sulaiman berupaya untuk merebut kembali tahta dan kekuasaan dari tangan Raja Kecil. Sampai kemudian dia minta bantuan kepada lima bangsawan Bugis asal Luwu: Daeng Parani, Daeng Marewah, Daeng Celak, Daeng Manambun, dan Daeng Kemasi. Akhirnya terjadilah peperangan antara Tengku Sulaiman yang dibantu bangsawan Bugis dengan Raja Kecil. Bangsawan Bugis tersebut bersedia membantu Tengku Sulaiman berperang melawan Raja Kecil dengan alasan hendak membebaskan Kerajaan Johor dan mengembalikannya kepada sultan yang lebih berhak, yakni Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV.

Atas bantuan lima bangsawan Bugis, akhirnya pada 1722 M. Tengku Sulaiman pun berhasil merebut kekuasaan dari Raja Kecil yang kemudian pada 4 Oktober 1722 M. dilantik menjadi Sultan Riau-Lingga-Johor-Pahang dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Sultan Sulaiman didudukkan sebagai Yang Dipertuan Besar Keraan Riau-Lingga-Johor dan Pahang. Bersamaan dengan itu, Daeng Marewah pun diberi kehormatan memangku jabatan Yang Dipertuan Muda I Riau, yang kedudukannya berada di bawah Yang Dipertuan Besar atau Sultan.

Jabatan Yang Dipertuan Muda, menurut A. Samad Ahmad diwujudkan untuk membalas jasa dari pertolongan Upu lima bersaudara itu. Jawatan tersebut telah ditentukan untuk disandang oleh seorang Upu yang lima bersaudara itu turun-temurun. Ketentuan ini telah diperkukuh pula satu ikrar “Sumpah Setia” antara kedua pihak (Ahmad, 1986:xv) ikrar yang sekali-kali tiada boleh dimungkiri sepanjang masa. Berkaitan dengan “Sumpah Setia” Melayu-Bugis tersebut menurut keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Sejarah ABRI, yang ditulis oleh Tanu Suherly dalam buku *Sejarah Perjuangan Raja Haji Fisabilillah dalam Perang Riau Melawan Belanda (1782-1784)*, dijelaskan bahwa dalam pelantikan jabatan Yang Dipertuan Muda Riau untuk pertama kalinya, maka Daeng Marewah mengucapkan “ARUK” atau sumpah setia di hadapan Sultan: “Jika di Melayukan daripada bangsa Bugis, yakinlah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, akulah Yang Dipertuan Muda yang memerintahkan kerajaanmu. Barang siapa tidak suka membujur di hadapanku aku lintangkan. Barang siapa tiada suka melintang di hadapanmu aku bujurkan. Barang yang semak berduri di hadapanmu aku cucikan”. Selanjutnya sumpah setia itu diperkuat dengan amanat Sultan dengan kata-pkata: “Seumpama mata hitam dan putih tidak boleh bercerai-cerai antara Sultan dengan Yang Dipertuan Muda, selagi ada cakrawala bulan dan matahari jika salah satu pihak menyalahi tidak akan selamat anak cucu dari dunia sampai ke akhirat”. Demikianlah sumpah setia yang melandasi tekad persatuan Melayu-Bugis dalam usaha membangun Kerajaan Melayu Riau, yang selalu dipegang teguh oleh keturunan mereka. Berkat persatuan yang kokoh mereka bahu membahu membangun Kerajaan Melayu Riau, wilayahnya meliputi Riau Kepulauan, Johor, dan Pahang. Sultan berkedudukan di Riau, Tumenggung di Johor dan Bendahara di Pahang. Tanu Suherly menjelaskan pula, bahwa Raja Haji sangat menghormati Yang Dipertuan Besar, yang dalam hal ini adalah Sultan. Raja Haji patuh kepada

keputusan Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Kerajaan Melayu Riau. (Abrus, dkk., 1989:190).

Dengan demikian, tentulah telah terjadi pembagian kekuasaan dan tugas di dalam menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Riau-Johor-Pahang. Meskipun begitu, dapat diyakini, kekuasaan Yang Dipertuan Besar Sultan, tetaplah berada di atas kekuasaan Yang Dipertuan Muda. Pusat kerajaan waktu itu tetap berlangsung di Ulu Sungai Carang, Pulau Bintan yang dikenal sebagai Sungai Riau. Dapat dikatakan pula bahwa Yang Dipertuan Muda taklah akan membelakangi, meninggalkan, apa lagi sampai mendurhaka kepada Yang Dipertuan Besar, yang dalam menjalankan kekuasaan dan tugas sebagaimana diberikan tentunya atas sepengetahuan, persetujuan, dan restu dari Yang Dipertuan Besar. Di situlah makna dan hakikat sumpah setia³ yang telah diikrarkan oleh Tengku Sulaiman dan Upu Bugis sebelum menaklukkan Raja Kecil.

3. Raja Mahmud Riayat Syah: Sang Sultan Besar

Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah mengukuhkan kedudukan pusat pemerintahan di Riau. Pada akhirnya, kerajaan Melayu ini pun dikenal dengan sebutan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang beserta daerah takluknya. Sebagaimana dijelaskan di atas, kekuasaan kerajaan ada yang dinamakan dengan Yang Dipertuan Muda, yang pertama dijabat oleh Daeng Marewah. Ketika Daeng Marewah wafat (berkuasa 1722—1728), menurut Raja Hamzah Yunus dan berbagai sumber, beliau digantikan oleh Daing Celak, menjadi Yang Dipertuan Muda II Riau (berkuasa 1728—1745 M.), lalu Daeng Celak digantikan oleh Daeng Kamboja sebagai Yang Dipertuan Muda III Riau (berkuasa 1745—1777 M.). Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah meninggal dunia pada 1760 M., dimakamkan di Kampung Melayu, Ulu Sungai Riau dan digantikan oleh putranya Sultan Abdul Jalil Muazam Syah sebagai Sultan Riau (berkuasa 1760—1761 M.), dikebumikan di Kampung Melayu, Hulu Sungai Riau juga, dan dilanjutkan oleh cucunya, anak Sultan Abdul Jalil Badrul Alam Syah yang bernama Raja Mahmud. Setelah dilantik menjadi Sultan, Baginda

³ Menurut Buyong Adil, sebagaimana dijelaskan dalam *Sejarah Perjuangan Raja Haji Fisabilillah dalam Perang Riau Melawan Belanda (1782-1784)*, bahwa "Sumpah Setia" orang Melayu dengan Bugis, di mana Sultan Sulaiman dengan YDM Daeng Marewah membuat persetiaan dengan bersumpah bersaksikan Al Quran mengakui persaudaraan dan bertolong-tolongan antara kedua belah pihak (1989:17).

bergelar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah atau Sultan Mahmud Syah III, yang ketika ditabalkan menjadi sultan pada 1761 masih berusia sekitar dua tahun.⁴

Raja Mahmud, ketika dilantik menjadi Yang Dipertuan Besar, Sultan Kerajaan Riau-Lingga dan Pahang menurut E. Netscher (1870) dalam *De Nederlanders In Djohor En Siak 1602 tot 1865*, yang diterjemahkan oleh Wan Ghalib *Belanda di Johor dan Siak 1602-1865*, belum dapat lagi melaksanakan tugas-tugasnya sebagai sultan sebagaimana patutnya karena masih anak-anak. Seiring penjelasan di atas, Daeng Kamboja bertindak sebagai wali dari putra almarhum Raja di Baruh, yang telah dinobatkannya menjadi Raja Johor dengan gelar Sultan Ahmad Riayat Syah, abang Raja Mahmud. Sultan Ahmad pada waktu itu baru berumur delapan tahun atau sembilan tahun, tetapi tak mendapat asuhan yang diperlukan dari ibunya Tengku Putih karena ibunya meninggal beberapa minggu setelah suaminya Tengku Besar Abdul Jalil wafat; Tengku Putih sewaktu suaminya berada di Selangor pada akhir 1760 telah melahirkan putra kedua yang diberi nama Raja Mahmud. Sementara itu, Daeng Kamboja mengangkat secara tak resmi kemanakannya Raja Haji sebagai Raja Muda dengan gelar Kelana. Sultan Ahmad tak berumur panjang, dia mangkat karena diracun. Akhirnya Bugis memilih Raja Mahmud, adik almarhum Sultan Ahmad, yang pada waktu itu masih bayi dan masih digendong oleh Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja (waktu itu Raja Mahmud mungkin belum sampai umurnya dua tahun sudah dilantik menjadi Yang Dipertuan Besar dengan gelar Sultan Mahmud Riayat Syah atau dikenal pula dengan nama Sultan Mahmud Syah III, *Pen.*). Kesempatan itu digunakan oleh Daeng Kamboja untuk bebas memerintah Kerajaan Riau sehingga sangat mengkhawatirkan Pemerintah Belanda di Malaka. (Ghalib, 2002:186-187).

Pelantikan Raja Mahmud menjadi Yang Dupertuan Besar Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dengan gelar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dijelaskan oleh Raja Ahmad dan Raja Ali Haji⁵ (*Tuhfat al-Nafis*, 1865) dalam Virginia Matheson Hooker dijelaskan bahwa seketika lagi

⁴Abdullah Zakaria Ghazali dalam bukunya *Istana dan Politik Johor (1835-1885)*, menjelaskan pula tentang pergantian Yang Dipertuan Besar Sultan Suliman Badrul Alam Syah sehingga sampai kepada Raja Mahmud. Katanya, setelah Sultan Sulaiman mangkat, tahta kerajaan berpindah kepada puteranya, Tengku Abdul Jalil, dan bergelar Sultan Abdul Jalil Muazam Syah. Sultan Abdul Jalil tidak sempat memerintah karena setelah diisytiharkan, baginda mangkat di Selangor. Sultan Abdul Jalil digantikan oleh puteranya, Raja Ahmad, bergelar Sultan Ahmad. Setelah Sultan Ahmad mangkat tahta Kerajaan Johor digantikan oleh saudara baginda, Raja Mahmud, dengan gelaran Sultan Mahmud III. Sultan Mahmud III memerintah Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga dari tahun 1761 hingga 1812, yang terakhir bersemayam di Lingga (Ghazali, 1997:6).

⁵ Raja Ali Haji adalah anak Raja Ahmad, yang tak lain tak bukan adalah anak Raja Haji. Raja Ahmad lahir di dalam istana Yang Dipertuan Muda Riau IV, di Pulau Biram Dewa dalam tahun 1778 M atau 1193 H. Sedangkan

maka Yang Dipertuan Muda (pun) naiklah ke istana lalu didukungnya Raja Mahmud, dibawanya turun (ke balai) lalu diribanya di atas singgahsana. (syahdan pada satu kaul orang tua-tua adalah yang menjulanginya itu satu anak baik daripada keturunan Bugis yang empat puluh, yang bernama To Kubu adanya). Setelah anak raja-raja Bugis melihat hal yang demikian itu, maka ia pun (masing-masing) memegang hulu kerisnya. Maka Yang Dipertuan Muda pun bertitah(lah), “Barang tahu kiranya suku-suku (sebelah) Melayu, dan sebelah Bugis, bahawa sesungguhnya inilah Raja Johor, dengan segala takluk daerah2 yang diangkat oleh Bugis (sebagaimana mengangkat nendanya Marhum Batangan, dan ia pun demikian jua). Maka barang siapa (yang) tiada membetuli aturan ini, maka pada hari/inilah/ (dan waktu) inilah (kita) berhabis-habis.” Maka lalu(lah) ia mengunus halamangnya.

Tuhfat al-Nafis lebih lanjut mengatakan syahdan setelah Datuk Bendahara (serta anak raja-raja suku-suku Melayu) melihat hal yang demikian itu, maka terbaliklah mukanya (semuanya itu, dan segala anak raja-raja Bugis memegang hulu kerisnya). Maka Datuk Bendahara pun fikir, “Jika tiada dibetulkan tentu(lah) rosak negeri (Riau) ini, tiada (apa) faedahnya. Maka ia pun bersabda katanya, “Jikalau sudah patut (ke) pada abang semua (sebelahBugis), Raja Mahmud ini menjadi raja Johor (dengan segala takluk daerahnya maka semua pun sertalah, (kerana semuanya pun anak cucu marhum juga, semuanya patut saya semua sembah).” Maka jawab Yang Dipertuan Muda, “Jikalau sudah begitu (Orang Kaya), al hamdu Lihatlah sama-sama betul mufakat (antara kita kedua pihak,” Maka lalu disarungkannya halamangnya).Maka lalu diajak (oleh Yang Dipertuan Muda) antara kedua pihak/itu/bersama-sama menjunjung duli.Maka menjunjung dulilah kedua pihak (Melayu dan Bugis itu). Kemudian baharulah bersetia pula (sepereti setia Marhum yang Mangkat di Sungai Baru. Maka setelah selesai/lah daripada itu maka/titah baginda Yang Dipertuan Muda, “Bacalah fatihah.” Maka dibacalah oleh imam akan fatitah dan doa. Maka habislah pekerjaan itu maka kembalilah antara kedua pihak Bugis dan Melayu itu, demikianlah kisahnya konon, daripada beberapa mutawatir khabar orang yang tua-tua (yang) semasanya intiha. (Matheson Hooker, 1991:321).

Raja Ali Haji, adalah cucu daripada Raja Haji, yang lahir dalam tahun 1808 di Pulau Penyengat. Sedangkan Sultan Mahmud Syah III dengan Raja Ahmad adalah sepupu dan merupakan ayah saudara pula daripada Raja Ali Haji.

4. Membangun Pusat Kerajaan di Lingga dan Menjadikan Penyengat sebagai Emas Kawin

Sultan Mahmud Ri'ayat Syah melalui masa kanak-kanaknya dengan penuh perjuangan dan tantangan. Baginda mesti belajar keras dan tekun. Ketika tumbuh remaja, kemampuannya dalam memimpin roda pemerintahan kerajaan sebagai Yang Dipertuan Besar atau Sultan telah terasah dengan baik atas bimbingan Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja dan Kelana Raja Haji. Sampailah suatu masa Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja wafat (1777). Maka yang menjadi Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Haji, anak Daeng Celak (Yang Dipertuan Muda II Riau). Tatkala Raja Haji menjadi Yang Dipertuan Muda IV Riau, beliau berkedudukan di Pulau Biram Dewa yang terkenal dengan Istana Kota Piring, sedangkan Sultan/Yang Dipertuan Besar tetap berkedudukan di Ulu Riau.

Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang semakin maju, terutama menguasai jalur lalu-lintas pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Pelabuhan-pelabuhan di dalam wilayah kerajaan ini menjadi pelabuhan perdagangan dari berbagai belahan dunia. Hal itu membuat Belanda di Melaka dan Batavia bernafsu untuk menaklukkannya. Untuk itu, berbagai politik jahat pun dilakukan, antara lain berupaya memecah-belah Yang Dipertuan Besar dengan Yang Dipertuan Muda atau Melayu dengan Bugis. Sampailah kemudian meletus peperangan antara Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dan Belanda di Riau dan Malaka pada 1782—1787. Menurut Teuku Ibrahim Alfian dalam *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji sebagai Bapak Bahasa Indonesia* pada 1757 Kerajaan Riau-Johor di bawah Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah dan Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja melawan Belanda di Malaka. Ikut serta Kelana Raja Haji. Belanda terpaksa mendatangkan bantuan dari Batavia. Raja Haji memindahkan pusat perlawanan dari Reteh ke Padas. Skenario perlawanan hampir mirip kembali dilakukan Kerajaan Riau-Lingga. Perlawanan kembali dilakukan ketika Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah dan Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Haji. Kesultanan Riau-Lingga (Riau-Lingga-Johor-Pahang) sering dianggap sebagai lanjutan (pewaris) kerajaan Melaka yang sejak pendudukan Portugis pindah ke Johor dan kemudian ke Bintan. (Junus, dkk., 2004:244).

Dalam peperangan itu kemenangan diraih oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dengan pimpinan perang di lapangan Raja Haji di Riau pada 6 Januari 1784 dan berlanjut di Malaka sehingga Yang Dipertuan Muda Riau IV Raja Haji tewas sebagai syuhada di Teluk Ketapang

pada 18 Juni 1784. Selepas itu Belanda menduduki Tanjungpinang, tetapi Sultan Mahmud tak tinggal diam. Baginda terus mengobarkan perjuangan dan segera melanjutkan berperangan dengan Belanda yang sudah berada di Tanjungpinang, Riau. Maka dengan pasukan gabungan, yang di dalamnya juga ikut serta kekuatan pasukan yang dipimpin oleh Yang Dipertuan Muda V Riau Raja Ali, mereka menggempur Belanda. Menurut Taufik Abdullah dalam *Sejarah Perjuangan Raja Haji Fisabilillah dalam Perang Riau Melawan Belanda (1782-1784)* selepas Raja Haji tewas, Sultan Mahmud dengan "perompak lanun" berhasil menghancurkan Benteng Belanda di Riau (1787). (Abrus, dkk., 1989:178).

Dalam berperangan di Riau pada 1787 tersebut sekali lagi Belanda kalah dan untuk kedua kalinya diusir dari Riau dan kembali ke Malaka dengan wajah tertunduk. Sementara itu Sultan Mahmud Ri'ayat Syah paham benar akan watak penjajah Belanda, yang menurut keyakinannya pasti akan datang lagi menyerang pusat Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang di Ulu Riau sebagai serangan balasan. Karena tak mau pusat kerajaan hancur dan kedaulatan kerajaan jatuh ke tangan Belanda, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dengan berani mengambil langkah penyelamatan kerajaan. Langkah dimaksud adalah berhijrah atau berpindah ke Lingga dan ke berbagai daerah kawasan kerajaan serta kerajaan Melayu lainnya. Dengan demikian, Belanda tak akan dapat lagi dengan mudah untuk menjangkau dan menyerang Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Pindahan pusat kerajaan dari Ulu Riau ke Lingga tersebut terjadi pada 1787. Ternyata sejak saat itu Belanda tak pernah lagi dapat menyerang pusat Kerajaan Melayu Riau-Lingga-Johor-Pahang, baik di Lingga ataupun di daerah lainnya. Sebaliknya, Sultan Mahmud dengan berbagai kekuatan terus berupaya untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan jalur lalu-lintas perdagangan di Selat Malaka. Sultan Mahmud, kata Taufik Abdullah bertahun-tahun mengelana yang antara lain berada di Pahang (Abrus, dkk., 1989:178).

Target utamanya adalah hendak mengusir Belanda dari Melaka. Beliau dibantu oleh Yang Dipertuan Muda V Riau Raja Ali bin Daeng Kamboja dan kemudian berlanjut kepada Yang Dipertuan Muda VI Riau Raja Jaafar bin Raja Haji. Dalam pada itu Sultan Mahmud terus membangun pusat kerajaan baru, Lingga dengan berbagai bangunan dan fasilitas sehingga benar-benar menjadi sebuah kota yang maju dan hebat. Baginda memainkan perannya dalam perdagangan dunia, utamanya hasil tambang timah. Kerajaan Riau-Lingga menjadi tanah Melayu sebagai tempat dilakukannya pembinaan bahasa Melayu sehingga dunia tulis-menulis mulai

mendapatkan tempatnya dan wujud di tengah kehidupan masyarakat. Antara lain, Raja Jaafar bin Raja Haji menjadi salah seorang juru tulis kerajaan. Di samping itu, nama lain yakni Raja Ahmad bin Raja Haji muncul sebagai pengarang, yang mulai menulis *Tuhfat al-Nafis*.

Tak berhenti hanya di Lingga, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah membuka Pulau Penyengat yang semula atau sebelumnya telah dijadikan oleh Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah bersama Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Hajibaru hanya sebagai kubu pertahanan perang, pada akhirnya untuk dijadikan sebuah kota. Baginda pun menikah dengan Engku Puteri Raja Hamidah binti Raja Haji—sebagai upaya untuk semakin memperkokoh hubungan persaudaraan Melayu-Bugis—dengan emas kawannya Pulau Penyengat. Setelah usai pernikahannya dengan Engku Puteri, dibangunlah Pulau Penyengat sebagai sebuah kota yang lengkap dengan segala macam gedung-gedung serta sarana dan prasarana lainnya. Pulau itu dikenal sebagai sebuah kota yang pada gilirannya menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya kebudayaan Melayu, yang antara lain dilakukan pembinaan bahasa Melayu dan pelbagai ilmu pengetahuan lainnya sehingga pulau itu dikenal sebagai Pulau Indera Sakti yang berfungsi sebagai Pusat Tamadun Melayu. Pelbagai peristiwa heroik berperangan mempertahankan negara dan bangsa, perjuangan memajukan ekonomi dan perdagangan, ilmu pengetahuan, agama, persatuan dan kesatuan bangsa yang fluralistik, kebudayaan, dan khasnya bahasa dan sastra Melayu sehingga Pulau Penyengat menjadi Kota Tamadun Melayu yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Upayanya untuk membangun pusat-pusat kota, baik di Lingga, Pulau Penyengat dan kawasan lainnya dalam wilayah Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang terus berlangsung sehingga Baginda wafat pada 12 Januari 1812 di Lingga.

Sebagai hamba Allah yang shaleh dan senantiasa dekat dengan masjid, maka setelah Baginda meninggal para pembesar negeri dan sekalian masyarakat Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang pun sepakat memberi ia gelar terpuji dan agung yakni Marhum Masjid. Ada pendapat yang berkembang di masyarakat sehingga dewasa ini bahwa gelar Marhum Masjid itu diberikan bukan hanya karena Baginda dalam setiap kali membangun kota dan selalu masjid yang dibangun terlebih dahulu dan rajin beribadah di masjid, tetapi juga karena beliau memang menghembuskan napas terakhir atau meninggal dunia di dalam masjid yang terletak di dekat istana kerajaan di Lingga. Beliau dimakamkan di halaman masjid. Adapun tentang bagaimana lebih lanjut kejuangan, keperintisan dan kepahlawanan almarhum yang begitu berjasa luar biasa

bagi bangsa dan negara, dapat diikuti lebih jelas dalam uraian pada bagian-bagian selanjutnya dari buku ini.

RIWAYAT HIDUP SULTAN MAHMUD RI'AYAT SYAH

1. Sejak Kanak-Kanak Menjadi Sultan

Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sejak Yang Dipertuan Besa Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah telah memantapkan kedudukan pusat kerajaan di Ulu Riau, Sungai Carang, Pulau Bintan. Beliau dilantik menjadi sultan pada 4 Oktober 1722. Sejak saat itu Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang mempunyai jabatan baru di bawah sebagai “pembantu” Yang Dipertuan Besar, yakni Yang Dipertuan Muda (YDM). YDM I Riau adalah Daeng Marewah (1722—1728). Selanjutnya beliau digantikan oleh Daeng Celak sebagai YDM II (1728—1745), YDM III Riau adalah Daeng Kamboja (1745—1777). Tentang hal ini dijelaskan panjang lebar oleh Haji Buyong Adil. Katanya pada Agustus 1760 Sultan Sulaiman telah menyuruh Raja Selangor (Raja Lumu), Raja Haji, dan putra Baginda, Raja Abdul Jalil Raja di-Baroh, pergi ke Rembau mengambil Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja dibawa balik ke Riau untuk menjalankan pemerintahan negeri. Namun, setelah ketiga-tiga orang raja itu meninggalkan Riau, Sultan Sulaiman pun jatuh gering. Pada masa itu juga Engku Putih (anak Daeng Celak), istri Raja Abdul Jalil Raja di Baroh yang tinggal di Riau itu, bersalin (melahirkan) seorang putera yang diberi nama Raja Mahmud. Putra beliau yang sulung bernama Raja Ahmad, abang Raja Mahmud, masih kanak-kanak lagi, belum balig.

Kemudian lanjut Buyong Adil rombongan Raja Selangor (Raja Lumu), Raja Haji, dan Raja Abdul Jalil sampai ke Pedas (Rembau). Mereka segera menyampaikan titah Sultan Sulaiman kepada Daeng Kamboja agar balik ke Riau. Rombongan beberapa hari di Pedas. Daeng Kamboja menyetujui Raja Abdul Jalil mengikut Raja Selangor pergi melawat ke Selangor (Kuala Selangor). Akan tetapi, dengan tak disangka-sangka, tiba di Selangor, Raja Abdul Jalil telah jatuh gering, demam, dan beliau diam di istana Raja Lumu itu. Sementara Sultan Sulaiman di Riau yang sedang gering, semakin bertambah gering pula. Akhirnya, pada 1760 itu juga Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah mangkat di Riau pada usia lebih kurang 60 tahun. Kala itu Daeng Kamboja dan Raja Haji masih di Rembau (Pedas) dan putra almarhum, Raja Abdul Jalil Raja di-

Baroh yang telah ditentukan bakal menggantikan almarhum berkerajaan itu, sedang gering pula di Selangor (Kuala Selangor).

Setelah wafatnya Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman Badrul Alamasyah, jelas Buyong Adil maka Bendahara pun mengantarkan utusan pergi memberitahukan hal itu kepada putra almarhum, Raja Abdul Jalil di Selangor, serta kepada Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja dan Raja Haji di Pedas (Rembau). Berita duka cita itu disampaikan juga kepada Raja Selangor (Raja Lumu) di Selangor. Dengan kehendak Allah, kira-kira lima bulan kemudian Raja Abdul Jalil yang sedang berada di Selangor itupun secara tiba-tiba mangkat pula. Raja Abdul Jalil secara otomatis telah menjadi Yang Dipertuan Besar Riau-Lingga-Johor-Pahang. Sayangnya, sebelum menduduki tahtanya di Riau beliau telah mangkat. Maka jenazah beliau disiapkan di Selangor. Selepas itu, jenazah dibawa dengan adat-istiadatnya ke tempat Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja dan Raja Haji di Pedas (di Rembau). Dari Pedas, dengan istiadatnya pula, jenazah itu dibawa oleh Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja dan Raja Haji dalam suatu rombongan besar, 45 buah perahu, balik ke Riau pada Februari 1761. Rombongan disambut dengan adatnya.

Setiba di Riau Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja serta orang besar-besar Bugis di Riau, urai Buyong Adil, telah merajakan Raja Ahmad, putra sulung almarhum, menjadi Yang Dipertuan Besar, Sultan Riau-Lingga-Johor-Pahang dan daerah takluknya, dan digelar Sultan Ahmad Riayat Syah. Pada masa itu, usia baginda lebih kurang sembilan tahun dan adindanya, Raja Mahmud, masih kecil. Selepas itu, barulah jenazah almarhum Sultan Abdul Jalil dimakamkan di pemakaman ayahandanya, Marhum Batangan (Sultan Sulaiman Badrul Alamasyah). Sahdan tidak lama selepas itu ibunda Sultan Ahmad, Engku Putih binti Daeng Celak mangkat pula. Sehingga Raja Mahmud dan kakandanya Sultan Ahmad Riayat Syah menjadi yatim piatu. Akibatnya, keduanya berada dalam pengasuhan keluarga suku Melayu di Kampung Bulang dan dalam tanggungjawab Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja bersama Engku Kelana Raja Haji ibni Daeng Celak. Secara lebih jelas, sebagaimana diterangkan Buyong Adil, Raja Mahmud dipelihara oleh emak saudaranya (bibinya) Engku Hitam (adik Engku Putih), Raja Aminah, dan Raja Halimah (adik Raja Haji). (Adil, 1971:122-125).

Perihal ketegangan dan permusuhan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang di bawah pimpinan Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman Badrul Alamasyah bersama putranya Raja

Abdul Jalil dan Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja, dan Kelana Raja Haji dengan Belanda, serta kemungkinan penyebab wafatnya Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman Badrul Alamyah dan putranya Sultan Abdul Jalil, yang dikenal pula sebagai Raja di Baruh atau Tengku Besar, dijelaskan secara panjang lebar oleh E. Netscher⁶ dalam tulisan laporannya: *De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 tot 1865* (Batavia, Brunining & Wijt 1870), yang diterjemahkan oleh Wan Ghalib dengan judul *Belanda di Johor dan Siak 1602—1865* (Ghalib, 2002:147-189).

Ketika Sultan Sulaiman mangkat, putranya Sultan Abdul Jalil yang sedang berada di Pedas (di Rembau), yang kemudian juga mangkat. E. Netscher (1870) menjelaskan bahwa pada 22 Februari 1761 Daeng Kamboja berlayar dengan armadanya ke Riau. Jenazah Tengku Besar (Sultan Abdul Jalil ibni Sultan Sulaiman) telah dimakamkan di pemakaman raja-raja di Sungai Baruh, di samping makam ayahnya (kini kawasan tersebut dikenal bernama Kampung Bulang, Batu Enam, Tanjungpinang, *Pen.*) Maka, Daeng Kamboja bertindak sebagai wali dari putra almarhum Raja di Baruh, yang telah dinobatkannya menjadi raja Riau-Johor dengan gelar Sultan Ahmad Riayat Syah. Sultan Ahmad pada waktu itu baru berumur delapan atau sembilan tahun, tetapi tak mendapat asuhan yang diperlukan dari ibundanya, Engku Putih, karena ibundanya meninggal beberapa minggu setelah suaminya Tengku Besar Abdul Jalil wafat. Engku Putih, sewaktu suaminya berada di Selangor pada akhir 1760, telah melahirkan putera kedua yang diberi nama Raja Mahmud. Ternyata, Raja Ahmad tak berumur panjang, dan Raja Mahmud, adiknya, masih bayi dan masih digendong ketika dilantik menjadi Yang Dipertuan Besar atau Sultan Riau-Lingga-Johor-Pahang dan daerah takluknya oleh Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja. (Ghalib, 2002:186-187).

Tentang perkara Daeng Kamboja selaku Yang Dipertuan Muda III Riau bersikukuh hendak melantik Raja Mahmud menjadi Yang Dipertuan Besar Sultan Riau-Lingga-Johor-dan

⁶Penulis Belanda ini, senantiasa menulis dari kaca mata, pandangan dari dan bagi pihak Belanda sendiri. Karena itu, dalam beberapa bagian tulisannya, ketika menyebutkan Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah (Sultan Mahmud Syah III), jika tidak mau bekerjasama dengan Belanda, maka dikatakannya sebagai lemah. Bagi kita orang (bangsa) Indonesia, kata lemah menurut E. Netscher adalah mesti bermakna atau bermaksud sebaliknya, yakni kuat (teguh pendirian), untuk tetap tidak akan pernah tunduk dan takluk kepada Belanda. Jikapun terjadi adanya penandatanganan perjanjian kerjasama, itu dapat kita maknakan bahwa Sultan Mahmud Riayat Syah (Sultan Mahmud Syah III) sebagai hendak mengulur-ngulur waktu guna mencari jalan keluar bagi terus melakukan perlawanan demi tegaknya negeri, marwah dan kedaulatan pemerintahan.

Pahang dijelaskan oleh sejumlah penulis, antara lain Raja Ahmad dan anaknya Raja Ali Haji⁷ dan Shaharom Husain, yang menjelaskan setelah Sultan Sbdul Jalil Muadzam Syah ibni Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah wafat, maka dilantiklah anaknya Raja Ahmad menjadi sultan. Namun, dalam tahun 1761 itu juga, Sultan Ahmad mangkat. Akhirnya pihak Melayu dan Bugis sebulat suara bersetuju Raja Mahmud menjadi sultan, maka baginda pun dilantik menaiki tahta kerajaan menggantikan saudaranya Raja Ahmad dengan gelaran Sultan Mahmud Syah III (Husain, 1995:41-42).

Menurut *Tuhfat al-Nafis* (1865) yang dialih-bahasa ke Inggris oleh Virginia Matheson Hooker (1991) dan diterjemahkan oleh Ahmad Fauzi Basri, terjadilah pertemuan antara pihak Bugis dengan Melayu berkenaan dengan pengganti Sultan Ahmad sebagai Yang Dipertuan Besar Riau-Lingga-Johor-dan Pahang dan daerah takluknya. Telah terjadi perdebatan antara pihak bugis (dibawah pimpinan Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja) dan Raja Haji (Engku Kelana) dengan pihak melayu dengan pimpinan, Datuk Bendahara Temenggung. *Tuhfat al-Nafis* menjelaskan, syahdan apabila keesokan hari maka berkumpullah segala raja-raja suku Melayu serta (Datuk Bendahara Temenggung semuanya ke balai serta) berkain lepas, dan berpendawa semuanya, dan Bugis-bugis dengan anak rajanya pun datang pula berkumpul, dengan memakai seluar sampak bertondera batung semuanya, berpendawa juga dengan kelewangnya dan halamangnya. Maka duduklah bersebelahan Bugis-bugis dengan Melayu itu. Maka Yang Dipertuan Muda dan Raja Haji serta anak-anak raja Bugis sekalian duduklah bertentangan dengan raja Melayu itu. Maka yang Dipertuan Muda pun memandang-mandang berkeliling-keliling, maka dilihat olehnya Dahing Cellak dan Dahing Kecik dan Engku Muda adik-beradik, duduk berdekatan dengan Datuk Temenungung semua. Maka bertitahlah Yang Dipertuan Muda kepada anak raja ketiga itu titahnya, “Cellak dan Kecik dan Muda, mari engkau ke mari sebelah aku semua di sini.” Maka Dahing Cellak dan Dahing Kecik pun adik-beradik beralihlah pihak sebelah Yang Dipertuan Muda itu, karena ia putera Raja Maimunah konon.

⁷(kitab ini sudah ditulis oleh ayahanda Raja Ali Haji, yakni Raja Ahmad, tetapi belum siap. Masa hidup Raja Ahmad adalah tahun 1193 H/ 1779-1878 M—yang ketika itu Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah atau Sultan Mahmud Syah III dalam usia 18 tahun. Dan, ketika Sultan Mahmud Syah III wafat pada 12 Januari 1812, Raja Ahmad sudah pun berusia sekitar 10 tahun—dipercayai sudah banyak mendapat secara jelas tentang peran dan perjuangan Sultan Mahmud Syah III dan ayahandanya Raja Haji dalam pentadbiran pemerintahan kerajaan dan berperang dengan Belanda. *Pen.*), dalam *Tuhfat al-Nafis* (1865)

Lebih lanjut dalam *Tuhfat al-Nafis* diterangkan seketika lagi maka Yang Dipertuan Muda (pun) naiklah ke istana lalu didukungnya Raja Mahmud, dibawanya turun (ke balai) lalu diribanya di atas singgahsana. (Syahdan pada satu kaul orang tua-tua adalah menjulangnya itu satu anak baik daripada keturunan Bugis yang empat puluh, yang bernama To Kubu adanya). Setelah anak raja-raja Bugis melihat yang demikian itu, maka ia pun (masing-masing) memegang hulu kerisnya. Maka Yang Dipertuan Muda pun bertitah(lah), “Barang tahu kiranya suku-suku (sebelah) Melayu, dan sebelah Bugis, bahawa sesungguhnya inilah raja Johor, dengan segala takluk daerahnya yang diangkat oleh Bugis (sebagaimana mengangkat nendanya Marhum Batangan, dan ia pun demikian jua). Maka barang siapa (yang) tiada membetuli aturan ini, maka pada hari /inilah/ (dan waktu) inilah (kita) berhabis-habis.” Maka lalu(lah) ia mengunus halamangnya.

Pada akhirnya urai *Tuhfat al-Nafis*.... Maka Datuk Bendahara berkata, “jikalau sudah patut (ke)pada abang semua (sebelah Bugis), Raja Mahmud ini menjadi raja Johor (dengan segala takluk daerahnya) maka saya semua pun sertalah, (karena semuanya pun anak cucu marhum juga, semuanya patut saya sembah).” Maka jawab Yang Dipertuan Muda, “Jikalau sudah begitu (Orang Kaya), al-hamdu li’llah sama-sama betul mufakat (antara kita kedua pihak.” Maka lalu disarungnya halamangnya).Maka lalu diajak (oleh Yang Dipertuan Muda) antara kedua pihak /itu/ bersama-sama menjunjung duli.Maka menjunjung dulilah kedua pihak (Melayu dan Bugis itu). Kemudian baharu(lah) bersetia pula, (seperti setia Marhum yang Mangkat di Sungai Baru. Maka setelah selesai/lah daripada itu maka/ titah Yang Dipertuan Muda, “Bacalah fatihah.” Maka dibacalah fatihah oleh imam akan fatihah dan doa. Maka habislah pekerjaan itu maka kembalilah antara kedua pihak Bugis dan Melayu itu (Metheson Hooker, 1991:320-322).

Tentang peristiwa bersejarah itu dijelaskan berbagai penulis, antara lain Haji Buyong Adil. Menurutnya pada 1761 itu juga Raja Ahmad mangkat di Riau dalam usia masih belia, belum akil-balig. Baginda digelar Marhum Tengah. Setelah mangkat Sultan Ahmad Riayat Syah (Marhum Tengah), ramai orang besar-besar Melayu di Riau berkehendakkan salah seorang dari saudara-saudara almarhum Sultan Abdul Jalil atau Raja di-Baroh yaitu Tengku Abdul Kadir atau seorang lagi Tengku Buang untuk dijadikan sultan. Akan tetapi, Yang Dipertuan Muda Daeng

Kamboja dan orang besar-besar Bugis memilih Raja Mahmud, adik almarhum Sultan Ahmad dijadikan sultan.

Akhirnya dalam suatu perhimpunan ramai di Balai Besar Riau, jelas Buyong Adil lagi, pada saat itu dihadiri oleh orang besar-besar Bugis dan orang besar-besar Melayu, termasuk Bendahara (Tun Hasan), Temenggung (Abdul Jamal), dan anak-anak temenggung itu yang bernama Daing Kecil, Daing Celak, dan Engku Muda Muhammad (bunda mereka Raja Maimunah adalah anak Daing Perani dengan Tengku Tengah) hadir juga di balai itu. Yang Dipertuan Muda Daing Kamboja telah membawa Raja Mahmud ke balai itu. Sambil Raja Mahmud diribanya (didudukkan di pangkuannya, Pen.) di atas singgasana, Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja pun melantik Raja Mahmud jadi Sultan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Setelah itu takada seorang pun di dalam perhimpunan itu yang membantah pelantikan itu dan Raja Mahmud pun jadi Yang Dipertuan Besar Johor-Riau-Lingga-Pahang dan daerah-daerah takluknya dengan gelar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (Sultan Mahmud Syah III) dalam usia satu tahun. Karena masih kanak-kanak itu, maka Baginda diasuh oleh emak saudaranya Engku Hitam (adik Engku Putih). Segala kuasa pemerintahan negeri dipegang oleh Yang Dipertuan Muda Daing Kamboja dengan dibantu oleh penolongnya Raja Haji. Yang Dipertuan Muda membuat istana baru dan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah tinggal bersama Daeng Kamboja. (Adil, 1971:126-127).

2. Pendidikan dan Pematangan Sultan

Raja Mahmud sejak kecil sudah menampakkan tanda-tanda kelak akan menjadi orang besar. Apa-apa asuhan emak saudara (bibi)-nya, juga Daeng Kamboja dan Raja Haji (ayah saudara/pamannya), menjadi penting bagi pertumbuhkembangannya sehingga mencapai kanak-kanak sampai remaja atau akil balig. Tentulah kepadanya sudah diberikan berbagai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama dan pemerintahan, karena beliau putra seorang sultan (raja) dan telah pun ditabalkan menjadi Yang Dipertuan Besar, Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Pendidikan agama Islam sudah didapatinya dengan baik ketika masih kanak-kanak, karena di pusat kerajaan di Hulu Sungai Carang, Bintan, dilangsungkan pula pendidikan-pendidikan agama Islam oleh guru-guru agama atau ulama, baik di istana maupun di masjid atau surau.

Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sebagai kelanjutan dari Kerajaan Melayu-Islam Melaka. Oleh sebab itu, sudah menjadi keniscayaan bahwa kerajaan inipun bercorak Islam, yang pendidikan bagi anak-anak sultan atau raja-raja dan rakyat sekaliannya ditekankan pada pendidikan bersendikan Islam. Pendidikan ketauhidan, syariah, dan muamalah diberikan di dalam istana dan rumah-rumah ibadah berupa langgar, surau, masjid dan rumah wakaf. Sejalan dengan itu, pendidikan tentang pemerintahan dan ketentaraan pun diberikan pula karena untuk kelangsungan kedaulatan negeri dari berbagai musuh, khususnya Belanda. Dengan demikian, tak mengherankan bila setiap sultan atau raja mempunyai semangat juang yang membaja, tak tergoyahkan oleh bujuk rayuan pihak musuh, khususnya Belanda. Pada akhirnya, setiap derap perjuangan dalam mempertahankan kedaulatan negeri, tiada lain tersebut panggilan berjuang di jalan Allah, yang dikenal dengan *fi sabilillah*, yang pada gilirannya sudah menjadi pilihan bila akhirnya gugur sebagai syuhada atau *syahid fi sabilillah*.

Niscayalah pendidikan semacam itulah yang diberi dan ditanamkan oleh Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja dan Kelana Raja Haji kepada Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah sewaktu kanak-kanak sehingga akil balig. Kala itu, Yang Dipertuan Muda dan Kelana Raja Haji telahpun pula mencontohkan langsung kepada Baginda Sultan yang masih belia itu bagaimana memimpin dan mengelola pemerintahan demi kemajuan, kemakmuran, dan kejayaan kerajaan (negeri dan masyarakat). Terlebih lagi, marwah negeri dan pemerintahan mesti ditegakkan meskipun dengan taruhan jiwa dan raga. Berhadapan dengan musuh kerajaan, terutama Belanda, tiada ubahnya berhadapan dengan musuh Allah sehingga tak akan pernah ada kata kompromi, apalagi mau ditaklukkan. Sikap dan kata yang pasti hanya satu, berjuang sebagai perlawanan dengan niat di jalan Allah, *fi sabilillah*. Itulah ajaran dan didikan yang memang telah melembaga di kalangan adat-istiadat Diraja Melayu-Islam.

Kepribadian Sultan Mahmud Ri'ayat Syah tentulah amat berbeda dan jauh lebih maju, matang, mahir (piawai), dan hebat (tangguh) bila dibandingkan dengan sultan-sultan dalam kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sebelumnya. Baginda sejak kecil (kanak-kanak) lagi sudah berkedudukan sebagai Yang Dipertuan Besar Sultan Johor-Riau-Lingga-Pahang. Pendidikannya diberikan langsung oleh Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja, Kelana Raja Haji, dan pembesar-pembesar kerajaan lainnya seperti Datuk Bendahara, Temenggung, dan Indra Bungsu. Di samping itu, tentulah Baginda juga dididik oleh sejumlah cerdik-pandai atau ulama dalam

perkara agama Islam. Kepribadiannya pula mendapat tempaan dari beberapa ibunda saudaranya, yang terutama Engku Hitam, saudara kandung ibunya yang telah mangkat.

Berlangsungnya pendidikan dalam segala bidang di dalam istana sudah menjadi kelaziman di dalam kerajaan-kerajaan Islam Nusantara ketika itu. Karena penguasa-penguasa atau pembesar-pembesar kerajaan menjadi peneraju penting dalam penyebaran dan pengembangan Islam, tak terkecuali pendidikannya, Islam menjadi agama yang sepenuhnya diyakini dan diamalkan oleh segenap rakyat kerajaan. Peran dan pengaruh penguasa menjadi sangat penting dan dominan di dalam syiar Islam tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam *Ensiklopedi Islam (2)* peran penguasa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sangat besar dalam penyebaran agama Islam. Sejak abad ke-17 dapat dikatakan bahwa Islam telah menyebar ke seluruh penjuru Nusantara melalui berbagai saluran seperti perdagangan, perkawinan, birokrasi pemerintahan, pendidikan (pesantren), mistik cabang-cabang seni, dan lain-lain. (Dasuki, 1994:215-216).

Dengan kata lain, pendidikan yang berlangsung bagi anak-anak bangsawan dalam kerajaan Islam terutama berlangsung di istana dan di langgar. Pengajaran di langgar merupakan pengajaran agama permulaan. Anak-anak dididik pada awalnya mempelajari abjad Arab, kemudian mengeja ayat-ayat Al-Quran. Berbagai pengetahuan dasar agama diajarkan pula, terutama tentang ibadah dan akhlak. Langgar bukan pula hanya sebagai tempat pendidikan agama, melainkan sekaligus sebagai lembaga sosial yang memiliki peranan penting di dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak. Rasa kebersamaan dan kesetiaan akhirnya menjadi terpujuk dan tumbuh di antara anak-anak, yang lambat laun menyadari bahwa mereka telah menjadi anggota kebersamaan (kelompok) yang besar, yakni Islam.

Bila demikian halnya, menjadi jelaslah bahwa pendidikan yang didapati Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, niscayalah terutama dari lingkungan istana. Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang adalah satu di antara kerajaan yang besar di Nusantara, sebagai kerajaan yang melekat dengan adat-istadat Melayu. Apabila Islam telah menjadi agama kerajaan dan segenap rakyatnya, maka kerajaan telah mengambil Islam sebagai agama yang mematrikan sendi-sendi Melayu dengan Islam sebagai satu dan kesatuan. Oleh karena itu sudah barang tentu menjadi wujud ajaran Islam di dalam pelaksanaan pemerintahan dan demikianlah pula di dalam pendidikannya. Niscayalah Daeng Kamboja, Raja Haji, dan para ibunya sudah melatih Sultan Mahmud Ri'ayat Syah

untuk melakukan berbagai perkara bagi dirinya secara pribadi, pemerintahan, ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Di dalam keluarga, pelatihan itu penting sehingga ketika anak telah dewasa dia akan berbuat sebagaimana patutnya. Raja Ali Haji dalam *Gurindam Dua Belas* menegaskan, yang menekankan sangat mustahaknya pelatihan bagi anak-anak, *Apabila anak tidak dilatih/Jika besar bapanya letih*. Tak ada keraguan bahwa Mahmud sudah dididik dengan pendidikan umum dan agama Islam dan sudah pula dilatih dengan sebaik-baiknya, terutama oleh Daeng Kamboja dan Raja Haji sehingga pantaslah akhirnya Baginda menjadi sultan terbesar dan sukses di antara jajaran sultan Kerajaan Melayu Bintan, Melaka, hingga Riau-Lingga.

Berkenaan dengan penjelasan di atas dapat dikaitkan dengan pendapat Parsudi Suparlan dan S. Budhisantoso dalam *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannyayang* membedakan orang Melayu dari golongan-golongan penduduk lainnya di nusantara, terutama di masa lampau, adalah pola kehidupannya yang berorientasi kepada kelautan, agama Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan mereka, dan kelonggaran dalam struktur-struktur sosialnya. Karena orientasi kehidupan mereka dan karena kedudukan komunitas-komunitas mereka di pantai yang merupakan daerah terdepan dari berbagai kontak hubungan dengan dunia luar, orang Melayu itu pula yang sebenarnya paling awal mengenal agama Islam. Oleh karena itu, ajaran-ajaran agama Islam dapat meresap dalam tradisi-tradisi yang berlaku dan menyelimuti berbagai upacara-upacara dan tindakan-tindakan simbolik yang pada dasarnya bukan Islam. Kedudukan mereka yang berada di garis terdepan dalam berbagai kontak kebudayaan dengan dunia luar yang berlangsung secara terus-menerus, termasuk kontak-kontak dengan dunia Islam, mempermudah penyebaran agama Islam dalam kehidupan orang Melayu. (Budisantoso, dkk., 1996:1).

Bagi Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, niscayalah sejarah panjang Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sejak Kerajaan Bintan, Temasik, lalu Melaka, kemudian di Bintan, ke Kampar, dan di Johor, menjadi bacaan penting bagi mata hati dan pikirannya. Bagaimana pasang-surut, turun-naik, jatuh-bangun kerajaan Melayu ini akibat terjadinya sengketa, perebutan kekuasaan, dan perang saudara di antara anak-anak atau keturunan raja dan peperangan dengan Portugis dan Belanda, telah memberi pemahaman yang mendalam bagi pikiran, sikap, dan tindakan Mahmud sebagai Yang Dipertuan Besar Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang.

Demikianlah pula perihal acapkali muncul atau terjadinya perselisihan, silang-sengketa, yang menyangkut perkara kekuasaan dan harta-benda antara pihak Melayu dengan pihak Bugis

dan puak-puak lainnya di dalam kerajaan, menjadi tempaan dan pemikiran tersendiri pula oleh Sultan Mahmud. Mentelah lagi, perkara kepicikan Belanda terhadap lawan-lawannya senantiasa mengiming-imingi dengan berbagai janji dan melakukan perjanjian, tetapi senantiasa tiada ditepati oleh Belanda. Beliau akhirnya menjadi paham benar tentang akal bulus, niat busuk, dan siasat licik Belanda. Beliau niscayalah mempunyai pemikiran dan sikap untuk mengambil kebijakan dan tindakan agar perkara-perkara yang tiada patut dan dapat merusak kedaulatan negeri itu dapat diakhiri dan berjalan dengan penuh persaudaraan, kekeluargaan, damai, dan tenteram. Kelak Sultan Mahmud Ri'ayat Syah pun mengukuhkan kembali perjanjian atau Sumpah Setia Melayu-Bugis dan memberi taman-laman hidup dan kehidupan kepada berbagai puak, antara lain orang Cina, di dalam Riau dan daerah takluknya. Menjadi jelaslah pula bahwa beliau telah berjasa besar dan luar biasa kepada bangsa di dalam pembauran dan perbauran kebangsaan.

3. Hubungan Darah dengan Raja Haji Fisabilillah

Sebelum sampai kepada wujudnya hubungan persaudaraan atau hubungan darah antara Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dan Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Haji, diperikan terlebih dahulu hubungan dan persebatian suku Melayu dengan suku Bugis di alam Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Bermula ketika pusat kerajaan berada di Hulu Riau, Sungai Carang, Bintan. Kala itu yang menjadi sultan adalah Raja Kecil (I), yang mengambil-paksa tahta kerajaan dari Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV (yang sebelumnya adalah bendahara). Anak sultan, yakni Tengku Sulaiman, pada akhirnya hendak merebut kembali tampuk pimpinan kerajaan dari tangan Raja Kecil. Dalam rangka mengambil-alih lagi pimpinan kerajaan itu, Tengku Sulaiman minta bantuan *bersekutu* dengan bangsawan-bangsawan Bugis.⁸

⁸ Tentang hal ini dijelaskan banyak sumber, antara lain Abdul Kadir Ibrahim, dkk., dalam *Aisyah Sulaiman Riau Pengarang & Pejuang Perempuan*. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, yang dalam tahun 1719 memindahkan pusat pemerintahan dari Johor ke Riau lagi. Pada bagian lain, keturunan Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV, yakni Tengku Sulaiman berupaya untuk merebut kembali tahta dan kekuasaan dari tangan Raja Kecil. Sampai kemudian, dia minta bantuan kepada lima bangsawan Bugis asal Luwu, yakni Daing Perani, Daing Marewah, Daing Celak, Daing Menambun, dan Daing Kemasi. Akhirnya terjadilah perperangan antara Tengku Sulaiman yang dibantu bangsawan Bugis dengan Raja Kecil. Bangsawan Bugis tersebut sampai bersedia membantu Tengku Sulaiman berperang melawan Raja Kecil, dengan alasan hendak membebaskan Kerajaan Johor dan mengembalikannya kepada sultan yang lebih berhak, yakni Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV.

Itulah awal-mula terjadinya hubungan baik, bukan hanya sebagai sesama manusia, melainkan juga secara resmi dalam tali ikatan menerajui pemerintahan kerajaan antara orang Melayu dan orang Bugis. Sejak saat itu pulalah—sebagaimana dijelaskan di atas—dalam kerajaan Melayu ada atau dikenal pimpinan bernama Yang Dipertuan Muda sebagai *pendamping* atau orang kedua di samping Yang Dipertuan Besar, Sultan. Hubungan antara kedua suku itu, terikat penuh persaudaraan, yang ikatan utamanya adalah Islam dan demi kebaikan kerajaan, negeri, dan segenap rakyat. Menurut Hamidy penduduk Riau ini telah memperlihatkan pula bagaimana masyarakat Melayu di rantau ini mempunyai sikap dan tingkah laku terhadap suku bangsa dan etnik lainnya dalam kehidupan sosial dan kebudayaan. Bagaimana pihak Kerajaan Riau-Johor-Lingga-Pahang menerima kehadiran bangsawan Bugis di Kerajaan Melayu itu cukup menarik. Setelah melalui pergaulan sosial begitu rupa, mereka tak hanya sekadar memperoleh kelapangan kehidupan dalam arti yang praktis saja, tetapi juga hal-hal lain, sebagaimana layaknya mereka di negeri asalnya. Itulah sebabnya, pihak bangsawan Bugis itu telah diberi kedudukan sebagai Yang Dipertuan Muda Riau. Setelah terjadi perbauran melalui nikah-kawin antara pihak Bugis dan kaum kerabat Kerajaan Melayu, keturunan mereka telah tampil dengan citra Melayu (Hamidy, 1990:20-21).

Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa apa-apa yang diikhtiarkan dan dirancang oleh Kompeni Belanda untuk mempertentangkan dan melaga suku Melayu dengan suku Bugis, antara lain menjadi salah satu isi perjanjian, sama sekali tiada berujud dan gagal dijalankan. Pihak Melayu dalam hal ini Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, takkan melakukannya. Dengan kata lain, sangat tak masuk akal bila Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah bermusuhan dengan Raja Haji dan selepas itu dengan Raja Ali. Bagaimana mungkin? Palsunya karena Raja Haji adalah ayah saudara (paman) Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Lengkapnya dapat dijelaskan bahwa Raja Mahmud—yang bergelar Mahmud Ri'ayat Syah—adalah anak Sultan Abdul Jalil ibni Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah dan ibundanya Engku Putih binti Daeng Celak (Yang Dipertuan MudaII Riau). Adapun anak Daeng Celak yang laki-laki antara lain, Raja Lumu dan Raja Haji, sedangkan anaknya yang perempuan adalah Engku Putih dan Engku Hitam. Dengan

Atas bantuan lima bangsawan Bugis, akhirnya dalam tahun 1722, Tengku Sulaiman pun berhasil merebut kekuasaan dari Raja Kecil, yang kemudian pada tanggal 4 Oktober 1722 dilantik menjadi Sultan Riau dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Bersamaan dengan itu, Daeng Marewah pun diberi kehormatan memangku jabatan sebagai Yang Dipertuan Muda Riau, sehingga Riau “dipimpin” oleh Yang Dipertuan Besar, Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah dan Yang Dipertuan Muda Daeng Marewah (Ibrahim, dkk., 2004:6-7).

demikian menjadi jelaslah bahwa ibunda Sultan Mahmud Riayat Syah yakni Engku Puteh, dan Raja Haji adalah adik-beradik. Jelasnya Raja Haji dan Engku Puteh adalah anak Daeng Celak dengan isterinya Tengku Mandak binti Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Dengan demikian, kedua orang datuk (kakek) Sultan Mahmud Riayat Syah adalah orang besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, yakni dari sebelah ayahnya adalah Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah dan dari sebelah ibunya pula adalah Yang Dipertuan Muda II Riau Daeng Celak.

Dengan demikian, nyatalah Raja Haji dan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah berhubungan darah, bersaudara, yakni Raja Haji adalah ayah saudara (paman) Sultan Mahmud Ri'ayat Syah atau Sultan Mahmud Ri'ayat Syah adalah anak saudara (keponakan) Raja Haji. Oleh sebab itu, tak heranlah kita bahwa Raja Haji sangat sayang kepada anak lelaki dari saudara perempuannya Engku Puteh itu. Sudah barang tentu pula Raja Haji sebagai ayah saudara akan memberikan perhatian, kasih-sayang, didikan, bimbingan, dan perlindungan penuh dan sebaik-baiknya kepada Sultan Mahmud Ri'ayat Syah yang yatim-piatu. Siapakah yang tak akan senang dan bangga jika keponakannya menjadi orang besar dan berhasil menjayakan kerajaan, yang dalam hal ini sebagai Yang Dipertuan Besar Sultan Kerajaan Melayu RayaRiau-Lingga-Johor-Pahang serta daerah-daerah takluknya?

Perkara penting terkait Raja Haji dan hubungannya dengan Raja Mahmud (Sultan Mahmud Ri'ayat Syah) adalah *perbauran* atau *percampuran darah* antara Melayu dan Bugis. Diperkenalkan di kalangan Melayu dan Bugis bahwa pada diri Raja Haji sudah tak dapat dikatakan sebagai sebenar-benarnya Bugis, tetapi juga sudah juga menjadi orang Melayu. Pasal, ayahandanya Daeng Celak menikah dengan Tengku Mandak, saudara perempuan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Sesuai dengan adat Melayu, anak dari pernikahan bangsawan Bugis dan bangsawan Melayu tak lagi menggunakan gelar daeng. Oleh sebab itu, Haji tak menggunakan gelar daeng, tetapi gelar raja sehingga yang melekat pada namanya secara lengkap Raja Haji sebagaimana lazimnya orang besar-besar bangsawan, keturunan sultan-sultan Melayu. Menurut Hasan Junustiga orang raja muda atau Yang Dipertuan Muda Riau sebelumnya yaitu Daeng Marewah, Daeng Celak, dan Daeng Kamboja masih belum bercampur darah dengan pihak Diraja Riau. Barulah pada Raja Haji persemendaan (perkawinan silang) antara Melayu dan Bugis menjadi bersebuti karena beliaulah Raja Muda pertama Riau yang berdarah

campuran. Oleh sebab itulah gelar kebangsawannya bukan lagi daeng, melainkan raja. Dalam hal ini, Sultan atau Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang (Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, *Pen.*) ialah kemanakannya dari pihak bapa. Beliau (Raja Haji) merupakan Yang Dipertuan Muda Riau yang paling luas diterima oleh rakyat dibandingkan dengan ketiga Yang Dipertuan Muda sebelumnya karena asal keturunannya yang terdiri atas pertautan dua keturunan Melayu dan Bugis. (Junus, 2000:9 dan 29).

Sultan Mahmud Ri'ayat Syah juga mempunyai pertalian darah atau persaudaraan dengan Daeng Kamboja Yang Dipertuan Muda III Riau. Hubungan itu adalah ayah Daeng Kamboja yakni Daeng Perani adalah saudara kandung Daeng Celak Yang Dipertuan Muda II Riau (ayah Raja Haji). Raja Haji pula adalah saudara kandung Engku Puteh, ibunda Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Dengan demikian, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah terhitung atau termasuk anak saudara (keponakan) juga dari Daeng Kamboja atau sebenarnya Daeng Kamboja adalah juga paman Sultan Mahmud. Dengan demikian, amatlah masuk akal bila Daeng Kamboja Yang Dipertuan Muda III Riau dan Kelana Raja Haji menempatkan Sultan Mahmud pada kedudukannya sebagai Yang Dipertuan Besar Sultan Riau-Lingga-Johor-Pahang pada kedudukan sebagaimana patutnya menurut hokum kerajaan dan adat-istiadatnya.⁹

4. Bibit Perperangan dengan Belanda

Sumber-sumber sejarah menjelaskan bahwa Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Lingga-Pahang dibawah pimpinan tertinggi kerajaan, Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, sempat terjadi selisih paham dengan Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja yang

⁹ Tentang pertalian atau hubungan darah atau persaudaraan secara zuriat atau keturunan yang dekat dan rapat antara Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah (Sultan Mahmud Syah III) dengan Daeng Celak (Yang Dipertuan Muda Riau II), Daeng Kamboja (Yang Dipertuan Muda Riau III), Raja Haji (Yang Dipertuan Muda Riau IV), Raja Ali (Yang Dipertuan Muda Riau V) dan Raja Jaafar (Yang Dipertuan Muda Riau VI) dapat dilihat dalam sumber terdekat adalah sumber Nusantara, yakni *Tuhfat al-Nafis* (terbit tahun 1865)—yang disusun awal oleh Raja Ahmad dan diselesaikan oleh anaknya, Raja Ali Haji—dan sumber luar negeri, pihak Belanda, yakni *Belanda di Johor dan Siak 1602-1865* (terbit tahun 1870) oleh E. Netscher yang diterjemahkan (2002) oleh Wan Ghalib. Sumber-sumber atau buku-buku tentang hal ini, sudah ditulis oleh banyak orang (penulis) baik di Indonesia, Malaysia, Singapura maupun dari beberapa negara di dunia.

dibantu oleh Kelana Raja Haji.¹⁰ Perselisihan paham itu tak terlepas dari masuknya Belanda yang mengadu-domba. Sultan Sulaiman diharapkan oleh Kompeni Belanda dapat melepaskan kerajaan dari kekuasaan “pembantunya” Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja. Bahkan Belanda telah mengusahakan agar terjadi peperangan antara Sultan Sulaiman dengan Daeng Kamboja yang berada di Linggi. Namun, sejarah mencatat pula bahwa Belanda gagal memecah-belah Yang Dipertuan Besar dengan Yang Dipertuan Muda.

Sementara Shaharom Husain menjelaskan Daeng Kamboja menggantikan Yang Dipertuan Muda II Riau Daing Celak, yang mangkat pada tanggal 19 Mei 1745. Kalau menurut peraturannya maka putranya yang bernama Raja Haji patut dilantik menggantikan jawatan Yang Dipertuan Muda itu. Akan tetapi oleh karena baginda belum cukup usianya, maka dengan persetujuan pihak Bugis, Sultan Sulaiman telah melantik Daeng Kamboja (putra Daeng Perani yang mangkat di Kedah) menjadi Yang Dipertuan Muda bergelar Yam Tuan Muda III Riau. Sebelum Daeng Kamboja memegang jawatan Yam Tuan Muda itu, dia telah ke Selangor karena bermusyawarat lebih dahulu dengan saudara-maranya di sana. Pada 11 Maret 1748 baharulah dia memegang jawatan Yam Tuan itu (Husain, 1995:37).

Menurut keterangan E. Netscher dalam *De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 tot 1865* (1870) (Ghalib, 2002) Belanda dapat memukul kalah Kerajaan Siak. Kedaan pada awal 1756 sangat tidak tenteram. Raja Alam setelah terpuak di Siak pergi ke Linggi, 20 mil sebelah utara Malaka, menemui iparnya Daeng Kamboja karena beliau mengetahui bahwa dengan bantuannya beliau akan dapat membuat perhitungan dengan Sultan Johor. Daeng Kamboja melengkapinya dengan dua buah kapal, dengan itu beliau menyerang ke Batu Bara, tempat beliau menyerang kapal *Woitkendsorp* sehingga pemerintah (Belanda, *Pen.*) Malaka dan Pemerintah Tinggi merasa sangat perlu untuk mengadakan pembalasan. Daeng Kamboja sejak 1753 tak berada di Riau atau bersama Sultan (Sulaiman Badrul Alamsyah, *Pen.*) dan biarpun beliau tak bersikap bermusuhan secara terbuka, tetapi tanda-tanda menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi. Sultan Sulaiman, sebelum keberangkatannya dari Malaka ke Riau pada Januari 1756, telah mengirim surat kepada Daeng Kamboja, Raja Alam, Raja Tuwah dari Kelang, dan

¹⁰Hasan Junus menerangkan tentang perkara kelahiran Raja Haji. Raja Haji lahir di pusat Kerajaan Riau yang ketika itu bertempat di Kota Lama, Pulau Bintan, dalam tahun 1725 sebagai putra dari Daing Celak dengan isterinya bernama Tengku Mandak, saudara perempuan Sultan Sulaiman (2000:9).

Sultan Salehuddin, Raja Selangor, meminta supaya mereka takluk kepadanya dan menanyakan apakah mereka bersedia mengakuinya sebagai raja mereka.

Lebih lanjut dijelaskan oleh E. Netscher, akibat ketegangan hubungan Sultan Sulaiman dengan Daeng Kamboja tersebut, perdagangan di Selat Malaka terhenti sama sekali. Pemerintah di Malaka berdaya upaya sekeras-kerasnya mencari jalan untuk menghidupkan perdagangan itu kembali. Sultan Sulaiman, sewaktu akan meninggalkan Malaka pada 30 Januari 1756, berjanji bahwa dalam jangka waktu satu bulan, Raja Trengganu, sebagai kuasanya, akan datang dengan satu armada ke Malaka dan Raja Muhammad yang berada di Malaka dari 2 sampai 4 Februari 1756 dijanjikan akan mendatangkan kekuatannya. Walaupun telah dikirim juru Dirksz ke Riau untuk mempercepat gerakan tersebut, baru pada 11 Juni 1756 Raja Trengganu muncul di Malaka. Segera pula dikirim surat kepada Raja Muhammad untuk segera datang dengan angkatan perangnya, tetapi dia sama sekali tak mengindahkannya.

Sementara itu, jelas E. Netscher, musuh-musuh (pihak Daeng Kamboja dan sekutunya, *Pen.*) terus memperkuat diri dan mencari dalih untuk memusuhi Kompeni secara terbuka. Dengan maksud itu Daeng Kamboja menulis surat kepada Gubernur Malaka yang menyatakan ketidakpuasannya dengan adanya penjelajahan di pantai Linggi, tempat dia sedang menyusun kekuatannya. Akan tetapi, Gubernur menjawab pada 11 April 1756 bahwa penjelajahan itu hanya ditujukan kepada kapal-kapal yang tak mempunyai pas dari Kompeni dan fitnah itu adalah kesalahannya sendiri. Kalau dia tunduk sepenuhnya kepada Sultan Johor sebagaimana seharusnya, tak akan ada orang akan berbuat jahat terhadapnya. Dalam surat itu Daeng Kamboja tak lagi diakui sebagai Raja Muda Johor, hanya disebut sebagai Orang Kaya.

Pada akhirnya, menurut E. Netscher (Ghalib. 2002) segera saja gabungan Bugis tersebut menyatakan permusuhannya dengan perbuatan/aksi di Malaka. Mereka berulang-ulang menimbulkan kebakaran, pembunuhan, dan penculikan di dalam kota. Pada tengah malam 29 malam 30 April 1756 mereka membakar 30 buah rumah di tengah-tengah kota. Pada pihak lain, ada kekuatan dari Raja Trengganu yang meninggalkan rajanya, lalu bergabung dengan Raja Haji di Riau untuk bersama Daeng Kamboja dalam melawan kompeni.

Menurut Netscher lagi, Daeng Kamboja nampaknya bertekad hendak memerangi Kompeni. Maka itu, pihak Kompeni dengan sekutunya pun mengambil keputusan di Malaka untuk menyerang pertahanan Daeng Kamboja di Linggi. Dengan ekspidisi ini ikut serta kapal-

kapal Kompeni *Kievietscheuvel*, *de Brouwer*, *Admiral Tromp*, *de Kaakoper*, *Weltevreden*, *de Herderin*, dan *de Vriendschap*, yang diperkuat dengan 100 tentara dan garnizun Malaka dan ikut pula dua puluh empat kapal raja Trengganu. Kekuatan ini dibawah komando Kapten Laut Cornelis Eijke pada 23 Juli 1756 menyerang Linggi, dapat memukul mereka (Daeng Kamboja dan Raja Haji, *Pen.*) yang terpaksa meninggalkan meriam serta kapal mereka. Dalam pertempuran itu, Raja Haji, kemenakan Daeng Kamboja, luka parah kena tembakan pada pinggulnya. Di pihak kita (Kompeni) gugur tiga orang dan luka-luka belasan orang.

Ternyata, jelas Netscher, musuh larinya tak jauh karena segera mereka muncul kembali dalam jumlah besar, sekali ini sampai ke tembok kota Malaka, sehingga pada awal Oktober pemerintah di Malaka menulis surat kepada Pemerintah Tinggi di Batavia, menyatakan bahwa Malaka praktis sudah terkepung dan semua yang ada di sekeliling kota telah dimusnahkan dan dibakar oleh Daeng Kamboja, dan kepadanya telah ikut bergabung orang Minangkabau dan Rembau, sedang kekuatan militer Malaka yang berjumlah hanya 236 orang tak memungkinkan untuk bertempur. Oleh sebab itu, bantuan dari Batavia sudah sangat dibutuhkan.

Seiring dengan itu, lanjut Netscher, Raja Alam di Batu Bara mengumpulkan suatu armada yang terdiri atas 70 atau 80 kapalmenduduki muara Sungai Siak dan mengancam pos Guntung. Di pihak Belanda, Raja Muhammad berkirim surat kepada Raja dan Sultan Johor untuk segera mengirimkan bantuan ke Malaka, tetapi tak mendapat tanggapan. Keadaan Malaka sudah menjadi semakin parah. Kota di bahagian daratan seluruhnya telah dikepung. Satu ekspedisi di bawah pimpinan Letnan D. Poppal pergi ke Kelibang, kira-kira dua mil sebelah utara Malaka pada 20 September 1756, datang kembali dalam keadaan luka-luka. Perundingan pada Februari 1757 tak menghasilkan apa-apa karena Daeng Kamboja dan Raja Alam menginginkan supaya Kompeni melepaskan diri dari Sultan Sulaiman serta membiarkan Sultan Sulaiman mengurus nasibnya sendiri.

Daeng Kamboja berada di Linggi. Sementara itu, Kelana Raja Haji berada di Riau bersama Sultan Sulaiman. Pada akhirnya, Raja Haji dan Sultan Sulaiman bersepakat untuk memanggil kembali Daeng Kamboja ke Riau dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Yang Dipertuan Muda III Riau. Dalam kaitan ini, E. Netscher menjelaskan bahwa pada bulan Desember 1759 Daeng Kamboja sudah mendapat keampunan dari Sultan Sulaiman, tetapi masih tetap berdiam di Linggi. Bersamaan dengan pengampunannya kepada

Daeng Kamboja dan memulihkan kembali kekuasaan dan kehormatannya, Sultan Sulaiman telah pula meletakkan jabatannya dari pemerintahan dan menyerahkannya kepada puteranya Tengku Besar Abdul Jalil (Raja di Baruh) bersama Orang Kaya Temenggung Paduka Raja sebagai pemegang kendali pemerintahan. Biarpun Tengku Besar sebenarnya telah menjadi raja di Johor, pada pertengahan 1760 beliau dikirim oleh ayahnya ke Linggi untuk meminta Daeng Kamboja kembali ke Riau. Pada akhirnya Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah wafat di Riau pada 29 Agustus 1760. Pada Januari 1761 Sultan Abdul Jalil mangkat pula di Selangor. Jenazahnya dibawa oleh Daeng Kamboja kembali ke Riau dan anaknya Raja Ahmad dilantik menjadi Sultan. Namun Sultan Ahmad tak berumur panjang, mangkat pula. Selanjutnya Daeng Kamboja melantik Raja Mahmud menjadi Yang Dipertuan Besar, Sultan Johor-Riau-Lingga-dan Pahang. (Ghalib, 2002:147-183).

Syahdan, setelah dilantiknya Sultan Mahmud Ri'ayat Syah sebagai Yang Dipertuan Besar Sultan Riau-Lingga-Johor-Pahang ternyata membawa kebaikan yang jauh berarti, bermakna dan bermasa depan yang gemilang bagi negeri itu. Persaudaraan, kesatuan, dan persatuan di antara petinggi (pembesar) kerajaan dan rakyat negeri terwujud sehingga roda pemerintahan dan pembangunan dapat dijalankan secara baik. Perdagangan telah membawa kerajaan ini memasuki gerbang kemakmuran dan kejayaan, tetapi menjadi pihak yang mulai lagi ditujukan oleh Belanda untuk dimusuhi. Dalam pada itu, Sultan Mahmud telah tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berkepribadian yang teruji bagi kemajuan dan kejayaan negeri. Kepadanya sudah pula diwariskan sikap dan tindakan yang patut untuk diambil terhadap musuh-musuh kerajaan, yakni Kompeni-Belanda, dan kewajiban membela agama Islam.

Daeng Kamboja, Raja Haji, dan petinggi kerajaan lainnya tentulah secara bersatu-padu mendukung dan menyokong Sultan Mahmud dalam menjalankan roda pemerintahan tertinggi Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, yang dalam bahasa dewasa ini dikatakan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Maka sejarah pun telah mencatat bahwa sejak saat itu boleh dikatakan tiada lagi silang sengketa yang berarti, yang dapat merusak dan mengancam kedaulatan kerajaan. Sultan Mahmud Ri'ayat Syah telah menjadi pemersatu segenap kekuatan pimpinan kerajaan. Akhirnyasemuanya seiring-sejalan, seia-sekata dan searah-setujuan dengan titah Yang Dipertuan Besar dalam memperjuangkan kemajuan dan kemakmuran negeri.

Nyatalah pula pengajaran yang didapat oleh Sultan Mahmud dari Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja dan Kelana Raja Haji tentang sikap sebagai petinggi kerajaan dan menjaga marwah negeri. Begitu pula hal-ikhwal perselisihan, permusuhan, dan berperangan dengan Belanda diserap sebagaimana patutnya oleh Sultan Mahmud. Juga tentang kejadian adanya sedikit ketegangan yang terjadi dalam sekejap di antara Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman dan Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja—tak terlepas dari hasutan dan kepentingan Belanda di Malaka—menjadi pelajaran berarti dan mendalam bagi Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud yang masih tumbuh dan berkembang menuju dewasa itu. Pada akhirnya, sultan itupun menjadi paham, mempunyai pendirian dan kepribadian yang kukuh di dalam menerajui Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang.

5. Memilih Raja Haji Menjadi Yang Dipertuan Muda

Daeng Kamboja, Yang Dipertuan Muda III Riau yang dibantu oleh Kelana Raja Haji telah menempatkan dan mendudukkan pemerintahan kerajaan tertinggi dengan segala titah dan perintahnya berada di atas kekuasaan Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Meskipun Sultan Mahmud masih kanak-kanak, keberadaannya niscayalah dijunjung tinggi oleh pembesar-pembesar kerajaan ini. Oleh karena itu, apa-apa yang hendak diberlakukan atas nama kerajaan, niscayalah senantiasa dibincangkan, dirundingkan, dan atas persetujuan Sang Sultan. Pasal, dengan cara itulah adat dan adab kebesaran kerajaan dapat dijunjung, ditegakkan, diwujudkan, diadatkan, dan dilembagakan di dalam kerajaan.

Suatu kenyataan bahwa setelah Sultan Mahmud menjadi Yang Dipertuan Besar Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang, persaudaraan, persatuan, dan kedamaian dalam kerajaan menjadi wujud. Pembesar-pembesar kerajaan yang berada di bawah Yang Dipertuan Besar atau Sultan, mulai dari Yang Dipertuan Muda, Bendahara, Temenggung, Raja Tua, Indera Bungsu, sampai Datuk-datuk dapat bekerja sama, bermufakat, dan seiring-sejalan di dalam membangun dan memajukan kerajaan. Tiap-tiap pembesar bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya atas jabatan yang diembannya, yang pada intinya bertanggung jawab kepada Sultan dan mencapai rida Allah. Karena itulah, suasana damai, aman, dan tenteram di dalam kerajaan menjadi kenyataan. Seiring dengan itu, gerak roda pembangunan untuk mencapai kemajuan dan kejayaan

pun dapat berjalan dengan baik dan benar-benar dirasakan segenap penduduk kerajaan. Kemakmuran bukan lagi menjadi sekedar cita-cita, melainkan wujud menjadi kenyataan pula.

Dalam pada itu, Raja Haji selaku Kelana ditugasi oleh Kerajaan untuk membantu kerajaan Melayu lainnya, baik yang di dalam taklukan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang maupun kerajaan di luar itu yang sedang ada masalah, sama ada di dalam kerajaan sendiri ataupun pertikaian dengan pihak Belanda. Raja Haji dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, yang membuat namanya menjadi dikenal secara luas, bahkan semakin diperhitungkan oleh Belanda di Malaka dan Batavia.

Antara lain, manakala Kelana Raja Haji berada di Pontianak, jelas *Tuhfat al-Nafis* (1865), beliau telah membantu Pangeran Syarif Abd al-Rahman untuk menyelesaikan pertikaian dalam kerajaan. Oleh Raja Haji, Pangeran Syarif Abd al-Rahman menjadi raja di Negeri Pontianak (ini), dengan segala takluk daerahnya. Adalah bergelar (Seri Paduka) Sultan Syarif Abd al-Rahman Nur Alam Karar. Adalah kira-kira enam belas bulan Raja Haji itu di dalam (negeri) Pontianak dengan bersuka-sukaan dengan (paduka adinda baginda) Sultan Syarif Abd al-Rahman laki-isteri dengan permainan(nya)—syahdan tiba-tiba/maka/ datanglah suruhan dari Riau menyilakan Raja Haji balik ke Riau karena Yang Dipertuan Muda (Daeng Kamboja) gering sangat. Syahdan setelah Raja Haji mendengar khabar suruhan (dari Riau) itu maka ia pun minta dirilah kepada Sultan Syarif Abd al-Rahman laki-isteri hendak/bermohon/ balik ke Riau. Setelah Sultan Abd al-Rahman (mendengarkan paduka kakanda baginda itu hendak balik ke Riau, maka berkemaslah Sultan Syarif Abd al-Rahman) laki-isteri menyiapkan (akan) perbekalan paduka kakanda (baginda) itu. Syahdan di dalam itu (maka) datang pula sekali lagi suruhan dari Riau (membawa surat kepada Raja Haji) mengatakan (hal seri) paduka kakanda baginda (itu) Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja telah (sudah) kembali ke rahmat Allah Taala, kalu inna li'Llahi wainna ilaiHi rajiun—maka Raja Haji menangis amat sangat.

Selanjutnya dijelaskan dalam *Tuhfat al-Nafis* lagi, maka Raja Haji belayar (ke Barat) sebelah Riau. Maka apabila hampir dengan hutan (sebelah) Riau maka lalu ia menuju negeri Pahang. Maka tiada beberapa hari maka sampailah ke Kuala Pahang. Syahdan maka bendahara Tun Abd al-Majid pun keluarlah mengalu-alukan (yakni menyambut) Raja Haji itu datang. Syahdan apabila tetaplah Raja Haji itu di dalam negeri Pahang, maka Datuk Bendahara pun

(memulailah pekerjaan pada) melantik Raja Haji itu. (Maka) apabila sampailah waktunya maka dilantiknyalah (Raja Haji itu) betapa adat istiadat melantik Yang Dipertuan Muda. Maka menjadilah Raja Haji itu Yang Dipertuan Muda di dalam negeri Riau dan Johor dengan segala takluk daerahnya, /dengan/sebab menerima pusaka (daripada) paduka ayahandanya (dan paduka kakandanya intiha al-kalam).

Sementara itu, masih mengikuti uraian *Tuhfat al-Nafis*, Baginda Sultan Mahmud di dalam Riau. Apabila (paduka ayahanda baginda Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja iaitu Marhum Janggut) (mangkat), (serta selesailah daripada dimakamkan paduka ayahanda baginda itu betapa adat raja yang besar-besar mangkat), maka duduklah baginda (Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, *Pen.*) dengan kemasygulan (karena Datuk Bendahara pada masa itu tiada di dalam Riau sudah pergi di Pahang. Adalah—maka baginda pun duduklah menanti-nanti akan suruhan yang pergi ke Mempawah itu, belum juga lagi datang. Syahdan di dalam (tengah-tengah) hal yang demikian itu, maka suruhan dari Pahang pun datanglah membawa surat (dari Datuk Bendahara mengatakan hal Raja Haji ada di dalam Pahang sudah dilantik) di Pahang oleh Datuk Bendahara (Tun Abd al-Majid). Setelah baginda mendengarkan paduka ayahanda baginda itu sudah ada di Pahang, maka baginda itu (pun terlalu sukanya—hendak pergi ke Pahang mendapatkan Yang Dipertuan Muda/ Raja Haji/. Maka baginda pun berangkatlah (berlayar) ke Pahang—maka ketika Sultan Mahmud ada di Kuala Pahang, maka Datuk Bendahara dan Raja Haji pun ilir, ke Kuala Pahang mengalu-alukan (paduka ananda) baginda (datang) itu. Maka (apabila berjumpa Yang Dipertuan Muda dan Datuk Bendahara akan paduka anakanda Sultan Mahmud, maka dibawanya mudik serta tiba naiklah ke istananya. Maka) duduklah baginda (Sultan Mahmud) itu serta paduka ayahanda (baginda Yang Dipertuan Muda serta paduka) Datuk Bendahara (di dalam) Pahang (bersuka-sukaan makan minum) betapa adat raja (yang) besar-besar (maka) berhimpun(lah/sekaliannya/ demikianlah halnya).

Selanjutnya urai *Tuhfat al-Nafis*, tiada berapa lamanya baginda Sultan Mahmud serta paduka ayahanda Yang Dipertuan Muda Raja Haji/ di dalam Pahang/ maka berangkatlah /keduanya itu/ balik ke Riau. Maka apabila sampai ke Riau, maka Yang Dipertuan Muda pun berbuatlah istana di (Pulau) Biram Dewa, serta dengan kotanya yang indah-indah (iaitu kota batu), yang bertatah dengan pinggan (dan) piring sangatlah indah(-indah)—(dan satu pula balai dindingnya cermin adalah tiang balai itu berbalut dengan kaki pahar /kaki tiang itu iaitu/ tembaga

dan kota itu sebelah atasnya berkisi-kisikan bocong. Adapun kota itu apabila kena /sinar/ matahari mancar-mancar/lah/ cahayanya. Kemudian diperbuat/nya/ satu istana pula di Sungai Galang Besar sangat juga indah-indah perbuatannya, iaitu istana paduka anakanda baginda Sultan Mahmud. Dan perhiasan istana Yang Dipertuan Besar dan Yang Dipertuan Muda itu daripada emas dan perak hingga rantai-rantai setelobnya dengan rantai perak jua dan seperti talam dan ceper kebanyakan diperbuat di negeri Cina dan seperti tepak dan baling air mawar daripada emas dan perak diperbuat di negeri Benila yang berkarang bertatahkan intan dan yang berserodi. Dan adapun pinggan mangkuk dan cawan kahwa dan /cawan/ kebanyakan diperbuat di negeri Cina serta tersurat dengan air emas pada pantat cawan itu tersebut) /nama/ Pulau Biram Dewa atau Malim Dewa. (Hooker Matheson, 1991:380-388).

PEJUANG SEJATI BAGI NEGERI GEMILANG DAN JAYA

1. Berperang dengan Belanda di Riau dan Teluk Ketapang

Masih menurut keterangan Raja Ahmad dan Raja Ali Haji dalam *Tuhfat al-Nafis*, alkisah maka tersebut(lah) perkataan negeri Riau iaitu masa kerajaan Sultan Mahmud dan Yang Dipertuan Muda Raja Haji. Syahdan—adalah kira-kira delapan tahun Yang Dipertuan Muda memerintah sebagai membantu Yang Dipertuan Besar, maka mulailah terjadi silang-sengketa dengan Belanda di Malaka dan Batavia. Sehingga mulailah dipersiapkan pertahanan (kubu) di berbagai kawasan, antara lain Tanjungpinang, Pulau Penyengat, Teluk Keriting. Maka pada akhirnya pecahlah perang besar antara pasukan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-dan Pahang dengan Belanda. Sebagai pimpinan perang di lapangan (medan perang), adalah Raja Haji. Perperangan terjadi di Riau dan kemudian berlanjut ke Teluk Ketapang-Malaka. Dalam hal ini, secara panjang lebar dijelaskan dalam *Tuhfat al-Nfis*.¹¹

Ketika terjadi permusuhan antara Kerajaan Riau dan Belanda tersebut, yang dimulai pada 1782, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah sudah berusia sekitar 22 tahun. Tentu, sebagai Yang Dipertuan Besar sebuah kerajaan besar dan seorang anak muda, dengan semangat dan jiwa mudanya yang membara Sultan sepenuhnya bertekad dan berupaya untuk mempertahankan kedaulatan dan marwah kerajaan (negeri dan rakyatnya). Sultan Mahmud, sebagai Yang Dipertuan Besar sekaligus sebagai anak saudara Raja Haji, niscayalah tak akan tinggal diam membiarkan ayah saudaranya itu berjuang dan berperang bersama pasukan kerajaan melawan Belanda. Dia tampil bersama Raja Haji dalam merancang, menyusun strategi, taktik, dan siasat perperangan. Meskipun demikian Raja Haji senantiasa berupaya melindunginya. Oleh karena itu, Sultan Mahmud diposisikannya sebagai yang memberi titah dan perintah kepada Yang Dipertuan Muda untuk memimpin pertempuran di medan perang. Bagi Raja Haji, keberadaan Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud, adalah sebagai kepala pemerintahan tertinggi, simbol hidup-

¹¹ Sementara E. Netscher menjelaskan pula—tentulah lebih kepada pesri Belanda—tentang penyebab terjadinya perperangan dan perperangan antara Kerajaan Riau-Lingga-Johor-dan Pahang (Sultan Mahmud Syah III dan Yang Dipertuan Muda Raja Haji) secara panjang lebar, dari halaman:287-331.

mati kerajaan. Dengan demikian, Sultan mesti dilindungi dan dibela dengan segenap kekuatan dan kemampuan. Jangan sampai Sultan dapat ditaklukkan oleh pihak musuh, dalam hal ini Belanda, karena bila hal itu terjadi, berakhirilah kedaulatan kerajaan. Sultan Mahmud pun memahami hal itu dan senantiasa menjadi pelaku intelektual dari perjuangan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dalam berhadapan dengan Belanda di medan perang.

Perang Kerajaan Riau dengan Belanda segera pecah. Menurut catatan pihak Belanda yang dibuat oleh E. Netscher (1870) (Ghalib, 2002) para komisaris Lemker dan Hoijnek van Papendrecht pada 7 November 1783 dengan kapal *Hofter Linde* dan *Malaka's Welvaren* sampai ke eskader di Riau disertai beberapa buah kapal lainnya. Komisaris pertama besok paginya mengambil alih komando dan segera segalanya dipersiapkan untuk mengadakan serangan umum terhadap kekuatan musuh (maksudnya adalah bala tentara Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, *Pen.*) di Tanjungpinang, Pulau Bayan, Penyengat (Mars), dan Senggarang dengan tak menunggu datangnya tambahan dari Terengganu atau Batavia. Hari akan melakukan penyerangan itu ditetapkan pada 6 Januari 1784. Komisaris Lemker pindah ke kapal *Malaka's Welvaren* dan Tuan Hoijnek van Papendrecht ke kapal *Snelheid* dengan maksud secara terpisah masing-masing akan memimpin satu divisi sewaktu mendarat.

Selanjutnya, tulis E. Netscher, pihak Belanda mulai menyerang dan diyakini segera menang, tetapi kapal *Malaka's Welvaren* terkandas ke tebing. Sekitar pukul dua siang, terbukalah kesempatan baik dan satu detasmen serdadu Eropa—kebanyakan orang Perancis, mendarat di tanah datar sebelah selatan bukit Tanjungpinang—dibawah pimpinan Stoppelaar menuju ke bukit berbatasan dengan Tanjungpinang, tetapi baru saja mendarat di Bukit Stoppelaarsberg, sarang meriam di darat melepaskan tembakan ke kapal *Malaka's Welvaren* yang masih terkandas dengan ledakan laksana ribuan halilintar. Kapal *Malaka's Welvaren* berkeping-keping terbang ke udara. Dengan demikian, pasukan Riau menyerbu ke bawah bukit, detasmen Belanda menjadi kacau-balau karena panik. De Stoppelaar terluka, Vandrig Zoldering yang kakinya bengkok memberikan isyarat untuk mundur dan dilaksanakan secara tergesa-gesa. Detasmen tersebut terpaksa meninggalkan beberapa orang yang mati dan tiga orang ditawan, di antaranya seorang terluka. Dari kapal *Malaka's Welvaren* hanya dua orang Eropa dan tujuh orang bumiputra yang tertolong.

Pada akhirnya, kata E. Netscher, setelah matinya Lemker, kapten Toger Abo kembali memegang komando. Maka diputuskan, pasukan harus kembali ke Malaka. Dengan keputusan itu, pada 24, 26, dan 27 Januari 1784 berturut-turut kapal-kapal yang ikut ekspedisi itu melabuhkan jangkarnya di Malaka. Kapal tersebut adalah Dolpin, Hof der Linde, Jonge Hugo, Diamant, Hoop, Geertruide Suzanna, bargas, dan Snelheid, gurab. Adapun kapal Spanyol kecil, yakni Concordia, Galjoot. Kemudian pencalang, yakni Rustenburg, dan Philippine, Kotter yakni Patriot dan Ondermemer.Sekoci, yakni Johanna dan Ciceroa. Kekalahan Belanda di Riau 6 Januari 1784 itu, ditegaskan oleh E. Netscher, sangat mengejutkan. Sebab, pada awalnya mereka sangat berharap politik adu-domba, *divide at impera* dapat memecah-belah pihak Melayu dengan Bugis menjadi wujud. Sebelum penyerangan di Riau itu, Gubernur Belanda di Malaka sangat berharap pihak Melayu bergabung dalam peperangan itu untuk menyerang dan menghalau Bugis dari Riau-Lingga-Johor-Pahang. Namun, yang terjadi di medan perang malah sebaliknya, anak muda, cucu penerus Sultan Sulaiman, yang kemudian bergelar Sultan Mahmud Riayat Syah, yang berada di Riau, sama sekali tak kelihatan berpihak kepada Belanda. Bahkan sebaliknya, Sultan itu bersama Bugis melawan Belanda. Akibatnya, Belanda kalah dan berundur ke Malaka.

Pasukan Kerajaan Riau, menurut E. Netscher, tak menghentikan langkahnya menyerang Belanda. Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dan Raja Haji bersama orang-orang Bugis dari Riau mengejar armada yang ditarik mundur itu. Di dalam pasukan itu, tegas E. Netscher, ternyata ikut serta juga Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud. Namun, sebelum melanjutkan pelayaran sampai ke Melaka, pasukan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang singgah terlebih dahulu di Muar. Akhirnya, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah pun tinggal di Muar dan Raja Haji beserta pasukan Riau-Lingga-Johor-Pahang melanjutkan pelayaran ke Melaka¹² untuk menyerbu Belanda. Jelas, E. Netscher, pada 13 Februari 1784—dua minggu setelah kembalinya kapal-kapal ke Malaka—Raja Haji mendarat dengan kekuatannya yang besar di Teluk Ketapang, sebuah teluk kecil berjarak lima mil sebelah timur Malaka—menyebabkan tempat itu menjadi tak aman bagi Belanda, sedangkan Raja dari Selangor, Sultan Ibrahim, mendarat pula pada bahagian barat.

¹²Tentang permintaan Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Haji kepada Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Syah III dapat dilihat pula Shaharom Husain, *Sejarah Johor Kaitannya dengan Negeri Melayu*, 1995:44-45).

Menurut Netscher lagi, Malaka menjadi terdesak sehingga Gubernur secepatnya mengirimkan berita kepada Pemerintah Tinggi untuk meminta bantuan. Begitu menerima berita itu, Batavia mengirimkan eskader kerajaan yang baru datang dari negeri Belanda, di bawah Kapten-Komandir J.P. van Braam, untuk memperkuat OIC yang telah mulai goyah di Hindia. Eskader ini terdiri atas kapal-kapal: Utrecht dengan 68 meriam, 480 orang, dengan Kapten-Komandir Jacob Pieter van Braam. Kapal Wessenar dengan 68 meriam, 450 orang dengan Kapten Gerard Oorthuijs. Kapal Goes dengan 54 meriam, 350 orang dengan Kapten Splinter Stavorinus. Kapal Louise dengan 56 meriam, 350 orang dengan Kapten Frederik Rudolf Karel Graaf van Rachteren. Kapal Monnickendam dengan 44 meriam, 270 orang, dengan Kapten Marcus Kuijper. Dan Kapal Juno dengan 36 meriam, 230 orang dengan Kapten Cornelis Maichael de With. Semuanya berjumlah 326 meriam dan 2.130 orang.

Dari catatan E. Netscher itu, lagi-lagi dapat ditangkap bahwa Belanda masih saja beranggapan antara Bugis dan Melayu tak sejalan dan berharap pihak Melayu akan bergabung dengan Belanda. Mereka bertekad untuk membebaskan Malaka dan mengusir Raja Hajisehingga pada 29 April 1784 mereka meninggalkan Batavia menuju Malaka. Ternyata, pada eskader masih ditambahkan sebuah kapal Kompeni Hinlopen yang dipersenjatai dengan 24 pucuk: tiga dan enam bom, kottebrigantian De Batavier, Letnan Buissinie, dengan 20 pucuk, kapal ringan de Haas dan de Vos, sekoci de Vole Maan dan 2 rakit berdasar datar. Pada kapal eskader diikutsertakan pula beberapa orang insinyur dan opsir infantri, yang atas permintaan van Braam didatangkan dari Belanda. Yang berpangkat tinggi di antara para opsir itu adalah Mayor Anthonij Harmell. Selanjutnya, ikut pula seorang opsir artileri, beberapa juru bom, juru meriam, dan sejumlah 300 orang serdadu bumiputra.

Selanjutnya, menurut E. Netscher, pada 20 Mei 1784, eskader tersebut merapat di dermaga Malaka. Pada 16 Juni kapal-kapal merapat lagi, yang dipimpin oleh Letnan Albert Coblijn. Maka, mulai terbitnya matahari 1 Juni, eskader bergerak ke Teluk Ketapang dekat Malaka. Setelah beberapa hari, armada mulai menembakkan meriam-meriamnya, ditujukan ke daratan dan ke kapal yang berada di pantai, dan pada 18 Juni dengan kekuatan 734 orang, di antaranya 291 bumiputra, dilakukan pendaratan dan dapat memukul hancur musuh, dan Raja Haji yang berdiri dekat sarang meriam untuk memberi semangat pasukannya, terkena tembakan senampang di dadanya sehingga gugur. Jenazahnya disembunyikan oleh para pengikutnya di

hutan. Atas petunjuk seorang tawanan, menurut perintah Gubernur Malaka, jenazah tersebut diambil dan dibawa ke kastil dan dikebumikan di kaki bukit St. Paulus. Empat atau lima ratus orang pihak Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang gugur sewaktu pendaratan itu, sedangkan dipihak Belanda 12 gugur, termasuk Letnan-Insinyur van der Mijle dan Kadet Laut van Halm. Di pihak Belanda luka 21 orang Eropa dan 13 bumiputra. Kemudian, meninggal karena lukanya: Letnan Feber, Opsir kelas satu pada kapal Juno. Perperangan antara pasukan Raja Haji dengan Belanda, baik yang terjadi di Riau maupun Malaka, menurut E. Tetscher, sebagai perperangan yang dilakukan atas nama Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. (Ghalib, 2002:314-352).

Tentang perperangan itu, dapat dipahami pula tulisan yang disusun penulis pribumi, bahwa di lain pihak dalam rangka menyongsong serangan Belanda tersebut, maka Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang juga menyiapkan segenap bala tentara, angkatan perang untuk menyerang Belanda di Malaka. Kata Hasan Junus pada tanggal 13 Februari 1784 pasukan Riau yang dipimpin oleh Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Haji sudah mendarat di Teluk Ketapang, yang terletak lebih kurang 15 kilometer di sebelah selatan Kota Malaka. Sumber Belanda mengatakan bahwa orang-orang Riau itu datang dengan "kekuatan yang besar" tanpa menyebutkan berapa besarnya. Winstedt (1982) menyebut jumlah pasukan itu sebagai "thousand warriors" tanpa menyebutkan berapa ribunya dan "three hundred women". Dari sinilah dapat diperkirakan kira-kira berapa banyak "kekuatan yang besar" tersebut. (Junus, 2000:48).

Di Muar itu, terjadi perundingan dan perbincangan serta kesepakatan penting antara Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Syah III (Sultan Mahmud Ri'ayat Syah) dengan Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Haji (sang paman). Sebagaimana dijelaskan banyak sumber, bahwa Raja Haji meminta Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud, yang juga sekaligus sebagai kemenakannya, agar mau tinggal di Muar dan tidak ikut dalam pasukan untuk berperang dengan Belanda di Melaka. Tentang alasan mengapa Raja Haji minta Sultan Mahmud tinggal di Muar, dijelaskan pula beberapa penulis, antara lain Abdul Kadir Ibrahim dalam Seminar *Menemukanli Ketokohan Sultan Mahmud Syah III* yang dilaksanakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Lingga, 14 Juni 2012. Antara lain, niscayalah Yang Dipertuan Muda Riau IV, Raja Haji sekali lagi meminta dan membujuk Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah untuk tidak meneruskan keterlibatannya secara langsung dalam kancah perperangan, dan sebaiknya segera meinggalkan

Malaka dan kembali ke Muar. Tentu kita dapat memikirkan dan merasakan bagaimana pikiran dan perasaan kedua pembesar Kerajaan Riau-Johor-Lingga dan Pahang tersebut tatkala itu. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam hati. Dan, dapat kita tangkap maknanya, bahwa agaknya dalam pikiran dan hati Yang Dipertuan Muda, pasukan Riau-Johor-Lingga dan Pahang yang dipimpinnya bersama Sultan Ibrahim yang memimpin pasukan Selangor, pada akhirnya akan menemui perlawanan berat dari pihak Belanda.

Beliau, mungkin juga sudah memperkirakan, pada akhirnya perang itu adalah perang penentuan harga diri, marwah, sehingga mesti berakhir dengan kemenangan yang diraih atau mati sebagai syahid. Jika saja Yang Dipertuan Besar ikut pula berperang dan ikut gugur di medan perang sebagai syahid, siapakah lagi yang akan dengan cepat kembali menyusun strategi dan kekuatan dalam melanjutkan kembali berperangan dengan Belanda. Salah-salah, jika Yang Dipertuan Besar dan Yang Dipertuan Muda tewas dalam masa perang itu, maka selanjutnya akan dengan begitu cepat dan mudah pihak Belanda dapat menaklukkan seluruh wilayah Kerajaan Riau-Johor-Lingga dan Pahang serta daerah-daerah taklukannya. Bila hal itu terjadi, maka api perlawanan dan jihad kepada Belanda akan berakhir. Raja Haji tak hendak itu terjadi. Karena itu, baginya tiada pilihan lain, dia harus “membangkang” kepada Yang Dipertuan Besar, dan bahkan memerintahkannya meninggalkan medan perang, lalu kembali ke Muar dan selanjutnya berkedudukan di Riau. Karena bagaimanapun, Yang Dipertuan Besar, bukan hanya sebagai pimpinan tertinggi dalam Kerajaan, melainkan sekaligus sebagai simbol kerajaan. Karena itu, harus tetap ada, berada dan terjaga di dalam kerajaan. Itu semua demi kebaikan dan kelanjutan Kerajaan, yang bak kata pepatah “mati satu tumbuh seribu”.

Dalam *Tuhfat al-Nafis*—yang disusun-ulang oleh Virginia Matheson Hooker—menjelaskan bagaimana jalan kejadian pengejaran pasukan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-dan Pahang terhadap pasukan Belanda sampai ke Malaka itu. Dari penjelasannya, terlihat kedudukan dan peran penting bagi seorang Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri’ayat Syah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kerajaan dan keterlibatannya secara langsung bersama Raja Haji (sang paman) dalam berperang dengan Belanda untuk “babak” yang ke sekian kalinya. Bahwa setelah perundingan di Riau, maka bersiaplah Raja Haji dengan akan beberapa kelengkapan (perang). Maka apabila sudah mustaib sekaliannya maka (lalulah ia) berangkat ke Malaka. Maka mengikut(lah) pula (paduka anakanda baginda) Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud (bersama-

sama paduka ayahanda bagindanya Yang Dipertuan Muda. Maka keras juga baginda Sultan Mahmud itu hendak pergi juuga bersama-sama paduka ayahanda bagindanya itu), maka (lalulah ia pergi). Maka sampai ke Muar maka ditinggalkannya paduka anakanda (baginda) itu di Muar iaitu Yang Dipertuan Besar. Maka Yang Dipertuan Muda Raja Haji lalulah ia ke Malaka, maka berbuatlah (ia tempat serta) kubu di Teluk Ketapang (di Tanjung Palas namanya), serta menuruh Penggawa Opu Nasti melanggar Semabuk. Maka berperanglah di Semabuk itu dengan beberapa (hari) beramuk-amukan gegak gempita bunyi senapang /pemuras/ serdadu dan pemuras Bugis (seperti bunyi orang menggoreng bertih serta dengan sorak tempitnya dan segala Bugis dengan kilung musungnya) dan bermati-matianlah (dan berluka-lukaan) sebelah-menyebelah. Maka tiada beberapa lamanya berperang itu, (maka tewaslah orang-orang Semabuk itu sebab banyak serdadunya mati, serta orang-orang Semabuk pun banyak panglima-panglimanya mati). Maka Semabuk pun kalahlah dan dapatlah Semabuk itu oleh Yang Dipertuan (Muda) Raja Haji.

Kemudian tiada berapa antaranya maka Sultan Mahmud pun datanglah ke Teluk Ketapang mendapatkan paduka ayahanda (bagindanya itu) Raja Haji (Yang Dipertuan Muda). Maka (tiada berapa lamanya bersama-sama dengan paduka ayahanda baginda itu /Raja Haji Yang Dipertuan Muda/ maka) sembah (Yang Dipertuan Muda) Raja Haji (itu kepada paduka anakanda baginda itu Sultan Mahmud), “Baik(lah) silakan paduka anakanda balik ke Muar. Nanti paduka ayahanda di dalam Muar, janganlah (paduka anakanda) masuk /di dalam pekerjaan perang ini/ biarlah (paduka) ayahanda saja karena barangkali dikehendaki Allah Taala (paduka) ayahanda sampai janji di dalam perang (ini) dahulu Allah wa baadu al-rasul. (Kemudian) /daripada itu/ paduka anakandalah (akan paduka) ayahanda harap memelihara ahli-ahli (paduka) ayahanda, serta memelihara(kan) pacal-pacal itu anak-(anak) Bugis. Adapun (paduka) ayahanda suka serta rela(kan) karena dosa (paduka) ayahanda selama ini. Maka ((paduka) ayahanda harapkan diampuni Allah Taala dengan sebab kematian perang ini.” Syahadan apabila baginda Sultan Mahmud mendengar perkataan paduka ayahanda (baginda) itu, maka baginda pun menangislah terlalu sangat. Maka Yang Dipertuan Muda Raja Haji pun menangis juga. Syahadan apabila selesai daripada bertangis-tangisan dua (ber)putera itu, maka Sultan Mahmud pun berangkatlah balik ke Muar menantikan habis pekerjaan paduka ayahanda baginda(nya) itu (Matheson Hooker, 1991:406-409).

Hal penting yang dapat ditangkap dan dipahami adalah, tentang kalimat yang ditulis E. Netscher di dalam bukunya sebagaimana dijelaskan di atas yang mengatakan dengan jelas, berperangan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dengan Belanda yang di medan perang dipimpin oleh Raja Haji sebagai panglima perang, baik sewaktu di Riau maupun di Malaka, sesungguhnya atas kehendak dan titah Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Oleh karena itu, menjadi jelaslah bagi kita dewasa ini bahwa pemegang kekuasaan atau kendali perintah (titah) tertinggi pihak Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dalam berperangan itu, sebenarnya berada di tangan Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah.

Dari keterangan E. Netscher dan *Tuhfat al-Nafis* dapat disimpulkan bahwa berperangan di perairan Tanjungpinang dalam tahun 1782-1784, pihak Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang adalah dibawah tanggungjawab (titah dan perintah) Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (Sultan Mahmud Syah III), dan yang memimpin perang di lapangan adalah Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Haji. Perperangan itu berhasil meraih kemenangan. Perperangan yang puncaknya terjadi pada 6 Januari 1784, yang dikenal dengan Perang Riau, pihak Belanda betul-betul kalah total, sehingga pasukan yang tersisa melarikan diri ke Malaka. Perperangan itu, adalah berperangan babak ketiga antara Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang setelah Perang di Malaka dan Linggi sebagaimana dijelaskan di atas. Perperangan “babak” keempat pun terjadi di Teluk Ketapang, Malaka, Raja Haji gugur sebagai syuhada’.

2. Sultan Mahmud Tolak Keinginan Belanda Mengusir Bugis

Seperti sudah diperikan di atas, dalam perang di Teluk Ketapang, Malaka itu Raja Haji gugur sebagai syahid. Terkait berperangan itu Mardiana Nordin menjelaskan dalam bukunya *Politik Kerajaan Johor 1718-1862*. Katanya pada bulan Juni 1784 bersamaan 1198 H pula, angkatan perang dari Johor yang diketuai Raja Haji memerangi Belanda di Malaka. Kejadian ini telah menyebabkan kematian Raja Haji di Teluk Ketapang pada 18 Juni 1784 bersamaan 10 Syaaban 1198 H. (Nordin, 2008:28). Menurut *Tuhfat al-Nafis* setelah Raja Haji tewas di tangan Belanda, saudara-saudaranya dan pasukan Kerajaan Riau-Lingga-Johor Pahang dengan seluruh sekutunya berundur dan keluar meninggalkan Melaka. Puteranya, Raja Jaafar dan Raja Idris, dan anak-anak saudaranya seorang yang bernama Raja Sulaiman. Adapun Yang Dipertuan Inderagiri

yang bernama Raja Ibrahim adalah ia luka /dibawa orang/ lari keluar. Adapun Raja Jaafar didukung oleh seorang namanya Encik Layan suku-suku megat Ino ialah yang mendukungnya membawa keluar. Maka habislah segala ahli-ahli Yang Dipertuan Muda itu keluar dari Teluk Ketapang, lalulah sekalian mereka itu ke Muar.

Lebih lanjut dijelaskan *Tuhfat al-Nafis*, antara lain, bahwa segala putera-putera (al-) Marhum Raja Haji serta orang-orang Riau yang mundur ke Muar itu (mendapatkan Baginda Sultan Mahmud itu). Maka apabila segala mereka itu berjumpa Baginda Sultan Mahmud maka berkabarlah mereka itu kepada Baginda itu akan hal paduka ayahanda Baginda Yang Dipertuan Muda Raja Haji sudah hilang mangkat al-syahid fi sabil Allah itu. (Maka) apabila Baginda (itu) melihat segala (orang) yang datang itu serta mendengar /per/khabar/an/ (segala) mereka itu, maka Baginda Sultan Mahmud pun terkejut lalu menangislah ia dengan tangis yang amat sangat. (Maka segala yang hadir di situpun menangislah semuanya kecil besar tua muda). Sementelahnya pula Baginda melihat ahli-ahli paduka ayahanda Baginda itu (Raja Haji, *Pen.*) makin bertambah-tambahlah rosak hatinya. Syahdan (maka apabila selesai daripada bertangis-tangisan itu) maka Baginda (serta segala orang tua-tua) pun berangkatlah balik ke Riau membawa ahli-ahli paduka ayahanda(nya baginda al-)Marhum (Raja Haji) itu. Maka apabila (tiba) baginda Sultan Mahmud (itu) ke (dalam) Riau (maka gemparlah pula di dalam negeri Riau) riuh-rendah dengan ratap tangis(nya besar kecil tua muda, apalagi) sanak saudaranya dan (paduka adinda-adindanya dan anakanda sekalian. Maka menangislah sekaliannya serta) dengan dukacitanya yang amat sangat (jua adanya).

Lebih lanjut dijelaskan *Tuhfat al-Nafis* itu bahwa tersebut(lah) perkataan Sultan Mahmud di dalam negeri Riau duduklah (baginda itu) di dalam dukacita sebab kehilangan paduka ayahanda Baginda Raja Haji al-Marhum. Adalah (yang) bersama-sama/ dengan Baginda itu/ (pula) masa itu (di dalam Riau) anak Raja Bugis Raja Ali dan Raja Abd al-Samad dan lainnya dan anak Raja Melayu iaitu Bendahara dan Temenggung dan (raja) Indera Bongsu. Adapun anak Raja Bugis yang menyebelah kepada suku-suku Melayu (itu) iaitu Raja Tuha (Encik Andak).

Dalam kesempatan itu menurut *Tuhfat al-Nafis*, muncullah pendapat untuk menggantikan kedudukan Yang Dipertuan Muda karena wafatnya Raja Haji. Syahdan di dalam itu, maka adalah suku-suku (sebelah) Melayu serta Raja Tua muafakatliah akan menganti(kan) yang Dipertuan Muda yang hilang kepada Baginda Sultan Mahmud. Akan tetapi, di dalam lagi

berbelah-belah fikiran karena yang terlebih tua pada masa itu Raja Ali, danada juga putera almarhum Raja Haji (empat orang) laki-laki (yang tuanya) bernama Raja Jaafar lagi belum remaja putera belum(lah) /lagi/ boleh memegang (pekerjaan) kerajaan. Maka jadi berbelah-belah(lah) fikiran antara suku /sebelah/ Melayu pada memilih akan ganti(nya) Raja Muda itu, akan tetapi kebanyakan cenderung(nya) suku-suku Melayu kepada Raja Jaafar /jua/ sebab kanak-kanak /tentulah/ menerima apa-apa yang yang dikehendaki oleh mereka itu. Di dalam hal itu tuan-tuan sekalian lebih maklum adat manusia mana-mana yang manfaat kepada dirinya itulah yang dikehendakinya. Syahdan di dalam hal itu jadi(lah) taukihlah Baginda Sultan Mahmud (daripada) memikirkannya. (Metheson Hooker, 1991:419-420).

Pada pihak lainnya pula, Belanda sudah mempersiapkan pasukan yang lebih lengkap dan kuat di Malaka untuk menduduki pusat Kerajaan Riau di Ulu Riau, Pulau Galang Besar, Sungai Carang, Kota Piring dan sekitar Tanjungpinang. Bahwa menyusul tewasnya Raja Haji (Yang Dipertuan Muda IV Riau) di Teluk Ketapang dan kemudian terjadi kekosongan jabatan Yang Dipertuan Muda, maka Belanda berharap dan mengupayakan agar tidak lagi dijabat oleh keturunan Bugis, melainkan keturunan Melayu saja. Hal ini dijelaskan E. Netshcer bahwa Belanda sangat berharap Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah tidak lagi mengangkat Yang Dipertuan Muda dari pihak Bugis. Malahan diharapkan Sultan dapat menghapus Bugis dari jajaran kekuasaan atau pemerintahan kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang. (Ghalib, 2002:330).

Sultan Mahmud sudah memperhitungkan bahwa Belanda akan datang untuk menyerang lagi ibukota Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang dan mendudukinya. Sementara perkara siapa yang pantas untuk menjadi Yang Dipertuan Muda menggantikan Raja Haji belum diputuskan. Dalam memikirkan adanya ancaman perang dari pihak Belanda dan keinginan pihak Melayu agar Yang Dipertuan Muda diangkat saja dari anak Raja Haji, yakni Raja Ja'afar, maka dari pihak lain Baginda dihadapkan pula dengan keinginan pihak Bugis yang mau Raja Ali bin Daeng Kambojaseharusnya menjabat Yang Dipertuan Muda. Hal ini tentu mesti dipikirkan secara matang, bertindak secara bijak, dan diambil keputusan dengan baik dan tepat oleh Sultan. Jika salah langkah maka akan terjadi pertumpahan darah dan perpecahan besar antara Bugis dengan Melayu, yang muaranya akan mengancam persatuan dan kesatuan kerajaan (negeri)

sehingga memberi peluang dan kemudahan kepada Belanda untuk dapat menakluk kerajaan. Sultan Mahmud pastilah tidak sudi hal itu terjadi!

Dan memang perpecahan sudah dimabang pintu. Mengikuti penjelasan *Tuhfat al-Nafis*, bahwa perundingan zuriat-zuriat Melayu untuk meminta Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah mengangkat pihak putra Raja Haji, yakni Raja Ja'afar menjadi Yang Dipertuan Muda diketahui oleh pihak Raja Ali sebagai zuriat Bugis. Syahdan kata sahib al-hikayat apabila Raja Ali mendapat (ia) akan (kabar) rahasia sebelah suku-suku Melayu serta Raja Tua itu, maka iapun mengumpulkan segala Bugis-bugis peranakan dan Bugis-bugis jati beribu-ribu, maka pergilah ia menghadap kepada (Baginda) Sultan Mahmud. Maka segala raja-raja pun hadir lah semuanya/, anak-anak Bugis minta tentukan/. Maka berdatang sembah ia, "Siapa yang patut akan mengganti (nya) paduka ayahanda (baginda itu) yang hilang /maka/ patik semua anak Bugis minta tentukan (pada) waktu ini." Maka pada akhirnya dengan bijaksana dan penuh wibawa Sultan Mahmud pun bertitah, bahwa "Siapa lagi yang lain (sebagai pengganti Raja Haji) Raja Alilah yang patut karena pada masa ini (Raja Alilah yang terlebih) tua daripada yang lain. Maka Raja Ali menjunjung duli kepada Baginda (Sultan Mahmuditu). Maka bergelarlal ia Yang Dipertuan Muda di dalam negeri Riau. (Metheson Hooker, 1991: 420-421).

Dalam kaitan pengangkatan Raja Ali menjadi pengganti Raja Haji sebagai Yang Dipertuan Muda V Riau nyatalah telah memupuskan keinginan, harapan dan tujuan Belanda hendak memecah-belah antara bugis dengan Melayu, tepatnya antara keturunan Yang Dipertuan Muda dengan Yang Dipertuan Besar Sultan sama sekali gagagl! Sultan Mahmud tidak hiraukan sama sekali harapan Belanda agar jangan melantik Raja Ali putra Daeng Kamboja menjadi Yang Dipertuan Muda, tetapi sebaiknya mengangkat pihak Melayu saja. Tentang ini jelas sekali ditegaskan Mardiana Nordin, bahwa selepas kematian Raja Haji, Sultan Mahmud lalu menabalkan Raja Ali sebagai Yang Dipertuan Muda kelima. (Nordin, 2008:28).

Mengapa Sultan Mahmud pada akhirnya memilih Raja Ali bin Daeng Kamboja menjadi Yang Dipertuan Muda V Riau? Jawabannya sangat prinsip, karena Sulan Mahmud dapat memahami keinginan pihak Melayu dan pihak Bugis untuk menduduki jabatan di bawah Yang Dipertuan Besar Sultan, yakni Yang Dipertuan Muda sebagai pengganti Raja Haji. Pada pikiran lainnya baginda juga harus ingat betul, tidak mau mengkhianati sumpah-setia Melayu-Bugis sejak Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah dengan pihak bangsawan Bugis

bersaudara, yang kemudian dinaikkan Daeng Marewah menjadi Yang Dipertuan Muda I Riau. Sultan Mahmud adalah seorang yang tunduk dengan peraturan dan hukum-hukum kerajaan yang sudah dibuat dan disepakati untuk dijalankan di dalam roda pemerintahan kerajaan. Sultan juga amat setia untuk mendudukkan dan meletakkan adat dan adab yang berlaku di dalam kerajaan sebagai acuan pola tingkah laku pembesar-pembesar kerajaan dan segenap lapisan masyarakatnya. Baginda juga tetap beteguh hati, konsisten dan konsekuen untuk mengekalkan persaudaraan, persatuan dan kesatuan segenap suku-bangsa di dalam kerajaan, utamanya antara Melayu dengan Bugis. Dan terlihat dengan jelas bagaimana kemampuan Sultan Mahmud sebagai seorang Raja yang dapat mendengar, menyimak dengan baik apa-apa kehendak atau pendapat yang berkembang di antara pembantu-pembatunya sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan, dan rakyat terhadap sosok yang patut menjadi Yang Dipertuan Muda pengganti Raja Haji. Ksemuanya itu dinilainya sebagai ajang mengemukakan pendapat dan musyawarah, yang tentu menggambarkan atau mencerminkan pula telah berjalannya alam demokrasi di dalam kerajaan yang dipimpinnya. Maka pada akhirnya Sultan Mahmud mengambil keputusan yang dipandang tepat dan terbaik bagi Kerajaan, yakni mengangkat Raja Ali bin Daeng Kamboja menjadi Yang Dipertuan Muda V Riau.

3. Membentuk Persekutuan Melayu dan Mengusir Belanda

Seperti disinggung di atas bahwa Belanda sudah mempersiapkan kekuatan perangnya untuk berangkat dari Malaka dalam rangka menggempur Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang di Riau. Sultan Mahmud Ri'ayat Syah diharapkan oleh Belanda dapat tunduk dan takluk, sehingga kerajaan tersebut berada dalam kekuasaan Belanda. Dengan demikian segala kemajuan dan kejayaan kerajaan yang sudah dicapai akan berada di bawah kendali Belanda dan sangat menguntungkan Belanda di dalam perdagangan dunia. Kata E. Netscher, kapal-kapal Kompeni, yaitu Hofder dan Diamant, tanggal 22 Juni 1784 dikirim ke Riau, diperkuat dengan dua orang vanding, empat opsir rendah dan 48 infanteri Melayu (pasukan Sultan Muhammad Ali bekas Sultan Siak yang diangkat oleh Belanda menjadi Sultan Selangor) untuk memblokade pintu masuk ke teluk mencegah keluar kapal-kapal. Pada mulanya pimpinan diserahkan kepada komandan kapal Hof der Linde Christiaan Frederik Winterheijm, tetapi tidak lama kemudian ia

ditarik sebagai pimpinan dan sebagai komandan kapal Hof der Linde. Sebagai gantinya ditunjuk Kapten Jacob Frederiks dari kapal Diamant, dan kapten-letnan dari kapal Hof der Linde ditunjuk memimpin kapal Diamant.

Dilanjutkan E. Netscher, pada permulaan Agustus kapal-kapal tersebut sampai di Riau, dan segera mereka menerima kunjungan dari dua orang utusan Raja Ali, yang meminta penjelasan apa syarat-syarat untuk mengadakan perdamaian. Komandan menunjuk supaya Raja Ali menghubungi Gubernur Malaka. Cara demikian diterima oleh Raja Ali, maka surat Raja Ali bertanggal 19 Agustus 1784, dan sampai ke Malaka pada tanggal 2 September dengan dibawa oleh Haji Mamat. Kita hanya bisa menduga bahwa jawaban Gubernur dan Dewan Malaka tidak sesuai dengan keinginan Bugis. Pihak Riau—oleh Yang Dipertuan Muda V Riau Raja Ali menyiapkan meriam-meriam, memperbanyak jumlah kapal.¹³ Dan memang benar selanjutnya Gubernur dan Dewan Makala pun mengirim lebih banyak kapal-kapal untuk memblokade Riau, berturut-turut berangkat ke Riau: 4 September 1784, Pencalang Bangka dan Belitong; tanggal 15 bulan itu juga Pencalang Geduld dan Bargas Constantia; 7 Oktober kotter Batavier dan Patriot, galjoot Concordia dan ligter Haas dan Vos. Semua kapal-kapal itu diikuti oleh eskader Kapten Komandir J.V. van Braam, ikut serta kapal Kompeni Hinlopen dan kapal-kapal pendarat kecil yang berangkat 10 Oktober dari Malaka dan tanggal 23 bulan itu juga tiba di Riau. (Ghalib, 2002:331-332).

Sikap dan pendirian yang teguh dan kukuh Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah terhadap kedaulatan, kemerdekaan dan marwah negeri (bangsa dan negara) yang tidak sudi bertemu dan apalagi berunding dengan Belanda dan bagaimana pula langkah dan sikap Raja Ali kepada Belanda. Penjelasan ini dapat diahami dari penjelasan E. Netscher selanjutnya. Sebagaimana dijelaskan, 10 Oktiber dan 23 Oktober 1784 kapal-kapal dan pasukan Belanda dari Malaka sudah berada di Riau. Adalah besok baginya dikirim ke darat kapten-letnan infanteri Dirk van Hogendorp dan letnan laut Konnell, didampingi oudvandrig kota Malaka Michiel

¹³Sultan Mamud dan mereka yang simpati degan Raja Ja'afar masih memantapkan persiapan kekuatan penuh Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang dalam menyambut penyerangan Belanda dari Malaka. Dapat ditegaskan bahwa Sultan Mahmud hendak melihat dan menguji kemampuan Raja Ali dalam menghadapi pihak musuh, yakni Belanda di dalam taktik dan medan perang. Baginda tentulah ingin Raja Ali dapat menyadari bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan tidak akan dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan bersatu-padu sebagai lazimnya dalam kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang pada masa-masa sebelumnya. Dengan semangat persatuan dan kesatuan itulah Belanda tidak pernah dapat menaklukkan Riau atau dengan kata lain dirinya sebagai Yang Dipertuan Besar Sultan Riau-Lingga-Johor dan Pahang.

Killian yang bertindak sebagai juru bahasa, dengan membawa surat dari kapten-komandir kepada Sultan Mahmud, yang isinya biasa saja, terutama mengundang Sultan untuk datang ke kapal Utrecht guna mengadakan perundingan. Kapten-komandir membatasi diri untuk tidak memberikan pengakuan atas hak Bugis dalam pemerintahan dan dalam surat tadi hal itu juga disinggung supaya Bugis tersebut mesti dikekang.

Lebih lanjut dijelaskan E. Netscher, sampai di tempat penghadangan di teluk, maka sekoci di mana tuan-tuan tersebut berada, disambut oleh empat orang panglima dan diiringkan selanjutnya. Komisi tersebut dibawa ke balai rung (tentunya di sitana Raja Ali di Pulau Bayan, sebuah pulau di tengah sungai yang masih jauh dari pusat Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang, di Sungai Carang, Kata Raja, *Pen.*), di mana mereka harus menunggu selama dua jam barulah raja keluar, dan selama waktu itu telah banyak berkumpul Bugis-bugis bersenjata di sekeliling balai rung. Kemudian barulah muncul seseorang diperkenalkan kepada Killian sebagai raja Melayu. Orangnya hormat, menyalami tuan-tuan komisi dan menyatakan kegembiraannya, atas kunjungan tersebut.

Sebelum Killian menyerahkan surat dari kapten-komandir, menanyakan apakah dia Sultan Mahmud. Yang diajak bicara tadi memperkenalkan dirinya sebagai Raja Ali, dengan mengatakan bahwa dialah Raja Melayu yang sebenarnya, sehingga tuan-tuan itu dengan dianyalah harus mengadakan perundingan dan kepadanya pula surat tersebut dapat diserahkan. Permintaannya itu ditolak, sehingga menimbulkan kegemparan di antara para Bugis itu, sehingga tuan-tuan itu terpaksa menyerahkan surat tersebut kepada Raja Ali. Raja Muda itu dengan angkuh melepas mereka pergi, tetapi diberi juga sebelas kali tembakan kehormatan.

Selepas tindakan itu, menurut E. Netscher, maka van Braam menyusun armadanya untuk berjaga-jaga. Ia menempatkan kapal-kapal berat sebelah selatan pintu masuk ke teluk, dengan kekuatan berhadapan dengan benteng yang kuat pula, yang terletak pada ujung timur Pulau Mars (Penyengat) yang mengawal pintu masuk ke teluk. Fargat Juno di bawah pimpinan kapten C.M. de with, dengan beberapa buah kapal Kompeni, ditempatkan di sebelah utara pintu masuk kanal. Kanal itu juga dipertahankan dengan satu benteng di Pulau Mars dan selanjutnya diperkuat dengan perahu-perahu yang bersenjata berat yang melintang—merupakan lini di teluk. Berhadapan dengan perahu-perahu itu, diatur merupakan lini pula: kapal-kapal Batavier dan Patriot, bargas Konstantia, pencalang Bliton dan Geduld, dan galjoot Concordia.

Dengan susunan itu, jelas E. Netscher, van Braam masih bersabar, dengan harapan semoga pihak orang Melayu akan menggunakan kesempatan untuk mendesak orang Bugis. Tetapi hal itu tidak terjadi—dan pada 23 Oktober 1784, melalui opsir bendera menyampaikan surat dari Sultan—isinya menyatakan bahwa Sultan tidak dapat hendak membuang Bugis dari Riau, karena berdasarkan kontrak lama ianya terikat dengan mereka, dan bahwa ia tidak dapat menjumpai kapten-komandir di kapal, karena setahunya tidak pernah nenek moyangnya mengikat perjanjian di atas kapal. Van Braam mengatakan kepada utusan dari Riau—bahwa ia sangat tersinggung dengan perlakuan yang dialami oleh para opsirnya kemarin, sekiranya memang Sultan mempunyai maksud-maksud damai, supaya pekerjaan memperkuat pertahanan dihentikan, dan kapal-kapal yang dipersenjatai supaya ditarik ke dalam teluk.

Singkat kisah dapat diringkaskan dari laporan E. Netscher tersebut, bahwa muncul utusan dari Sultan, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang tingkatannya rendah. Untuk perundingan itu mestinya Sultan mewakilkannya kepada Bendahara, Temenggung atau orang Melayu lainnya yang setingkat dengan itu. Kepada van Braam utusan rendah dari Sultan itu juga menyatakan tidak ada membawa rancangan perdamaian. Maka Kapten-Komandir mengemukakan pokok-pokok sebagai dasar perdamaian, 1) kontrak antara Melayu dan Bugis supaya dihapuskan; 2) tidak akan pernah seorang Bugis menjadi rajanya di kerajaan Johor; 3) semua Bugis harus meninggalkan Riau; 4) pertahanan Penyengat (Mars) segera diserahkan kepada Belanda dan kapal-kapal yang bermusuhan ditarik masuk jauh ke dalam teluk. Dan utusan tersebut menyatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk mengambil keputusan terhadap syarat-syarat yang demikian. (Ghalib, 2002:333-334).

Sehingga akhirnya Sultan tidak memberi jawaban apapun! Maka pecahlah perang antara Riau dengan Belanda pada tanggal 29 Oktober 1784. Kata Mardiana Nordin, perang tersebut terjadi bersamaan 18 Ramadhan 1291, yang diketuai oleh Peter Jacob van Braam. (Nordin, 2008:28). Meski demikian, perperangan tidak berlanjut karena ada upaya dari Belanda untuk minta berdamai. Pada akhirnya kata E. Netscher ternyata Sultan Mahmud tidak juga secara langsung mau berunding untuk perdamaian dengan Belanda. Melihat itu pada tanggal 30 Oktober 1784 Belanda telah menyurati Sultan agar melihat kenyataan bahwa ia tidak akan mampu melawan kekuatan Belanda. Dalam pada itu pada 31 Oktober, pagi-pagi sekali dalam hujan lebat Raja Ali dan pasukanya keluar meninggalkan Riau. Melihat itu Belanda meminta

Sultan memenuhi undangan pada 31 Oktober untuk turun ke kapal dalam rangka berunding tentang perdamaian antara Belanda dengan Riau. Pada akhirnya bukan Sultan Mahmud yang menemui Belanda dan mau berunding, melainkan Raja Tuwah¹⁴ yang mengatasnamakan Sultan. (Ghalib, 2002:330-340).

Berkenaan dengan penyerangan Belanda terhadap pusat Kerajaan Riau di kawasan teluk dan sekitar Tanjungpinang selepas tewasnya Raja Haji di Teluk Ketapang dapat pula kita pahami sebagaimana keterangan yang dikemukakan *Tuhfat al-Nafis*. Syahdan ada(lah) kira-kira ada tiga bulan lamanya maka angkatan dari Malaka pun datanglah akan melanggar negeri Riau. Pada akhirnya, Raja Ali, Yang Dipertuan Muda itu keluar dari negeri Riau (itu) berlayar(lah) ke Mempawah dan Sukadana. Sementalahnya Raja Tua sudah memang ianya belot sebelah Belanda. Syahdan tiadalah terkata-kata lagi (Baginda) Sultan Mahmud itu melihat hal (fiil) Raja Tua itu. (Apabila tibalah angkatan Belanda dari Melaka itu iaitu raja lautnya yang bernama Piter Jakub Pemberam), maka Raja Tua pun turun pergi berjumpa kepada Raja Laut itu. “Sekarang kita raja yang berempat (Raja Tua, Datuk Bendahara, Temenggung, dan Indera Bongsu, *Pen.*) menteri yang besar apa-apa sahaja suka raja laut, (kita) boleh jalankan.”

Kemudian maka jawab raja laut itu (katanya), “Baiklah nanti kita buat satu perjanjian baik-baik serta boleh kita tinggalkan satu wakil kompeni di dalam Negeri Riau supaya boleh menolong Tuan Sultan meramaikan Negeri Riau, membanyakkan hasil(-hasil).” Jawab Raja Tua itu, “Bagus.” Lalulah ia (memberi tabik) balik (berkayuh masuk ke dalam sungai. Maka apabila tiba naiklah ke darat), maka musyawarahlah ia dengan Datuk Bendahara serta Temenggung dan Indera Bongsu. Setelah putus musyawarahnya (maka) lalulah keempatnya menghadap (Baginda) Sultan Mahmud. Setelah mendengar, Sultan Mahmud pun bertitah, “Mana-mana sahaja baik(nya) kepada Ayahanda-Ayahanda sekalian.” Pada akhirnya, muncullah perjanjian antara raja-raja (tak termasuk Sultan Mahmud Riayat Syah karena Baginda tak berkenan, *Pen.*) itu dengan Belanda. Belanda selanjutnya meletakkan wakilnya di negeri Riau, bernama Abran Rudi.

¹⁴ Dalam struktur Pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang, yang boleh mengatasnamakan Kerajaan terutama adalah Yang Dipertuan Besar Sultan. Di bawahnya adalah Yang Dipertuan Muda, Bendahara atau Temenggung. Dengan kata lain bahwa Raja Tua, Indra Bongsu tidak berwenang mengambil keputusan, dan jikapun Raja Tua atau Indra Bongsu membuat suatu keputusan atas nama kerajaan, maka keputusannya itu tidak dapat dilaksanakan, tidak berkekuatan hokum untuk dilaksanakan. Inilah kecerdikan Sultan Mahmud, baginda biarkan orang besar kerajaan tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perjanjian dengan Belanda. Sehingga dengan demikian sudah pastilah Sultan atau pihak kerajaan tidak dapat melaksanakan perjanjian itu, dan sebaliknya dianggap tidak ada.

Wakil kompeni itu kasar, keras, dan sekehendaknya saja kepada orang Riau. Di dalam hal itu, jadi kesusahanlah atas Baginda Sultan Mahmud itu serta segala orang tua-tua yang di dalam Negeri Riau itu, makin sehari makin bertambah keras perintahnya wakil kompeni itu. (Matheson Hooker, 1991:414-423).

Dari uraian di atas perlu dijelaskan pihak Belanda sebagaimana ditulis E. Netscher (Ghalib, 2002: 334-352) telah menulis menurut pemahamannya dari pihak Belanda bahwa telah terjadi permusuhan sesungguhnya antara Melayu dengan Bugis atau Sultan Mahmud dengan Raja Ali. Belanda yakin betul memang demikianlah adanya terjadi di tengah Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang. Mereka sangat percaya pula perundingan damai dengan membuahkan perjanjian antara Belanda dengan pihak Riau yang diwakilkan oleh Raja Tua dapat diwujudkan. Padahal sama sekali tidak, karena Raja Tua tidak termasuk sebagai pejabat Kerajaan yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Dari pemahaman kita sebagai anak bangsa dewasa ini dapat mengatakan pula bahwa terjadinya ketegangan antara Raja Ali dengan pihak Melayu hanyalah sebagai taktik dalam mengelabui kehendak Belanda. Perlawanan yang diberikan oleh Raja Ali kepada Belanda niscayalah atas titah Sultan Mahmud. Dan Sultan Mahmud pula yang mengatur agar Raja Ali menghentikan serangannya, dan kemudian setelah melalui perundingan dan rencana selanjutnya untuk menghalau Belanda dari Riau, Sultan Mahmud pun menitahkan pula agar Raja Ali segera membawa pasukan besar untuk meninggalkan Riau menuju Sukadana, Kalimantan. Kejadian tersebut dipahami oleh Belanda seolah-olah memang terjadi ketegangan dan permusuhan antara Raja Ali dengan Sultan Mahmud. Selanjutnya Sultan Mahmud pun mulai menerapkan taktik jitu kepada Belanda, yang sebagian besar telah berhasil bersandiwara dalam mengelabui Belanda. Dengan cara semacam itu maka Belanda tidak lagi menyerang Riau meskipun perjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Sultan, karena memang bukan baginda, Yang Dipertuan Muda, Bendahara ataupun Temenggung yang menandatangani perjanjian. Maka perjanjian hanya tinggal perjanjian, yang nyatanya hanya di atas kertas dan tidak wujud di lapangan. Sultan Mahmud tetap dapat menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang serta daerah takluknya sebagaimana patutnya sebagai negeri yang merdeka dan berdaulat untuk menegakkan marwah negeri, kemajuan dan kemakmuran segenap rakyatnya. Di lain pihak ternyata tanpa sepengetahuan Belanda ternyata perhubungan Sultan dengan Yang Dipertuan

Muda Raja Ali dan raja-raja Melayu lainnya terus berlangsung yang pada intinya suatu ketika mesti menghalau Belanda dari Riau.

Masih berkenaan dengan perjanjian yang terjadi antara raja-raja di bawah Sultan Mahmud Riayat Syah dengan Belanda, dapat dipertegas dengan keterangan dalam *Tuhfat al-Nafis*. Bahwa latar belakang dan nasib akhirnya perjanjian yang dibuat oleh Belanda yang diwakilkan oleh Gubernur Melaka kepada Piter Jakub Pemberam dan pihak Riau yang di atasnamakan oleh raja-raja Melayu (Raja Tua dan Indra Bungsu). Pada intinya, perjanjian itu bukanlah perjanjian langsung antara Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dengan Belanda, melainkan oleh “pembantu-pembantunya” yang disebut raja-raja. Akhirnya seluruh perjanjian yang dibuat itu tak dilaksanakan, bahkan Sultan Mahmud berpandangan bersikap bahwa perjanjian itu tak ada dasar dan gunanya untuk ditaati. Dengan demikian Baginda tak mengindahkan sama sekali perjanjian itu dan segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali melakukan penyerangan terhadap Belanda. (Matheson Hooker, 1991:420-425).

Dalam kaitan itu dapat dipahami pula keterangan E. Netscher (suatu laporan atau tulisan yang lebih berat sebelah kepada pihak Belanda dan begitu mengesankan adanya permusuhan antara Sultan dengan Yang Dipertuan Muda, yang sebenarnya dapat diragukan, dan bahkan tak dapat dipercayai, *Pen.*), setelah gugurnya Raja Haji, pihak Belanda berharap Sultan dapat bekerja sama dengan Belanda dan menghapus Yang Dipertuan Muda Riau—yang kala itu sudah dijabat oleh Raja Ali, putra Daeng Kamboja, dan saudara sepupu Raja Haji—dari jajaran kekuasaan kerajaan. Belanda melakukan tekanan kepada Sultan supaya mau tunduk dan membuat perjanjian tanda takluk kepada Belanda. Namun nyatanya upaya yang dilakukan sejak 22 Juni 1784 sampai terbitnya perjanjian 10 November 1784, Sultan sama sekali tak dapat ditaklukkan oleh Belanda. Dalam bahasa Netscher, Sultan tak berada dalam keadaan siap melaksanakan isi surat perjanjian tersebut. Maka pada 7 Februari 1787 diadakan lagi perjanjian. Perjanjian tersebut memberi pemaaman kepada kita bahwa perjanjian yang tidak ditandatangani oleh Sultan, tetapi raja dari Kerajaan Riau yang tiada berwenang menerima tawaran perjanjian, bukanlah sebagai pertanda takluk Sultan dan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dan daerah takluknya kepada Belanda. Hal itupun terjadi dibiarkan oleh Sultan sebagai taktik, siasat, dan strategi mengulur waktu untuk mencari jalan keluar dalam ikhtiar mempertahankan keutuhan dan kedaulatan kerajaan. Pada akhirnya, setelah semuanya membaik, jalan keluar ditemukan, dirasa yakin, Baginda akan

kembali melawan Belanda, yang tentu dengan strategi dan kekuatan yang sudah dapat dipercayai mampu berperang lagi dengan Belanda.

Dari penjelasan E. Netscher lebih lanjut dapat ditangkap pula, Raja Ali sebagai Yang Dipertuan Muda V Riauyang meninggalkan Riau ke Kalimantan, selepas itu ke Tembelan, terus ke Siantan. Kelak beliau menjalin hubungan secara rahasia dengan Sultan Mahmud dan akan melakukan penyerangan terhadap Belanda.¹⁵ Dapat dipahami juga, Sultan Mahmud telah memainkan siasatnya dengan jitu sehingga pihak Belanda dapat dikelabui Baginda. Tindakan Sultan yang terus berupaya untuk menyerang kembali Belanda itu dapat dilihat dari keterangan E. Netscher lebih lanjut. Ceritanya, pada 3 Mei 1787 pukul delapan malam, Residen D. Ruhe memberitahukan secara rahasia bahwa orang-orang dari Mantang—yaitu suatu kampung di Pulau Siolong yang terletak di sebelah selatan Pulau Bintan—datang tergesa-gesa ke Tanjungpinang. Diperkirakan orang-orang Bugis dan orang-orang dari Kalimantan sedang dalam pelayaran menuju Tanjungpinang. Residen langsung mengirim kapitan Salim Sandera kepada Sultan untuk membawa kabar tersebut agar kiranya menanggulangnya. Lalu, Kapitan Salim Sandera melaporkan bahwa Sultan Mahmud telah menerima kabar tersebut dan segera akan mengambil sikap (padahal sebaliknya, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah hanya berpura-pura menerima laporan itudan akan mengusir orang-orang yang baru datang itu. Di sebalik itu, sebenarnya Sultan sudah merencanakan dengan kekuatan di Riau, ditambah kekuatan dari Mantang, Raja Ali dan dari Kalimantan untuk melakukan serangan mendadal pada Belanda, *Pen.*).

Selanjutnya, kata E. Netscher, pada 5 Mei pukul sebelas malam, diberitakan bahwa pada jam tujuh pagi tadi telah terlihat sebuah iring-iringan perahu yang terdiri atas empat buah penjajab, satu memakai bendera berwarna hitam, satu lagi berbendera merah, dan dua lainnya memakai bendera putih. Iring-iringan itu menuju ke pantai sebelah selatan Tanjungpinang. Para pemerhati itu mengatakan bahwa yang datang itu bukanlah iring-iringan perahu bajak laut melainkan kenaikan seorang raja. Dari bangunan perahu dapat disimpulkan bukan buatan dari

¹⁵ Jamal D. Rahman, Abdul Malik, Al-Azhar, dkk., dalam *Dermaga Sastra Indonesia*, menjelaskan bahwa menyusul tewasnya Raja Haji, Belanda akhirnya menyerbu ke Riau, dan Yang Dipertuan Muda Riau V, Raja Ali merundur ke Kalimantan. Sedangkan Sultan Mahmud Syah III dengan para raja lainnya, tetap bertahan di Riau. Sampai akhirnya, pada tahun 1787 Sultan Mahmud Syah III menyerang Belanda dengan bantuan kelompok Ilanun dari Borneo (Kalimantan), dan berhasil memaksa Belanda mundur ke Melaka. Selepas itu, Sultan Mahmud segera memindahkan pusat kerajaan Riau-Lingga-Johor-dan Pahang ke Lingga, sebagai strategi menyelamatkan pusat kerajaan kalau datang lagi serangan balik dari pihak Belanda di Malaka dan Batavia. (2010:25).

daerah Melayu melainkan dari Pulau Kalimantan. Residen mendapat keterangan bahwa itulah kenaikan Raja Ali.

Setelah melihat itu, lanjut E. Tetscher, Residen menulis surat kepada Malaka pada 6 Mei untuk meminta bantuan agar dikirimkan tiga buah kapal, lima puluh pasukan infanteri, empat orang penembak meriam, dan empat busketir (pada waktu itu, sebagaimana dijelaskan oleh penulis ini sebelumnya, bahwa setelah Raja Haji kalah dan Sultan Mamud kembali ke Riau, maka Belanda menyusun kekuatan pula di Riau. Bahwa.... Kapitan Cina menyiapkan beratus-ratus orang Cina agar siaga menantikan apa yang akan terjadi).

Selanjutnya, urai Netscher pada 7 Mei datanglah ke iring-iringan perahu itu dua utusan Sultan dan seorang dari garnisun sebagai utusan Residen. Mereka disambut oleh seorang imam dan seorang panglima yang menyatakan bahwa mereka itu mewakili kepala iring-iringan tersebut yang datang dari pulau-pulau Solok (Sulu?) sebanyak 92 buah perahu atas perintah Sultan Syarif Abdul Rahman dari Pontianak untuk membantu merampas Mempawah. Kedua kepala pasukan mereka bernama Raja Alam dan Raja Uma dan keduanya berasal dari satu rumpun bangsawan Solok (Sulu?).

Keesokan harinya, jelas Netscher, Residen Ruhde dan Komandan J.C Vetter datang menghadap Sultan Mahmud dengan maksud mengirimkan sedikit perbekalan seperti beras dan buah-buahan kepada orang-orang Solok (Sulu) itu agar mereka dapat meninggalkan Riau dalam keadaan yang memadai. Sultan Mahmud membekali pula mereka dengan satu pikul beras dan barang-barang perlengkapan lainnya kepada Raja Alam dan Raja Muda yang disambut dengan rasa terimakasih yang sepantasnya.

Setelah itu, menurut laporan Netscher, pada 9 Mei, Residen semakin berjaga. Pada 10 Mei, pukul 7 malam, terdengar suara orang banyak rebut-ribut bunyinya di luar benteng sepanjang pantai. Seluruh garnizun mempersiapkan persenjataan siap menghadapi kemungkinan yang akan terjadi berhubungan dengan keadaan yang sangat gawat itu. Hal itu diberitahukan kepada Sultan (tentunya Sultan menerima dengan baik pemberitahuan itu dan pura-pura tak tahu, padahal dia sendiri berada di sebalik gerakan itu, yang Belanda sendiri memang tak mengetahuinya, *Pen.*), sementara Residen ikut melibatkan diri dalam kesiagaan yang dilakukan seluruh garnizun.

Kali berikutnya, jelas Netscher, subuh hari 13 Mei musuh menyusup ke sebelah selatan Terusan Riau melalui Penyengat dan Senggarang, tetapi dihadang oleh pencalang bernama Bangka bersama sebuah slup bernama Johanna menghala ke Batu Itam di pengkolan sebelah selatan Tanjungpinang. Pukul 7 malam komandan benteng kecil di bukit seorang Eropa dan kapitan pribumi memperhatikan bagaimana musuh memperkuat diri dengan dibantu oleh orang-orang pribumi. Tak lama kemudian musuh pun maju dari arah gunung merapat ke pinggir pencalang dan slup sehingga pertempuran tak terhindarkan lagi. Di pencalang Bangka terdapat Residen D. Ruhde, Komandan T.C. Vetter, dan beberapa opsir.

Selanjutnya, tulis Netscher, dua buah perahu musuh mendekati selat Singapura, sementara kapal Bangka terus menuju Malaka. Sementara itu, slup Johanna tetap tinggal di Riau dan tersadai di pasir ditawan oleh musuh-musuh itu (pasukan Sultan Mahmud Riayat Syah, *Pen.*). Maka, pejabat pemerintahan di Malaka berkesimpulan Raja Ali dan Sultan Mahmud telah bersekongkol melaksanakan kehendaknya itu. Menurut pertimbangan pejabat-pejabat Belanda di Malaka, Sultan Mahmud memberikan tanda setuju untuk tindakan tersebut sehingga raja itu tidak lagi mengingat bahwa untuk hal-hal semacam itu sudah diatur dalam surat perjanjian pada 1784 yang dibuat bersama Jakob Pieter van Braam. (Ghalib, 2002:354-371). Pada akhirnya kapal-kapal Belanda sebagaimana dikemukakan di atas tidak dapat berbuat banyak melawan gempuran pasukan gabungan yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Belanda sekali lagu dengan kepala tertunduk dan rasa malu atas kekalahan perang melarikan diri ke Malaka.

Dengan demikian dapat dipahami keterangan E. Netscher di atas, telah memberi kejelasan kepada kita tentang sikap, pendirian, dan taktik (siasat) Sultan Mahmud Riayat Syah dalam mengupayakan kelanjutan perlawanan kepada Belanda. Keterangan pihak Belanda sebagaimana dijelaskan di atas dapat disanding-kuatkan dengan penjelasan Raja Ahmad dan Raja Ali Haji dalam *Tuhfat al-Nafis*. Bahwa selama lebih kurang tiga tahun setelah perjanjian, maka dukacitalah Baginda Sultan Mahmud serta Raja Indera Bongsu.¹⁶ Maka jadilah dukacita itu susahnyanya seumpama api memakan sekam maka memakanlah kepada sabarnya. Maka (hilanglah

¹⁶ Shaharon Husain dalam *Sejarah Johor Kaitannya dengan Negeri Melayu*, menjelaskan bagaimana akhirnya perjanjian demi perjanjian yang dibuat oleh Belanda dengan pihak Sultan Mahmud, yang pada intinya selalu diingkari oleh Belanda sendiri dan selalu berbuat sewenang-wenang. Kekerasan yang sudah dijalankan oleh Belanda itu akhirnya telah menimbulkan balik api persengketaan di antara Sultan Mahmud Syah (Shah) III dengan Belanda hingga berbangkit berperangan di antara Sultan Mahmud Syah III dengan pihak Belanda yang ada di Riau. Perperangan itu menyebabkan orang Belanda ramai terbunuh dan yang tinggal melarikan diri balik ke Malaka (1995:48).

sabarnya itu)—Maka (dijalankannyalah perkerjaannya iaitu) menyuruhlah ia (Sultan Mahmud) satu utusan ke Tempasuk (adalah yang pergi itu namanya Encik Talib serta beberapa orang lagi sertanya) membawa surat kepada raja Tempasuk minta pertolongan (kepada raja Tempasuk itu) pada mengamuk Belanda di dalam Riau. Maka diterimalah oleh raja Tempasuk kehendak Raja Indera Bungsu serta Baginda Sultan Mahmud itu. Maka lalulah ia menyuruh anak(-anak)nya tiga orang, (dan empat dengan Raja Ismail itu, dan adalah Raja Ismail menjadi panglima besarnya. Adalah nama raja yang disuruhnya itu) pertama Raja Tebuk (namanya), kedua Raja Alam (namanya. Adalah Raja Alam membawa isterinya bernama Raja Aisyah), ketiga Raja Muda (Umak namanya, dan keempat datuk-datuknya yang bernama Datuk Sikolo, dan maka apabila selesailah mereka itu daripada mufakatnya dan musyawarahnya) maka berlayarlah mereka itu ke Riau. (Adalah /kira-kira/ kelengkapannya berangai dan penjajab kira-kira dua) tiga puluh (buah lebih kurang sedikit tiadalah dapat tentunya karena tiada tersebut di dalam siarah).

Selanjutnya *Tuhfat al-Nafis* menjelaskan, bahwa kemudian apabila sampai ia ke belakang (Riau memberitahulah ia kepada Baginda Sultan Mahmud dan kepada Raja Indera Bungsu), maka (dilepaskanlah oleh) Raja Indera Bungsu mengatakan perompak (lanun) /di Kuala Riau/ di belakang Riau. Maka (diberinya tahu kepada fetur Belanda itu. (Maka) fetur menyuruh menyiapkan belah semangkanya dan satu keci perangnya karena hendak mengeluari orang yang jahat-jahat itu. Maka di dalam hal itu lanun itu pun sudah masuk dari (pada) Terusan maka /hal itu/ (di dalam negeri Riau pun) mengisilah meriamnya hendak membedil perahu(-perahu) lanun itu maka perahu-perahu penjajab pun (yang di dalam Sungai Riau itu pun) bersedialah rupa-rupa (akan) hendak membedil. Maka lanun (pun) rapatlah ke Tanjungpinang, maka dibedil oleh penjajab-penjajab itu dengan tiada berpeluru. Maka lanun pun naiklah ke darat diamuknyalah Tanjungpinang itu. Maka dilawan oleh Belanda itu maka (amuk-amuklah). Maka banyaklah (Belanda-Belanda itu) mati lalu (ia) turun ke kecinya (mana-mana yang hidup), ada yang turun ke (se)belah semangka berlayarlah ia ke Malaka, mana(-mana) yang hidupnya. (Kata satu kaul adalah keci itu sangkut maka dikerumunkan oleh perangai-perangai itu. Maka kalahlah keci itu dan kubu di Tanjungpinang pun dapatlah dan seekor Belanda pun tiada lagi tinggal dalam negeri Riau lagi).

Selepas itu menurut penjelasan *Tuhfat al-Nafis*, maka Raja Tebuk dan Raja Alam serta lanun yang banyak pun mengadaplah (kepada) baginda (Sultan Mahmud). Maka diperjamu oleh

Baginda serta di(per)baik-baikkan hatinya (serta dipermuliakan atas sepatutnya. Maka duduklah baginda Sultan Mahmud bersama-sama raja lanun itu di dalam Riau serta Raja Indera Bungsu). Adalah berlaku pekerjaan ini pada hijrat sanat 1215. Kemudian pulanglah Raja Tabuk dan lainnya ke Tempasuk. (Matheson Hooker, 1991:430-432).

Perjuangan heroik dan strategis yang dilakukan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah bersama pasukan "Persekutuan Melayu" untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang dari kesewenang-wenangan dan gempuran Belanda, dijelaskan pula oleh penulis yang muncul jauh selepas masa Raja Ahmad, Raja Ali Haji dan E. Nethcher, antara lain Haji Buyong Adil dalam *Sejarah Johor*. Menurutnyanya Sultan Mahmud Syah III mendapat tekanan yang luar biasa dari Belanda. kepadanya dibebankan membayar utang-utang atas kerugian Belanda dalam berperangan dengan Kerajaan Riau, sehingga sampai Raja Haji tewas. Setelah itu, Sultan Mahmud diminta menjalankan roda pemerintahan kerajaan atas pengawasan Belanda. Untuk itu diperbuatlah perjanjian. Kala itu, amat berat pilihan yang mesti diambil Sultan Mahmud, yang pada intinya demi Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang, serta dalam rangka mengambil tempo untuk menyusun kembali kekuatan dalam upaya meneruskan perlawanan kepada Belanda. Maka, perjanjian lanjutanpun mau tak mau harus ditandatangani, pada 7 Februari 1787. Bahwa bersikap mengalah untuk menang! Faktanya, Sultan Mahmud dan orang besar baginda telah berduka-cita sejak telah membuat perjanjian yang baharu di Malaka itu. Sultan Mahmud dengan Raja Indera Bungsu telah menghantar utusan membawa surat kepada Raja Tempasok di Kalimantan (Borneo), meminta raja itu menghantarkan lanun-lanunnya datang melanggar Belanda di Riau.

Akhirnya lanjut Buyong Adil, dengan perintah Raja Tempasok, suatu angkatan lanun mengandongi empat puluh buah kapal layar yang besar telah berlayar menuju ke Riau. Pada 2 haribulan Mei tahun 1787, angkatan itu telah hampir ke Tanjungpinang (tempat orang Belanda di Pulau Riau). Sultan Mahmud telah berpura-pura menghantarkan orang baginda melihat angkatan yang datang itu. Pada 7 haribulan Mei 1787, baginda telah memberi tahu kepada Resident Belanda itu mengatakan ada pun kapal-kapal layar yang datang itu membawa orang-orang dari tempat yang bernama Solok dan ada membawa seorang Raja dari Kalimantan. Dalam pelayarannya mereka telah dipukul ribut kencang, dan mereka datang ke Riau karena hendak membeli beras dan membaiki kerusakan kapal mereka.

Selanjutnya jelas Buyong Adil ternyata Belanda sangat percaya kepada Sultan Mahmud. Maka angkatan lanun dari Tempasok itu telah dibenarkan masuk ke Riau; diberi beras dan lain-lain barang bekalan yang diperlukan mereka; dan mereka mengatakan kepada orang Belanda iaitu mereka semua akan balik ke Kalimantan apabila sampai angin musim. Pada 13 haribulan Mei 1787, tegas Buyong Adil dengan tiada disangka-sangka dan tidak disadari oleh orang Belanda, tiba-tiba lanun itu telah menyerang Riau, dan berlakulah pertempuran di antara mereka dengan akar-askar pihak Belanda. Orang-orang Sultan Mahmud pura-pura sama juga berperang di pihak Belanda; tetapi meriam-meriam mereka tidak berpeluru. Lanun-lanun itu terus menyerang sampai ke Kota Belanda di Tanjungpinang. Oleh sebab ramai orang Belanda mati terbunuh dalam berperangan itu, Resident Belanda di Riau itupun menyerah-kalah kepada ketua-ketua lanun itu. Resident Belanda itu telah memimta tangguh selama tiga hari lagi hendak memindahkan barang-barang dan harta benda Kompeni Holanda yang ada di Tanjungpinang itu masuk ke kapal. Tetapi ketua-ketua lanun itu hanya membenarkan sampai besok pagi sahaja mereka mesti keluar meninggalkan Riau, dan melarang orang-orang Belanda membawa meriam-meriam yang ada di situ. Pada malamnya, semua orang-orang Belanda yang ada di Riau, termasuk Residentnya itu sekali, telah meninggalkan tempat-tempat mereka, keluar meninggalkan Riau lalu balik ke Malaka dengan kekalahan; selain daripada wang Kompeni Belanda, tak ada satu barang pun yang dapat dibawa lari oleh orang-orang Belanda tatkala mereka meninggalkan Riau itu. Akhirnya, ketua lanun itu naik ke darat menghadap Sultan Mahmud. Maka baginda menjamu dan mera'ikan laun-lanun itu karena kejayaan mereka mengalahkan Belanda. Tiada lama kemudian, lanun-lanun itupun balik semula ke negeri mereka (Adil, 1971:144-146).

Penulis lainnya menjelaskan pula tentang sampai terjadilah berperangan di Teluk Riau, sekitar pantai Tanjungpinang antara Sultan Mahmud dan Belanda, adalah Rida K. Liamsi dan Mardiana Nordin. Rida K. Liamsi dalam bukunya *Tanjungpinang Kota Bestari*, menjelaskan berperangan yang terjadi pada 10 Mei 1787 sangat dahsyat, monumental dan membuktikan Sultan Mahmud adalah seorang raja yang gagah perkasa dan menguasai taktik berperang, kemampuan besar dalam mempertahankan kedaulatan negeri. Sultan Mahmud Riayat Syah mengomandoi berperangan, yang dibantu oleh Yang Dipertuan Muda V Riau Raja Ali dan pasukan bajak laut dari Tempasok, Kalimantan Barat. Benteng Belanda yang dijaga satu

garmizun berkekuatan hampir 200 orang digempur dan hancur. Residen David Ruhde dan serdadunya dipaksa menyerah dan diancam dalam tempo 3 hari harus segera kembali ke Malaka. Akhirnya dengan hanya pakaian sehelai sepinggang David Ruhde lari ke Malaka dan melaporkan kejadian itu kepada Gubernur Malaka. Pasukan Kerajaan Riau itu kemudian menghancurkan seluruh benteng-benteng dan pertahanan Belanda di Tanjungpinang, Pulau Bayan. Orang Belanda menegaskan bahwa Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dan Raja Ali yang berada di Kalimantan Barat sebagai dalang serangan tersebut. (Liamsi, 1989:13). Tegas Mardiana Nordin akhirnya Sultan Mahmud dengan bantuan Raja Tempasuk dan sekutunya, pada 1787 berhasil mengusir Belanda dari Riau. Selanjutnya Sultan Mahmud pindah tempat semayamnya di Lingga (Nordin, 2008:28-29).

Perperangan tersebut terjadi, dikatakan oleh Belanda sebagaimana dikemukakan E. Netscher karena ketidaksetiaan (pembangkangan) Sultan Mahmud terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Belanda. Katanya ketidaksetiaan Sultan itu dapat dijumpai dalam sepucuk surat yang beliau kirimkan kepada Kapten Inggris, Francis Light, di Pulau Pinang pada 10 November 1787. Surat tersebut, antara lain berbunyi, "Daripada Paduka Sultan Mahmud Riayat Syah yang duduk di atas tahta Kerajaan Johor dan Pahang dengan semua daerah takluknya Kami sangat mengharapkan sudilah hendaknya sahabat kami menyampaikan kandungan surat ini kepada Gubernur Jenderal di Bangla. Dengan perantaraan surat ini kami memberitahukan bahwa pada masa sekarang ini Kompeni Belanda berada dalam keadaan bermusuhan dengan kami." Sultan Mahmud sudah pula bersekutu dengan berbagai kekuatan, antara lain dengan Sultan Ibrahim dari Selangor dan nenendanya Sultan Mansyur Syah dari Terengganu. Surat itu ditulis pada tanggal 29 Muharram tahun 1202 Hijrah (10 November 1787 Masehi). Nyatalah perjanjian 7 Februari 1787 telah dilanggar oleh Sultan Mahmud dengan orang-orang besarnya. Mereka berusaha mengembalikan Riau sebagaimana dulunya sebagai sebuah kerajaan Melayu yang belum terkat dengan perjanjian yang banyak kali diadakan itu (Ghalib, 2002:370-378).

Sejarah telah mencatat, dalam perperangan tersebut lagi-lagi Belanda kalah dan melarikan diri ke Malaka. Kekalahan itu tentulah membuat amarah Gubernur Belanda di Malaka memuncak dan akhirnya bersepakat dengan pimpinan tertinggi Belanda di Batavia, yang antaranya segera memperkuat pasukan untuk kembali lagi menyerbu dan menguasai Riau. Kekalahan Belanda dalam perperangan dengan pihak Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang

dibawah pimpinan tertinggi Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud di Teluk Riau sekitar pantai Tanjungpinang tersebut ternyata sangat memukul dan mempermalukan pimpinan Belanda bukan hanya di Malaka tetapi juga di Batavia. Bagaimana tidak, akibat kekalahan Belanda dalam peperangan lanjutan dengan Sultan Mahmud itu membuat pasukan ada di antaranya yang terbunuh, ada kapal perang yang diledakkan oleh pasukan Sultan dan seluruh pasukan Belanda yang masih tersisa terpaksa melarikan diri ke Malaka. Adalah setelah peperangan kedua di Teluk Riau yang berhasil mengantarkan kembali kemenangan dan marwah Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang itu, maka Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah pun segera mengambil langkah-langkah besar, antara lain memperkuat kembali pasukan kerajaan dengan armada dan segala peralatan perangnya. Kebijakan besar dan nyatanya sangat monumental adalah *berhijrah*, memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dari Hulu Riau, Sungai Carang, Bintan ke Daik-Lingga.

4. Demi Kedaulatan Negeri, Berhijrah ke Lingga

Dalam tradisinya pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Riau-Lingga-Johor-Pahang memang selalu berpindah-pindah. Awal sekali bermula dari Kerajaan Bintan, yang pindah ke Temasik (Singapura), lalu ke Malaka. Dari Malaka, berlanjut kembali ke Bintan, lalu ke Kampar, terus ke Johor sehingga berlanjut ke Hulu Sungai Carang, Pulau Bintan, ke Pahang, dan lama di Ulu Sungai Carang. Akhirnya Sultan Mahmud Ri'ayat Syah memindahkan pusat kerajaan ke Daik-Lingga dan kemudian membuka Pulau Penyengat sebagai bagian pusat kemajuan dan tamadun Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang.

Selepas kemenangan peperangan “babak ketiga” lanjutan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang di bawah Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dengan Belanda di Teluk Riau, perairan Tanjungpinang pada 13 Mei 1787 membuat Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud khawatir bahwa Belanda akan melakukan serangan balasan besar-besaran terhadap pusat kerajaannya. Berkenaan dengan kekhawatiran Sultan Mahmud akan datangnya kembali serangan balas dendam dari Belanda di Melaka dan Batavia membuat Baginda mengambil langkah-langkah perlindungan, penyelamatan dan pengamanan pusat kerajaan dan kemerdekaan serta sekaligus kedaulatannya. Tentang kekhawatiran dan kerunsingan Sultan Mahmud terhadap

kemerdekaan, kedaulatan dan pusat kerajaan Melayu Riau-Lingga-Johor dan Pahang dikemukakan beberapa sumber, antara lain Rida K Liamsi. Sultan Mahmud dengan melihat situasi yang kurang menguntungkan itu, selepas memerangi Belanda sehingga kalah lalu berundur ke Malaka, dan khawatir serangan balas dari kompeni Belanda, maka Sultan Mahmud Riayat Syah akhirnya memindahkan pusat kerajaan dari Hulu Riau ke Pulau Lingga, jauh di selatan Pulau Bintan. Eksodus pertengahan tahun 1787 itu cukup besar. Sultan Mahmud berangkat dalam satu rombongan tak kurang dari 200 perahu ke Lingga. Sedangkan 150 perahu lainnya dipimpin Temenggung Abdul Jamal pindah ke Pulau Bulang (sekitar Batam) dan menetap di sana. Ditambah lagi yang pindah ke berbagai kawasan takluk Kerajaan Riau-Lingga, dan kerajaan Melayu lainnya. (Liamsi, 1989:13-14).

Sebagaimana disinggung di atas, kerajaan-kerajaan Melayu di Nusantara pada intinya mengikuti dan melaksanakan jalannya roda pemerintahan sebagai adanya kerajaan Islam di Timur Tengah (Arab) yang utamanya dicontohkan oleh sultan-sultan selepas masa kekhalifahan Islam. Dan dalam tradisi kerajaan Melayu di Nusantara memang sudah menjadi kelaziman melakukan pemindahan pusat kerajaan bilamana sudah tidak aman lagi dari ancaman musuh atau tersebut hal lainnya yang tidak menguntungkan kepentingan yang lebih besar bagi kerajaan dan rakyatnya. Maka kita percaya bahwa tindakan berhijrah atau pemindahan pusat kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang dilakukan lagi ke Lingga tentulah tak terlepas dari pemahaman Sultan Mahmud Riayat Syah atas peristiwa berhijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.¹⁷

Sultan Mahmud Riayat Syah memahami dan menyadari betul bahwa kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan di atas segala-galanya. Pada bagian lain baru saja usai berperang habis-habisan dengan Belanda. Baginda sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan tertinggi kerajaan dapat mengerti betul, bahwa kala itu kekuatan perang Kerajaan Riau belum dapat dibagun sebagaimana kekuatan ketika berperang dengan Belanda, baik di sekitar pantai Tanjungpinang—yang puncaknya 6 Januari 1784—atau perperangan lanjutan di Teluk Ketapang. Sultan Mahmud khawatir pasukan dan rakyat kerajaan akan banyak menjadi korban sehingga

¹⁷ Dalam *Ensiklopedi Islam (2)*, dijelaskan Hijrah bermakna berpindah, meninggalkan, berpaling, dan tidak memperdulikan lagi. Hijrah dalam sejarah Islam dihubungkan dengan kepindahan Nabi Muhammad SAW dari Makah ke Madinah. Dalam hubungan ini, hijrah berarti berkorban karena Allah SWT, yaitu memutuskan hubungan dengan yang paling dekat dan dicintai demi tegaknya kebenaran dengan jalan berpindah dari kampung halaman ke negeri lain. Pada akhirnya, setelah hijrah (berpindah), makan dapat sebagai babak pendahuluan bagi kebangkitan perjuangan (1994:108).

pada 1787 itu juga Baginda memutuskan untuk pindah, meninggalkan pusat pemerintahan kerajaan di Ulu Riau (Sungai Carang) ke kawasan yang lebih aman, yakni Daik-Lingga. Di tempat baru yang lebih aman itulah akan dibangun kembali kekuatan perang dan pertahanan negeri. Pada hakikatnya pemindahan pusat pemerintahan ke Lingga tersebut demi kedaulatan dan marwah negeri.

Perpindahan Yang Dipertuan Besar dengan segala pembesar kerajaan dan sekalian rakyat dari Riau ke berbagai kawasan, utamanya ke Lingga dijelaskan pula oleh Buyong Adil. Katanya, tiada lama lepas Belanda kalah di Riau itu, oleh sebab khawatir Belanda datang menyerang-balas ke Riau, Sultan Mahmud serta orang-orang Baginda dengan angkatan sebanyak 200 buah perahu, telah bertolak meninggalkan Riau pergi ke Pulau Lingga (Daik) lalu Baginda bersemayam membuat tempat pusat pemerintahan Baginda di Lingga pula. Bendahara Abdul Majid yang masa itu ada di Riau, dengan angkatannya sebanyak 150 buah perahu, telah bertolak juga meninggalkan Riau balik ke Pahang. Sejak itu ramailah orang-orang Melayu di Riau meninggalkan Riau pindah pergi ke Bulang, ke Selangor, ke Terengganu, ke Kalimantan, dan ke lain-lain pulau di Kepulauan Riau. Riau yang selama ini ramai didiami oleh orang-orang Melayu dan Bugis itu telah hampir tidak didiami oleh bumiputeranya. Kebanyakan yang tinggal ialah pekerja China yang bekerja di kebun-kebun dan ladang-ladang gambir dan lada hitam di pulau itu, dan di antara ladang-ladang itu banyak pula yang telah ditinggalkan oleh tuannya orang-orang Melayu dan Bugis lalu diambil oleh orang-orang China. Sejak itu semakin ramailah orang China datang dan diam di Riau (Adil, 1971:147).

Sebagaimana dijelaskan di atas, pada intinya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara menyesuaikan pemerintahannya dengan pemerintahan Islam sebagaimana zaman Nabi Muhammad s.a.w. dan pemerintahan khalifah, yang kemudian berubah dengan kesultanan. Oleh karena itu, apabila terjadi pemindahan pusat pemerintahan sebagai hal yang sudah lazim dan tentunya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Pada intinya, untuk menghindari musuh dan untuk mencapai kemajuan dan kejayaan yang lebih di tempat yang baru. Bukankah hijrahnya Nabi Muhammad dari Makah ke Madinah dilatarbelakangi oleh peperangan, tidak amannya Makah dan adanya harapan baru di Madinah. Sultan Mahmud Riayat Syah sebagai seorang muslim yang taat, dan memang sebagai Sultan Kerajaan Islam, sudah pastilah mengambil jalan

atau langkah memindahkan pusat kerajaan ke kawasan baru, mengikuti langkah Nabi Muhammad yang melakukan hijrah.¹⁸

Sultan Mahmud mempunyai keyakinan bahwa di tempat yang baru akan lebih aman dan dapat menyusun kekuatan untuk suatu ketika, bila berhadapan dengan Belanda, maka sudah mempunyai kekuatan dan angkatan perang yang kuat dan besar. Hal lain adalah untuk semakin memajukan kehidupan sosial budaya dan ekonomi, yang berujung kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kata Shaharom Husain, setelah tamat berperangan dengan Belanda dan dengan persetujuan para pembesarnya, maka Sultan Mahmud Ri'ayat Syah berpindah bersemayam di Lingga. Baginda merasa bimbang kalau lama di Riau tentu Belanda akan mengulangi lagi menyerang negeri itu. Padahal, Riau pada masa itu tak lagi mempunyai kekuatan penuh untuk menahan serangan musuhnya. Maka dengan sebab itu Riau telah kembali sunyi dibiarkan oleh pemerintahnya Sultan Mahmud Syah III dan para pembesarnya. (Husain, 1995:48).

Pertimbangan lain Sultan Mahmud sehingga berpindah ke Lingga tersebut niscayalah dipandang dari posisinya yang strategis dan tak mudah dijangkau atau dimasuki oleh Belanda. Untuk mencapai Lingga, mesti melalui beberapa selat, yang di sebagian laut-pantainya terdapat karang penghalang. Diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang seluk-beluk laut, selat, dan pantai Lingga barulah dapat masuk ke kawasan tersebut. Teluk, suak, tanjung, dan pulau-pulau yang terdapat di sekitar Lingga dipandang akan menjadi benteng alami bagi penghalang musuh. Pertimbangan lain, menurut Tengku Ahmad Abubakar dan Hasan Junus, Lingga memang sudah ada orang dan sudah ada pemerintahnya, yakni Megat yang bernama Datok Megat Kuning anak dari Datuk Merah Mata yang berasal dari Kota Kandis, Pangkalan Lama (Jambi). Selanjutnya oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, Datok Megat Kuning diberi gelar Orang Kaya Temenggung dan berkedudukan di Pulau Mepar, sebuah pulau yang terletak di

¹⁸Hijrah, Nabi Muhammad, sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab dalam *"Membumi" Al-Quran*, bahwa bermula ketika Nabi Saw. dan sahabat-sahabat beliau—di Makkah—kaum Muslimin berada pada posisi yang sangat lemah dan teraniaya. Namun, keyakinan mereka akan datangnya kemenangan tidak pernah sirna. Hal ini disebabkan oleh tebalnya iman mereka kepada Allah Yang Mahakuasa. Beliau dan sahabat-sahabat berhijrah, motivasi utama mereka adalah guna memperoleh ridha Allah SWT, yang diyakini Mahakuasa lagi Mahabijaksana. Melalui hijrah, Rasulullah Saw. Ingin mengajarkan bahwa untuk mencapai suatu usaha besar, dibutuhkan pengorbanan maksimal dari setiap orang. Beliau bermaksud berhijrah dengan segala daya yang dimilikinya, tenaga, pikiran dan materi, bahkan dengan jiwa dan raga beliau. Allah bersama mereka. Apapun yang terjadi, maka itu adalah pilihan-Nya, sehingga ketika itu tiada lagi alasan untuk takut, gentar atau bersedih (1994:348-349).

depan Tanjung Buton, Daik-Lingga. Pertimbangan lain, terkait dengan “tuah” arti-makna Lingga itu sendiri. Pendapat tentang asal nama Lingga, menurut sumber sejarah dari negeri Cina seperti yang dikumpulkan oleh seorang ahli sejarah dalam buku *Historical Notes on Indonesia and Malaya*, nama Lingga itu berasal dari kata *ling* yang berarti ‘naga, dan kata *ge* yang artinya ‘gigi’. Mungkin karena Gunung Daik kelihatan seperti gigi naga. (Abubakar & Junus, 1972:14). Dengan nama itu, diharapkan akan memberi kemajuan dan kejayaan bagi Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang.

Kekhawatiran Sultan Mahmud bahwa Belanda akan menyerang kembali pusat pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang di Riau tentu bukan tanpa alasan. Hal yang dikhawatirkan tersebut ternyata benar adanya, memang terjadi. Kekalahan Belanda dan terusir dari Riau pada 1787 tersebut sungguh membuat pihak Belanda di Malaka dan Batavia tak dapat menerimanya. Rasa malu bagi mereka telah menimbulkan api dendam dan kemarahan memuncak. Mereka segera memperkuat pasukan dan kembali lagi menyerang Riau. Bagi Belanda, tiada kata dan tekat lain selain Sultan Mahmud Ri’ayat Syah harus bertanggung jawab dan pada akhirnya mesti kalah, lalu tunduk kepada Belanda. Pemerintah Belanda di Batavia dan Malaka telah menugaskan pasukannya untuk menghukum (mungkin maksudnya: membunuh) Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri’ayat Syah! Dalam hal ini dikemukakan Rida K Liamsi, Belanda sangat marah atas tindakan penyerangan Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang dibawah penanggungjawab Sultan Mahmud Ri’ayat Syah. Maka pada bulan Agustus 1787, Belanda kembali mengirim satu eskader dipimpin Jacob Pieter van Bram, **dengan tugas menghukum Sultan Mahmud** dan membangun kembali benteng Tanjungpinang yang hancur. Ketika tiba di Tanjungpinang, Sultan Mahmud sudah tidak ada lagi, dan sudah berada di Lingga. Maka, Jacob Pieter van Bram tidak lagi dapat melaksanakan perintah pihak Belanda, yakni menghukum Sultan Mahmud (Liamsi, 1989:13-14).

Tentang penyerbuan kembali Belanda kepada Kerajaan Riau tersebut, dalam catatan paling awal antara lain dalam *Tuhfat al-Nafis*. Menurut *Tuhfat al-Nafis*, maka gubernur pun bersiap serta memberi tahu ((piter)) Jakub Pemberam). Maka ((Piter)) Jakub Pemberam pun pergilah ke Riau dengan beberapa kapal perang(nya). Maka apabila ia ke Riau maka didapat/i/nya segala orang-orang Melayu (dan peranakan /Bugis/ yang tinggal di dalam Riau) sudah(lah) habis semuanya, hanyalah (yang) tinggal Cina-Cina sahaja (lagi). Maka (ia pun) tiada

terkata-kata lagi, maka diperiksanya kepada Cina-Cina (katanya), “Kemana pergi orang-orang Melayu dan peranakan?” Maka jawab Cina-Cina itu, “Sudah berpecah-pecah ke sana ke mari (tuan). Ada yang ke Lingga, ada yang ke Pahang (ada yang ke Terengganu. Maka, setelah mendengar penjelasan orang-orang Cina itu, maka Piter Jakub pun baliklah ke Malaka ditinggalkannya satu fetur serta satu kapal (perang serta dengan beberapa jaga-jaga) bersama-sama. ((Maka)) diperbuatnyalah loji di Tanjungpinang (itu). (Matheson Hoker, 1991:433-434).

Di Lingga Sultan Mahmud pun membangun pusat kerajaan dan kekuatan pertahanan perang. Menurut Sindu Galba dkk.Sultan Mahmud sudah membangun pula istana, pasar, masjid, dan benteng kota berupa parit yang mengelilingi kota. (Galba, dkk., 2001:17). Kubu-kubu dan benteng pertahanan pun dibangun dan diperkuat dengan senjata meriam. Kubu-kubu dan benteng tersebut antara lain di Bukit Cening, Tanjung Buton, dan Pulau Mepar.

5. Menyatukan Kerajaan Melayu dan Menguasai Selat Malaka

Api perjuangan dalam jiwa Sultan Mahmud Ri’ayat Syah sungguh tiada pernah mengecil dan semakin menyala-nyala. Meskipun telah menjadi Raja atau Yang Dipertuan Besar/ Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang serta daerah takluknya yang begitu besar dan luas, Baginda masih merasa perlu untuk lebih meluaskan lagi pengaruhnya. Hal itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan dalam rangka kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan negeri-negeri Melayu di Nusantara. Sebab apa? Kolonial Belanda di Malaka dan Batavia semakin memperkuat kedudukannya dan semakin berambisi pula untuk menaklukkan beberapa negeri Melayu, utamanya Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Dalam pada itu, Inggris sudah pula datang, yang nyatanya dengan maksud yang sama, menjajah. Menyadari hal itu Sultan Mahmud tak tinggal diam. Dari pusat kerajaannya yang baru, Lingga beliau menyusun rencana dan strategi untuk kembali berhadapan dengan Belanda.

Untuk itu, sejalan dengan pembangunan kembali kekuatan dan kemakmuran Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, yang pusatnya di Lingga itu, Sultan Mahmud pun semakin menunjukkan penolakannya terhadap perdamaian yang ditawarkan lagi oleh Belanda. Dalam pikiran Sultan Mahmud, untuk dengan Belanda tak ada kata perdamaian dan apalagi takluk. Beberapa perjanjian yang pernah dibuat oleh raja-raja Melayu tak sedikit pun mempengaruhinya

untuk menentang dan menolak apa-apa yang menjadi kehendak Belanda. Sekali lagi, meskipun perjanjian dibuat beberapa kali, hal itu tak penting karena tak pernah mengikatnya dan tak terlaksana. Bahkan, semangat Baginda semakin memuncak untuk segera mengusir Belanda dari Malaka. Dalam rangka itu Sultan Mahmud sudah merencanakan untuk membentuk persekutuan dengan beberapa kerajaan Melayu di Nusantara. Persekutuan itu, malah juga akan menyerang Inggris yang sudah menduduki sebuah kerajaan Melayu di Pulau Penang.

Guna memuluskan rencana besarnya itu, dalam waktu sesingkatnya harus segera terbentuk Persekutuan Negeri-Negeri Kerajaan Melayu Nusantara. Maka Baginda kemudian pergi ke kawasan-kawasan takluknya dan negeri-negeri Melayu lainnya membangkitkan semangat perlawanan terhadap Belanda dan menjalin persekutuan dalam rangka menyerang Belanda di Tanjungpinang dan Malaka. Sejalan itu semakin memperkuat sektor perdagangan dan ekonomi untuk kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat setiap kerajaan. Hal itu benar-benar diakui dan menakutkan Belanda. Sebagaimana catatan laporan pihak Belanda yang dibuat E. Netscher, pada 20 Juni 1790 Sultan Mahmud Ri'ayat Syah telah melancarkan rencananya membentuk Perkumpulan Melayu dari kerajaan-kerajaan Melayu. Perkumpulan Melayu itu terdiri atas Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dengan Terengganu, Rembau, dan Siak. Angkatan perang disiapkan. Perahu-perahu dari Sulu, Terengganu, Lingga, Johor, Indragiri, Kota Karang, dan Siantan yang terdiri atas 40 buah perahu menuju Perak dan Siantan, 30 di utara Pulau Pinang, 30 buah dari Sultan Muhammad (Ali) Siak, dan 60 disiapkan di Siak. Jumlahnya 180 perahu. Semuanya berjumlah 400 buah perahu kalau dihitungkan seluruhnya yaitu perahu besar dan kecil yang juga dilengkapi dengan senjata ringan. Dalam persekutuan Melayu ini juga termasuk Raja Kerajaan Kedah yaitu Sultan Abdullah. (Ghalib, 2002:376-377).

Persekutuan Melayu yang dibentuk oleh Sultan Mahmud itu tak hanya hendak menyerang Belanda, tetapi juga Inggris di Pulau Pinang. Menurut Daud Kadir dkk. Sultan Mahmud membentuk persekutuan tersebut dengan tujuan untuk mengusir Belanda dan Inggris dari perairan Melayu. Persekutuan ini sempat melancarkan beberapa kali penyerangan di Pulau Pinang. Selain itu orang-orang Melayu yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah tetap mengadakan gangguan terhadap kapal Belanda dan Inggris di perairan Selat Malaka sampai

1795. Belanda tak berhasil menaklukkan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah.¹⁹ Oleh sebab itu Belanda merasa dalam kecemasan dan terancam sehingga mereka segera pula mengambil kebijakan. Akhirnya Belanda merasa perlu mengembalikan kedudukan Sultan Mahmud ke Tanjungpinang. Terjadilah perdamaian Kompeni Belanda dengan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah pada 1795, yang berisi, antara lain kekuasaan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dipulihkan semula di Tanjungpinang. Sultan Mahmud Ri'ayat Syah harus membayar ganti rugi kepada Kompeni Belanda sebesar 60.000 real. Namun akhirnya Belanda kalah dari Inggris dan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dapat menjalankan roda pemerintahan kerajaan sebagaimana patutnya (Kadir, dkk., 2007:152-153) tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Dengan demikian, perjanjian beberapa kali yang pernah dibuat raja-raja Riau—tak langsung oleh Sultan Mahmud—dengan Belanda tak pernah satu pasal pun terlaksana. Sebaliknya, kedaulatan dan marwah Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang tetap tegak. Selang beberapa tahun kemudian, sebagaimana dijelaskan Mardiana Nordintepatnya pada 1795 British telah mengambil alih Malaka dan Johor, termasuk jajahannya dari tangan Belanda dan British telah bertindak mengiktiraf Sultan Mahmud sebagai raja bagi Kerajaan Johor. Keadaan kembali berubah apabila 1801, orang Bugis kembali ke Johor dan British tidak memberi sebarang halangan. Raja Ali juga mengisi semula jawatan YDM. Tak beberapa lama kemudian, Raja Ali jatuh sakit lalu meninggal dunia pada 1806 di Pulau Bayan. Beliau digantikan oleh putra Raja Haji yaitu Raja Jaafar sebagai YDM VI pada 1806. (Nordin, 2008:30).

Sebagai Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah pun semakin meningkatkan berbagai ikhtiar untuk membangun Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang serta daerah-daerah takluknya. Maka Lingga pun semakin maju. Seiring dengan itu, jelas Shaharom Husain, setelah Malaka berpindah tangan kepada pihak Inggeris, kuasa dan pengaruh Belanda di Malaka dan di Selat Malaka termasuk Kepulauan Riau boleh dikatakan berangsur-angsur luput. Masa itulah

¹⁹ Gerakan atau tindakan pengacauan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Riayat Syah terhadap lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia di Selat Malaka, telah membuat Belanda dan Inggris tidak berdaya. Seiring perputaran waktu, gangguan itu, telah membuat Belanda kehilangan kemampuannya untuk menguasai selat Malaka yang penting dan strategis bagi jalur pelayaran dan perdagangan dunia itu. Kekampuan angkatan perangnya semakin melemah dan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyerang Sultan Mahmud. Akibatnya bukan hanya tidak dapat lagi memanfaatkan Selat Malaka untuk lalu lintas pelayaran dan perdagangan, melainkan telah berdampak langsung kepada kemajuan kota Malaka yang menjadi pusat pemerintahan Belanda setelah Batavia. Dan akhirnya Malaka mendekati kelumpuhan atau keterpurukannya. Belanda semakin lemah di sana. Sultan Mahmud semakin mengukuhkan kekuatannya menguasai Selat Malaka. Dan akhirnya Belanda terpaksa angkat kaki dari Malaka.

Riau yang dikuasai Belanda telah dipulangkan kuasanya oleh orang Inggeris kepada rajanya Sultan Mahmud Syah III. Tidak lama kemudian pihak yang berkuasa Belanda di Betawi telah menghantar utusannya untuk menyerahkan kuasa pemerintahan Riau kepada Sultan Mahmud Syah III dengan tidak membuat sebarang perjanjian. Sultan Mahmud Syah III menerima dengan sukacitanya. Baginda kekal bersemayam di Lingga. Dari sehari ke sehari makin bertambah ramai pusat pemerintahan Kerajaan Johor dan jajahannya (Husain, 1995:49).

6. Membuka Pertambangan Timah dan Memakmurkan Negeri

Raja Haji ditabalkan (dilantik) menjadi Yang Dipertuan Muda IV Riau pada 1777, ketika usianya menginjak 52 tahun. Kala itu Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah telah berusia sekitar 17 tahun dalam masa 16 tahun kesultanannya. Raja Haji membantu Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah—yang tak lain tak bukan adalah anak saudaranya sendiri—di dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan dan pembangunan. Raja Haji yang sudah mempunyai pengalaman dan kemampuan selaku Kelana, baik dalam pekerjaan pemerintahan, diplomatik dengan berbagai kerajaan, perdagangan maupun berperang dengan pihak Belanda, tak mau menyalahkan jabatan dan kedudukannya sebagai Yang Dipertuan Muda di dalam membantu Yang Dipertuan Besar untuk memajukan dan memakmurkan kerajaan (negeri).

Kemajuan dalam berbagai bidang, kedamaian, dan kemakmuran Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang tahap pertama tatkala Kerajaan berpusat di Ulu Sungai Carang, Bintan. Kemajuan dan kemakmuran telah dimulai ketika Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Ketika Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dibantu oleh Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Haji, dalam menerajui pemerintahan, kerajaan telah semakin menampakkan dan mewujudkan kemajuan dan kemakmuran. Hal itu dijelaskan panjang lebar dalam *Tuhfat an-Nafis*. Pada seketika itu makin ramai (dan bertambah ramainya negeri) Riau, serta (dengan) makmurnya serta (dengan) orang-orang (yang di dalam) Riau (itu banyaklah yang) kaya-kaya, (seperti Syed Husain Aidid adalah dia diam di Sungai Timun cukup dengan gedungnya serta dengan perahu-perahu tiang sambungnya pulang pergi ke tanah Jawa berniaga, dan beberapa pula saudagar-saudagar Cina dan Bugis dan beberapa kapal dan keci dan wangkang kepala

merah dan kepala hijau, berpuluh-puluh buah //demikian lagi kapal dan keci demikian juga banyaknya// yang berlabuh di dalam negeri Riau (dan pulang pergi berniaga di dalam negeri Riau itu) apalagi perahu-perahu Bugis dan (perahu-perahu) Jawa dan toh Siam beratus-ratuslah yang berlabuh di dalam negeri Riau itu, istimewa pula perahu-perahu rantau (jangan dikata lagi) bercucuk ikanlah daripada kuala hingga sampai ke kampung Cina). Syahdan (maka) baginda Yang Dipertuan Besar serta Yang Dipertuan Muda (serta raja-raja Bugis dan Melayu) pun banyaklah mendapat hasil-hasil dan cukai-cukai (dan antara-antaranya Cina wangkang itu dan toh Siam seperti segala mangkuk pinggan dan piring yang halus-halus dan yang kasar-kasar beberapa gedung. Apalagi seperti kain perbuatan Cina seperti diwangga dan kimka dan belakang parang dan satin berates-ratus gulung dapatnya di dalam setahun angin.

Selanjutnya menurut *Tuhfat al-Nafis* tersebut, segala tuan-tuan syed pun banyaklah datang dari tanah Arab apalagi lebai Jawa hingga penuh tumpatlah di rumah wakaf dan masjid dan segenap surau orang besar-besar itu dan orang kaya-kaya itu. Apalagi malam Jumat berkumpullah ke dalam semuanya maulud nabi. Maka selesai daripada maulud memberi sedekah, ada yang kena jekketun, ada yang dapat ringgit, ada yang dapat rupiah. Dan lainnya daripada malam Jumat itu beberapa pula permainan yang bermain seperti joget dan wayang. Dan beberapa pula penjajab perang yang sudah sedia di pelabuhan serta cukup (dengan) ubat pelurunya serta (dengan) panglima-panglimanya (dua) tiga puluh turun (dua) tiga puluh naik ke darat. (Adapun segala meriamnya pun digantunglah apabila datang sesuatu hajat baginya maka didekatkannya meriamnya. Dan Yang Dipertuan Muda pun selalulah bermain-main dan berkayuh-kayuh serta bergonggong dan biduan bersama-sama, iaitu ke pulau Bayan ((dan)) ke Terkulai dan bersiram ke Senggarang dan lainnya adanya). (Matheson Hooker, 1991:388-389).

Menurut keterangan Hasan Junus baik sumber setempat maupun sumber asing sama-sama sependapat bahwa pada masa (Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah, *Pen.*) dan Raja Haji sebagai Yang Dipertuan Muda, kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang berkembang dengan kemakmuran yang melimpah. Di pusat pemerintahan dan sekitarnya saja terdapat sebesar 90.000 jiwa, dan terdiri atas banyak sekali pedagang. Semua itu ditopang oleh perkembangan spiritual disaksikan oleh banyaknya rumah ibadat dan rumah wakaf serta ramainya para ulama dan mubaligh dengan kegiatan agama yang intensif. Perlu diingat akan peranan para ulama dan mubaligh sebagai penjaga dan pendorong semangat beragama, termasuk tentang *jihad* dalam arti

sempit dan luas. Dari usaha mereka inilah munculnya suatu mata-rantai dalam sejarah menentang kolonialisme di Indonesia. (Junus, 2000:29).

Kemajuan, kemakmuran, dan kejayaan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang ketika dipimpin Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dan disokong oleh Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Haji bermula dan terjadi tatkala pusat kerajaan di Ulu Riau, Sungai Carang, Bintan pada 1761-1787 (selama 26 tahun). Hasan Junus dalam *Karena Emas di Bunga Lautan* menyebutkan bahwa masa itu merupakan puncak ketenaran dan kemakmuran Riau. Sandaran ekonominya segera diperhitungkan oleh para pengelolanya. Benih gambir yang dibawa dari pesisir Pulau Sumatera pada masa Yang Dipertuan Muda II Riau Daeng Celak, ayahanda Raja Haji, merupakan benih perekonomian Riau yang hasilnya berlipat ganda. Gambir menjadi hasil perdagangan Riau yang terpenting. Meski demikian tentulah kerajaan itu tak menggantungkan perekonomiannya semata-mata dari gambir saja. Cukai bandar perdagangan yang sering menjadi pemasukan terbesar kerajaan-kerajaan di nusantara berlaku pula di Riau. Dari segala macam jenis alat pengangkutan laut yang berkumpul di pelabuhan dapatlah diketahui berapa ramainya perdagangan di situ. Dan kalaulah istana dapat menjadi ukuran kemakmuran negeri, memang tepatlah Riau sebuah negeri yang makmur. Kemudian, harga beraslah yang selalu dijadikan ukuran kemakmuran Riau. Di Riau beras murah. Di Riau beras didatangkan dari Jawa dan Bali. Tak jauh dari gambaran kemakmuran itu kelihatan pula penjajab perang siaga di pelabuhan. (Junus, 2002:22).

Menurut Rustam S. Abrus, dkk. mengikut penjelasan Buyong Adil (1971), Kerajaan Riau menjadi pusat perdagangan atau pelabuhan transit antara Timur dan Barat. Hal ini disebabkan sangat strategisnya letak Riau dalam jalur perdagangan itu, juga sebagai akibat dari berkembangnya arus perdagangan ke Riau pada masa itu. Pedagang-pedagang India, Sri Langka, Arab, dan negara Barat: Belanda, Inggris, Perancis, dan Portugis telah bertarung memperebutkan Riau. Inggris berusaha mendekati Kerajaan Riau (Sultan Mahmud dan Raja Haji) agar dapat secara bersama-sama menghadapi Belanda. Sementara itu, terjadilah peristiwa perampasan kapal Inggris yang berlabuh di Pulau Bayan Riau oleh Belanda. Kapal Inggris yang bermuatan barang berharga itu adalah kapal Betsy (1782). Gubernur Belanda di Malaka menugasi kapal Perancis dengan nakhoda Marthuin Barbaron untuk merampas kapal Betsy tersebut. Peristiwa tersebut memberikan dampak langsung terhadap pecahnya Perang Riau (1782—1784), antara Belanda

dan Kerajaan Riau dibawah Pemerintahan Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dan Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Haji. (Abrus, 1998:22).

Setelah di Riau (Hulu Sungai Carang, Bintan), Sultan Mahmud Ri'ayat Syah membangun pusat kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang di Lingga sejak 1787—1812. Ikhtiarnya untuk terus menjayakan dan memakmurkan kerajaan dengan segenap rakyatnya, dengan pusat pemerintahan baru tersebut, berlangsung selama 25 tahun. Menurut M. Amin Yacob dalam *Sejarah Kerajaan Lingga (Johor-Pahang-Riau-Lingga)*, sejak 1787 itu ramailah rakyat mendirikan perkampungan. Berbagai kaum ingin berhampiran tinggal mengabdikan kepada Sultan Mahmud. Suku Bugis yang datang dari Sulawesi dan yang sudah membaaur beranak pinak menamakan kampungnya Pangkalan Rokam dan Kampung Bugis. Yang dari Pulau Bangka membuat perkampungan, yakni Kampung Merawang, Mentok, Sepincan, dan Kampung Pahang. Orang Cina berkampung di Jalan Kota Parit, Sungai Daik, yang menjadi jalur lalu lintas laut Kuala Daik sampai ke Kampung Lingga yang melewati Kampung Pahang. Di masa itu untuk kehidupan rakyat di Lingga didatangkanlah bibit sagu dari Maluku-Ambon. Juga ditemukan timah²⁰ di Dabo Singkep. Dan, pengambilan timah menggunakan cangkul, yang daerah awal penemuan dan memulai penggaliannya di Pasir Kuning, Dabo. Hasil penggalian timah sangat memuaskan setelah Sultan Mahmud memerintah untuk sebagian besar dikelola oleh orang Cina Keh yang membuat perlombongan di bawah tanah. (Yakob, 2004:14-15).

Sejalan dengan pendapat di atas, dikemukakan pula oleh Sidnu Galba, dkk. bahwa semasa di Lingga itu, Yang Dipertuan Besar Riau-Lingga-Johor-Pahang sudah pula membangun istana, pasar, masjid, dan benteng kota berupa parit yang mengelilingi kota. (Galba, 2001:17). Selain itu menurut Shahrarom Husain pada masa sultan ini memerintah Riau, Johor, Pahang, dan Lingga, negeri-negeri itu boleh dikatakan aman sentosa. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dalam bukunya *Hikayat Abdullah*²¹ telah menyebutkan bahwa pada masa Sultan Mahmud Riayat Syah memerintah sebagai Yang Dipertuan Besar, seluruh kawasannya, khususnya Muar, Batu Pahat, dan Kesang kesemuanya ramai penduduk dan kaya dengan hasilnya. Di pusat-pusat kota

²⁰Sultan Mahmud adalah putra bangsa pertama yang berupaya untuk memanfaatkan hasil tambang berupa timah. Kata Haji Buyong Adil, di samping telah sukses membangun Lingga, juga membangun Pulau Penyengat. Meski penyengat dibangun dengan indahnya, tetapi Sultan Mahmud tetap juga bersemayam di Lingga dan memajukan perusahaan bijih timah di Pulau Singkep (Adil, 1971:154).

²¹ Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dikatakan Amin Sweeney dalam *Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi* dikatakan hidup dalam tahun 1796-1854. (2008:25).

banyak pedagang keluar-masuk. Berpuluh-puluh kati dan koyan pinang kotai dibawa keluar negeri seperti India dan Bengla. Barang dagangan lainnya adalah kemenyan, rotan, dan berbagai jenis buah-buahan. (Husain, 1995:53).

Berkenaan dengan penambangan timah di kawasan Lingga tersebut, dijelaskan *Tuhfat al-Nafis* bahwa alkisah maka tersebut(lah) perkataan Baginda Sultan Mahmud di dalam negeri Pahang, maka Baginda (Sultan Mahmud) pun berangkatlah balik ke negeri Lingga. Maka apabila sampai ke (negeri) Lingga tetaplah ia di dalam Lingga serta orang-orang Melayu dan peranakan Bugis sehari-hari jua memikirkan pencarian (segala) orang-orangnya (sama ada sebelah suku-suku Melayu atau sebelah Bugis). Maka dengan takdir Allah Taala maka terbukalah ((tanah)) Singkep, maka Baginda (Sultan Mahmud) pun menyuruhlah orang-orang Melayu dan peranakan Bugis mengerjakan timah-timah di situ serta (diaturkannya) masing-masing (dan masing-masing) bagian (dan) datanglah kapal-kapal Inggris ke situ meninggalkan beberapa wang cengkeram(nya) timah pulang pergi. Maka dapatlah sedikit-sedikit rezeki dan kehidupan orang-orangnya. Dan perahu-perahu dari (negeri) timur(-timur) pun datang (juga) membawa beras ke Lingga (dan besar-beras dari rantau-rantau pun datang juga), dan wangkang-wangkang (dari) Cina pun datang juga. Maka di dalam hal itu perompak-perompak banyak juga karena Baginda (Sultan Mahmud) belum (tetap lagi) berdamai dengan Kompeni Belanda, dan Kempeni Inggeris pun selalu juga membawa(kan) obat bedil dan peluru meriam senapang/dan/ berpalu dengan (dagangan) timah-timah dan lainnya. Maka besarlah perompak /pada/ seketika itu. Adalah kepalanya /perompak itu/ Panglima Raman namanya, hingga merompaklah ia ke tanah Bangka dan (orang) Jawa ditawannya dibawanya ke Lingga dijadikannya isi negeri Lingga. Lama-lama sukalah orang-orang Bangka itu diam di Lingga membuat kebun dan dusun tiadalah ia mau balik ke Bangka lagi. Terkadang datang sanak saudaranya dari Bangka dengan suka hatinya sendiri (tiadalah dengan rompak) memperhambakan dirinya di bawah pemerintah Baginda Sultan Mahmud.(Maka) jadilah ramai ((di dalam)) negeri Lingga itu. Kala itu pula, Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar²², putera daripada Raja Haji. (Matheson Hooker, 1991:447-448).

Penambangan timah semakin memberikan hasil yang jelas pada masa Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Penjelasan ini dapat diikuti dan dipahami dari tulisan Sutedjo Sujitno dalam bukunya *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia*, yang menerangkan

²² Raja Jaafar dilantik oleh Sultan Mahmud Syah III menjadi Yang Dipertuan Muda Riau VI menggantikan Yang Dipertuan Muda Riau V, Raja Ali, yang meninggal karena sakit, dalam tahun 1806.

bahwa Ir. Hovec yang melakukan penelitian timah di Kepulauan Riau pada 1863 berpendapat, “Penggalian timah untuk pertama kali dilakukan oleh orang-orang pribumi di Pulau Singkep telah terjadi sejak dahulu kala, dan *adalah lebih tua umurnya daripada di Bangka.....*”. Atas dasar pendapat tersebut, penambangan timah di Singkep telah dilakukan sebelum 1709. Pada 10 November 1784 ditandatangani perjanjian (perjanjian dimaksud, nyatanya tak terlaksana sebagaimana isi perjanjian karena Sultan Mahmud Ri’ayat Syah selalu mengingkarinya, yang sebabnya demi kedaulatan kerajaan, *Pen.*) antara Sultan Negeri Johor, Pahang, Riau, dan Lingga dengan Belanda yang berisi penguasaan atas timah dan beberapa komoditas lainnya. Ini memberi indikasi bahwa timah sudah dihasilkan dari Pulau Singkep atau setidaknya dari kawasan Kepulauan Riau (Kerajaan Riau-Johor-Lingga-Pahang). Pada 1788, Sultan Mahmud Ri’ayat Syah memindahkan pusat pemerintahannya ke Pulau Lingga dan mengutip pajak penjualan timah. Pada 1792 keluarga Abang Tawi, bangsawan Mentok (Bangka) yang berpindah ke Singkep, diterima oleh Sultan Lingga dan diberi hak untuk menambang timah di pulau itu. Pada 1812 Sultan mulai mengusahakan timah di Sungai Buluh, yang dilengkapi dengan kincir air untuk memompa kolong. Tak kurang dari 70 orang Cina bekerja di tambang Sungai Buluh itu dan selanjutnya mewajibkan para penambang untuk menjual hasil timah kepadanya yang akan dibayar dengan harga tetap. (Sujitno, 2007:18).

Dengan demikian, menjadi teranglah bahwa kemajuan bidang ekonomi dan perdagangan bagi kemakmuran negeri dan rakyat Kerajaan Riau-Johor-Lingga-Pahang telah didukung pula oleh adanya pertambang timah. Alhasil Riau menjadi pusat perdagangan dunia, setelah Malaka. Kejayaan kerajaan dan kemakmuran rakyat wujud menjadi kenyataan. Karena itu pulalah kegiatan atau aktivitas kebudayaan dapat dimulai dan digesa, antara lain, dengan mengaktifkan kegiatan tulis-menulis dan penerbitan. Dari sanalah akhirnya dalam perjalanan kerajaan besar di Asia Tenggara ini, dikenal penulis-penulis yang handal dan tersohor, yang antara lain dimulai oleh Raja Ahmad bin Raja Haji, yang kemudian berlanjut kepada Raja Ali Haji bin Raja Ahmad bin Raja Haji, Haji Ibrahim Orang Kaya Muda Riau, dan nama-nama lainnya. Untuk mengembangkan kegiatan intelektual itu, didirikanlah penerbit dan percekatan di Lingga.

7. Penyengat sebagai Emas Kawin dan Tempat Pengembangan Tamadun Melayu

Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah adalah *tokoh perbauran*. Baginda telah berhasil menjadi Yang Dipertuan Besar Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang selama 51 tahun (1761—1812). Semasa pemerintahannya semakin dikukuhkan persaudaraan antara suku Melayu dan Bugis serta berbagai suku (puak) lainnya di dalam kerajaan. Suku Melayu, Bugis, China, Jawa, bahkan para lanun dapat disatukannya dalam ikatan suatu bangsa dan persaudaraan di dalam bingkai kerajaan. Mempertautkan suku-suku bangsa tersebut antara lain dilakukannya melalui jalan pernikahan. Terkait uraian di atas, dapat dipahami pula pendapat Rida K. Liamsi, dalam *Bulang Cahaya* (2007), adalah antara Melayu dan Bugis melakukan pernikahan. Tengku Buntat anaknya Tengku Muda Muhammad yang sudah saling mencintai dengan Raja Ja'afar, akhirnya oleh Sultan Mahmud dinikahkan dengan Tengku Husin atau Tengku Long, anaknya sendiri. Sedangkan Sultan Mahmud Syah III sendiri, juga menikah pula dengan Engku Puteri Raja Hamidah, puteri daripada Raja Haji Fisabilillah, dengan maskawinnya ditambah Pulau Penyengat. Sebelum itu, Raja Ja'afar telah diangkat oleh Sultan Mahmud Syah III menjadi wakil Sekretaris Kerajaan.

Sultan Mahmud menyadari dan memperhitungkan betul bahwa persatuan dan kesatuan mesti tetap dan terus dijaga dan dipupuk sehingga tetap kukuh dan tiada akan tercerai-berai. Baginda memahami dengan sebaiknya tentang begitu luasnya wilayah kerajaan dan ditambah lagi dengan beberapa kawasan sebagai daerah takluknya. Untuk menjaga keutuhan itu tiada jalan lain yang lebih utama melainkan tetap dapat bersatu padu dan penuh persaudaraan antara para raja dan segenap rakyat kerajaan. Dengan demikian pastilah akan mampu dan ikhlas di dalam membela marwah negeri, memajukan, memakmurkan, dan menjayakan kerajaan dan segenap rakyat.

Kejelian dan visionernya Sultan Mahmud di dalam menerajui kerajaan bagi kemajuan dan kejayaan di masa depan tak berhenti sehingga pusat pemerintahan di Lingga saja. Bahkan demi hal tersebut, juga sekaligus demi semakin mengukuhkan persaudaraan, persatuan, dan kesatuan suku bangsa dan berbagai potensi kekuatan negeri, Pulau Penyengat—yang sebelumnya hanya dijadikan sebagai tempat kubu-kubu dengan benteng-bentengnya, terutama dalam berperangan dengan Belanda kurun waktu 1782—1787—dibuka sebagai sebuah bagian pusat Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Hasan Junus dalam *Engku Puteri Raja Hamidah*

Pemegang Regalia Kerajaan Riau mengutip penjelasan Raja Ali Haji dalam *Tuhfat al-Nafis*, yang menyebutkan bahwa Sultan Mahmud sebagai Yang Dipertuan Besar, Sultan, telah membuka Pulau Penyengat tersebut. Syahdan adapun Baginda Sultan Mahmud menyuruh Punggawa Bakak menebas Pulau Penyengat Indera Sakti karena Punggawa Bakak itu dia memang sudah duduk di Penyengat itu ada empat lima buah rumah. Maka dikerjakan oleh Punggawa Bakak itu seperti titah Baginda itu. Maka setelah cuci Pulau Penyengat itu ditebas, maka baginda pun berbuatlah istana dan kota paritnya dengan masjid balairungnya. Maka tiada beberapa antaranya selesailah pekerjaan itu. Maka apabila selesai Pulau Penyengat itu jadi negeri tempat kerajaan maka Baginda pun memindahkan paduka adinda Baginda Engku Puteri yaitu Raja Hamidah isterinya, ke istana Pulau Penyengat dengan orang baik-baik dan anak raja-raja serta ianya. (Junus, 2002:10-11).

Sejak saat itu Pulau Penyengat pun tumbuh, berkembang, dan berperan dengan ciri utamanya bidang tamadun Melayu, yang antara lain bahasa dan sastra Melayu. Kelak ketika masa Raja Ali Haji, bahasa Melayu mendapat pembinaan secara tertulis dan akhirnya memberi jalan bagi pengangkatan bahasa Melayu yang dibina di Lingga dan Pulau Penyengat itu menjadi bahasa Indonesia. Dan perlu pula diperikan sepintas kilas tentang isteri-isteri Sultan Mahmud Riayat Syah dan anak-anaknya. Adapun istri Sultan Mahmud Riayat Syah²³, menurut Hasan Junus tak hanya dijelaskan oleh sumber pribumi, yang antara lain Raja Ahmad dan Raja Ali Haji dalam *Tuhfat al-Nafis*, tetapi bahkan dapat dirujuk sumber yang ditulis oleh pihak Belanda, yakni E. Netscher dalam bukunya *De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 tot 1865 Histische Beschrijving* (Burining & Wijt, Batavia, 1879, hlm. 246). Katanya, *Den 12den Januarij 1812 overleed Sulthan Mahmoed. Zijne opvolging was de aanleiding tot belangrijke gebeurtenissen in het tijd van Djohor.*

Deze vorst was gehuwd met Ongkoe Poewan, eene dochter van den Bandahara van Pahang. Na verloop van eenigen tijd, gene kinderen bij haar bebbende, trouwede hij Intjeh Makoh, eene dochter van eenen Boegies, genamd Daing Matoerang of Intjeh Djafar. Het huwelijk werd ingezegend door Imam Said; de getuigen er van waren Mohammad Tahir en Lebei

²³ Tentang istri dan anak-anak Sultan Mahmud Riayat Syah (Sultan Mahmud Syah III), telah pula dijelaskan oleh Abdullah Zakaria Ghazali, dalam bukunya *Istana dan Politik Johor (1835-1885)*, yang terbit tahun 1997: hlm.6-7. Juga oleh Aswandi Syahri & Raja Murad dalam *Cogan Tegalia Kerajaan Johor-Riau-Lingga-dan Pahang*, 2006:8-9.

Moestafa, met nog vijf andere fatsoenlijke Lieden. Intjeh Makoh baarde eenen zoon, genamd Togkoe Hoesin of Tongkoe Soeloeng.

Eenigen tijd daarna, in 1780, huwde Sulthan Mahmoed Intjeh Mariam, eene dochter van den Bandar Hasan. Dit huwelijk was voorgesteld door den onderkoning Radja Hadji. Het werd ingezegend te zijnen huize, door Hadji Jakoeb, in tegenwoordigheid van Datoe Soeleeatang Ibrahim en den Sabandar Mohammad. Intjeh Mariam baardeen zoon, genamd Tongkoe Abd'oerrahman.

Soelthan Mahmoed huwde ten vierde male met Tongkoe Hamidah of Ongkoe Poetri, eene dochter van wijlen Radja Hadji. Onderkoning van Riouw, Zij bleef kindeloos.

Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, kata Hasan Junus, adalah Sultan Mahmud meninggal dunia pada 12 Januari 1812. Penggantian sultan sesudahnya merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi Kerajaan Johor.

Raja ini menikah dengan Engku Puan, putri Bendahara Pahang. Dari perkawinan ini tiada terdapat keturunan, lalu beliau menikah pula dengan Encik Makoh, anak seorang Bugis yang bernama Daing Maturang atau Encik Jaafar. Pernikahan dilaksanakan oleh Imam Said dengan saksi-saksi yang terdiri atas Muhammad Tahir dan Lebai Mustafa serta lima orang patut-patut lainnya. Encik Makoh melahirkan seorang puteri yang diberi nama Tengku Husin alias Tengku Sulung.

Suatu masa yang lain, pada 1780, beliau menikah pula dengan Encik Maryam, anak Datuk Bandar Hasan. Perkawinan ini dilaksanakan atas usul Raja Haji. Imam nikahnya ialah Haji Yaakub, dengan para saksi yang terdiri atas Datuk Suliwateng Ibrahim dan Syahbandar Muhammad. Encik Maryam melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Abdurrahman.

Sultan Mahmud menikah untuk keempat kalinya dengan Tengku Hamidah atau Engku Puteri, anak dari Raja Haji yang menjadi Raja Muda pada masa itu. Dari perkawinan ini tidak ada keturunan. (Junus, 2002:13-14). Menurut Buyong Adil, Sultan Mahmud Syah III menikah dengan Raja Hamidah (disebut juga Engku Puteri) anak almarhum Raja Haji Marhum Telok Ketapang, berlangsung dalam tahun 1803. Setelah itu Sultan Mahmud telah memperbaiki dan mengindahkan Pulau Penyengat di Riau, dan digelar Pulau Penyengat Indera Mulia. Isteri baginda Raja Hamidah itu telah dipindahkan diam di Pulau Penyengat, dan baginda pun menyerahkan Pulau Penyengat itu menjadi hak milik Raja Hamidah. (Adil, 1971:153-154).

Terkait dengan pembauran suku-bangsa dan pemuliaan Sultan Mahmud Riayat Syah terhadap perempuan, dapat dilihat ketika Baginda pada akhirnya mengambil keputusan penting, yakni menikah dengan Raja Hamidah binti Raja Haji. Hal itu tak dapat dibantah sebagai upaya Baginda untuk kembali mewujudkan pembauran, yang langsung beliau contohkan. Dick van der Meij dalam *Filosofi Dunia Melayu* menjelaskan tentang pembauran dalam masyarakat Melayu dapat dipahami dari Kisah *Isra' Mi'raj*, perjalanan Muhammad ke Jerusalem dan naiknya ke sorga—dulu dan sekarang sangat penting di dunia Muslim, termasuk dunia Melayu. Hal pluralitas Melayu dalam cerita *Isra' Mi'raj* sangat menonjol. Dan kalau kita melihat identitas dalam dunia Melayu memang keanekaragaman yang menakjubkan, ditambah dengan toleransi terhadap keanekaragaman itulah yang mendasari identitas Melayu (Malik, dkk., 2010:56-57).

Adapun Sultan Mahmud menjadikan Pulau Penyengat sebagai maskawin pernikahannya dengan Engku Puteri Raja Hamidah binti Raja Haji, tak terbantahkan pula antara lain sebagai sangat memuliakan kaum perempuan. Kata Hasan Junus Pulau Penyengat Indrasakti dikaitkan dalam cerita pusaka sebagai pulau emas-kawin atau mahar yang diberikan oleh Sultan Mahmud Syah III kepada Engku Puteri Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah Yang Dipertuan Muda IV Riau. Adapun pulau ini sebagaimana tercatat dalam *Tuhfat al-Nafis*, pada mulanya adalah sebuah pulau yang berfungsi sebagai kubu atau benteng²⁴ yang dipakai oleh Sultan Mahmud Syah III dan Raja Haji Fisabilillah dalam perang Riau melawan Belanda. Pulau ini dipertahankan oleh orang-orang Siantan yang terkenal sangat tinggi semangatnya dalam perperangan. Baru pada awal abad ke-19 pulau ini menjadi tempat tinggal, yaitu setelah kepemilikannya diserahkan kepada Engku Puteri dan kemudian menjadi tempat kedudukan resmi atau pusat pemerintahan Yang Dipertuan Muda.

²⁴ Kubu atau benteng di Pulau Penyengat, menurut Raja Hamzah Yunus dalam bukunya *Peninggalan-peninggalan Sejarah di Pulau Penyengat*, terdapat 12 kubu (benteng dan parit-parit pertahanan). Pusat perbentengan di Pulau Penyengat terletak di Bukit Kursi dan di Penggawa. Benteng-benteng itu dilindungi oleh parit-parit pertahananyang melindungi benteng, umumnya ditempatkan tidak jauh dari pantai. Kubu/benteng itu kebanyakan dibangun menjelang perang antara Kerajaan Riau dengan Kompeni Belanda pada tahun 1782-1784. Ia dibangun untuk melindungi pusat kerajaan yang pada masa itu terletak di Kota Piring di Ulu Sungai Riau. Sejumlah lebih kurang 90 pucuk meriam (ukuran antara 5 hingga 7 hasta) ditempatkan pada posisi benteng-benteng itu. Menurut pendapat Mayor H.M. Nair Atache Militer Australia yang mengunjungi kubu-kubu itu pada tahun 1970, menerangkan bahwa “Konstruksi benteng-benteng itu amat sempurna dan merupakan peninggalan yang terbaik untuk mempelajari sistem pertahanan di abad ke-18” (Yunus, 2003:18-19). Dan, sejarah mencatat bahwa Benteng-benteng yang hebat sebagai pertahanan Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang guna berperang dengan Kolonial Belanda, itu dibangun semasa Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah.

Menurut Hasan Junus sesuai keterangan *Tuhfat al-Nafis* syahdan kata sahibul hikayat sekali peristiwa pada suatu masa maka bertitah baginda Sultan Mahmud kepada paduka dinda Baginda Engku Puteri dihadapan beberapa anak-anak raja seperti Raja Mahmud putra Tengku Panglima Besar putra Baginda Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, demikian bunyi titahnya, “Sekarang Raja Hamidah, adalah sahaya membuat Pulau Penyengat ini dijadikan negeri sudah cukup dengan istananya serta dengan parit-paritnya. Maka Raja Hamidah-lah yang saya buatkan jadi miliklah kepada Raja Hamidah. Syahdan lagi daripada fasal negeri Riau ini daripada hasil-hasil dan lain-lainnya, yaitu jadi milik makanan Raja Hamidah adik beradik, yaitu segala anak-anak Raja Haji al-marhum Fisabilillah. Maka tiadalah saya campur tangan lagi barang satunya. Adapun negeri Lingga maka yaitu bagian si Komenglah yaitu putera (Raja Jumaat) Tengku Abd al- Rahman, dan janganlah Raja Hamidah adik-beradik campur lagi dari pada pihak hasil-hasilnya dan kharajatnya.” Syahdan kata ahli al-rawi inilah permulaan berbagi makanan antara kedua belah pihak Yang Dipertuan Muda dengan Yang Dipertuan Besar pada pekerjaan hasil-hasil kharajatnya. Sebermula adalah jatuh pekerjaan ini di dalam tahun Hijrat sanat 1218 pada tahun Jim yaitu pada hari bulan Zulkaidah hari Sabtu, sudah lepas membuat istana adanya. (Junus, 2002:10-11).

Sebagaimana dijelaskan di atas, Sultan Mahmud Ri’ayat Syah telah menjadikan Pulau Penyengat sebagai emas kawinnnya dengan Tengku Hamidah atau Engku Puteri Raja Hamidah dan selanjutnya menjadi kediaman permaisurinya itu. Selebihnya, Baginda telah pula menjadikan pulau itu sebagai bagian dari pusat Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, yang atasnya termasuk dalam tanggung jawab Yang Dipertuan Muda V Riau Raja Ali dan kemudian Yang Dipertuan Muda VI Riau, Raja Raafar. Di pulau itu pulalah lambang dan alat-alat kebesaran kerajaan diletakkan, yang diamanahkan kepada Engku Puteri Raja Hamidah. Kata Raja Hamzah Yunus, seorang perempuan bernama Engku Puteri Raja Hamidah sebagai permaisuri Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Syah III, berpengaruh di kalangan bangsawan dan kerajaan. Barang-barang yang diamanahkan kepadanya oleh sultan itulah yang menentukan sah atau tidaknya seorang sultan ditabalkan menurut adat Melayu. Alat-alat kebesaran (Regalia) itu dianggap sakral atau keramat yang melambangkan kebesaran dan kekuasaan, penuh kekuatan magis yang dapat mempengaruhi keadaan kosmos dan mengembalikan keseimbangannya dan menolak berbagai bahaya seperti wabah, bencana alam, atau gejolak masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan oleh Raja Hamzah Yunus alat-alat bekesaran Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang yang disimpan oleh Engku Puteri terdiri atas sebuah Cogan yang bernama “Sirih Besar”, Sayap Sandang, seperangkat alat musik nobat, pedang panjang berhulu emas, tombak berambu, tempat bara (perbaraan), seperangkat tepak, ketor dan pahar emas/perak, dan lain sebagainya. (Yunus, 2002:4-5). Cogan sebagai lambang kebesaran kerajaan tersebut sejak semula sangat diinginkan oleh Belanda untuk diambil dan dimiliki dan begitu pula dengan Inggris. Namun kedua bangsa *penjajah* dari Eropa itu tak pernah berhasil mendapatkannya karena tetap terjaga dalam pertahanan dan keamanan pihak Kerajaan Riau-Lingga-Johor- Pahang, yang terakhir oleh Engku Puteri Raja Hamidah.

8. Hijrah Bepencar dan Pelopor Otonomi Daerah

Tatkala Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri’ayat Syah berpindah meninggalkan Riau (Ulu Sungai Carang, Bintan), pusat Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang pada 1787 ke kawasan baru bernama Lingga, ternyata sejumlah pembesar kerajaan juga berhijrah, masing-masing disertai pasukan serta rakyat ke berbagai daerah (kawasan). Sultan Mahmud Riayat Syah sendiri dengan pasukan perang dan sebagian rakyat ke Lingga. Yang lainnya, ada yang ke Bulang (Batam), Sukadana (Kalimantan), Pahang, Selangor, Terengganu, Kedah, Muar, Johor, Singapura, Kampar, Jambi, Siak, dan beberapa kawasan di Kepulauan Riau. Dalam kaitan ini, Paul Michel Munoz dalam *Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia* menjelaskan bahwa Johor menerapkan semacam kepemimpinan politik terhadap Semenanjung Malaysia, Riau, dan Sumatera Selatan. (Munoz, 2009:281). Kekuasaannya yang besar dan mencakup wilayah yang luas menjadikan Sultan secara leluasa melakukan pemindahan pusat kerajaan, yang pada intinya untuk tetap tegak, utuh, dan berdaulatnya kerajaan di mata bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Barat: Portugis, Belanda, dan Inggris. Dan, mengapakah mesti berhijrah (berpindah) dengan cara bepencar berbagai wilayah kerajaan-kerajaan Melayu?

Sekali lagi kita sebagai anak bangsa dewasa ini dapat melihat bagaimana kejeniusan dan visionernya Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri’ayat Syah di dalam menerajui kerajaan, mengambil keputusan penting dan monumental (bersejarah). Keputusan itu amat besar manfaat

dan faedahnya bagi negeri, pemerintahan, dan segenap rakyatnya. Sultan Mahmud Ri'ayat Syah berpindah dalam keadaan berpencar-pencar tersebut sebagai upaya agar dapat melindungi dan menyelamatkan kelangsungan kerajaan dari Kompeni Belanda. Pasal, kekalahan dua kali dalam peperangan yang dialami Belanda di kawasan Riau (Tanjungpinang, sekarang) telah membuat Belanda semakin meningkat *syahwat balas dendamnya* kepada Sultan Mahmud dan hendak menguasai seluruh kawasan kerajaan dan daerah takluknya.

Persoalan perdagangan, hasil-hasil perkebunan atau pertanian, cukai, tambang timah, dan utang perang yang dibebankan kepada kerajaan Melayu telah menjadikan Belanda semakin bertambah nafsunya untuk menyingkirkan Sultan dan Yang Dipertuan Muda dari kerajaan. Untuk itu, dengan tipu muslihat Belanda pun membuat beberapa perjanjian dengan raja-raja Melayu yang berada di bawah Sultan. Namun, ternyata perjanjian itu, sebagaimana dijelaskan di atas—baik janji-janji itu sendiri maupun salah satu pasalnya—tak ada satu pun yang ditaati oleh Sultan. Dalam hal ini, Sultan telah menetapkan dengan harga mati bahwa marwah dan kedaulatan kerajaan di atas segala-galanya. Dengan kata lain, perpindahan yang dilakukan secara berpencar-pencar tersebut dilakukan untuk semata-mata menjadi bangsa yang merdeka, bukan sebagai pengecut, dan tetap dengan kepala tegak dalam berhadapan atau berdepan-depan dengan bangsa asing, dalam hal ini Belanda dan Inggris. Baginda telah dengan cemerlang, gemilang dan jaya menjadikan negeri kerajaan sebagai mandiri dengan wajah nyata kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Sultan Mahmud berkeyakinan bahwa Belanda telah *memelihara amarah* dan kekesalannya sehingga menggebu-gebu untuk kembali lagi menggempur pusat Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, di Hulu Riau, Sungai Carang, Bintan. Karena itulah, maka beliau segera menitahkan dan mengerahkan segenap pembesar kerajaan, orang-orang kaya (saudagar-saudagar), para ulama, dan segenap lapisan rakyat dari berbilang kaum untuk berhijrah. Mengapakah harus berpencar? Tak lain tak bukan, sebagai strategi, taktik, dan siasat untuk membingungkan dan membuat keragu-raguan bagi pihak Kompeni Belanda. Belanda menjadi tak fokus untuk melakukan penyerangan ke suatu kawasan. Penyerangan menjadi sangat sulit untuk dilakukan karena kekuatan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sudah berhimpun di berbagai kawasan. Apabila diserang ke suatu daerah, ternyata beberapa daerah (kawasan lainnya) dengan kekuatan penuh, tidak dapat dijangkau dan apa lagi disentuh. Bahkan, Belanda khawatir,

dalam waktu yang tiada disangka-sangka, sulit diperhitungkan, pasukan Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dari berbagai kawasan itu, dapat saja menyerang Belanda, utamanya di Malaka. Dan bukti sejarah mencatat bahwa Belanda memang tak pernah lagi dapat menyerang Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Bahkan, mereka sangat terganggu oleh tindakan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud dan Raja Ali, yang mengerahkan pasukan laut untuk memutuskan (memblokade) lalu-lintas perdagangan dunia di selat Malaka. Ekonomi Belanda semakin melemah dan Malaka terancam lumpuh. Sementara itu, Inggris semakin kuat pula menekan Belanda. Dan pihak Sultan Mahmud telah pun menjalin kerja sama perdagangan, terutama hasil tambang timah dengan Inggris yang berpusat di Bangla.

Pada hakikatnya sistem pemerintahan daerah, yang dikenal dewasa ini sebagai otonomi daerah, sesungguhnya sudah diterapkan, dilaksanakan atau dijalankan ketika Sultan Mahmud Riayat Syah menjadi Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Sejarah mencatat bahwa pembesar-pembesar kerajaan ini tak berada di suatu kawasan atau di pusat pemerintahan bersama Sultan, tetapi didudukkan di berbagai kawasan. Mereka itu menjadi wakil sultan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di wilayah kedudukannya. Yang Dipertuan Muda Riau terakhir berkedudukan di Pulau Bayan dan Pulau Penyengat. Kemudian, Datuk Bendahara berkedudukan di Pahang, dan Raja Tua serta Raja Indera Bungsu di daerahnya masing-masing pula. Di samping itu, terdapat pula beberapa Raja (Sultan) di kawasan takluk Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, yang menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara otonomi, tetapi tetap terikat dengan pusat Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Sultan Jambi, Sultan Sukadana-Kalimantan Barat, Sultan Kedah, Sultan Selangor, Sultan Terengganu, misalnya, tetap bertuankan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah sebagai penguasa kerajaan pusat.

Tak diragukan lagi, Sultan Mahmud Riayat Syah Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang telah menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan negeri dengan cara *otonomi daerah*. Hal ini dapat kita katakan bahwa Sultan Mahmud Ri'ayat Syah sudah membuat kebijakan mendahului zamannya. Dengan otonomi daerah itulah membuat Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang dapat mencapai kemajuan, kejayaan, kemakmuran dan kesejahteraan segenap rakyat. Otonomi daerah yang dikenal dan berlaku di Indonesia dewasa ini dan di beberapa negara di dunia, pada intinya sebagaimana dikatakan oleh HAW. Widjajamelalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya

dan Pemerintah Pusat diharapkan tak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah di atasnya dan kepada publik/masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. (Widjaja, 2002:7-8).

Ternyata Sultan Mahmud telah lebih dulu menerapkan cara pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan, pemerataan, kemakmuran, dan kesejahteraan melalui pemberian penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah (kawasan-kawasan) yang dipimpin oleh orang-orang besar kerajaan di bawah Yang Dipertuan Besar atau Sultan. Dalam hal ini Yang Dipertuan Muda, Datuk Bendahara, Raja Tua, Indra Bungsu, dan Penggawa. Sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan di atas, antara lain ketika Sultan Mahmud menetapkan Raja Ali sebagai Yang Dipertuan Muda V Riau yang berkedudukan di Pulau Bayan, dan Pulau Penyengat permaisurinya sendiri Engku Puteri Raja Hamidah. Pada akhirnya pulau itu begitu berperan, yang antara lain menjadi pusat tamadun Melayu.

Jelaslah bahwa jasa-jasa Sultan Mahmud bagi bangsa dan negara begitu luas bidang dan cakupannya. Jasanya dalam memperkenalkan dan merealisasikan sistem pemerintahan yang demokratis dengan penerapan otonomi daerah secara luas, baik di daerah kekuasaannya langsung maupun daerah takluknya, sungguh luar biasa bagi penerapan otonomi daerah, yang nyatanya di alam Indonesia merdeka baru diterapkan sejak bergulirnya reformasi pada 1997 dan wujud sejak 1999 sehingga dewasa ini. Kaitan pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-dan Pahang sebagai pemerintahan yang sudah menerapkan otonomi daerah dapat ditangkap dari penjelasan Helmiati, tentang sistem pemerintahan kerajaan yang pada awalnya, mulai berlaku sejak zaman Yang Dipertuan Besar I Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah dan Yang Dipertuan Muda Riau I, Daeng Marewah. Katanya hal utama yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman dan YDM Daeng Marewah adalah memperkokoh dasar-dasar pemerintahannya. Cara pemerintahan kesultanan Melayu ini agak sedikit unik. Ia tidak bersifat sentralistik. Tiap-tiap pembesar mempunyai daerah pemerintahan sendiri dan tinggal di daerah kekuasaannya itu. Secara nominal Kesultanan Johor-

Riau masih mewarisi hirarki kerajaan Melayu Malaka seperti pegawai pemerintahan yang terdiri dari Raja Muda, Bendahara, Temenggung, Penghulu, Bendahara (ri) dan Syahbandar. Hanya saja istilah dan fungsi Raja Muda—menjadi Yang Dipertuan Muda (Helmiati, 2011:75-76).

Jika demikian, maka bagi anak bangsa dewasa ini perlu banyak belajar dan mengetahui penerapan pemerintahan yang berbentuk monarki absolut, tetapi dilaksanakan secara demokratis dan daerahnya diberi otonomi penuh ketika pemerintahan Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah dari 1761 sampai dengan 1812. Niscayalah dari *kiat-kiat keberhasilan YDB Sultan Mahmud Riayat Syah* banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik, diambil, dan implementasikan oleh anak bangsa dewasa ini bagi kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dengan kata lain, patutlah pula bila kita acungkan jempol dan mengatakan bahwa Sultan Mahmud Ri'ayat Syah atau Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor Pahang adalah *Pelopor Otonomi Daerah di Nusantara*.

9. Perenungan bagi Bangsa dari Sultan Mahmud

Pada 1761 Raja Mahmud menjadi Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Baginda dikenal sebagai Sultan Mahmud Syah III yang bergelar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, berkedudukan sebagai Yang Dipertuan Besar (YDB) IV (sebagai Sultan dari kesultanan Johor adalah yang ke-15). Datuk (kakek)-nya dari sebelah keturunan ayahandanya adalah Yang Dipertuan Besar I Sultan Sulaiman Badrusl Alamsyah (berkuasa 1722—1760), yang dikenal sebagai putra Sultan Johor-Riau-Pahang Sultan Abdul Jalil IV. Ayahanda Sultan Mahmud adalah Yang Dipertuan Besar Sultan Abdul Jalil (berkuasa 1760—1761). Ayahandanya digantikan oleh kakandanya Raja Ahmad sebagai Yang Dipertuan Besar dengan gelar Sultan Ahmad Ri'ayat Syah (1761). Setelah Sultan Ahmad Ri'ayat Syah wafat, Raja Mahmud menggantikan kakandanya itu sebagai Yang Dipertuan Besar IV Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dengan gelar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (Sultan Mahmud Syah III), yang berkuasa pada 1761—1812. Kedua anaknya menjadi Sultan pula. Pada 1812—1819 Sultan Abdul Rahman menjadi Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, tetapi periode 1819—1824 tinggal menjadi Sultan Riau-Lingga saja. Ini menyusul oleh Inggris dilantiknya kakanda Sultan Abdul

Rahman, Tengku Husin, menjadi Sultan Singapura dan Johor dengan gelar Sultan Husin Syah (1819—1835). Hal ini sudah diuraikan oleh Nordin (2008).

Betapa kokoh, tegas, dan tegarnya Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dalam mempertahankan marwah dan kedaulatan negara (kerajaan). Bagaimana tidak, meski berkali-kali digempur (diserang) dan dibujuk-rayu dengan berbagai janji kemewahan dan kesenangan oleh Belanda, Baginda tetap tak tertarik dan tak sudi menerimanya. Bahkan Baginda rela berhijrah meninggalkan pusat kebesaran kerajaan di Ulu Riau, Sungai Carang, Bintan dan membangun kawasan baru di Lingga dan Pulau Penyengat. Dalam pada itu datang pula pihak lain, Inggris, yang pada intinya dengan maksud yang sama, hendak menguasai kerajaan yang berada di bawah teraju pemerintahan Sultan Mahmud. Namun nyatanya, kedua bangsa penjajah dari Eropa itu tak pernah dapat menaklukkan Sultan Mahmud dengan wilayah kerajaannya.

Sekali lagi kita bentangkan—sungguh—betapa kita, anak bangsa dewasa ini dapat merasa kagum dan teramat menaruh hormat kepada Baginda karena seluruh hidupnya, sepanjang usianya, sejak kanak-kanak lagi, selama lebih 50 tahun telah didarmabaktikannya, diabdikannya untuk bangsa dan negeri. Sulit bagi kita membayangkan bagaimana Sultan Mahmud sejak kecil (kanak-kanak) sudah kehilangan kedua orang tuanya, yatim-piatu. Dalam keadaan itu, sudah dipikulkan di atas pundaknya suatu tanggung jawab yang amat besar dan berat, yakni menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, yang disebut dengan Sultan atau Yang Dipertuan Besar Kerajaan Besar Riau-Lingga-Johor-Pahang (kini kawasan kerajaan tersebut sebagian di Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Sejak Baginda mangkat di kawasan yang dulu bernama Riau-Lingga-Johor-Pahang itu—sekurang-kurangnya di Kepulauan Riau dan Riau sehingga saat ini—meski sudah lebih 200 tahun, belum ada lagi lahir anak bangsa sekaliber dirinya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sungguh fantastis, monumental, sangat bersejarah, dan bermakna luar biasa Baginda Sultan Mahmud berhasil menjadi Sultan (Raja) atau Yang Dipertuan Besar dalam masa setengah abad dan baru mengakhiri jabatannya karena meninggal dunia. Sebelumnya tak sedikit sultan kerajaan ini hanya berkuasa dalam masa yang sangat singkat, yang di antaranya karena adanya kudeta dan pembunuhan terhadap sultan. Sungguh berbeda, Sultan Mahmud mampu melewati kesemuanya itu dengan selamat, cemerlang, gemilang, dan terbilang. Hal itu jelas menandakan bahwa Baginda adalah manusia yang luar biasa, dan nyatalah kejuangan dan perjuangannya untuk bangsa dan negara semata. Jasa-jasanya

dalam banyak hal kepada Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang ketika itu, niscayalah, tak dapat dilepaskan dan memang sejatinya berkait pula kepada bangsa dan negara Indonesia sehingga dewasa ini dan pada masa-masa mendatang yang boleh dan patut dibanggakan. Di antara jasanya itu yang begitu penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa adalah ketika Baginda membuka Lingga sebagai pusat kerajaan.

Di Pulau Penyengat Baginda mulai menumbuhkembangkan kebudayaan dan peradaban (tamaduan) Melayu. Selanjutnya, Baginda membuka dan menjadikan Pulau Penyengat sebagai kota dan bagian dari pusat kerajaan. Di pulau itu akhirnya berlangsung kreativitas intelektual sehingga di kemudian hari melahirkan banyak tokoh intelektual, pemikir, dan pengarang. Mereka antara lain, Raja Ahmad bin Raja Haji. Adapun Raja Ahmad adalah produk zaman yang memang sudah bercitra maju. Adalah anak manusia yang menjadi Yang Dipertuan Besar Sultan Riau-Lingga-Johor-dan Pahang ketika munculnya Raja Ahmad sebagai intelektual dan pengarang, tentunya tak terlepas dari ikhtiar yang sungguh-sungguh dan visioner yang dirancang dan diterapkan oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (Sultan Mahmud Syah III). Bukankah ia yang membuka Pulau Penyengat menjadi sebuah kota dan tempat kediaman dan kedudukan Yang Dipertuan Muda?Sebelumnya menjelang berperangan dengan Belanda, beliau telah menyiapkan benteng-benteng sebagai kubu pertahanan. Sehingga setelah Kerajaan Melayu yang dipimpinnnya berada di puncak kejayaan maka Penyengat dibangun bagi lambang masa depan! Adalah segala kelengkapan dan baiknya sarana dan prasarana (fasiltas) yang disiapkan oleh Sultan Mahmud Syah III sehingga Pulau Penyengat menjadi pusat tamadun Melayu. Dalam kaitan ini, kita sertakan pendapat Anthony Reid & David Marr dalam *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka*, yang menjelaskan bahwa Raja Ahmad bin Raja Haji adalah seorang tokoh yang amat berpengaruh dalam kelompok Penyengat. Lahir pada 1773. Ia adalah pangeran pertama dari Riau yang naik haji. Ia adalah pelopor masa itu (Reid & David Marr, 1983:101—102). Bahwa bagi Sultan Mahmud hal yang tak kalah mustahak bagi sebuah kerajaan (Negara) adalah membangun kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, intelektual, cendikia atau pemikir-pemikir yang memerlukan waktu tidak singkat.

Adapun sebagai buah dikembangkannya Pulau Penyengat sebagai sebuah kota yang lengkap dengan segala sarana dan prasaranya oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, maka lahirlah pula generasi berikutnya dalam dunia kalam, dan umumnya kebudayaan. Mereka adalah Raja Ali

Haji bin Raja Ahmad, Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda Riau, Ali Kelana, Khalid Hitam, Aisyah Sulaiman Riau, dan lain-lain. Berkat kepiawaian dan kehebatannya sebagai Sultan, Yang Dipertuan Besar, pada akhirnya bermunculanlah orang-orang atau tokoh-tokoh besar. Ada Raja Haji, Engku Puteri, dan Raja Ali Haji. Segala perjuangan dan jasa-jasa yang luar biasa yang diberikan oleh Raja Haji sebagai Yang Dipertuan Muda dan Raja Ali Haji sebagai pengarang kepada bangsa dan negara—menjadi tokoh yang ikut menguatkan ketokohan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah—yang merupakan bagian dan amat bersehati dengan jasa-jasa yang sudah diberikan sepenuhnya oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah.

Sungguh gelar Pahlawan Nasional yang disandang oleh Raja Haji dan Raja Ali Haji atas jasa-jasanya dalam serangkaian perjuangan dan kejuangan demi bangsa, tentulah nyata memberi maknanya pula kepada kita anak bangsa, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia), bahwa Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (yang selalu juga disebut sebagai Sultan Mahmud Syah III) berada di pucuk-puncak jasa perjuangan dan kejuangan tersebut. Dengan demikian, alangkah patut dan sangat layak almarhum mendapat gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Republik Indonesia. Ketokohnya (menjadi raja besar di kawasan Asia Tenggara, yang membawa kerajaan mampu berhadapan dan berperang secara gagah berani dengan Belanda demi membela tanah air dan bangsanya, membuat kemajuan negeri dan rakyatnya dalam segala bidang dan kemakmuran) pantas dan patut menjadi tauladan seluruh anak bangsa dan pemberi semangat bagi generasi bangsa dalam menapaki hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, dewasa ini sudah sepantasnyalah *di dadanya disematkan gelar Pahlawan Nasional!*

PERAN SULTAN MAHMUD RI'AYAT SYAH DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

1. Pendahuluan

Kehidupan berpemerintahan telah dikenal masyarakat Melayu di wilayah Kepulauan Riau jauh sebelum Sriwijaya menjadikan kawasan ini sebagai vazalnya sekitar abad VI. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa penguasa politik telah ada di Kepulauan Riau sejak abad IV dalam bentuk penguasa lokal di Bintan. Mulyana (1981) dalam bukunya berjudul *Kuntala, Sriwijaya dan Swarnabhumi* menyebutkan kehidupan berpemerintahan ini semakin insentif dikenal masyarakat ketika Raja Sriwijaya Dapunta Hyang pada awal abad VI memperluas wilayah taklukkannya ke Pantai Timur Semenanjung. Raja ini menjadikan kerajaan lokal (Kerajaan Bintan) sebagai vazalnya sekaligus basis ekonomi dan pusat logistik angkatan perang Sriwijaya.

Letak geografis yang strategis Kepulauan Riau memberikan keunggulan dan keuntungan bagi eksistensi Sriwijaya dalam memperluas pengaruhnya. Sampai abad XIII Sriwijaya berhasil menguasai daratan dan lautan Indonesia Bagian Barat, Semenanjung Tanah Malayu, dan Lautan Cina Selatan. Bahkan, Sriwijaya berhasil menguasai sepenuhnya jalur perdagangan utama pada masa itu, yakni Selat Malaka, Tanah Genting Kra, Selat Sunda, dan Selat Karimata (Lutfi, 1977). Hal itu terjadi karena Jalan Sutera yang menghubungkan Timur dan Barat sudah tidak dipakai lagi akibat tantangan alam yang berat dan secara ekonomis sudah tidak menguntungkan.

Walaupun berada di bawah kekuasaannya, Sriwijaya tetap memberikan keleluasaan kepada Kerajaan Bintan untuk berpemerintahan sendiri (otonom) (Samad, 2010). Kerajaan Bintan oleh Sriwijaya diberikan wewenang untuk memainkan peran penting dan sering bertindak untuk dan atas nama Sriwijaya dalam berhubungan dengan pedagang-pedagang asing yang melawati Selat Melaka. Kedudukan dan kewenangan yang diberikan kepada Bintan telah menyebabkan tertanamnya rasa hormat dan kesetiaan yang tinggi dari Bintan kepada Sriwijaya.

Tercatat dalam sejarah, ketika raja terakhir Sriwijaya, Prameswara, mencoba memberontak kepada Majapahit tahun 1391—1392, Kerajaan Bintan merupakan satu-satunya kerajaan yang menyokong keinginan Prameswara tersebut.

Pengenalan dalam pemerintahan ini semakin intensif setelah periode Sriwijaya, terutama pada periode Melaka dan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Pada kedua periode ini kawasan Kepulauan Riau tetap merupakan kawasan utama dan pusat pemerintahan dari semua kerajaan-kerajaan yang pernah menguasainya. Salah satunya tersebutlah masa Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang pada abad XVIII saat tampuk kekuasaan dipegang oleh Sultan Mahmud Riayat Syah selama kurun waktu 1761—1812.

2. Cikal-Bakal Pemerintahan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah

Sultan Mahmud Ri'ayat Syah merupakan gelar dari Sultan Mahmud ibni Sultan Abdul Jalil Muadzam Syah, yang pusat pemerintahan kerajaan awalnya berada di Hulu Riau di Pulau Bintan (wilayah Kota Tanjungpinang sekarang) sampai 1786. Setahun berikutnya, tepatnya tahun 1787, Sultan memindahkan pusat kerajaannya ke Daik di Pulau Lingga (Kabupaten Lingga sekarang). Pemandahan ini dilakukan sebagai strategi Sultan untuk menghadapi dan melawan tekanan intensif dari Belanda yang ingin menguasai kerajaan. Sejak itulah terkenal sebutan: dari yang awalnya Kerajaan Riau-Johor atau Johor-Riau menjadi Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Di tempat barunya ini Sultan memerintah sampai beliau wafat pada 1812.

Dilihat dari susur-galur keturunannya, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah bukanlah keturunan dari *sultan* (peringkat tertinggi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Melayu). Beliau merupakan keturunan dari *bendahara* (peringkat kedua dalam struktur pemerintahan Kerajaan Melayu setelah sultan dan peringkat ketiga setelah Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang menggunakan jabatan Yang Dipertuan Muda). Sewaktu diangkat menjadi sultan (1761) beliau berusia masih sangat muda (ketika ditabalkan menjadi sultan beliau digendong) sehingga beliau menjadi sultan termuda yang diangkat dalam sejarah Kerajaan Melayu. Sampai beliau kemudian dewasa, roda pemerintahan sementara dipegang dan dikendalikan oleh pamannya sendiri, yakni Yang Dipertuan Muda III Daeng Kamboja.

Dalam *Tuhfat al-Nafis* karangan Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji (Virginia Matheson, 1991) digambarkan suasana pelantikan sultan yang masih kecil itu berlangsung dengan khidmat dan meriah. Karena masih kecil, beliau sampai digendong menuju kursi kebesaran Kesultanan Johor-Riau-Pahang oleh seorang pembesar kerajaan. Saat pelantikannya tersebut terjadi kesepakatan antara puak Bugis dan Melayu untuk bersetia mendukung sultan sampai akhir hayatnya. Di kemudian hari, terutama setelah kemangkatan sultan, kedua puak ini sempat bersilang pendapat dalam hal penentuan siapa yang layak memegang tampuk kerajaan menggantikan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah.

Kedatangan Belanda yang ingin menguasai wilayah kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang menjadi awal bangkitnya semangat sultan untuk memerangi setiap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Sikapnya terhadap Belanda sangatlah tegas: menolak segala bentuk paksaan dari pihak Belanda. Hal itu nampak saat sultan menolak keras isi perjanjian yang disodorkan Belanda di Front Filipina di Linggi. Karena sikapnya inilah, Belanda berulang kali melancarkan gangguan atas pemerintahan sultan sehingga menyebabkan terjadinya beberapa kali berperangan.

Tatkala menghadapi berperangan dengan Belanda, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah tercatat memiliki strategi yang handal sehingga mampu membuat Belanda kewalahan menghadapi pasukannya. Sebelum meletusnya perang melawan Belanda, sultan telah mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka memenangkan setiap berperangan itu, antara lain dengan memindahkan pusat kerajaan agar tidak mudah dijangkau oleh lawan. Di samping itu, sultan mempunyai kemampuan dalam mengharmonisasikan bawahannya sehingga konflik internal kerajaan hampir tak nampak ke permukaan. Sultan beberapa kali berhasil mendamaikan perselisihan di antara para pembesar di kerajaannya, diantaranya pertikaian Engku Muda Muhammad dengan Raja Ali yang sama-sama ingin menjadi Yang Dipertuan Muda.

Sultan Mahmud Ri'ayat Syah adalah penguasa yang mengerti taktik dan cara mempertahankan kekuasaan tak hanya dengan cara mengkonsolidasi kekuatan dalam negeri, mempererat perhubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga kalau perlu melalui perkawinan, tetapi juga dengan bijak menggunakan kekuasaan asing. Taktik yang digunakan beliau untuk selalu berpindah-pindah guna menghindari penyerangan musuh memang dimungkinkan karena kawasan taklukannya sepanjang Selat Melaka dan Kepulauan Riau terdiri atas beribu-ribu pulau

yang cukup berjauhan letaknya satu sama lain sehingga menjadi tempat yang aman bagi perlindungan.

Cara yang demikian itu juga membawa manfaat bagi semakin intensifnya mobilisasidan sosialisasi politik yang dilakukan oleh kerajaan terhadap masyarakatnya. Secara langsung maupun tidak, mobilisasi dan sosialisasi ini semakin meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan keterlibatan mereka dalam bernegara dan berpemerintahan.

3. Strategi Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dalam Menghadapi Belanda

Kronik kehidupan dan pemerintahan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah adalah kisah tentang perjuangan melawan penjajahan Belanda di Tanah Melayu. Selama lebih dari 50 tahun mengabdikan (1761—1812), perhubungan pemerintahannya dengan Belanda selalu diwarnai pertikaian dan pertentangan. Walaupun berat perjuangan yang dilakukannya melawan pasukan Belanda yang bersenjata lengkap, hal itu tak mengendurkan semangat sultan untuk terus berjuang. Kalah dan menang memang datang silih berganti, tetapi kisah perjuangan sultan menunjukkan kegigihan seorang pemimpin yang sangat setia membela tanah air dan bangsanya sehingga beliau tak pernah mau menyerah kepada penjajah.

Keberanian, ketangguhan, dan keteguhan sultan melawan Belanda telah menjadi catatan emas bagi generasi penerus Kesultanan Melayu pada masa itu dan periode selanjutnya. Setelah Perang Riau (1782—1784) yang menyebabkan Raja Haji, panglima perang sekaligus Yang Dipertuan Muda IV Kerajaan Riau-Lingga, syahid fi sabilillah, bukti sejarah menyebutkan pertentangan melawan Belanda dimulai kembali sejak tahun 1786. Ketika itu Sultan yang diiringi oleh Bendahara Tun Abdul Majid serta para pembesar lainnya dari Hulu Riau hendak melawat ke Melaka yang dikuasai oleh Belanda. Tujuannya adalah untuk menziarahi makam almarhum Raja Haji Fisabilillah (Marhum Teluk Ketapang) di kaki Bukit Melaka. Pada kunjungan kali ini perhubungan Sultan dengan Belanda masih berjalan harmonis. Rombongan Sultan pun disambut dengan keramahan dan barisan kehormatan oleh Abraham Couperus, Gubernur Belanda di Melaka ketika itu.

Ternyata, keharmonisan perhubungan kedua pihak ini hanya berlangsung singkat. Setahun berikutnya, perselisihan antara sultan dan Belanda mulai terkuak ke permukaan.

Awalnya Sultan Mahmud dan Bendahara Pahang Tun Abdul Majid serta pembesar Riau-Lingga memenuhi undangan Gubernur Belanda di Malaka. Rupanya Belanda mempunyai maksud yang licik. Sesampainya di sana, sultan dipaksa Belanda untuk menandatangani suatu perjanjian yang merugikan kedudukannya. Perjanjian 7 Februari 1787 tersebut memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Sultan harus menyerahkan pemerintahannya kepada Belanda.
2. Sultan dibebaskan/dilepaskan kuasanya dari orang besar Raja Tua, Bendahara (Tun Abdul Majid), Temenggung, dan Raja Indera Bungsu.
3. Tongkang Cina dan lainnya di Tanjungpinang (Riau) tidak membayar cukai lagi kepada sultan, tetapi diharuskan membayar kepada Belanda.

Perjanjian tersebut tentulah sangat merugikan pihak Sultan Riau-Johor-Pahang. Secara tidak langsung berarti Belanda sengaja merusak perekonomian dan pemerintahan Sultan untuk mendapatkan anggaran pendapatan belanja kerajaan dari cukai. Apalagi, tanpa izin dari Sultan, tiba-tiba kemudian Belanda telah menempatkan residennya di Tanjungpinang secara sepihak.

Sultan Mahmud Ri'ayat Syah tentu tak menerima perlakuan Belanda tersebut. Sebenarnya beliau hendak melawan saat itu juga, tetapi karena berada di wilayah kekuasaan Belanda, Sultan mengurungkan niatnya. Di dalam hatinya Sultan sudah bertekad akan melakukan perlawanan sekembalinya dari Malaka. Begitu beliau telah berada di Riau, atas musyawarah dan mufakat dengan pembesar kerajaannya, disepakati untuk melakukan perlawanan atas kesewenang-wenangan Belanda tersebut.

Sultan pun mulai mengatur strategi menghadapi Belanda. Beliau menyadari tak mungkin secara frontal melawan Belanda yang punya kekuatan armada lengkap di Selat Melaka. Oleh sebab itu, secara rahasia beliau mengirim utusan ke Tempasuk (Kalimantan). Tujuannya adalah membujuk agar Raja Tempasuk, pimpinan lanun yang terkenal ketika itu, menyerang Belanda di Tanjungpinang. Sultan juga berangkat ke Pahang menemui Bendahara Tun Abdul Majid. Di sana Sultan menitahkan Bendahara untuk menyerang Belanda di Malaka melalui Pahang.

Sultan memusatkan perhatian utamanya untuk menyerang Belanda di Tanjungpinang dengan memanfaatkan para lanun dari Tempasuk. Pada hari yang ditentukan, tepatnya Mei 1787, 40 buah kapal layar besar yang membawa askar lanun dari Tempasuk datang menyerang dan mengalahkan orang Belanda di Tanjungpinang. Penyerangan ini membuat banyak orang Belanda

mati terbunuh. Residen Belanda, David Ruhde, dan beberapa orang yang masih hidup melarikan diri dari Riau dan kembali ke Malaka.

Atas kemenangan itu, dengan sangat sukacita Sultan mengadakan jamuan besar makan minum sebagai ucapan selamat atas kejayaan askar lanun Raja Tempasuk melepaskan Riau dari tekanan Belanda. Setelah lanun kembali ke Tempasuk, Sultan merasa khawatir tinggal di Hulu Riau. Beliau memperkirakan Belanda pasti akan menyerang Tanjungpinang yang kini kembali dikuasai Sultan untuk balas dendam. Berdasarkan pemikiran itu, Sultan memindahkan pusat pemerintahan dari Hulu Riau di Pulau Bindan ke Daik di Pulau Lingga dengan angkatan sebanyak 200 buah perahu layar.

Kepulauan Lingga, yang semula merupakan *hinterland* yang paling jauh dari pusat kerajaan, dengan kepindahan raja dan menjadikannya pusat pemerintahan itu, akhirnya menjadi benteng utama kerajaan. Dengan sendirinya, rasa memiliki masyarakat terhadap kerajaan semakin besar. Itulah sebabnya, setiap kali raja-raja Melayu berpindah tempat dengan cepat mereka bangkit kembali menyerang musuh dan biasanya berhasil. Ini membuktikan bahwa taktik berpindah-pindah tempat tersebut memungkinkan sosialisasi politik yang dilakukan oleh kerajaan semakin intensif dan lebih lanjut hal tersebut membangkitkan kesadaran politik masyarakat untuk membela kerajaan. Dengan kata lain, berpindah-pindahnya pusat kerajaan berarti semakin banyak masyarakat yang berinteraksi secara intensif dengan negara dan interaksi yang intensif ini telah membantu raja-raja Melayu sehingga mampu bertahan terhadap upaya penjajahan yang dilakukan oleh pihak asing, khasnya Belanda, sampai ratusan tahun. Kerajaan Riau-Lingga baru dapat dikuasai oleh Belanda pada awal abad XX, tepatnya pada 1913. Itu pun dilakukan oleh Belanda dengan cara yang licik yaitu ketika Sultan Abdul Rahman Muazam Syah sedang tak berada di pusat kerajaan, Pulau Penyengat Inderasakti, karena beliau sedang berkunjung ke Singapura. Oleh sebab itu, kudeta yang dilakukan oleh Belanda itu tak pernah diakui sah oleh Sultan dan rakyat Kerajaan Riau-Lingga sampai setakat ini. Alhasil, penguasaan Belanda terhadap Kerajaan Riau-Lingga sejak 1913 sampai dengan tersungkurnya penjajah itu pada 1942 yang dilanjutkan oleh Pemerintah Kolonial Jepang sampai 1945 mengandung kontroversial politik dan pemerintahan sampai saat ini dan tergolong tindakan biadab.

Sejak kepindahan Sultan, daerah Hulu Riau yang pernah menjadi pusat Kerajaan Riau-Johor-Pahang telah pula ditinggalkan rakyat Melayu. Ada yang pindah ke Pulau Karimun,

Kundur, Moro, Bulang, Selat (Singapura), Terengganu, Kalimantan, dan pulau-pulau di Kepulauan Riau-Lingga yaitu Singkep dan Senayang. Dengan berpindahnya pusat Kerajaan Riau-Johor-Pahang ke Daik-Lingga sejak 1787, berarti Hulu Riau atau Riau Lama menjadi pusat ibunegeri Kesultanan Riau-Johor-Pahang lebih kurang 46 tahun (1721—1787).

Walaupun sudah merasa aman pindah ke Daik-Lingga, Sultan yakin bahwa Belanda tak akan tinggal diam. Dendam kesumat atas kekalahan mereka sebelumnya tentu tak akan pernah padam. Sultan sangat percaya bahwa cepat atau lambat Belanda pasti akan menyerang pusat kerajaannya yang baru. Oleh karena itu, Sultan mengatur strategi agar menyerang Belanda lebih dahulu daripada nanti musuh itu yang duluan menyerang kerajaannya. Maka pada 1788, setahun setelah beliau berada di Lingga, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah berangkat ke Pahang. Beliau juga telah mengutus beberapa utusan ke Tempasuk. Keberangkatan dan pengiriman utusan ini dalam rencana melakukan koordinasi agar mereka dapat ikut membantu menyerang orang Belanda di Melaka melalui Pahang.

Kali ini rencana Sultan kurang mendapat tanggapan. Walaupun begitu, sebagai seorang pemimpin Sultan tak pernah berputus asa. Tak begitu lama kemudian Sultan Mahmud pergi ke Terengganu menemui Sultan Mansyur (Tun Dalam). Kepada Sultan Mansyur, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah menyampaikan ikhtiarnya untuk mendesak Belanda agar membatalkan perjanjian terdahulu yang merugikan pihak Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Sementara menunggu ikhtiar dari Sultan Mansyur ke Malaka, Sultan pergi lagi ke Pahang. Karena belum ada berita keputusan apapun dari Pahang, Sultan pun kembali ke Lingga.

Akhirnya, peperangan melawan Belanda berakhir pada Agustus 1795, seiring dengan perjanjian Belanda dengan Inggris. Dalam perjanjian itu, pihak Inggris mengambil kekuasaan Malaka dari tangan Belanda. Dan, Belanda diwajibkan membebaskan Riau-Lingga-Johor-Pahang dan menyerahkannya semula kepada Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Selanjutnya, pada Oktober 1795 diserahkanlah wilayah Riau-Lingga-Johor-Pahang kepada Sultan Mahmud Riayat Syah oleh Inggris. Belanda pun, tak lama sesudah itu, memang datang juga menyerahkan surat bebasnya Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dari segala perjanjian dengan mereka selama ini. Dengan senyum penuh kemenangan dan sekadar sopan-santun politik pemimpin Melayu untuk tak menambah musuh, Sultan yang arif itu berkata kepada pihak Belanda, "Terima kasih!"

Sebuah pukulan telak terhadap pihak Belanda dari seorang pemimpin Melayu-Islam yang karismatik, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah.

Terbukalah rahasia strategi politik yang sangat bijaksana seorang Sultan Mahmud Ri'ayat Syah ketika melawan Belanda selama ini. Selain memperkuat pertahanan di dalam negeri, rupanya beliau menjalin perhubungan diplomasi yang sangat baik dengan pihak luar yakni Inggris yang senantiasa bersaing dengan Belanda. Pada saat yang tepat perhubungan yang baik itu dimanfaatkan beliau untuk menyelamatkan tanah air dan bangsanya dari upaya penjajahan yang dilakukan secara bertubi-tubi dan terus-menerus oleh Belanda. Ternyata, strategi itu membuahkan hasil yang gemilang: kerajaan dan bangsanya terbebas dari segala bentuk tekanan pihak asing yang coba menjajahnya. Alhasil harkat, martabat, dan marwah bangsanya tetap terpelihara, yang pada gilirannya nama pemimpin yang bijak itu—Sultan Mahmud Ri'ayat Syah—menjulung terbilang.

4. Kepemimpinan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dalam Memajukan Kerajaan

Sultan Mahmud Ri'ayat Syah tak hanya ahli dalam strategi berperangan. Beliau juga mampu mengharmoniskan kerajaan dari pertikaian internal. Jiwa kepemimpinannya bisa mempersatukan pihak-pihak yang bertikai sehingga mereka menjadi fokus melaksanakan pembangunan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat. Dengan mengutamakan persatuan, Sultan berhasil mengeliminasi konflik-konflik yang berujung pada pelemahan kerajaan. Sejarah mencatat, selama kepemimpinan Sultan tak pernah terjadi konflik besar yang menguras tenaga dan korban jiwa, sebagai mana laik terjadi di kerajaan lain.

Pada 1793, misalnya, ketika Sultan Mansyur (Tun Dalam) mangkat di Terengganu setelah 60 tahun menjadi Sultan (1733—1793), terjadilah silang sengketa. Sultan Mansyur digantikan oleh putranya Raja Zainal Abidin bergelar Sultan Zainal Abidin II sebagai Sultan Terengganu III. Sultan pun menitahkan Engku Muda Muhammad (keponakan/anak saudara) Tun Abdul Majid dan putra Temenggung Abdul Jamal (Pulau Bulang) dengan isterinya Raja Maimunah bin Daeng Perani menjaga Riau, sementara menanti diadakannya peraturan yang tetap di situ. Sebelumnya sejak 1784, Belanda telah melarang orang Bugis masuk ke Riau, tetapi British (Inggris) membolehkan orang Bugis masuk ke Riau kembali sejak 1801.

Dalam pada itu, Yamtuan Muda V Riau, Raja Ali ibni Daeng Kemboja yang sudah lama tinggal di Muar (Johor) serta anak dan isterinya kembali ke Riau dan membuat kediamannya di Tanjung Unggat. Tak lama kemudian timbul peperangan antara Raja Ali dan Tengku Muda Muhammad. Mereka berselisih paham karena masing-masing merasa berhak memerintah Riau sebagai Yang Dipertuan Muda. Raja Ali mengalahkan Engku Muda Muhammad dalam pertikaian tersebut dan Engku Muhammad pindah ke Pulau Bulang.

Atas ikhtiar Bendahara Tun Abdul Majid yang datang dari Pahang, pada Februari 1802, Yamtuan Muda Raja Ali dan Engku Muda Muhammad didamaikan oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah di Lingga. Bendahara mempunyai empat orang anak lelaki, yang bernama Tun Abdul Muthalib, Tun Muhammad, Tun Koris, dan Tun Da serta dua orang puteri Engku Puan (bersuamikan Sultan Mahmud Riayat Syah Lingga), Tun Salmah menikah dengan Sultan Ibrahim Syah Selangor.

Pada suatu masa Tun Abdul Muthalib dari Pahang melawat ke Riau dijamu oleh Sultan dijemput makan bersama. Mengikut adat-istiadat Kerajaan Riau-Johor-Lingga masa itu, apabila anak bendahara yang dimuliakan oleh Sultan seperti itu, dialah yang akan dicadangkan untuk menggantikan bendahara, tetapi belum diumumkan kepada khalayak ramai. Temenggung Abdul Jamal adik Bendahara Tun Abdul Majid tidak menerima jemputan Sultan. Oleh karena itu, Tun Abdul Jamal merasa iri dan sakit hati terhadap anak saudaranya itu.

Pada masa yang lain, Temenggung Abdul Jamal telah dijemput Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dari Lingga mengiringinya ke Pahang. Pada suatu malam, Temenggung Tun Abdul Jamal membunuh Tun Abdul Muthalib di rumah Bendahara Tun Abdul Majid sambil bersembunyi dan melarikan diri ke Padang Buluh (Pekan Lama). Akan tetapi, beliau dapat ditangkap dan diserahkan kepada Bendahara Tun Koris, bahkan hendak membunuh ayah saudaranya, tetapi dihalangi oleh ayahandanya Bendahara Tun Abdul Majid. Sultan Mahmud Ri'ayat Syah menyuruh orang untuk mengantarkan kembali Temenggung Tun Abdul Jamal ke Pulau Balang.

Pulau Bulang adalah pangkalan Armada Angkatan Laut Diraja Sultan, juga sebagai tempat menyimpan obat bedil dan peluru meriam. Temenggung Tun Abdul Jamal pergi ke tempat menyimpan obat bedil dan tempat itu meledak. Temenggung Tun Abdul Jamal tewas bersama dua orang anaknya di tempat tersebut. Tun Muhammad adik Abdul Muthalib yang tinggal di Chenok (tepi Sungai Pahang) membawa 40 orang askarnya untuk membalas kematian

abangnya. Karena tahu Temenggung Tun Abdul Jamal sudah meninggal, dia pun menetap di Riau.

Bendahara Tun Abdul Majid telah meninggal dunia di Pahang pada 1802. Tun Muhammad dijemput ke Lingga oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah lalu dilantik sebagai Bendahara Pahang menggantikan ayahandanya Bendahara Tun Abdul Majid. Setelah menjadi bendahara itu, Muhammad kembali ke Pahang dan di tengah pelayaran melewati Pulau Tioman ke Endau perahunya oleng dipukul ombak dan karam. Bendahara dan isterinya yang sedang di dalam kamar perahu itu hilang. Maka, Tun Muhammad digelar Marhum Mangkat di Laut. Hanya 40 orang anak buah perahu bendahara yang selamat sampai ke Pahang.

Setelah mengetahui peristiwa tersebut, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah di Daik melantik Tun Koris menggantikan abangnya sebagai Bendahara Pahang bergelar Bendahara Paduka Raja. Di tahun yang sama 1803, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah juga melantik Raja Ali ibni Daeng Kemboja sebagai Yamtuan Muda V Riau yang bersemayam di Riau.

Putra sulung Sultan Mahmud Ri'ayat Syah anak dengan isterinya Chek Makoh binti Chek Jaafar Daeng Maturang, yaitu Tengku Husin (Tengku Long) dikawinkan dengan Chek Puan Bulang anak Engku Muda Muhammad. Pada 1803 itu juga di Lingga Sultan Mahmud melantik Engku Muda Muhammad sebagai Temenggung Johor di Bulang menggantikan abangnya Temenggung Tun Abdul Hamid (Daeng Kecil) yang meninggal dunia. Mereka berdua adalah anak dari Temenggung Tun Abdul Jamal Marhum Pulau Bulang.

Pada 1806 (1221 H.) Yamtuan Muda V, Raja Ali, mangkat di Riau dan digelar Marhum Pulau Bayan. Untuk menggantikannya, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah di Daik mengangkat Raja Jaafar anak Marhum Teluk Ketapang Raja Haji menjadi Yamtuan Muda VI dan tinggal di Riau. Pada 1806 itu juga, Sultan telah melantik anak almarhum Temenggung Abdul Hamid (Daeng Kecil) yang bernama Amdul Rahman bergelar Temenggung Seri Maharaja menetap di Pulau Bulang yang memerintah daerah pegangannya Tanah Besar Johor, Singapura, Batam, Kundur, Karimun, dan sekitarnya.

Engku Muda Muhammad awalnya menolak sebagai Temenggung di Bulang. Dia mau menjabat sebagai Yamtuan Muda memerintah di Riau, tetapi tak disetujui oleh Sultan Mahmud. Bendahara Paduka Raja Tun Koris telah meninggal dunia di Pahang. Almarhum meninggalkan anak Tun Ali dan Tun Muhammad. Pada tahun itu juga (1806), Sultan Mahmud Ri'ayat Syah

telah melantik Tun Ali (Wan Ali) menggantikan ayahnya Tun Koris dengan gelaran Bendahara Siwaraja (Seriwaraja). Bendahara Tun Ali waktu itu baru berumur 25 Tahun.

Sejak peristiwa itulah Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang mulai terpecah-belah karena orang-orang besarnya tak bersepaham antara satu sama lain. Hal itu dipicu oleh campur tangan Inggris dan Belanda dalam perniagaan di Kepulauan Riau, Singapura, dan Semananjung Tanah Melayu yang kelak akan menjadi padang perburuan pendatang asing yang menyebabkan timbulnya garis perceraian Johor, Pahang, termasuk Singapura, dan Lingga dengan Riau.

Pada 1811, sebelum angkatan perang Inggris yang dikomandani oleh Lord Minto dan Thomas Stamford Raffles menaklukan tanah Jawa dari tangan orang Belanda, Temenggung Abdul Rahman (Temengung Seri Maharaja yang bertugas di Pulau Bulang memindahkan tempat tugasnya dan membawa anak isterinya), serta seramai 150 orang ke Singapura (sebelah Kuala di tepi sungai Singapura). Dari Singapura-lah beliau menjalankan pemerintahan ke daerah pegangannya di Bulang.

Pada 1811 itu juga, Tengku Husin (Tengku Long) putra sulung Sultan Mahmud Ri'ayat Syah di Lingga dinasihatkan oleh ayahndanya agar ke Pahang untuk memperistrikan Wanesah adik Bendahara Tun Ali Pahang. Perkawinan Tengku Husin dengan Chek Puan Bulang anak Engku Muda Muhammad adalah untuk menguatkan kedudukan Baginda di atas kerajaan dan memelihara perimbangan kekuasaan diantara Baginda dengan kedua orang besar di dalam kerajaan Baginda. Lagi pula, di Riau dan Penyengat segala urusan kuasa kendali pentadbiran dipegang oleh Yamtuan Muda Raja Jafaar ibni Raja Haji.

Semasa Tengku Husin (Tengku Long) sedang berada di Pahang, dengan tidak diduga pada 12 Januari 1812, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, mangkat. Namun, jauh hari sebelum Tengku Husin berangkat ke Pahang, Sultan sudah berwasiat kepadanya bahwa seandainya jika ditakdirkan beliau mangkat, Tengku Husin-lah yang bakal menggantikannya. Sultan juga berpesan kepada putera keduanya, Raja Abdul Rahman yang sangat kuat menjalankan ibadah, agar dapat berangkat ke Makah menunaikan ibadah haji.

6. Penutup

Sultan Mahmud Ri'ayat Syah telah nyata berbuat dan bertindak untuk menjaga dan memajukan marwah negerinya. Sejak awal beliaulah yang membangun, membenahi, dan memaju-jayakan Lingga menjadi sebuah wilayah yang berpemerintahan sendiri dan berdaulat selama 25 tahun. Pada zamannya ini institusionalisasi jalannya pemerintahan telah ditadbirkan dalam segala aspek kehidupan. Perhubungan pejabat pemerintahan dengan pejabat pemerintahan lainnya berjalan dengan harmonis. Begitu juga perhubungan pemerintah dengan rakyatnya berjalan tanpa gejolak sekecil apapun.

Sejak mulai berkuasa sampailah Baginda mangkat, perjalanan hidupnya diisi dengan semangat perlawanan terhadap penjajah dan kepiawaian untuk mempersatukan para pembesar kerajaan dan seluruh rakyat. Tak heranlah kasih sayang dan cinta kasih seisi negeri, baik orang besar-besar maupun rakyat sekaliannya, tercurah kepada Baginda. Sultan benar-benar mampu membentuk dan menunjukkan jati dirinya sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan asing sekaligus tokoh pemersatu untuk kejayaan internal kerajaan. Dalam situasi yang sulit karena mendapat tekanan dari Belanda, Baginda telah berhasil meletakkan landasan untuk kelanjutan pemerintahan berikutnya. Sultan Mahmud Ri'ayat Syah telah menjalankan takdirnya sebagai pemimpin yang bijaksana dan pahlawan terbilang yang berada paling depan dalam membela marwah tanah air dan bangsanya.

PERAN SULTAN MAHMUD RI'AYAT SYAH DALAM MEMAJUKAN PEREKONOMIAN NUSANTARA

1. Kemajuan Ekonomi Riau Merusak Monopoli VOC

Pemerintah Belanda jelas sekali mempunyai syahwat besar untuk menguasai tempat-tempat atau kawasan-kawasan strategis atau bandar-bandar perdagangan dunia, terutama di Nusantara secara monopoli dan menggunakan peralatan atau kelengkapan perang. Malaka dan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang di antara yang menjadi incaran yang tiada tara menggiurkan. Dalam rangka itu mereka pun menyiapkan angkatan perang dan jurus-jurus jitu untuk melakukan penaklukan atau penjajahan. Sejalan dengan itu, cara lain mereka perkuatkan pula yakni mengadu-domba berbagai kekuatan di dalam sebuah kerajaan yang berdaulat atau antara kerajaan satu dan kerajaan lainnya. Di Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, misalnya, mereka menerapkan politik adu-domba dengan harapan Melayu dengan Bugis atau Bugis dengan Bugis dapat berperang dan akhirnya hancur sehingga dengan mudah mereka dapat menguasainya. Sayangnya politik semacam itu tak mempan di salah satu kerajaan terbesar di kawasan Nusantara atau Asia Tenggara itu.

Belanda memang tak main-main untuk memonopoli perdagangan dan ekonomi di Nusantara. Dengan modal besar dan kekuatan perang mereka melengkapi ikhtiar yang akan dilakukan sebagai penjajah. Menurut Hasan Junus dalam bukunya *Raja Haji Fisabilillah Hannibal dari Riau*, Belanda membentuk sebuah perusahaan atau serikat dagang yang bernama VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, resminya berdiri pada 20 Maret 1602, yang Belanda ketika itu merupakan Republik Nederland Serikat (*Republik van Vereenigde Nederlanden*). Pada pasal 35 akte pendirian, serikat dagang itu diberi hak oleh parlemen Republik Nederland Serikat untuk membuat surat-surat perjanjian atau kontrak politik dengan para penguasa pribumi dan daerah-daerah di seluruh nusantara untuk membangun kota-kota (terutama pelabuhan), mengangkat para gubernur, dan membentuk tentera (bayaran).

Lebih lanjut dijelaskan Hasan Junus, mula-mula VOC menempatkan seorang Gubernur Jenderal di Maluku. Baru pada 1619 kedudukan itu dipindahkan ke Batavia. VOC berhasil mengambil alih Melaka dari tangan Portugis pada tahun 1641 dan mengangkat seorang Gubernur di situ. Selanjutnya, Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieters Zoen Coen mengatakan bahwa VOC tak akan dapat menjalankan perdagangan tanpa perang dan perang tak dapat dijalankan tanpa perdagangan. Gubernur Jenderal berikutnya, Antonio van Diemen, mengatakan bahwa perdagangan VOC di Asia tak dapat dilanjutkan tanpa perluasan wilayah.

Jadi menurut Hasan Junus dapat dilihat dengan jelas bahwa VOC bukanlah sebuah serikat dagang biasa, melainkan serikat dagang menyertakan seperangkat mesin perang atau jari-jari gurita raksasa kolonialisme yang sengaja didirikan untuk beroperasi di wilayah Nusantara dan sekitarnya. Beberapa penulis sejarah Belanda mengatakan bahwa para pengelola puncak serikat dagang itu berkelakuan lebih sebagai seorang raja merdeka di kawasan Timur dunia dan bukan sebagai pegawai. (Junus, 2000:5-6).

Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang—yang sudah dijelaskan di muka—adalah sebuah kerajaan besar di Nusantara sebagai kelanjutan Kerajaan Bintan (1150—1158), Kerajaan Bintan-Temasik (Singapura) (1159—1384), Kerajaan Malaka (1384—1511), berlanjut lagi ke Bintan, lalu ke Kampar dan di Johor (1511—1673). Pada 1673 berpusat di Ulu Sungai Carang, Bintan, yang dikenal kemudian sebagai Ulu Sungai Riau, berdiri sebagai sebuah kerajaan besar dengan wilayahnya yang luas pula. Setiap sultan kerajaan ini bukan hanya berkewajiban memajukan kerajaan dan segala bidang kehidupan, melainkan juga terus berupaya dengan segenap kekuatan untuk merebut dan menguasai lagi Melaka! Tersebab apa? Karena Malaka—termasuk selatnya—adalah suatu bandar perdagangan yang menghubungkan berbagai jalur lalu lintas perdagangan dunia. Juga tentu sebagai simbol kejayaan.

Dalam kaitan ini Hasan Junus menjelaskan pula bahwa sejak berdirinya Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang semangat dan ikhtiar hendak mengembalikan Malaka ke dalam pangkuan kerajaan Melayu tak pernah padam. Tekad dan upaya ke arah itu, mulai dinampakkan sejak 1673, ketika Laksemana Tun Abdul Jamil mulai membangun Riau sebagai sebuah pelabuhan bebas bertempat di Sungai Carang, di Pulau Bintan. Dalam banyak hal Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang seperti hendak mengemban kebesaran Malaka pada masa lampau. Bukankah di

masa lampau, sebagaimana dinyatakan oleh Tome Pires dalam karyanya *Summa Oriental*, siapa yang menguasai Malaka maka dapat menentukan hidup matinya Venesia. (Junus, 2000:6-7).

VOC—Belanda, sebagaimana dijelaskan di atas, di Nusantara setelah menguasai Maluku selanjutnya menjadikan Batavia (Jakarta, sekarang) sebagai pusat pemerintahan Belanda di Nusantara. Selepas itu mereka menguasai Malaka. Pada akhirnya, mereka menjadi paham bahwa kekuatan Malaka sebagai tempat penting dalam perdagangan dunia masih tidak sepenuhnya dapat diwujudkan karena ada Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang yang berpengaruh luas, termasuk terhadap Malaka. Jalur lalu-lintas pelayaran dan perdagangan dunia, yang ternyata bertumpu pula di bandar-bandar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dan kerajaan ini ikut menentukan lancar atau tidaknya lalu-lintas di Selat Malaka. Tentu pada gilirannya Kerajaan Riaudianggap oleh Belanda sebagai penghalang terbesar bagi ambisi (birahi monopoli) negeri penjajah itu untuk menguasai dengan leluasa perdagangan di jalur Selat Malaka.

Tak heranlah Belanda setelah menduduki Malaka berupaya untuk menaklukkan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Nyatanya hal itu tak pernah sekalipun terwujud dalam perjalanan sejarah. Bahkan secara faktanya Belanda mendapat tekanan pula dari Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sehingga Belanda mengakui Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sebagai sebuah kerajaan besar yang merdeka dan berdaulat. Ini dapat dipahami secara jelas dari adanya beberapa kali peperangan dan perjanjian antara Belanda dan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Dan nyatanya pula perjanjian yang dibuat pada akhirnya bukan bekerjasama yang saling menguntungkan yang terjadi, melainkan berbuah dengan peperangan, yang tiap-tiap pihak pernah mengalami kemenangan dan kekalahan.

2. Perdagangan dan Ekonomi Menuju Kegemilangan

Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dengan Yang Dipertuan Besarnya Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, yang dibantu oleh Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja dan Kelana (calon Yang Dipertuan Muda) Raja Haji pada akhirnya berhasil membentuk persekutuan kerajaan-kerajaan Melayu dan menyerang Belanda di Malaka. Menurut Hasan Junuspada Agustus 1722 para pembesar Kerajaan Riau merencanakan suatu penyerangan terhadap kota Malaka. Namun penyerangan baru benar-benar terjadi pada 1756, yang dipimpin oleh Daeng

Kamboja dan dibantu oleh Raja Haji. Beberapa kota sekitar Melaka pun berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Riau. Pada 29 April 1756 pasukan gabungan yang dipimpin Daeng Kamboja berhasil menyerang kota Malaka. Mereka masuk ke kota dan membakarnya. Pada 2 Juli 1756 Belanda menawarkan perjanjian damai, tetapi tak membuahkan hasil. Pada 27 Juli 1756 Kerajaan Riau menyurati Gubernur Malaka, yang menyatakan permusuhan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang beserta kerajaan-kerajaan dalam persekutuan Melayu dengan Belanda. Pada Oktober 1756 pasukan gabungan Kerajaan Melayu sampai di pinggir Kota Malaka. Maka pada 4 Februari 1757 Kerajaan Riau beserta kerajaan-kerajaan dalam gabungan persekutuan Melayu tersebut membakar pinggir Kota Melaka. Perperangan berlanjut di Linggi (1756—1757) sehingga kemudian terjadilah perjanjian damai antara Belanda dengan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang beserta sekutunya pada 1 Januari 1758 di Filipina, terutama menyangkut perdagangan timah. (Junus, 2000:17-28).

Permusuhan Belanda dengan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, yang pemicu utamanya adalah perdagangan, kepentingan ekonomi ternyata tak semakin mengendur, tetapi tambah memburuk. Tentu sudah dapat ditebak karena Belanda hendak menguasai secara monopoli sentral-sentral perdangan serta pusat-pusat ekonomi yang dimiliki dan dikuasai Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Berbagai upaya dilakukan Belanda, yang antara lain hendak memecah-belah Melayu dengan Bugis. Bahkan jauh sebelumnya Belanda juga berupaya memecah-belah Bugis dengan Bugis yakni pihak Raja Haji dengan Daeng Kamboja. Akan tetapi baik pihak Melayu maupun pihak Bugis, Daeng Kamboja dan Raja Haji tidak terpengaruh dengan adu-domba dan fitnah yang dilakukan pihak Belanda sehingga sumpah-setia tetap terjaga dan berkekalan.

Upaya Belanda untuk memecah-belah sumpah-setia Melayu-Bugis, memutus sendi-sendi persaudaraan dan kebersamaan serta persatuan, niscaya tak akan pernah berhasil karena Melayu-Bugis, terutama yang menduduki puncak kekuasaan, Yang Dipertuan Besar/Sultan dan Yang Dipertuan Muda sama-sama sudah mengalir darah Melayu-Bugis. Mereka bersaudara-mara. Hal ini sudah ditegaskan di muka, yang antara lain dapat diungkapkan kembali bahwa Raja Haji bersaudara kandung dengan ibunda Sultan Mahmud Ri'ayat Syah sehingga Sultan Mahmud Ri'ayat Syah yang diharapkan oleh Belanda sebagai pihak Melayu dan Raja Haji sebagai pihak Bugis, antara satu dengan lainnya dapat berperang tak pernah terlaksana. Pasal, Raja Haji adalah

ayah saudara (paman) Sultan Mahmud atau dengan kata lain, Sultan Mahmud adalah anak saudara (keponakan) Raja Haji. Dan Sultan Mahmud dengan Raja Ali adalah saudara sepupu. Jadi rencana pecah-belah yang dibuat oleh Belanda tak pernah berhasil, sebaliknya semakin mengukuhkan pluralistik di dalam kerajaan itu, yang semakin mengukuhkan pula lancarnya perdagangan, kemajuan ekonomi, dan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kerajaan.

Belanda sepertinya tidak mau tahu bagaimana perhubungan budaya dan darah antara Melayu dan Bugis sudah sejak lama terjadi, terbina, dan menyatu. Pada awalnya, orang-orang Melayu ke Negeri Bugis, yang antara lain Makasar, dan kali berikutnya orang-orang Bugis ke Negeri Melayu, yang suatu masa dilanjutkan oleh Daeng Marewah dan saudara-saudaranya membantu Tengku Sulaiman dalam menegakkan kedaulatan negeri Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang beserta daerah takluknya (1722). Perhubungan Bugis-Melayu, dikatakan oleh Mukhlis PaEne sebagai hubungan *arus-balik*. Dalam tulisannya *Melayu-Bugis-Melayu dalam Arus Balik Sejarah* (2004), Mukhlis PaEne menegaskan, arus balik ini sangat penting untuk diketahui sebagai sebuah dasar pemahaman bagi peran timbal-balik orang-orang Melayu di negeri-negeri Bugis-Makassar dan peran orang-orang Bugis-Makassar di negeri-negeri Melayu. Peran orang-orang Melayu di negeri-negeri Bugis-Makassar sebagai benang merah dari sebuah perjalanan sejarah yang amat penting dan terbukti adanya.

Menurut Muklis PaEne lebih lanjut, pada 1542 seorang Portugis bernama Antonio de Paiva mendarat di Siang, sebuah kerajaan tua di pesisir Selatan Makassar. De Paiva adalah orang Eropa pertama yang tinggal di Sulawesi. Dalam laporannya yang tertulis dalam *Coto Decades* p.78, de Paiva menyebutkan bahwa ketika ia mendarat di Pulau Celebes (Sulawesi), ia telah bertemu dengan orang-orang Melayu di Siang. Mereka mendiami perkampungan Melayu dengan susunan masyarakat yang teratur dan sudah berada Siang sejak 1490. Dalam pada itu, Manoel Pinto, juga seorang Portugis yang mengunjungi Siang pada 1545, mengatakan bahwa ketika itu orang Melayu di Siang berjumlah sekitar 40.000 jiwa, jumlah yang sangat banyak untuk ukuran kala itu.²⁵

²⁵ Tulisan tersebut, disampaikan Mukhlis PaEne dalam Seminar *Filosofi Dunia Melayu: Pluralistik dan Kebangkitan Sastra* sempena serangkaian acara *Revitalisasi Budaya Melayu Internasional*, Kota Tanjungpinang, 29 Juli s.d. 1 Agustus 2004, yang diterbitkan dalam buku *Revitalisasi Budaya Melayu: Filosofi Dunia Melayu Pluralistik Budaya dan Kebangkitan Sastra*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang (Malik, 2010:153—155).

Mengikuti keterangan Mukhlis PaEne, pada akhirnya orang Melayu mendapatkan jabatan dalam pemerintahan kerajaan di Makassar. Dalam wilayah Kerajaan Makassar, bahasa resmi yang digunakan dalam perhubungan dengan bangsa asing, antara lain Belanda, adalah bahasa Portugis dan Melayu. Katanya, Perang Makassar berakhir pada 1667 dan memaksa Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI menandatangani perjanjian Bongaya antara Gowa dengan Belanda. Akibat dari perjanjian ini, terjadilah arus-balik pengaruh Melayu di nusantara, pada saat itulah orang-orang Melayu-Bugis/Makassar yang menduduki jabatan-jabatan penting di Kerajaan Gowa bersama bangsawan tinggi kerajaan yang tak menyetujui Perjanjian Bongaya meninggalkan Kerajaan Gowa Sulawesi Selatan secara besar-besaran. Peristiwa ini sangat penting, karena arus balik ini terjadi setelah hampir 177 tahun sejak berdirinya pemukiman Melayu di Siang (sekitar 1490) atau sekitar 146 tahun sejak kedatangan orang-orang Melayu dan bermukim di Manggallekana pada 1521. (Malik, 2010:165-166).

Dapat diyakini bahwa dari keturunan mereka inilah, yang kemudian bergabung dengan pihak Kerajaan Melayu-Riau-Lingga-Johor-Pahang pada 1722. Pada akhirnya di dalam Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang ada jabatan setingkat di bawah sultan, yang bergelar Yang Dipertuan Besar (Raja), yakni Yang Dipertuan Muda Riau, yang dimulai oleh Daeng Marewah. Jelaslah perhubungan erat dan rapat antara Melayu-Bugis, yang sejatinya tak mungkin akan dapat diceraikan oleh VOC-Belanda. Pembesar Kerajaan Melayu kemudian mengikat perjanjian dengan orang Bugis, yang dikenal dengan perjanjian Sumpah-Setia Melayu-Bugis. Tujuan utamanya adalah membangun kejayaan kerajaan dan kemakmuran masyarakat. Untuk itu, bidang pertahanan dan perdagangan (ekonomi) mesti dikuatkan. Maka tak mengherankan pada akhirnya kerajaan ini mencapai puncaknya dalam kekuatan perang dan kemakmuran dengan menguasai perdagangan timah dan jalur lalu-lintas perdagangan Selat Malaka. Di kerajaan ini terdapat bandar-bandar perdagangan yang wujud sebagai bandar perdagangan dunia. Hal itu jelaslah membuat Belanda yang menguasai Malaka menjadi tak nyaman dan merasa terancam kedudukan dan perannya. Dengan melihat semakin kuat dan majunya Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, pihak VOC-Belanda berupaya, antara lain mengadu-domba Melayu dengan Bugis di dalam Kerajaan Riau. Akan tetapi Belanda agaknya lupa bahwa perhubungan erat dan rapat antara Melayu-Bugis, yang sejatinya memang tak mungkin akan dapat diceraikan oleh VOC-Belanda. Pada sisi lain, adanya perjanjian antara Belanda dan Kerajaan Riau adalah perjanjian kerjasama,

terutama menyangkut perdagangan, tujuan ekonomi, dan bukan sebagai hilangnya kemerdekaan, kedaulatan kerajaan, dan hapusnya kekuasaan sultan. Tentu bagi Kerajaan Riau sendiri, dimaklukkannya perjanjian kerjasama itu bukan tanda menyerah, melainkan lebih sebagai upaya untuk memajukan perdagangan dan siasat di masa hadapan untuk kembali memerangi dan mengusir Belanda dari Malaka.

Berkenaan dengan perjanjian yang terjadi antara Belanda dengan Riau-Lingga-Johor dan Pahang sebagaimana dijelaskan di muka, tak terlepas dari taktik licik Belanda. Dalam kelanjutannya ternyata perjanjian yang disepakati kedua belah pihak tidak pernah terlaksana. Nyatalah perjanjian itu hanya sekedar helah dan dalih Belanda saja untuk mengelabui dan dalam bahasa terang benderangnya sebagai dalam upaya menipu Sultan. Dalam kaitan ini ditegaskan Tengku Luckman Sinar, bahwa perjanjian formil ditandatangani oleh pihak Sultan Mahmud Ri'ayat Syah yang diwakili oleh orang-orang Besar Kerajaan Riau, pada 10 November 1784, adalah dalam keadaan terpaksa. Perjanjian itu dirasakan oleh Sultan Mahmud sebagai penghinaan yang luar biasa bagi bangsa dan negerinya. Bagaimana tidak? Setelah Raja Haji tewas di Teluk Ketapang, dan berperangan itu sebenarnya atas nama Sultan Mahmud Riayat Syah, maka Belanda antara lain meminta Sultan Mahmud membayar ongkos perang Belanda (1782—1784) sebesar \$60,000,00 kepada Van Braam Cs. Harta-harta rampasan dari rakyat Riau dijual lelang oleh Belanda di Batavia menghasilkan \$60,670,00 lalu dibagi-bagi mereka. Dua puluh dua helai panji-panji dan petaka dari pasukan Kerajaan Riau di bawah pimpinan tertinggi Sultan Mahmud Riayat Syah dan pimpinan perang Raja Haji, yang direbut dalam berperangan dibawa oleh Van Braam ke Hoolland pada 1785 untuk ditempatkan di museum Bronbeek. Sultan Mahmud tak pernah menepati satu pun dari pasal-pasal perjanjian dan tak sama sekali membayar utang perang yang dibuat sepihak oleh Belanda. Sebaliknya, Sultan Mahmud dengan Imperium Melayu yang gagah itu—atas penghinaan dan syarat-syarat kapitulasi yang diletakkan Belanda—menjadi berapi-api semangatnya menuju kemerdekaan Imperium Melayu Riau-Johor kembali dan lepas dari tangan Belanda pada 1795 kelak. Untuk lebih lengkap dapat dilihat, L.Y. Andaya, *The Kingdom of Johore*, KL, 1975; H. Buyong bin Adil, *Sejarah Selangor*, DBP, 1971; dan R.O. Winstedt, *A History of Johore (1365—1895)*, JMBRAS, 1979. (Rustam S. Abrus, dkk. (Penyunting), *Sejarah Perjuangan Raja Haji Fisabilillah dalam Perang Riau Melawan Belanda (1782—1784)* (Abrus, 1988:144—146).

Manakala pada 1761 Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dipimpin oleh Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, dengan Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja. Selepas itu berlanjut kepada Raja Haji. Pada bagian ini kita menekankan penerokaannya terhadap peran Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dibawah Yang Dipertuan Besar, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, dalam perdagangan atau ekonomi. Dalam upaya memperkuat kerajaan dan menjayakannya, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah telah membangun Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sejak 1761 sampai 1812, yang bermula di Hulu Riau, Sungai Carang, Pulau Bintan (1761—1787) dan kemudian selama 25 tahun berlanjut di Lingga dan Pulau Penyengat (1787—1812). Beliau telah dapat membenahi Lingga menjadi sebuah kota dan begitu pula Pulau Penyengat yang lengkap dengan segala fasilitasnya. Meskipun ada masa dalam situasi sulit dan berperang dengan Belanda, tetapi beliau telah berhasil melaluinya dengan cemerlang dan gemilang, dengan tanpa menggadaikan marwah negeri kepada penjajahsehingga sukses pula dalam meletakkan landasan untuk kelanjutan pemerintahan berikutnya.²⁶ Pemindahan pusat Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, di samping untuk menjaga kemerdekaan, tegaknya marwah dan kedaulatan kerajaan, serta untuk menghindari serangan balik pihak Belanda dan sekaligus sebagai upaya menyusun strategi dalam upaya memerangi dan mengusir Belanda dari Riau dan Melaka. Hal tak kalah penting, dan sekali lagi demi negeri dan rakyat seluruhnya, kemajuan ekonomi mesti dicapai dan kemakmuran penduduk kerajaan harus terwujud. Untuk itulah, berbagai kawasan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, terutama di pusat pemerintahan baru, yakni Lingga dan Pulau Penyengat, dibangunnya sedemikian rupa sehingga menampakkan hasil pembangunan ekonomi, yang sekaligus sebagai wujud kebudayaan dan peradaban, yang disebut sebagai tamadun Melayu. Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang berhasil membangun dan memfungsikan pelabuhan-pelabuhan perdagangan dan menjadi bandar penting perdagangan dunia.

3. Mencapai Puncak Kemajuan Ekonomi

²⁶Lihat Anastasia Wiwik Swastiwi. "Kerajaan Johor Riau-Lingga Pada Masa Pemerintahan Sultan Mahmud Syah III" dalam *Naskah Kuno : Sumber Ilmu Yang Terabaikan (Telaah Terhadap Beberapa Naskah Kuno)*. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Tanjungpinang (2002).

Penataan dalam bidang ekonomi yang telah dilakukan sejak 1722 mencapai kemajuan yang pesat pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dengan dibantu pengusahaannya oleh Yang Dipertuan Muda III Daeng Kamboja dan berlanjut kepada Yang Dipertuan Muda Riau IV Raja Haji. Pada masa ini Kesultanan Riau-Johor merupakan sebuah kerajaan merdeka yang dapat bersikap terbuka pada perdagangan dunia karena sandaran ekonominya terletak pada sektor perdagangan. Pelabuhan kesultanan ini sangat terbuka untuk segala bangsa, bahkan menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan transito antara Timur dan Barat karena letaknya yang strategis di jalur dagang Selat Malaka. Menurut A.B. Lopian dalam tulisannya berjudul *Riau dan Pelayaran di Perairan Selat Malaka pada Abad XVIII* dalam buku *Sejarah Perjuangan Raja Haji Fisabilillah dalam Perang Riau Melawan Belanda (1782-1784)*, pentingnya Selat Malaka sebagai tempat pertemuan kapal di persimpangan alur pelayaran dari barat, timur, selatan dan utara telah dikenal berabad-abad lamanya. Faktor penting pada waktu itu adalah bahwa tempat persimpangan ini merupakan pula pertemuan dari dua sistem angin yang menguasai iklim di kawasan Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Irama angin ini menentukan saat kapal-kapal tiba dan berangkat di daerah Selat Malaka ini dan mempengaruhi pelayaran sampai pada abad XIX ketika tenaga uap mulai digunakan. (Abrus, 1988:199). Bandarbandarnya menerima tiap-tiap pedagang yang datang dari mana saja. Oleh karena itu, pada masa ini Kesultanan Riau-Johor tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Komoditas perdagangan di Kesultanan Riau-Johor berupa rempah-rempah, barang pecah belah, gambir²⁷, beras, gula, garam, damar, kemenyan, pinang, rotan, dan lain-lain. Kemajuan dalam bidang ekonomi pada masa itu ditulis dalam kitab *Tuhfat al-Nafis*, yang menjelaskan bahwa bertambah-tambah ramainya negeri Riau serta makmurnya dan orangpun banyaklah yang kaya-kaya dan beberapa pula saudagar-saudagar Cina dan Bugis dan beberapa pula kapal dan kici dan wangkang-wangkang berpuluh-puluh buah berlabuh di dalam negeri dan pulang pergi berniaga di Riau.

²⁷Lihat. Lucas Partanda Koestoro. *Dapur Gambir di Kebun Lama Cina, Jejak Kegiatan Perekonomian Masa Lalu Sebagai Potensi Sumber Daya Arkeologi Pulau Lingga*. Balai Arkeologi Medan. Tt. Adalah kejelian pihak penguasa Kerajaan Melayu masa itu yang melihat peluang pasar gambir dalam perdagangan di bandarbandar yang berada di bawah pengaruhnya. Upaya memperbesar produk gambir yang pangsa pasarnya cukup besar, dilakukan dengan menyiapkan tenaga yang terampil pada lahan-lahan yang diketahui memang subur untuk tanaman gambir. Teknologi pembuatan gambir itupun dikenalkan pada calon-calon pekerja dimaksud. Pilihan untuk mempekerjakan migran-migran Cina itu kelak terlihat tepat karena menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin besarnya produk komoditas dimaksud.

Tuhfat Al-Nafis melanjutkannya lagi, shahadan kata sahibu'l-hikayat pada masa inilah negeri Riau itu ramai serta ma'amornya, dan segala dagang pun banyaklah datang dari negeri Jawa, dan kapal dari Benggala membawa apium dan lain-lain dagangan, dan segala perahu dagang di kuala Riau pun penohlah daripada kapal, dan kici dan selob, dan santi, dan wangkang, dan tob Siam. Dan apalagi di dalam sungai Riau; segala perahu-perahu rantau berchucok ikatlah bersambong dan berpendarat, demikianlah halnya (...) Maka tatkala itu banyaklah orang-orang negeri kaya-kaya, kelengkapan perang banyak yang sedia. Maka hal inilah dibahasakan oleh orang tua-tua; 'baik' (keadaan di Riau pada masa itu). (Matheson Hooker, 1991:24).

Berkenaan dengan macam-jenis barang dagangan yang menjadi andalan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dijelaskan panjang lebar pula oleh Teuku Ibrahim Alfian dalam buku *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji sebagai Bapak Bahasa Indonesia*. Antara lain diterangkannya bahwa sesungguhnya arti dan peran Riau secara ekonomik dan perdagangan bukan hanya karena faktor lokasi geografisnya, melainkan Riau sangat kaya dengan berbagai jenis dan hasil laut lainnya, sedang di daratan terdapat sungai-sungai dan hutan yang kaya dengan sumber daya alam berbagai jenis. Sungai-sungai besar dan utama di Riau bermuara ke Selat Malaka. Maka terutama melalui Malaka diperdagangkanlah komoditi-komoditi dari berbagai negara mulai dari bahan pakaian dan pecah-belah dari Mediterrania, candu, indigo, perak dari Asia Barat, katun dari Gujarat, sutera dan porselen dari Cina, besi dan logam mulia dari Malaya, serta rempah-rempah termasuk lada, pala, cengkeh, kayu serta komoditi aromatik dari Nusantara. Dari Riau sendiri barang dagangan utama adalah rotan, getah, kelapa, beras, sagu, ikan, gambir, lada, kayu, teripang, dan lain-lain. Kombinasi saling melengkapi dan saling menguntungkan dari berbagai faktor: letak geografis yang menempatkan Riau di titik pusat pertemuan pelayaran dan perdagangan regional dan internasional, sumber daya alam yang lengkap dan sangat diperlukan. Maka, sebagian atau keseluruhan diteminan itu telah memikat kedatangan pihak luar, antara lain Belanda, ke Riau. (Junus, dkk., 2004:241-242).

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah perekonomian yang sudah tertata menjadi semakin membaik. Digambarkan dalam *Tuhfat al-Nafis*, banyak saudagar kaya yang tinggal di Riau. Umumnya mereka adalah saudagar Cina dan Bugis. Saudagar Cina membawa barang dagangan berupa mangkuk, piring, dan pinggan, sedangkan saudagar Bugis membawa barang dagangan berupa kain. Selain saudagar, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Ri'ayat

Syah juga banyak berdatangan Syed dari Arab, yang berdampak tempat-tempat seperti masjid dan surau sering didatangi oleh para saudagar Cina, Bugis, dan para Syed.

Sultan Mahmud Ri'ayat Syah bahkan berhasil membangun kawasan perairan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. Sebagai konsekuensinya, Kesultanan Riau-Lingga menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting dan menentukan di Asia Tenggara pada masa itu. Selain kejayaan dalam bidang perdagangan, pemasukan khas kerajaan diperoleh dari pertama hasil cukai pemasukan dan pengeluaran barang-barang untuk ekspor dan impor. Kedua cukai penimbunan barang-barang dan bahan-bahan di pelabuhan. Akan tetapi, penarikan cukai tersebut tidak memberatkan pemakai jasa pelabuhan, sebaliknya memberi kemakmuran kepada rakyat. Selanjutnya, dana-dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan gedung seperti balai pertemuan, surau-surau sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan Islam, armada perdagangan, dan sebagainya. Di dekat pusat pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, Hulu Riau, Sugai Carang, ada sebuah pulau yang bernama Pulau Biram Dewa. Di pulau itu dibangun istana untuk Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Haji, yang dikenal sebagai Istana Kota Piring, yang diperindah dengan hiasan porselin dari Cina dan dihiasi akar bahar yang dicampur dengan tembaga. Dalam *Tuhfat al-Nafis*, dijelaskan syahdan kata sahib al-hikayat adalah pada masa Yang Dipertuan Muda Raja Haji (menjadi Yang Dipertuan Muda) itu, mangkin ramai (dan bertambah ramainya negeri) Riau, serta (dengan) makmurnya serta (dengan) orang-orang (yang didalam) Riau (itu banyaklah yang) kaya-kaya, (sperti Syed Husain Aidid adalah ia diam di Sungai Timun cukup dengan gedungnya serta dengan perahu-perahu tiang sambungnya pulang pergi ke tanah Jawa berniaga, dan beberapa pula saudagar-saudagar Cina dan Bugis dan beberapa pula kapal dan keci dan wangkang kepala-kepala merah dan kepala hijau, berpuluh-pulh buah//demikian lagi kapal dan keci demikian juga banyaknya//yang berlabuh di dalam negeri Riau ((dan pulang pergi berniaga di dalam negeri Riau itu)) apalagi perahu-perahu Bugis dan (perahu-perahu—Jawa dan tob Siam beratus-ratuslah yang berlabuh di dalam negeri Riau itu, istimewa perahu-perahu rantau ((jangan dikata lagi)) bercucuk ikanlah daripada kuala hingga sampai ke Kampung Cina. Syahadan (maka) baginda Yang Dipertuan Besar serta Yang Dipertuan Muda (serta raja-raja Bugis dan Melayu) pun banyaklah mendapat hasil-hasil dan cukai-cukai (dan antara-antaranya Cina Wangkang itu dan tob Siam seperti segala mangkuk pinggan dan piring yang halus-halus dan yang kasar-kasar beberapa gedung. Apalagi

seperti kain perbuatan Cina seperti dewangga dan kimka dan belakang parang dan sitin beratus-ratus gulung dapatnya di dalam setahun angin. Dan segala tuan-tuan syed pun banyaklah datang dari tanah Arab apalagi lebai Jawa hingga penuh tempatlah di rumah wakaf dan masjid dan segenap surau orang besar-besar dan orang kaya kaya itu. Apalagi malam Jumaat berkumpullah ke dalam semuanya maulud nabi. (Matheson Hooker, 1991:386).

Perekonomian Kesultanan Riau-Johor yang mencapai puncaknya pada masa Sultan Mahmud Ri'ayat Syahdiimbangi dengan kehidupan berkesenian seperti joget dan wayang. Bahkan Yang Dipertuan Muda pun digambarkan menaiki perahu bersama dengan rombongan kumpulan joget berlayar dari Pulau Bayan, Terkulai, dan Senggarang. *Tuhfat al-Nafis* memerikan hal itu dengan jelas. Maka selesai daripada maulud memberi sedekah, ada yang kena jekketun, ada yang dapat ringgit, ada yang dapat rupiah. Dan lainnya daripada Jumaat itu beberapa pula permainan yang bermain seperti joget dan wayang. Dan beberapa pula penjajab perang yang sudah sedia di pelabuhan serta cukup (dengan) ubat pelurunya serta (dengan) panglima-panglimanya (dua) tuga puluh turun (dua) tiga puluh naik ke darat. (Adapun segala meriamnya pun digantunglah apabila datang sesuatu hajat baginya maka didekatkannya sahajalah penjajab-penjajab itu. Maka diturunkannya meriamnya, dan Yang Dipertuan Muda pun selalulah bermain-main dan berkayuh-kayuh serta bergonggong dan biduan bersama-sama, iaitu ke Pulau Bayan ((dan)) ke Terkulai dan bersiran ke Senggarang dan lainnya adanya. (Matheson Hooker, 1991:386).

Kesultanan Riau-Johor digambarkan sebagai sebuah negeri yang aman dan makmur. Sandang pangan sangat murah. Pedagang pun selalu untung bila berniaga di Riau. Gambir sebagai komoditas utama masa itu digambarkan dapat dibeli dengan harga murah di Riau yang kemudian dapat dijual lagi ke Jawa dengan harga berlipat ganda. Dalam *Tuhfat al-Nafis* dijelaskan pula, ((syahadan)) demikianlah di dalam beberapa tahun bersuka-sukaan ((kerana)) negeri (pun) aman lagi makmur, makan-makanan pun murah dan segala orang-orang berniaga pun banyak untung (seperti gambir dibeli dua jekketun didalam Riau dijual ((di tanah Jawa berganda-ganda untungnya sampai dijual)) delapan jekketun sepikul, terkadang sampai sepuluh jekketun. Dan beras Jawa dapat tiga rupiah Benggal sepikul. Dan apalagi makanan yang lainnya seperti gula batu dan gula pasir dan bawang dan lainnya daripada makan makanan sebab itulah menjadi makmur negeri.

Masih dalam *Tuhfat al-Nafis* lebih lanjut menambahkan penjelasannya. Demikian lagi sutera berharga lima suku sekati dan embalau harga tiga rial sepikul dan kain sutera tenun Siantan harga lapan ringgit sehelai, dan seluar harga lima rial sehelai, demikian yang tersebut kaul siarah Haji Podi. Dan beras Siam sepuluh ringgit sekoyan. Syahadan tersebut didalam tawarikh Tok Ngah adalah banyaknya orang di dalam sungai negeri Riau iaitu sembilan laksa. Kata setengah kaul lima laksa orang Melayu yang kecil besarnya jantan betina, dan luar rakyat di laut-laut ((dan)) empat laksa Bugis jati, serta peranakan kecil besar jantan betina lapan ribu Bugis di Sungai Timun, dan dua ribu di Pulau Biram Dewa dan Pangkalan Rama dan di Sungai Baru dan lain-lainnya tempat dan enam ratus anak raja-raja delapan puluh orang kaya-kaya dan saudagar-saudagar Bugis dan tuan-tuan dan lain Cina-Cina dan Keling-Keling. Syahdan adalah jenis-jenis makan-makanan semuanya murah di dalam negeri Riau melainkan jenis-jenis daripada kain cita-cita Eropah dan sakhlut dan kain putih dan kain antelas dan sapu tangan batik dan kain batik iaitu khabar orang terlalu mahalunya. (Matheson Hooker, 1991:387).

Kehidupan masyarakat Kesultanan Riau-Johor yang aman dan makmur mulai terganggu saat kedatangan Kompeni Belanda yang berlabuh di Pulau Bayan. Kedatangan Belanda ke Pulau Bayan dan membawa kapal rampasan dari perompak Inggris dari Riau ke Malaka adalah sebagai pelanggaran kedaulatan atas Riau. Dengan kata bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab utama terjadinya peperangan antara Belanda dengan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang adalah menyangkut perdagangan, ekonomi di Selat Malaka dan Kota Malaka sendiri. Karena Kerajaan Riau ikut menjadi pihak yang menentukan dan berperan secara internasional. Sejarah mencatat antara Belanda dengan Kerajaan Riau, yang diwakili oleh Raja Haji selaku Yang Dipertuan Muda atas nama Sultan Mahmud Ri'ayat Syah ada perjanjian tentang pembagian harta dari kapal rampasan. Kata Rida K Liamsi, dalam bukunya *Tanjungpinang Kota Bestari*, tahun 1782, terjadi sengketa antara Riau dengan Belanda karena Belanda melanggar kedaulatan Riau dalam kasus kapal "Betsy" dan 1154 peti candu sebagai rampasan dari kapal perompak Francis. Pihak Riau meminta haknya, tetapi tidak dihiraukan Belanda. Dan, akhirnya meletuslah perang antara Belanda dengan Riau dalam tahun 1782-1784 (Liamsi, 1989:8). Dan tersebut itu peperangan Belanda dengan Riau sehingga berlanjutan sampai tahun 1787. Juga dapat dilihat Hasan Junus, *Raja Haji Fisabilillah Hannibal dari Riau* (Junus, 2000:32-37).

Hal itu membuat Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dan Raja Haji merasa sudah diinjak-injak marwahnya dan mereka merasakan marwah kerajaan perlu ditegakkan dan mesti memberi protes keras terhadap Belanda. Dalam *Tuhfat al-Nafis* dijelaskan, syahdan (kata sahib al-hikayat) adalah permulaan sebab kegeruhan negeri Riau itu** (dan sebab kerosakannya), maka iaitu atas dua kaul. Sebermula adalah kaul yang pertama yang aku dapat didalam sejarah (dan siarah pihak Siak dan) Selangor sebab yang zahirnya (serta) aku periksa (khabar-khabar yang menceterakan oleh orang tua-tua yang semasanya dan yang mengiringi akan dia). Iaitu adalah Yang Dipertuan Muda Raja Haji ada perjanjian konon dengan kompeni Belanda, musuh (kompeni) Belanda musuh Raja Hajji. Adapaun jika ada pekerjaan tangkap-menangkap rampas-merampas musuh nya itu ada bahagian/nya/ di dalam itu (antara keduanya jika Raja Haji pun pekerjaan konon). Kemudian datanglah satu kapal musuh Belanda itu masuk ke dalam Riau berlabuh di Pulau Bayan. (Matheson Hooker, 1991:399).

Setelah kedatangan Kompeni Belanda, dan berlanjut dengan berperangan antara Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dengan Belanda rentang masa 1782—1784, banyak saudagar Cina yang mengalami kerugian. Demikian juga dengan perdagangan beras dari Jawa dan Bali terpaksa dihentikan karena mengalami kerugian. Bahkan, tak hanya beras, tetapi juga komoditas perdagangan gambir, agar-agar, dan gamat terhenti. Negeri yang dulu aman dan makmur, setelah kedatangan Kompeni Belanda mengalami kemerosotan ekonomi. Berikut *Tuhfat al-Nafis* menyebutkan, demikianlah lagi di dalam Negeri Riau selama-lama Kompeni Belanda membuka pekerjaan perang dengan Raja Riau, maka beberapa kerugian daripada keuntungan orang-orang yang berniaga, dan saudagar-saudagar di dalam Negeri Siam dan Cina dan Koci sebab kerana segala mereka itu membawa ((dagangan)) ke sebelah ((tanah)) Johor juga yang kebanyakan. Dan demikian lagi beras dari Jawa dan Bali semuanya dibawa ke pihak Riau dan Johor juga berpulu sama dagangan gambir dan lainnya, demikian lagi wangkang-wangkang Cina berpulu dagangannya dengan dagangan orang kulit hitam seperti tiang wangkang dan agar-agar dan gamat lainnya daripada dagangan wangkang. Apakala sudah Kompeni Belanda membuat perang itu semuanya itu terhentilah pekerjaan beberapa kerugian atas orang yang mencari kehidupan. Apalagi orang yang berlayar-layar sepanjang laut didalam kesusahan ketakutan di dalam berterik beruntun dengan kapal perang dan penjajab terkadang hilang dengan nyawa. Maka adalah pekerjaan yang tersebut itu nyatalah hendak merosakkan dunia yang Allah Taala suruh hidupkan

dunia ini dengan jalan yang adil dan makmurnya. Syahadan demikian dakwa segala mereka itu konon kepada gubernur Malaka. (Matheson Hooker, 1991:428).

Dalam kemajuan perdagangan dan ekonomi ini, maka ada baiknya dikaitkan lagi dengan peperangan yang terjadi antara Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang. Karena ini pada akhirnya berkait erat dengan kemajuan ekonomi kerajaan, baik di Hulu Riau maupun kelak di Lingga. Bahwa nyatalah peperangan yang berkecamuk di Teluk Ketapang, yang hampir saja berhasil mengusir Belanda dari Malaka, kemudian Raja Haji gugur sebagai syuhada, belum memuaskan nafsu menjajah Kolonial Belanda. Mereka pun dengan kekuatan bertambah-tambah datang lagi menyerang pusat Kerajaan Riau di Tanjungpinang. Namun, penyerangan itu dapat dipatahkan oleh Sultan Mahmud dengan pasukannya. Setelah menghabiskan satu garnizun Belanda di Tanjungpinang yang menyebabkan pihak musuh itu melarikan diri ke Malaka dan demi tetap berdaulat serta mencapai kemajuan, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah mengambil keputusan memindahkan ibukota Kesultanan Riau-Johor ke Lingga. Keputusan itu sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Raja Indera Bungsu dan Datuk Bendahara. Perpindahan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah ke Lingga didampingi oleh Raja Indra Bungsu. Bersamaan dengan itu, Bendahara mengungsi ke Pahang dan sebagian penduduk lainnya ke Trengganu. Penduduk yang menetap di Riau adalah orang-orang Cina yang berkebun gambir dan lada.

Sebagaimana catatan dalam *Tuhfat al-Nafis* yang menyebutkan, kemudian maka musyawarahlah baginda dengan Raja Indera Bungsu dan Datuk Bendahara sekalian (maka ((titah baginda)) “Tiada(lah) terhemat (duduk) di dalam negeri Riau sebab Holanda-Holanda itu tentu datang semula ia melanggar Riau ((padahal didalam negeri) kekuatannya sudah tiada lagi. Jikalau begitu baik kita pindah ke Lingga. Maka sembah segala orang besar(besarnya), “Manamana titah sahaja(lah) (adanya). Syahadan baginda pun (bersiaplah beberapa kelengkapan) berangkat (berlayar) ke Lingga bersama(sama) Raja Indra Bungsu serta segala orang Melayu/peranakan Bugis kira-kira lebih dua ratus buah perahu (yang di dalam Riau itu besar kecil yang) mengiringkan baginda (berangkat) pindah ke Lingga itu. Syahadan adapun suku-suku (Melayu/pihak Datuk) Bendahara (itu) berlayarlah (ia) ke Pahang kira-kira tengah dua ratus perahu-perahu (besar kecil dan setengah suku-suku ke Trengganu.

Tuhfat al-Nafis menjelaskan hal itu di dalam buku beliau tersebut lebih lanjut, maka berpecahlah segala anak-anak raja dan orang baik-baik dan orang/kaya-kaya dan

orang/kebanyakan membawa dirinya masing-masing haluannya, dan tiadalah (yang tinggal) lagi di dalam (negeri) Riau melainkan Cina-Cina yang didalam hutan sahaja yang tinggal yang mengambil kuli(kuli) kepada orang-orang Melayu dan kepada (orang-orang) Bugis yang berkebun-kebun gambir dan lada hitam. Adapun Cina-Cina menjadi kuli-kulinya itu demikianlah mula-mulanya sebab kerana itulah banyak Cina-Cina yang tinggal tiada pindah kesana ke mari. Syahdan rosaklah negeri Riau. (Matheson Hooker, 1991:428).

Pada awal perpindahan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah ke Lingga, mau tidak mau, beliau harus berhadapan dengan masalah. Ini dapat dipahami karena penduduk Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang sudah bertebaran ke Trengganu, Pahang, dan Kelantan. *Tuhfat al-Nafis* menjelaskan situasi yang tak mudah, yang mesti diatasi oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Alkisah maka tersebut(lah) perkataan ((Baginda)) Sultan Mahmud. Apabila baginda (itu) sudah tetap di dalam negri/Lingga maka tiap-tiap hari di dalam kesusahan juga, kerana segala anak raja Melayu dan Bugis sudah bertaburan ke sana ke mari. (Ada yang ke Trengganu, ada yang ke Pahang, ada yang ke Kelantan, ada yang berbuat tempat di Selat Bulang) mencari rezekinya pun tiada berketentuan, melainkan kebanyakan merompak jugalah yang/betul yang/boleh lekas mendapat rezeki. Maka di dalam hal itu (maka) baginda pun (hendak) berangkat ke Trengganu (akan) hendak minta/tolong/bicarakan kepada Yang Dipertuan Trangganu memperbaiki negeri Johor dan Riau yang sudah dirosakkan oleh Kompeni Belanda (itu) pada zahirnya. Dan pada batinnya semuanya fitnah itu daripada Yang Dipertuan Terangganu juga datangnya seperti (yang telah) tersebut pada Perang Linggi dan Perang Riau. (Matheson Hooker, 1991:428).

Sultan Mahmud Ri'ayat Syah kembali berusaha memperbaiki perekonomian yang mengalami kemerosotan tajam dengan membangun Lingga menjadi sebuah kota lengkap dengan istana dan kota paritnya. Dalam kaitan ini Lucas Partanda Koestoro dalam *Dapur Gambir di Kebun Lama Cina, Jejak Kegiatan Perekonomian Masa Lalu Sebagai Potensi Sumber Daya Arkeologi Pulau Lingga*. Balai Arkeologi Medan (t.t) menjelaskan hubungan perdagangan Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang dengan bangsa lain tidak hanya memperkuat perekonomian bagi kerajaan tetapi juga menghasilkan keragaman budaya. Keragaman itu memperkaya bentuk fisik kebudayaan di Lingga, seperti masjid dengan penggunaan lantai

marmar dan keramik Cina pada bagian mustakanya, atau nisan-nisan makam masyarakat Bugis yang masih mencirikan bentuk benda budaya daerah asalnya.

Lebih lanjut dijelaskan Lucas Partandas Koestoro (t.t.) bahwa tinggalan yang terdapat di Daik mengindikasikan adanya pembagian lokasi pemukiman seperti istana, pejabat istana, masyarakat biasa, dan orang asing. Istana ditempatkan terpisah dari perkampungan masyarakat lainnya, istana terletak di Damnah yang lokasinya di sebelah barat kota kerajaan, lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Kampung para pedagang atau pendatang lainnya umumnya terletak di tepi Sungai Daik yang berada di sebelah timur kota kerajaan karena sungai berperan sebagai sarana transportasi pedagang yang membawa barang-barang dagangan. Pemukiman bagi pejabat dan masyarakat biasa tersebar di antara kedua tempat tersebut. Pemukiman para pejabat terletak di tempat yang sesuai dengan profesi masing-masing seperti rumah bagi pejabat pabean yang berada di Pabean sekarang ataupun rumah keturunan Abdul Rahman yang berpangkat letnan di kerajaan terletak di Kampung Cina, berdekatan dengan pintu keluar-masuk kerajaan. Letnan Abdul Rahman tersebut kemungkinan adalah komandan pasukan penjaga di kerajaan yang mengawasi pintu masuk ke Kerajaan Lingga melalui Sungai Daik.

Catatan berusia ratusan tahun di dalam *Tuhfat al-Nafis*, menjelaskan pula tentang hal itu. Syahdan kata sahib al-hikayat adalah pekerjaan rompak-merompak itu mana-mana (wangkang) dagang yang hendak masuk ke negeri Lingga tiadalah dirompaknya (konon). Syahdan duduklah baginda di dalam negeri Lingga membuat istana di hulu serta (dengan) kota paritnya. (Matheson Hooker, 1991:428). Dalam kaitan ini, dapat ditegaskan jikapun terjadi tindakan perompakan yang dilakukan dari pihak Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, itu terjadi terutama di perairan Selat Malaka. Yang dirompak pun bukanlah kapal-kapal rakyat biasa sebagai pedagang, melainkan kapal-kapal asing yang membawa barang dagangan, terutama yang berhubungan dengan Belanda di Malaka. Tujuan perompakan bukan sekadar mendapatkan hasilnya untuk kepentingan pribadi orang-orang yang merompak, melainkan untuk kembali menopang bangkitnya ekonomi Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang. Tujuan yang paling utama adalah untuk mengarau, mengganggu, dan melumpuhkan perdagangan Belanda dengan berbagai pihak asing sehingga lambat laun Kota Malaka sebagai basis Belanda kala itu semakin sepi dan lumpuh. Sejarah mencatat upaya tersebut membuahkan hasil. Belanda semakin terdesak sehingga suatu waktu Malaka jatuh ke tangan Inggris pada 1795.

Sempena itu Sultan Mahmud Ri'ayat Syah pun kembali dapat melaksanakan sepenuhnya kekuasaan dan kewenangan atau tanggungjawabnya sebagai Yang Dipertuan Besar Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang serta daerah-daerah takluknya sehingga kemajuan pembangunan semakin nyata diperbuat dan kemajuan ekonomi bertambah-tambah membaik. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat negeri menjadi kenyataan lagi. Puncaknya, jadilah pusat kota di Lingga dan Pulau Penyengat sebagai taman kebudayaan dan tamadun Melayu. Sultan Mahmud juga telah mewariskan sifat dan sikap pantang menyerah dengan musuh (penjajah) dan jiwa kesatria, pejuang, dan pahlawan sepanjang hayat. Sikap dan sifat itu diwariskan kepada zuriat-zuriat diraja, baik keturunan Melayu maupun Bugis di dalam Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Alhasil kelak sepeninggalnya di kawsasan kerajaan Melayu yang besar dan luas itu, lahirlah cendikia-cendikiayang berjiwa patriot, pejuang sejati, fi sabilillah bagi bangsa sebagaimana ditampakkan oleh Raja Ali Haji, Haji Ibrahim, Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam, dan Aisyah Sulaiman Riau, dan masih banyak lagi nama lainnya. Dan jiwa perjuangan itu terus berkobar sampai perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.²⁸

4. Membangun Kembali Perdagangan dan Membuka Pertambangan Timah

Sebagaimana dijelaskan di atas, Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sebenarnyah mengukuhkan diri sebagai kelanjutan daripada Kerajaan Melayu Melaka. Berhubung dengan itu, bidang perdagangan dan kemajuan ekonomi harus dicapai dan diwujudkan sampai ke puncak. Kemakmuran rakyat negeri, kejayaan kerajaan, dan marwahnya mesti pula terjaga dan wujud di antara bangsa-bangsa di dunia, termasuk di mata negara-negara penjajah (asing). Untuk benar-benar mewujudkan kemajuan melalui jalan perdagangan dan ekonomi tersebut, mau tak mau, Selat Malaka dan Kota Melaka harus dikuasai. Oleh karena itu, bagi Kerajaan Riau-Lingga, tiada akan pernah terjadi kesepakatan kerjasama yang berwujud nyata (terrealisasi di lapangan, melainkan hanya di atas kertas) dan kekal dengan pihak Belanda.

Lihatlah keperkasaan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang terhadap Belanda dalam memainkan perannya bagi perdagangan dan ekonomi di Selat Malaka. Hal itu sangat merasahkan Belanda di Malaka sehingga Belanda sangat bernafsu untuk mengenyahkan Sultan Mahmud

²⁸ Lihat Ar. Kemalawati dalam buku *Sejarah Perjuangan Raja Haji Fisabilillah dalam Perang Riau Melawan Belanda (1782-1784)* (Abrus, 1988:250—251).

Riayat Syah dan Raja Haji sampai kawasan kerajaan besar itu dapat dikuasai mereka. Akan tetapi Belanda tak berhasil mewujudkannya karena perlawanan tiada henti dilakukan. Geliat perdagangan dan ekonomi terus dibangun pula. Selepas Raja Haji gugur sebagai syuhada di Teluk Ketapang pada 18 Juni 1784, Belanda menyangka sudah tamatlah riwayat Sultan Mahmud Riayat Syah dan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Ternyata sebaliknya, semakin kukuh. Perlawanan terhadap Belanda terus berkobar, terutama di kawasan Riau. Menurut Taufik Abdullah dalam buku yang sama, dominasi Belanda sewaktu-waktu dilawan. Sultan Mahmud—bersama-sama dengan para “perompak lanun”—berhasil menghancurkan benteng Belanda di Riau (1787). (Abrus, 1988:178).

Sultan Mahmud Ri’ayat Syah berusaha membangun kembali jaringan perdagangan yang sudah terbentuk. Salah satunya perdagangan beras dari Jawa, sedangkan perkebunan gambir tetap dijalankan oleh orang-orang Cina. Sultan Mahmud sudah paham betul perjalanan sejarah Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, yang merupakan keterusan Kerajaan Bintan, Malaka, dan Johor, yang pasang-surut, turun-naik, jatuh-bangun oleh karena konflik dalam kerajaan sendiri ataupun karena berhadapan dengan Portugis dan Belanda. Baginya, kedudukan kawasan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang yang strategis, terutama dalam jalur perdagangan dunia, sebagai potensi dan modal besar untuk kembali menjayakan kerajaan. Oleh karena itu, Selat Malaka mesti ikut ambil bagian dalam peran lalu-lintas pelayaran dan perdagangan.

Penjelasan di atas sejalan dengan penjelasan Lucas Pantanda Koestoro dalam *Dapur Gambir Di Kebun Lama Cina, Jejak Kegiatan Perekonomian Masa Lalu Sebagai Potensi Sumber Daya Arkeologi Pulau Lingga*. Balai Arkeologi Medan (Tt). Jauh dari keramaian kota pesisir, kelompok masyarakat Cina itu menyiapkan lahan di tengah hutan. Mereka mendirikan tempat tinggal di sekitar kebun dan dapur gambir. Rumah panggung, di Kebun Cina Lama ditandai oleh umpak batu yang menjadi dasar tiang-tiang rumah, memungkinkan mereka untuk bertempat tinggal dengan nyaman. Kayu dan bambu serta atap ilalang/daun nipah di peroleh di lingkungan sekitarnya. Air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta proses pembuatan gambir dengan mudah didapat oleh adanya sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan kualitas air yang baik di dekat tempat tinggal dan dapur gambir. Sementara itu, berbagai jenis wadah yang dibutuhkan dapat dipenuhi dengan mendatangkan berbagai produk keramik dan tembikar dari berbagai tempat, terutama dari Cina. Bahan makanan utama juga diperoleh lewat

jalur perdagangan, yang merupakan salah satu bentuk kontak sosial, yang berlangsung secara rutin di pesisir pantai. Beras, sagu, dan ikan diperoleh dengan mudah dari para pedagang yang menjajakannya di pusat-pusat keramaian. Pusat keramaian yang ada di Pulau Lingga sekaligus menjadi tempat orang menjajakan gambir yang dihasilkan. Selain kelompok pedagang Melayu bawahan penguasa Melayu, peran orang Cina juga cukup besar dalam memperdagangkan gambir. Mereka memiliki hubungan yang erat juga dengan pedagang lain di berbagai tempat yang memerlukan produk tersebut.

Menurut Tanu Suherly dalam *Sejarah Perjuangan Raja Haqji Fisabilillah dalam Perang Riau Melawan Belanda (1782—1784)*, kedudukan geografis Kerajaan Melayu Riau terletak pada pelayaran antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan serta antara Selat Malaka dan Laut Jawa. Kedudukan tersebut memiliki nilai strategis dalam jalur perniagaan, tetapi juga memiliki kerawanan dalam bidang keamanan. Oleh karena itu, keberhasilan pemimpin kerajaan itu (dapat disebutkan namanya ialah Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah yang dibantu oleh Yang Dipertuan Muda III Riau Daeng Kamboja, berlanjut ke Yang Dipertuan Muda IV Riau Raja Haji, lalu Yang Dipertuan Muda V Riau Raja Ali dan sehingga Yang Dipertuan Muda VI Riau Raja Ja'afar, *Pen.*) membangun negerinya adalah merupakan sukses besar, mengingat besarnya ancaman dari Kompeni Belanda yang sedang berusaha ingin menguasai wilayah Nusantara. Dan nyatalah pada waktu kerajaan itu lahir, jalur pelayaran Malaka—Jakarta (Batavia) sudah berada di bawah kontrol Kompeni Belanda. Mereka hendak memonopoli perdagangan dan mengukuhkan keudukannya di Jakarta pada 1619 dan memberi nama Jakarta sebagai Batavia. (Abrus, 1988:187).

Di dalam *Tuhfat al-Nafis* disebutkan pula syahdan (kata sahib al-hikayat) apabila kompeni Belanda mendengar khabar/orang-orang Cina itu (telah difikirkannya), maka tiadalah diusirnya segala orang Melayu (yang lari-lari) itu, dan Piter Jakub pun baliklah ke Malaka ditinggalkannya satu fetus serta satu kapal (perang serta beberapa jaga-jaga) bersama-sama. ((Maka)) diperbuatnyalah loji di Tanjungpinang itu (itu) dan Cina-Cina itu pun disuruhnyalah mengerjakan, kebun-kebun gambir (orang) Melayu yang tinggal(tinggal) itu dan perahu-perahu Jawa pun disuruhnyalah datang berniaga membawa beras ke dalam Riau berpalu-palu dengan gambir-gambir). Akan tetapi berapa-berapa kesusahan atas segala orang yang berniaga karena perompak sepergti anak hayam umpamanya/daripada kebanyakan. Maka tiada berhenti Kompeni

Holanda payar memayar keruhlah lautan itu. Syahadan adapun Kompeni Inggris juga membawakan, ubat bedil dan meriam dan senapang berjual beli didalam negeri Melayu berpulu dengan dagangan negeri(negeri) Melayu, demikianlah halnya sehari-hari ((adanya)). (Matheson Hooker, 1991:428).

Selain komoditas beras dan gambir seperti tersebut di atas, perdagangan timah, apiun, obat bedil, peluru, dan meriam senapang kembali mewarnai perekonomian Kesultanan Riau-Johor. Sebagai diterangkan dalam *Tuhfat al-Nafis*, adalah kata riwayat orang tua-tua ada konon satu orang putih kapitan kapal sahabat Yang Dipertuan Muda itu, memang/memang/pada masa di Linggi Yang Dipertuan Muda berniaga-niaga timah-timah dengan dia, jadi bersahabatlah tolong-menolong dengan Yang Dipertuan Muda itu pada pekerjaan berniaga-niaga itu. Maka apabila Yang Dipertuan Muda sudah pulang ke Riau semula, maka datanglah ia mendapatkan Yang Dipertuan itu ke Riau padahal kapalnya itu ada membawa apiun beribu-ribu peti. Maka tatkala ia berlayar ke China, maka ditinggalkannya setengah kepada Yang Dipertuan Muda minta jualkan di dalam Riau. Nanti apabila ia balik dari negeri China, jika habis laku diambil wangnya, dan adalah pula keuntungan Yang Dipertuan Muda di dalam itu. Syahadan maka apiun itulah diserahkan oleh Yang Dipertuan Muda kepada segala perahu-perahu Bugis dan perahu-perahu dagang mana-mana orang yang sahabat handai Yang Dipertuan Muda itu. Maka habislah apiun itu konon, maka cukuplah akan pembayar hutang marhum. (Matheson Hooker, 1991:316).

Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, juga membuka penambangan timah di Singkep. Selain dikerjakan oleh orang Melayu dan Bugis, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah juga mendatangkan orang-orang dari Bangka untuk penambangan timah tersebut. Dengan demikian, perekonomian berhasil dibangun kembali. Bahkan, masyarakat Kesultanan Riau-Johor kembali ramai dan didatangi penduduk dari berbagai kawasan di nusantara. *Tuhfat al-Nafis* kembali mengisahkan hal itu. Alkisah maka tersebut(lah) perkataan Baginda Sultan Mahmud di dalam Negeri Pahang. Maka apabila dinantikan bicara Yang Dipertuan Terengganu perbaiki-perbaiki dia dengan Kompeni Belanda, (maka) tiada juga juga datang suruhnya atau khabar(nya), maka Baginda (Sultan Mahmud) pun berangkatlah balik ke Negeri Lingga. Maka apabila sampai ke (negeri) Lingga tetaplah ia di dalam Lingga serta orang-orang Melayu dan peranakan Bugis sehari-hari jua memikirkan pencarian (segala) orang-orangnya (sama ada sebelah suku-suku Melayu atau sebelah Bugis). Maka dengan takdir Allah Taala maka terbuka

((tanah)) Singkep, maka Baginda (Sultan Mahmud) pun menyuruhlah orang-orang Melayu dan peranakan Bugis mengerjakan timah-timah di situ serta (diaturkannya) masing-masing (dan masing-masing) bahagian (dan) datanglah kapal-kapal Inggris ke situ meninggalkan beberapa wang cengkeramnya timah pulang pergi. Maka dapatlah sedikit-sedikit rezeki dan kehidupan orang-orangnya. Dan perahu-perahu dari (negeri) timur (timur) pun datang (juga) membawa beras ke Lingga (dan beras-beras dari dari rantau-rantau pun datang juga), dan wangkang-wangkang (dari) China pun datang juga. Maka di dalam hal itu perompak-perompak pun banyak juga karena baginda (Sultan Mahmud) belum (tetap lagi) berdamai dengan Kompeni Belanda, dan Kompeni Inggris pun selalu juga membawakan ubat bedil dan peluru dan meriam senapang/dan/berpalu dengan (dagangan) timah-timah dan lainnya. Maka besarlah perompakpadaseketika itu. Adalah kepalanya/perompakitu/Panglima Raman namanya, hingga merompak ia ke tanah Bangka (hingga) lalu(lah) ke Jawa. Maka banyaklah orang Bangka dan (orang) Jawa ditawannya dibawanya ke Lingga dijadikannya isi negeri Lingga. Lama-lama sukalah orang-orang Bangka itu diam di Lingga membuat kebun dan dusun tiadalah ia mau balik ke Bangka lagi. Terkadang datang sanak-sanak saudaranya dari Bangka dengan suka hatinya (tiadalah dengan rompak) memperhambakan dirinya di bawah perintah baginda Sultan Mahmud. (Maka) jadilah ramai (didalam) negeri Lingga. (Matheson Hooker, 1991:447).

Meskipun Belanda sangat bernafsu hendak menguasai usaha perdagangan timah, tetapi mereka tak dapat menaklukkan Sultan Mahmud. Dan nyatalah bahwa Sultan Mahmud tak sudi melakukan perhubungan dagang dengan Belanda. Malahan pada bagian lain Sultan Mahmud menetapkan penambangan timah dilakukan sendiri oleh Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Penjualannya dilakukan kepada Inggris. Timah di Pulau Singkep yang berhasil dirintis oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah ini dalam perkembangannya dikenal sebagai salah satu tambang timah terbesar di Indonesia selain Bangka di Bangka-Belitung. Tentang ditambangnya timah di dalam wilayah Kerajaan Riau, semakin memberikan hasil yang jelas pada masa Yang Dipertuan Besar Mahmud Ri'ayat Syah.

Penjelasan ini, dapat diikuti dan dipahami dari tulisan Sutedjo Sujitno dalam bukunya *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia*, bahwa: Ir.Hovecyang melakukan penelitian timah di Kepulauan Riau tahun 1963 berpendapat bahwa: "Penggalian timah untuk pertama kali dilakukan oleh orang-orang pribumi di Pulau Singkep telah terjadi sejak dahulu kala, dan *adalah*

lebih tua umurnya daripada di Bangka.....”. Atas dasar pendapat tersebut, penambangan timah di Singkep telah dilakukan sebelum tahun 1709. Bahwa timah sudah dihasilkan dari Pulau Singkep atau setidaknya tidaknya dari kawasan Kepulauan Riau (Kerajaan Riau-Johor-Lingga-Pahang) semasa Sultan Mahmud Ri’ayat Syah. Pada tahun 1788, Sultan Mahmud Ri’ayat Syah memindahkan pusat pemerintahannya ke Pulau Lingga dan mengutip pajak penjualan timah. Pada tahun 1792, keluarga Abang Tawi, Bangsawan Mentok (Bangka) yang pindah ke Singkep, diterima oleh Sultan Lingga dan diberi hak untuk menambang timah di pulau itu. Pada tahun 1812, Sultan mulai mengusahakan timah di Sungai Buluh, yang dilengkapi dengan kincir air untuk memompa kolong. Tidak kurang dari 70 orang Cina bekerja di tambang Sungai Buluh itu dan selanjutnya mewajibkan para penambang untuk menjual hasil timah kepadanya yang akan dibayar dengan harga tetap (Sujetno, 2007:18).

Menurut buku *Sejarah Perjuangan Raja Haji Fisabilillah dalam Perang Riau melawan Belanda (1782—1784)*, Kerajaan Riau menjadi pusat perdagangan atau pelabuhan transit antara Timur dan Barat. Hal ini disebabkan sangat strategisnya letak Riau dalam jalur perdagangan itu, juga sebagai akibat dari berkembangnya arus perdagangan ke Riau pada masa itu. Pedagang-pedagang India, Sri Lanka, Arab, dan negara Barat: Belanda, Inggris, Perancis, dan Portugis telah bertarung memperebutkan Riau-Lingga. Inggris berusaha mendekati Kerajaan Riau-Lingga (Sultan Mahmud dan Raja Haji) agar dapat secara bersama-sama menghadapi Belanda. Akan tetapi, Sultan Mahmud tak mau berkerjasama semacam itu, hanya sebatas kerjasama dalam perdagangan saja, utamanya timah. (Abrus, 1988:22). Kata A.B. Lopian dalam buku yang sama, keramaian dan kemakmuran Riau-Lingga menunjukkan bahwa pada waktu itu (pertengahan abad XVIII) pusat pelayaran dan perdagangan di kawasan perairan Selat Melaka telah berpindah ke Riau yang meneruskan kekuasaan Johor—pusat pelayaran dan perdagangan di kawasan ini pada abad XVII—setelah mengalami kemelut sepeninggal Sultan Mahmud (maksudnya adalah Sultan Mahmud Syah II, Sultan Johor ke-8, *Pen.*) pada akhir Juli atau Agustus 1699. (Abrus, 1988:198-199).

5. Penutup

Peran Sultan Mahmud Ri'ayat Syah yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, seperti yang telah diuraikan di atas sangat memungkinkan untuk mengangkat beliau menjadi pahlawan nasional. Di samping itu, jasanya juga luar biasa dalam pembangunan Kota Daik pada saat Lingga dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan dan berbagai kota di daerah takluknya.

Sepanjang perjalanan sejarah Kesultanan Riau-Lingga Sultan Mahmud Ri'ayat Syah telah menjadi perintis bagi kemajuan ekonomi di antaranya sebagai berikut: membangun Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dengan pusat pemerintahan dan perekonomian di Ulu Riau, Sungai Carang, membangun Lingga dan Pulau Penyengat sebagai sebuah kota yang lengkap dengan infrastrukturnya sehingga menjadi pusat perdagangan dan kemajuan ekonomi, kebudayaan, dan tamadun Melayu. Selain itu, beliau juga membuka pertambangan timah di Pulau Singkep yang dalam perkembangannya dikenal sebagai salah satu tambang timah tertua dan terbesar di Indonesia. Beliau juga melanjutkan perkebunan gambir di Lingga yang sebelumnya sempat merosot di Riau.

Dari paparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam situasi sulit dan selalu mendapat tekanan Belanda, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah tetap berjaya dan telah berhasil meletakkan landasan untuk kelanjutan pemerintahan berikutnya. Alhasil, wilayah Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang itu setelah Indonesia dan Malaysia merdeka, menjadi beberapa negara bagian di Malaysia dan beberapa provinsi di Indonesia, bahkan menjadi sebuah negara, yakni Singapura. Terbentuknya kota-kota dan pemerintahan daerah dan negara bagian (kerajaan negeri) di Malaysia, dan Negara Singapura tersebut tak terlepas dari jasa besar, agung, dan fisabilillah yang sudah dicurahkan sepanjang hidup Sultan Mahmud Ri'ayat Syah sepanjang kekuasaannya sebagai Yang Dipertuan Besar Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang (1761—1812).

Kesungguhan, kegigihan, dan kepiawaian beliau membela bangsa dan tanah airnya, yang antara lain menjadikan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sebagai pusat perdagangan dunia dan tak kenal takut dari upaya penjajahan yang dilakukan oleh pihak Belanda telah membuktikan bahwa di dalam dirinya memang mengalir darah pemimpin besar dan pahlawan sejati. Jasanya dalam memajukan perdagangan dan ekonomi di kawasan yang disebutkan di atas ternyata semakin berwujud setelah berdiri tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Dengan kata lain, kemajuan di bidang perdagangan dan ekonomi yang berlangsung dan diperankan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura hingga dewasa ini dan masa-masa mendatang amat berantai dan berkait-erat atau bersambung langsung dengan perdagangan dan kemajuan ekonomi yang pernah dibuat dan dicapai puncaknya oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah atau Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa Sultan Mahmud Ri'ayat Syah adalah Pahlawan Perdagangan dan Kemajuan Ekonomi di Asia Tenggara pada masanya.

PERAN SULTAN MAHMUD RI'AYAT SYAH MENJADIKAN KERAJAAN RIAU-LINGGA SEBAGAI PUNCAK TAMADUN MELAYU

1. Pendahuluan

Tamadun Melayu mempunyai sejarah yang panjang dan masih berterusan hingga setakat ini. Peradaban Melayu itu mempunyai wilayah geografi yang luas yaitu sebuah wilayah samudera yang berwujud tamadun maritim. Peradaban Melayu merupakan satu-satunya tamadun maritim di dunia (Abdullah Hasan, 2010:1). Dengan demikian, walaupun terdapat banyak pusat tamadun Melayu dalam sejarahnya yang panjang, pada hakikatnya ia adalah sebuah tamadun yang sama dalam sebuah kesinambungan. Tamadun Melayu dialami oleh manusia yang mengongsi himpunan memori yang sama yaitu orang Melayu. Tamadun Melayu bertumbuh, berkembang, dan maju dalam kestabilan politik yang lama dan berterusan yang dinaungi oleh perundangan-undangan dan budaya yang kompleks.

Kata *tamadun* yang digunakan di dalam tulisan ini tak hanya merujuk kepada kemajuan kebendaan (material) sesebuah masyarakat. Sebenarnya istilah *tamadun* ditinjau dari sudut etimologi berasal dari kata *maddana* dalam bahasa Arab. *Maddana* yang merupakan verba (kata kerja) merujuk kepada perbuatan 'membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti'. Dari perkataan *maddana* ini terbentuk pula kata *madani* yang merupakan ajektiva (kata sifat). *Madani* merujuk kepada makna 'sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji'. Kedua-dua kata *maddana* dan *madani* sendiri sebenarnya berasal daripada *din* yang bermakna 'agama' yaitu menggambarkan kehidupan beragama (lihat Marsuki, 2006). Dengan demikian, tamadun berkaitan dengan perkembangan peradaban yang direkayasa oleh manusia berdasarkan nilai-nilai agama yang dianutnya.

Pengertian tamadun berdasarkan etimologi seperti yang dikemukakan di atas, secara tidak langsung menekankan dua hal yang penting dalam memberikan takrifan (definisi) yang lengkap terhadap tamadun. Penakrifan tamadun yang lengkap harus menggabungkan kedua-dua hal itu yang berkaitan dengan kehalusan budi pekerti dan pembangunan perkotaan atau petempatan. Secara lebih sempurna, tamadun boleh ditakrifkan sebagai jumlah capaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran, dan kemajuan (seperti sains, teknologi, kesenian, kesusasteraan, dan lain-lain) yang tinggi, baik, halus, dan sopan ke arah pembentukan pribadi dan masyarakat yang memiliki kepribadian, tatasusila, dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa.

Tamadun juga sering disamakan pengertiannya dengan peradaban yang membawa makna keadaan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani dalam sesebuah bangsa dan masyarakat. Selain itu, kata yang sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk memberi maksud tamadun ialah *civilization*. Perkataan itu berasal dari perkataan *civitas* dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar atau kota. Istilah *civilization* juga menekankan penggabungan antara ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan (material).

Kehidupan yang berbudi pekerti mulia dan bermoral tinggi merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan bertamadun. Pembinaan sifat yang seperti ini pada diri seseorang begitu berkaitan erat dengan kepercayaan yang diterima, sedangkan kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama. Peran agama dalam membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta perilaku tindakan mereka dalam kehidupan memang sangat penting. Di sini dapat diperlihatkan bagaimana agama mempunyai kaitan yang begitu erat dengan tamadun sebagaimana yang digambarkan oleh tamadun-tamadun Melayu pada masa silam.

Tamadun dan budaya mempunyai perhubungan yang erat karena budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. Budaya kehidupan sesebuah masyarakat merujuk kepada tatacara mereka bertindak ke atas lingkungan hidup mereka, termasuk lingkungan sosial, dalam menyelenggarakan kehidupan secara kolektif. Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah pasti mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri-ciri kehidupan bertamadun. Bagaimanapun, tamadun berbeda daripada budaya jika dilihat dari dua keadaan berikut berikut ini (Abdul Latiff Abu Bakar, 2010).

1. Pengaruh natijah tamadun berkekalan lebih lama dibandingkan dengan pengaruh natijah budaya. Dengan pengertian lain, sesuatu natijah budaya yang kekal lama dalam sesebuah masyarakat merupakan natijah tamadun. Sebagai contoh, kesetiaan kepada maharaja merupakan satu natijah tamadun dalam masyarakat Jepang meskipun sistem politik mereka telah jauh berbeda daripada keadaan silam. Manakala cara mereka berpakaian dan pemilihan jenis makanan pula merupakan natijah budaya karena telah mengalami banyak perubahan dalam tempoh seratus tahun ini.
2. Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah, sedangkan budaya selalu dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu. Tamadun Islam, misalnya, meliputi beberapa budaya menurut negara atau wilayah yang berbeda. Sebagai contoh, budaya berpakaian masyarakat Islam di rantau Melayu berbeda daripada masyarakat Islam di Semenanjung Arab walaupun mereka sama-sama di bawah naungan tamadun Islam.

Sepanjang sejarah manusia telah muncul tamadun-tamadun besar yang masyhur seperti tamadun Mesir, tamadun India, tamadun China, tamadun Yunani, tamadun Islam, tamadun Melayu, dan lain-lain. Setiap tamadun memiliki keunikan tersendiri seperti tamadun Yunani yang masyhur dengan filsafat dan keseniannya, sedangkan tamadun Islam pula masyhur dengan perspektif kehidupan yang menyeluruh, di samping perkembangan sains dan teknologi.

Meskipun terdapat keistimewaan tertentu pada tamadun-tamadun yang berbeda, kesemua tamadun yang telah muncul mempunyai ciri-ciri dasar yang sejagat seperti berikut ini (Abdul Latiff Abu Bakar, 2010).

1. Kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota, bandar, kebijakan, atau madinah.
2. Peningkatan kualitas kehidupan yang lebih sempurna berbanding sebelumnya, seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat penghidupan yang lebih stabil dan panjang.
3. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi, dan pendidikan yang sempurna dan teratur.
4. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri bagi menjadi perantaraan komunikasi, perekaman, penyampaian, dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu.

5. Kewujudan sistem perundang-undangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang berwibawa yang dilaksanakan untuk mengatur perlakuan dan tindak-tanduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan.
6. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan bagi menyempurnakan lagi kesejahteraan hidup.
7. Kelahiran dan perkembangan daya kreativitas dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan, dan nilai estetika yang tersendiri.

Dalam perspektif ketujuh ciri tamadun yang semesta atau sejagat (universal) itulah tulisan ini membahas perkembangan tamadun Melayu. Khususnya, pembahasannya berkaitan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (1761—1812) dalam perjuangannya menjadikan Kerajaan Riau-Lingga sebagai salah satu puncak tamadun Melayu.

Oleh sebab wilayah di luar Kepulauan Melayu di Tenggara Asia tidak pernah menjadi wilayah konsentrasi, aktivitas perdagangan, intelektual, dan budayalah yang aktif. Sebenarnya, aspek intelektual ini adalah suatu yang sangat penting dalam tamadun Melayu. Di mana sahaja yang pernah menjadi pusat pemerintahan sultan atau raja Melayu, kita akan mendapati lahirnya intelektual yang menghasilkan karya agama (falsafah) dan epik-epik Melayu, semenjak tradisi Melayu Hindu-Budha seperti yang dilaporkan oleh I_Tsing, sehingga kerajaan-kerajaan Melayu Islam di Aceh, Medan, Palembang, Melaka, Perak, Patani, dan Riau-Johor (Abdullah Hasan, 2010).

Ada beberapa syarat penting yang memungkinkan wilayah ini menjadi sebuah pusat intelektual sebuah tamadun. Wilayah yang dapat menampung aktivitas intelektual itumestilah mempunyai sistem pemerintahan yang agak stabil. Dan, Riau-Lingga di bawah pemerintahan sultan-sultannya, yang mempunyai sistem undang-undang yang memungkinkan rakyatnya hidup dalam sistem yang rukun.

Yang lebih mustahak lagi, mestilah wujud sistem perdagangan yang dapat memberi surplus dalam pendapatan masyarakatnya bagi memungkinkan para intelektualnya mempunyai masa rehat bagi menghasilkan karya intelektual. Hanya kehidupan begini dapat menghasilkan cendekiawan lokal (*local genius*). Dan, para intelektual inilah yang menghasilkan karya intelektual seperti yang dihasilkan dan dimulai oleh Raja Ahmad Engku Haji Tua ibni Raja Haji Fisabilillah dan dilanjutkan dengan rancak oleh generasi berikutnya. Dan, Raja Ahmad Engku

Haji Tua itu adalah hasil binaan dan didikan kakandanya, Sultan Mahmud Riayat Syah, Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang.

2. Puncak Pertama: Tamadun Melayu-Budha Sriwijaya

Sejauh yang dapat ditelusuri, puncak pertama kejayaan tamadun Melayu terjadi sejak abad ketujuh (633 M) sampai dengan abad keempat belas (1397 M.) yaitu pada masa Kemaharajaan Sriwijaya. Menurut Kong Yuan Zhi (1993:1), pada November 671 Yi Jing (635—713), yang di Indonesia lebih dikenal sebagai I-tsing, berlayar dari Guangzhou (Kanton) menuju India dalam kapasitasnya sebagai pendeta agama Budha. Kurang dari dua puluh hari beliau sampai di Sriwijaya, yang waktu itu sudah menjadi pusat pengkajian ilmu agama Budha di Asia Tenggara. Di Sriwijayalah selama lebih kurang setengah tahun Yi Jing belajar sabdawidya (tata bahasa Sansekerta) sebagai persiapan melanjutkan perjalanannya ke India. Setelah tiga belas tahun belajar di India (Tamralipiti/Tamluk), beliau kembali ke Sriwijaya dan menetap di sana selama empat tahun (686—689) untuk menyalin kitab-kitab suci agama Budha. Setelah itu beliau kembali ke negerinya, tetapi pada tahun yang sama ia datang kembali ke Sriwijaya dan menetap di sana sampai 695.

Dari catatan Yi Jing itulah diketahui bahasa yang disebutnya sebagai *bahasa Kunlun*, yang dipakai secara luas sebagai bahasa resmi kerajaan, bahasa agama, bahasa ilmu dan pengetahuan, bahasa perdagangan, dan bahasa dalam komunikasi sehari-hari masyarakat. Yi Jing menyebutkan bahwa bahasa Kunlun telah dipelajari dan dikuasai oleh para pendeta agama Budha Dinasti Tang. Mereka menggunakan bahasa Kunlun untuk menyebarkan agama Budha di Asia Tenggara. Dengan demikian, bahasa Kunlun menjadi bahasa kedua para pendeta itu. Ringkasnya, bahasa Kunlun merupakan bahasa resmi Kemaharajaan Sriwijaya dengan seluruh daerah taklukannya yang meliputi Asia Tenggara. Pada masa itu bahasa Kunlun telah menjadi bahasa internasional. Ternyata, bahasa Kunlun yang disebut Yi Jing dalam catatannya itu ialah bahasa Melayu Kuno.

Pada masa Sriwijaya itu bahasa Melayu telah bertembung dengan bahasa Sansekerta yang dibawa oleh kebudayaan India. Bangsa India menyebut bahasa Melayu sebagai Dwipantara sejak abad pertama masehi lagi (Levi, 1931 dalam Hassim dkk., 2010:3). Pertembungan dengan bahasa Sansekerta menyebabkan bahasa Melayu mengalami evolusi yang pertama. Bahasa

Melayu telah berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan mampu menyampaikan gagasan-gagasan baru yang tinggi, yang sebelumnya tak ada dalam kebudayaan Melayu (lihat Ismail Hussein, 1966:10—11).

Dari perenggan di atas jelaslah bahwa bahasa Melayu (Kuno) sudah tersebar luas di Asia Tenggara sehingga tamadun Melayu mencapai puncak kejayaan pertamanya sejak abad ketujuh karena digunakan sebagai bahasa resmi Kemaharajaan Sriwijaya. Itu pulalah sebabnya, bahasa Melayu mampu menjadi *lingua franca* dan menjadi bahasa internasional di Asia Tenggara. Masa Sriwijaya itu dikenal sebagai tamadun Melayu-Budha dengan peninggalannya berupa prasasti-prasasti di Kedukan Bukit, Palembang (tahun Saka 605 = 683 M.), di Talang Tuwo, Palembang (tahun Saka 606 = 684 M.), di Kota Kapur, Bangka (tahun Saka 608 = 686 M.), di Karang Berahi, hulu Sungai Merangin (tahun Saka 608 = 686 M.). Semua prasasti itu menggunakan huruf Pallawa (India Selatan) dan bercampur dengan kata pungut dari bahasa Sansekerta.

3. Puncak Kedua: Tamadun Melayu-Islam Melaka

Setelah masa kegemilangan dan kecemerlangan Sriwijaya meredup, pusat tamadun Melayu berpindah-pindah. Perpindahan itu dimulai dari Bintan, Melaka, Johor, Bintan, Lingga, dan Penyengat Indrasakti.

Antara abad ke-12 hingga abad ke-13 berdirilah kerajaan Melayu di Selat Melaka. Kerajaan Melayu tua itu dikenal dengan nama Kerajaan Bintan-Temasik, yang wilayah kekuasaannya meliputi Riau dan Semenanjung Tanah Melayu. Sesudah masa Bintan-Temasik inilah termasyhur pula Kerajaan Melaka sejak abad ke-13.

Pada awal abad kelima belas Kerajaan Melaka sudah menjadi pusat perdagangan dunia di sebelah timur yang maju pesat. Para saudagar yang datang dari Persia, Gujarat, dan Pasai—sambil berniaga—juga menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah kekuasaan Melaka. Tak hanya itu, mereka pun menyebarkan bahasa Melayu karena penduduk tempatan yang mereka kunjungi tak memahami bahasa para pedagang itu, begitu pula sebaliknya. Jalan yang harus ditempuh ialah menggunakan bahasa Melayu. Bersamaan dengan masa keemasan Melaka ini, dimulailah tamadun Melayu-Islam. Bahasa Melayu pun mendapat pengaruh bahasa Arab dan

bangsa-bangsa pedagang itu (Arab, Parsi, dan lain-lain) menjadikannya sebagai bahasa kedua mereka.

Menurut *Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia* (1998:56), ulama Gujarat seperti Nuruddin al-Raniri berkarya dan berdakwah dengan menggunakan bahasa Melayu. Begitu pula Francis Xavier yang menyampaikan *summon* dalam bahasa Melayu ketika beliau berada di Kepulauan Maluku. Masuknya Islam ke dunia Melayu makin meningkatkan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional dalam dunia Islam dan menjadi bahasa kedua terbesar setelah bahasa Arab (www.prihatin.net).

Pada masa kejayaan Melaka itu bahasa, kesusasteraan, dan ilmu pengetahuan di dunia Melayu turut berkembang. Bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, bahasa ilmu dan pengetahuan, di samping bahasa perhubungan sehari-hari rakyat. Bahasa Melayu yang berkembang pada zaman Melaka ini disebut bahasa Melayu Melaka. Malangnya, pada 1511 Kerajaan Melaka dapat ditaklukkan oleh Portugis dan lebih tragis lagi, khazanah kebudayaan zaman Melaka itu musnah terbakar ketika terjadi penyerbuan oleh penjajah itu.

4. Puncak Ketiga: Tamadun Melayu-Islam Riau-Lingga-Johor-Pahang

Teraju kepemimpinan Melayu dilanjutkan oleh putra Sultan Mahmud Syah I, setelah ayahnda Baginda mangkat di Kampar (1528), yang bergelar Sultan Ala'uddin Riayat Syah II. Baginda mendirikan negara Melayu baru yang pemerintahannya berpusat di Johor pada 1530. Baginda pun berkali-kali berusaha untuk merebut kembali Malaka, tetapi tetap tak berjaya.

Walaupun begitu, di Johor ini dilakukan pembinaan dan pengembangan bahasa, kesusasteraan, dan ilmu pengetahuan untuk menggantikan khazanah Malaka yang telah musnah. Di samping itu, diterbitkan pula karya-karya baru. Di antara karya tradisi Johor itu yang terkenal ialah *Sejarah Melayu (Sulalat al-Salatin 'Peraturan Segala Raja')* tulisan Tun Muhammad Seri Lanang yang bergelar Bendahara Paduka Raja. Karya yang amat masyhur ini mulai ditulis di Johor pada 1535 selesai pada 1021 H. bersamaan dengan 13 Mei 1612 di Lingga. Selain itu juga ditulis *Peringatan Sejarah Negeri Johor*, diperkirakan pada 1750-an.

Satu lagi karya agung yang dihasilkan pada masa ini adalah *Hikayat Hang Tuah*. Menurut Sulastin Sutrisno (1983:67), *Hikayat Hang Tuah* ditulis antara 1676—1700. Francois Valentijn

menempatkan *Hikayat Hang Tuah* sama pentingnya dengan *Sulalat al-Salatin*. Betapa tidak, hikayat ini memerikan orang Melayu dengan sejarah, adat-istiadat, dan filsafat hidupnya yang wajar. Siti Hawa Haji Salleh (2009) pula menilai bahwa *Hikayat Hang Tuah* merupakan epik Melayu yang membanggakan orang Melayu.

Bahasa yang digunakan dalam tradisi Johor ini biasa disebut bahasa Melayu Riau-Johor atau bahasa Melayu Johor-Riau. Di Indonesia bahasa itu dikenal dengan nama bahasa Melayu Riau, sedangkan di Malaysia biasa juga disebut bahasa Melayu Johor, selain sebutan bahasa Melayu Johor-Riau.

Misi Belanda di bawah pimpinan William Velentijn yang berkunjung ke Riau (Kepulauan) pada 2 Mei 1687 mendapati Riau sebagai bandar perdagangan yang maju dan ramai. Orang-orang dari pelbagai penjuru dunia datang ke sana dan mereka terkagum-kagum akan kepriawaian orang Riau dalam bidang perdagangan dan maritim umumnya.

Pada 1778 perdagangan di Kerajaan Riau bertambah maju dengan pesat. Dengan sendirinya, rakyat hidup dengan makmur, yang diikuti oleh kehidupan beragama (Islam) yang berkembang pesat. Kala itu pemerintahan diterajui oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dan Raja Haji sebagai Yang Dipertuan IV Muda Riau-Lingga-Johor-Pahang. Duet kepemimpinan ini pulalah yang membangun koalisi nusantara yang terdiri atas Batu Bahara, Siak, Indragiri, Jambi, pesisir Kalimantan, Selangor, Nanning, dan Rembau, bahkan mencoba berhubungan dengan para raja di Jawa dalam melawan Kompeni Belanda untuk membela marwah bangsanya.

Setahun kemudian, yakni pada Rajab 1193 bersamaan dengan 1779, lahirlah putra Raja Haji yang diberi nama Raja Ahmad ibni Raja Haji. Putra Yang Dipertuan Muda IV Kerajaan Riau-Lingga ini nanti memainkan peran yang sangat penting bagi perkembangan tradisi intelektual dan kepengarangan di Kerajaan Riau-Lingga sehingga tamadun Melayu mencapai puncaknya kembali. Berawal dari beliau, dunia kepengarangan di kawasan ini tumbuh merecup dengan subur dan sangat membanggakan kita hingga hari ini.

Selain Raja Ahmad dan ananda Baginda yang lain, Raja Haji yang setelah wafat karena perjuangannya yang heroik menentang penjajah sehingga mendapat gelar Fisabilillah, memiliki seorang putri yang diberi nama Raja Hamidah. Perempuan yang *bukan perempuan biasa* itu kemudian biasa disapa Engku Puteri Raja Hamidah. Setelah sampai jodohnya, beliau disunting oleh Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dan pada 1803 Baginda berdua menikah. Emas kawinnya tak

tanggung-tanggung, sebuah pulau kecil di depan Tanjungpinang, yang kelak menjadi pusat pembinaan dan pengembangan tamadun Melayu, yang seri kegemilangannya memancarkan cahaya sampai jauh, ke sekutah-kutah nusantara. Itulah keistimewaan Pulau Pengemat Inderasakti, Pulau Emas Kawin, untuk Engku Puteri Raja Hamidah ibni Raja Haji Fisabilillah dari suaminya Sultan Mahmud Ri'ayat Syah.

Selain itu, Engku Puteri juga dianugerahi jabatan sebagai pemegang regalia oleh suaminya yang sultan itu. Regalia adalah seperangkat alat kebesaran Kerajaan Riau-Johor yaitu alat yang menjadi simbol kebesaran adat-istiadat Melayu, termasuk peralatan kebesaran yang menentukan sah tidaknya penabalan seseorang sultan. Itulah anugerah sekaligus amanah yang dititipkan oleh suaminya kepada Raja Hamidah, istrinya tercinta. Dan, beliau dengan anggun lagi setia memegang dan menjalankan amanah itu dengan segenap jiwa-raganya, bagai menatang minyak yang penuh, demi menjunjung marwah.

Ada hikmah yang amat penting dari kebijakan dan kearifan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah mengamanahkan pengawalan regalia, lambang adat-istiadat, kekuasaan, marwah, dan keagungan Kerajaan Riau-Lingga kepada Engku Putri Raja Hamidah, istri Baginda. Amanah pengawalan tradisi kepada perempuan perkasa itu merupakan simbol pelbagai kearifan yang menandakan ketinggian budi seorang pemimpin, sekaligus simbol keagungan sebuah tamadun yang diperjuangkannya.

Istri harus menjadi pendamping terbaik suami, apalagi bagi kepemimpinannya. Itu makna pertama dari amanah pengawalan yang dititipkan. Karena pemimpin yang baik harus memiliki pendamping terbaik pula, maka istri yang baiklah yang harus memegang peran utama itu, apakah di kala suka apalagi di kala duka. Saling percaya suami-istri menjadi awal dan pengawal keberhasilan kepemimpinan. Suami tak menempatkan istrinya hanya sebagai penghias tahta belaka dan istri pun tak rela menggiring suaminya ke jurang penyelewengan kekuasaan.

Makna kedua, cinta-kasih kepemimpinan harus menjelma menjadi cinta-kasih kepada negara, negeri, dan rakyat. Penyatuan suami-istri itu pun merupakan lambang penyatuan bangsa (sang suami Melayu dan sang istri Melayu-Bugis). Dalam konteks pengawalan regalia, jika tak berada di tangan yang tepat, nasib negara dan bangsa akan tergadai. Hanya orang yang berjiwa wira dan negarawanlah yang mampu memegang amanah itu dengan segenap jiwa-raganya. Engku Putri Raja Hamidah berhasil menjadikan dirinya ikon pengawal tradisi itu dengan

cemerlang berkat kepercayaan, cinta, dan kasih suaminya, pemimpin negara, rakyat sekaliannya, dan marwah dirinya sebagai perempuan terbilang. Bukankah Engku Putri adalah putri pemimpinan negara yang terbilang kesetiaannya kepada rakyat dan negerinya? Raja Hamidah telah terdidik di lingkungan istana untuk menjadi putri diraja yang harus taat berbakti kepada bangsa dan negara.

Dengan menerima amanah itu, seseorang harus sanggup menghadapi pelbagai tantangan karena tanggung jawabnya sangat besar. Engku Putri sangat menyadari konsekuensi itu dan Baginda menempatkan marwah negara dan bangsanya di atas segala-galanya. Dan betul, dua kekuatan besar yang sedang dimabuk kuasa kala suaminya telah berpulang ke rahmatullah, Inggris dan Belanda, berkali-kali merayu dan menerornya dengan uang (rasuah, korupsi) dan karena kehabisan akal akhirnya menggunakan senjata. Apakah yang terjadi?

Perempuan mulia lagi perkasa itu tetap teguh, kokoh, tak berganjak. Lalu, dipekkikannya kepada calon penjajah itu, “Kalian tak akan mampu menjaga regalia ini karena ianya marwah bangsa dan negara kami. Hanya kamilah yang boleh dan tahu cara menjaganya. Ia harus berada di tangan orang yang setia menggunakan segenap pikiran, hati, cinta-kasih, dan jiwa-raganya untuk mengawalinya. Jika kalian rampas dariku, ia tinggal menjadi lempengan emas yang tak ada lagi tuahnya, tetapi memang sangat bermakna bagi budaya kalian. Ingat dan camkanlah baik-baik, kalian tak pernah mampu merampas marwah kami!” Sebuah tembakan tepat dan telak yang menembus kepala dan jantung penceroboh dan membuat mereka terkapar membisu dari bidikan seorang perempuan perkasa pengawal tradisi.

Demikianlah pada 1803 itu Pulau Penyengat Inderasakti mulai dibuka untuk tempat kediaman Engku Puteri Raja Hamidah. Dua tahun kemudian, pada 1805, Raja Ja'far ibni Raja Haji Fisabilillah, saudara kandung Raja Hamidah, ditabalkan menjadi Yang Dipertuan Muda VI Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Oleh Sultan Mahmud Riayat Syah, sejak itu pusat pemerintahan Yang Dipertuan Muda dipindahkan dari Kota Piring, Pulau Biram Dewa, ke Pulau Penyengat Inderasakti. Di pulau kecil tetapi ternama itulah sampai seterusnya pentadbiran Kerajaan Melayu di bawah kuasa Yang Dipertuan Muda diselenggarakan. Di pulau itu pula para cendekiawan Kerajaan Riau-Lingga *mendirikan* taman para penulis untuk memelihara warisan yang agung. Dan, dari pulau itulah sinar gemala mestika alam memancarkan cahayanya ke

relung-relung hati yang tidak buta untuk membangunkan dan mengembangkan tamadun Melayu-Islam yang terala (luhur) lagi ranggi.

Menurut Francois Valentijn, pendeta sekaligus pakar sejarah berkebangsaan Belanda, pada abad ke-18 bahasa Melayu Riau-Johor telah mengalami kemajuan pesat dan telah menyamai bahasa-bahasa Eropa. Berikut ini penuturannya seperti dikutip oleh Nik Sapiah Karim dkk., 2003:14 dan Hassim dkk., 2010:4) dalam bahasa Melayu Malaysia.

“Bahasa mereka, bahasa Melayu, bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut, tetapi juga digunakan di seluruh Kepulauan Melayu dan di segala negeri Timur, sebagai suatu bahasa yang difahami di mana-mana sahaja oleh setiap orang, tidak ubah seperti bahasa Perancis atau Latin di Eropah, atau sebagai bahasa Lingua Franca di Itali dan di Levant. Sungguh luas tersebar nya bahasa Melayu itu sehingga kalau kita memahaminya tidaklah mungkin kita kehilangan jejak, kerana bahasa itu bukan sahaja difahami di Parsi bahkan lebih jauh dari negeri itu, dan di sebelah timurnya sehingga Kepulauan Filipina.”

Begitulah luar biasanya pembinaan dan pengembangan bahasa yang telah dilaksanakan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Rakyat digesa untuk berbahasa Melayu tinggi dengan baik dan benar, sesuai dengan adab berbahasa yang baik. Alhasil, bahasa Melayu Kerajaan Riau-Lingga dijadikan model bahasa baku Melayu di seluruh nusantara, bahasa Melayu tinggi. Bahasa Melayu tinggi itulah yang diajarkan dan dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah yang didirikan oleh Belanda di nusantara ini. Taraf capaian bahasa Melayu itu terus ditingkatkan oleh anak-cucu Baginda kemudian, yang terdiri atas Raja Ali Haji dan kawan-kawan cendekiawan Kerajaan Riau-Lingga dalam aktivitas keilmuan yang bersifat akademik. Pada gilirannya, segala upaya itu telah menjadikan tamadun Melayu mencapai puncak kegemilangannya kembali, bahkan jauh lebih hebat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, terutama dalam tradisi intelektual.

5. Indera Keenam Seorang Pemimpin Besar

Telah disebutkan di atas bahwa dengan kehendak Allah, Raja Haji menjadi syuhada di medan perang pada 18 Juni 1784 di Teluk Ketapang, Melaka, setelah Baginda bersama Sultan Mahmud Riayat Syah menyerang Belanda sampai ke sarang musuh, ke Melaka. Atas saran ayahndanya (Sultan Mahmud Ri'ayat Syah sejatinya keponakan Raja Haji dari sebelah ibu), walau pada mulanya Sultan Mahmud Ri'ayat Syah ikut berperang bersama Raja Haji, Baginda

bersiaga di Muar, Johor. Di tempat bertahan itulah, Baginda mendapat laporan dari angkatan perangnya bahwa Raja Haji telah gugur di medan tempur. *Tuhfat al-Nafis* menceritakan bahwa mendengar kabar duka cita itu Sultan Mahmud Ri'ayat Syah sangat sedih. Bahkan seluruh Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang pun berduka cita yang mendalam. Walaupun begitu, sebagai pemimpin sebuah kerajaan besar, Baginda tak boleh berlama-lama larut dalam kesedihan. Nasib Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dan seluruh rakyatnya menjadi taruhannya. Sultan pun kembalilah ke pusat kerajaan, yang kala itu masih di Hulu Riau.

Di luar urusan kenegaraan, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak Almarhum Raja Haji Fisabilillah. Di antara anak-anak almarhum itu, yang paling mendapat perhatiannya adalah Raja Ahmad. Si Bungsu yang lahir di Istana Kota Piring pada Rajab 1193 H. atau 1778/9 itu dipeliharanya dengan penuh kasih sayang. ". . . apabila ayahnya terbunuh dalam tahun 1784 ia telah dipelihara oleh Sultan Mahmud" (Matheson, 1982:xxi). Dalam pandangan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, ada keistimewaan dalam diri Si Bungsu yang telah ditinggalkan oleh ayahndanya pada usia lebih kurang 5—6 tahun itu. Tak heranlah Baginda mendidik Raja Ahmad dengan sebaik-baiknya.

Dalam perkembangan selanjutnya, memang Raja Ahmad menetap bersama pamandanya Sultan Selangor di Selangor. Di sanalah beliau bertemu dengan pujaan hatinya, Encik Hamidah, yang kemudian mereka menikah. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai dua orang anak dan anaknya yang kedua itulah Raja Ali Haji, yang lahir pada 1809 (Matheson, 1982:xxi).

Raja Ahmad, kemudian, kembali semula ke Riau bersama keluarganya. Sesampainya di Riau, kakaknya, Engku Putri Raja Hamidah telah menikah dengan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Pada 1805 abangnya Raja Jaafar diangkat menjadi Yang Dipertuan Muda dan Baginda melantik Raja Ahmad menjadi wakil resminya atas restu Sultan Mahmud Ri'ayat Syah.

Dengan jabatan resminya itu banyaklah tugas kenegaraan yang dilaksanakan oleh Raja Ahmad. Pada 1828 beliau menunaikan fardu haji bersama putranya Raja Ali. Sekembalinya dari menunaikan ibadah haji itu, beliau akrab disapa dengan nama Raja Ahmad Engku Haji Tua dan putranya terkenal dengan nama Raja Ali Haji. Beliau mangkat pada 1878 dalam usia 100 tahun.

Semasa hidupnya Raja Ahmad telah mendapat pendidikan duniawi dan agama Islam di lingkungan istana, baik dari kakandanya Sultan Mahmud Ri'ayat Syah maupun Sultan Selangor dan saudara-saudaranya yang lain. Selain itu, beliau juga pernah mendapatkan pendidikan Islam

dari Haji Abdul Wahab, seorang ulama yang berwibawa yang juga penerjemah *Hikayat Golam* dari bahasa Arab. Semasa kunjungan kedua kalinya ke Batavia pada 1823, beliau sempat pula berguru dengan Syekh Abdul Rahman Misri tentang ilmu falakiah. Dengan demikian, beliau memang kaya akan ilmu pengetahuan dan pengalaman praktis selama menjalankan tugas resminya sebagai Wakil Yang Dipertuan Muda.

Di samping jabatan resminya, Raja Ahmad Engku Haji Tua dikenal luas sebagai seorang cendekiawan. Bahkan, beliau merupakan generasi awal kebangkitan aktivitas intelektual di Kerajaan Riau-Lingga. Kesemuanya dapat dijalaninya, dan anak cucunya kemudian, karena segala fasilitas yang diperlukan untuk pekerjaan mengarang telah dipersiapkan dengan baik di pusat pemerintahan Yang Dipertuan Muda di Pulau Penyengat Inderasakti yang tenang dan nyaman. Dari Raja Ahmad Engku Haji Tua-lah, kemudian, kreativitas intelektual yang menyemarakkan tamadun Melayu terus mengalir kepada anak-cucu Sultan Mahmud Ri'ayat Syah.

Sangat jelas kepekaan mata batin Sultan Mahmud Ri'ayat Syah bahwa dari adindanya Raja Ahmad tamadun Melayu akan menjulang setelah kepergian Baginda ke alam yang kekal abadi. Oleh sebab itu, sangat tepat ketika Baginda mendidik Raja Ahmad dengan kasih-sayang dan memberikan perhatian yang lebih kepada kanak-kanak yang ditinggal syahid oleh ayahndanya itu, yang kemudian memberikan laluan dan pengabdian besar bagi kesinambungan dan menjulangnya kembali tamadun Melayu, khususnya, dan tamadun umat manusia, umumnya.

6.Perjuangan Memartabatkan Bangsa

Di Kerajaan Riau-Lingga, kemudian, sejak separuh pertama abad ke-19 sampai awal abad ke-20 kreativitas ilmu, pengetahuan, dan budaya mengalir dengan deras. Di sini aktivitas intelektual, yang menjadi ciri khas tamadun Melayu sejak zaman Sriwijaya, tumbuh merecup kembali. Tak berlebihanlah apabila disebut bahwa pada abad itu Kerajaan Riau-Lingga menjadi pusat tamadun Melayu-Islam, pasca Kerajaan Melaka. Dari kalangan penulis keturunan Diraja Melayu, kesemuanya itu dimulai dari Raja Haji Ahmad ibni Raja Haji Fisabilillah, anak didik sekaligus adik sepupu dan adik ipar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah.

Walaupun begitu, agaknya petuah putra Raja Ahmad dan keponakan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah-lah, Raja Ali Haji, yang paling ketara semangat perjuangan melalui aktivitas intelektual. Didalam mukadimah karyanya *Bustan al-Katibin*(1857) yaitu buku tentang tatabahasa dan ejaan bahasa Melayu kita disajikan hidangan berharga berikut ini.

“Segala pekerjaan pedang itu boleh diperbuat dengan kalam, adapun pekerjaan kalam itu tiada boleh diperbuat oleh pedang... Dan, berapa ribu dan laksa pedang yang sudah terhunus, maka dengan segores kalam jadi tersarung.”

Kalam yang berteraskan budilah yang mampu membuat beribu-ribu dan berlaksa-laksa pedang yang sudah terhunus jadi tersarung. Memang, ketika minda manusia sudah tercerahkan, dengan apa pun bentuk pengabdian hanya demi Sang Khalik, kehadiran pedang tak lagi diperlukan. Hal itu mengingatkan kita akan wahyu pertama Allah swt. kepada rasul pilihannya Muhammad s.a.w. yang terdapat dalam QS Al-‘Alaq: 1—4, “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Yang mengajari (manusia) dengan kalam.”

Raja Ali Haji juga mengobarkan semangat mencipta dengan menggunakan kalam melalui syair Parsi yang dikutipnya dalam buku yang disebutkan di atas, “Berkata kalam, aku ini raja (yang) memerintah akan dunia. Barangsiapa yang mengambil akan daku dengan tangannya, tak dapat tiada aku sampaikan juga (dia) kepada kerajaan(nya).”

Tak heranlah mengapa pekerjaan mengarang sangat dimuliakan di lingkungan istana Kerajaan Riau-Lingga. Para pembesar istana merasa hidupnya belumlah lengkap walau telah menjabat suatu jabatan tinggi sebelum mereka menghasilkan karya tulis, entah karya sastra atau bukan. Begitulah profesi mengarang menjadi begitu mulia dan diidam-idamkan oleh setiap orang. Kepengarangan jadinya mengantarkan suatu capaian tamadun yang cemerlang, gemilang, dan terbilang.

Pengarang Bilal Abu atau biasa juga disapa Lebai Abu mengawali kedahsyatan kalam. Beliau sekurang-kurangnya menulis dua buah karya sastra. Karya-karya beliau itu ialah *Syair Siti Zawiyah* dan *Syair Haris*. Kedua syair ini selesai ditulis pada 1820.

Kemudian, bermulalah kepengarangan Raja Haji Ahmad Engku Haji Tua ibni Raja Haji Fisabilillah. Setakat ini beliau diketahui sebagai orang pertama dari kalangan Diraja Melayu

yang menceburkan diri dalam dunia kepengarangan di Kerajaan Riau-Lingga. Beliaulah pelopor tradisi intelektual di kalangan kerabat diraja Kerajaan Riau-Lingga.

Dalam karir beliau sebagai pengarang, Raja Haji Ahmad Engku Haji Tua menghasilkan empat buah karya: (1) *Syair Engku Puteri*(1831), (2) *Syair Raksi*(1841), dan (3) *Syair Perang Johor*(1843/44). Di samping itu, beliau juga mengerjakan naskah awal buku yang sangat terkenal (4) *Tuhfat al-Nafis* 'Hadiah Berharga' (1866) yang kemudian disempurnakan dan diselesaikan oleh anaknya, Raja Ali Haji.

Raja Ali Haji (1808—1873), putra Raja Ahmad, meneruskan jalan yang telah dirintis oleh Bilal Abu dan ayahnya. Beliau kemudian tampil sebagai cendekiawan paling masyhur di antara kaum intelektual Riau-Lingga kala itu. Beliau menulis dua buah buku dalam bidang bahasa (Melayu). Buah karyanya yang lain dalam bidang hukum dan pemerintahan, bidang filsafat yang berbau dengan puisi, bidang sastra (puisi), bidang agama, dan juga diperkirakan menulis naskah *Peringatan Sejarah Negeri Johor*.

Sabtu, 29 April 2000 Presiden Republik Indonesia, Haji Abdurrahman Wahid membuka Temu Akbar I Thariqat Mu'tabarrah Se-Sumatera, di Masjid Agung Annur, Pekanbaru, Riau. Dalam pidatonya beliau menegaskan pengakuan Pemerintah Republik Indonesia akan jasa Raja Ali Haji dalam mempersatukan bangsa dan menciptakan bahasa nasional. "Tanpa jasa beliau itu, kita belum tentu menjadi bangsa yang kokoh seperti sekarang ini," tegas Gus Dur.

Penulis sezaman Raja Ali Haji yang juga sangat dikenal ialah Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda. Dari penulis ini, Kepulauan Riau mewarisi paling tidak lima buah buku. Karyanya *Cakap-Cakap Rampai-Rampai Bahasa Melayu-Johor* (dua jilid; penerbitan pertama 1868 dan kedua 1875, di Batavia) dapat menempatkannya sebagai pelopor penulisan cerpen di Indonesia. Karyanya yang lain ialah *Perhimpunan Pantun-Pantun Melayu*, *Hikayat Raja Damsyik*, *Syair Raja Damsyik*, dan *Cerita Pak Belalang dan Lebai Malang*.

Di antara pengarang itu terdapat juga nama Raja Saliha. Beliau adalah saudara kandung Raja Ali Haji dan dipercayai mengarang *Syair Abdul Muluk* bersama Raja Ali Haji.

Penulis yang lain adalah Raja Haji Daud, saudara seayah Raja Ali Haji. Dia menulis dua buku: *Asal Ilmu Tabib* dan *Syair Peperangan Pangeran Syarif Hasyim*.

Raja Ali dan Raja Abdullah, selain dikenal sebagai pemimpin kerajaan yaitu sebagai Yang Dipertuan Muda Riau, keduanya juga adalah penulis. Raja Ali menulis (1) *Hikayat Negeri*

Johor dan (2) *Syair Nasihat*. Akan halnya Raja Abdullah beliau menghasilkan karya (1) *Syair Madi*, (2) *Syair Kahar Masyhur*, (3) *Syair Syarkan*, dan (4) *Syair Encik Dosman*.

Raja Hasan, anak laki-laki Raja Ali Haji, diketahui menulis sebuah syair. *Syair Burung* nama gubahannya itu. Raja Safiah mengarang *Syair Kumbang Mengindera* dan saudaranya Raja Kalsum menulis *Syair Saudagar Bodoh*. Kedua penulis perempuan itu adalah putri Raja Ali Haji.

Raja Haji Muhammad Tahir sehari-hari dikenal sebagai hakim. Walaupun begitu, dia juga menghasilkan karya sastra yaitu *Syair Pintu Hantu*.

Raja Haji Ahmad Tabib menulis lima buah buku. Kelima buku tersebut adalah (1) *Syair Nasihat Pengajaran Memelihara Diri*, (2) *Syair Raksi Macam Baru*, (3) *Syair Tuntutan Kelakuan*, (4) *Syair Dalail al-Ihsan*, dan (5) *Syair Perkawinan di Pulau Penyengat*.

Pengarang berikutnya adalah Raja Umar bin Raja Hasan. Dia menulis buku *Ibu di dalam Rumah Tangga*.

Daeng Wuh juga menyempurnakan senarai pengarang masa Kerajaan Riau-Lingga. Beliau menulis *Syair Yahya*.

Raja Haji Muhammad Said dikenal sebagai penerjemah. Karya terjemahannya (1) *Gubahan Permata Mutiara* (terjemahan karya Ja'far al-Barzanji) dan (2) *Simpulan Islam* (terjemahan karya Syaikh Ibrahim Mashiri).

Raja Abdul Muthalib, nama pengarang berikutnya, menghasilkan dua buah karya. Kedua karya itu ialah *Tazkiratul Ikhtisar* dan *Ilmu Firasat Orang Melayu*.

Penulis lain ialah Badriah Muhammad Thahir. Beliau memusatkan perhatian dalam bidang penerjemahan. Karya terjemahannya adalah *Adab al-Fatat*, yaitu terjemahan dari karya Ali Afandi Fikri.

Penulis generasi cicit Sultan Mahmud Riayat Syah dan Raja Ahmad Engku Haji Tua serta cucu Raja Ali Haji banyak pula yang cemerlang. Di antara mereka itu terdapatlah nama-nama dalam senarai berikut ini.

Khalid Hitam, selain aktif dalam kegiatan politik, juga dikenal sebagai pengarang. Karyanya (1) *Syair Perjalanan Sultan Lingga dan Yang Dipertuan Muda Riau Pergi ke Singapura*, (2) *Peri Keindahan Istana Sultan Johor yang Amat Elok*, dan (3) *Tsamarat al-Matlub Fi Anuar al-Qulub*.

Abu Muhammad Adnan menghasilkan karya asli dan terjemahan. Karyanya dalam bidang bahasa adalah *Kitab Pelajaran Bahasa Melayu* dengan rangkaian *Penolong Bagi yang Menuntut Akan Pengetahuan yang Patut, Pembuka Lidah dengan Teladan Umpama yang Mudah, Rencana Madah pada Mengenal Diri yang Indah*. Selain itu, dia juga menulis *Hikayat Tanah Suci, Kutipan Mutiara, Syair Syahinsyah, Ghayat al-Muna, dan Seribu Satu Hari*.

Penulis Salamah binti Ambar menulis dua buku yaitu (1) *Nilam Permata* dan, (2) *Syair Nasihat untuk Penjagaan Anggota Tubuh*. Lalu, Khadijah Terung menulis buku *Perhimpunan Gunawan bagi Laki-laki dan Perempuan*. Kedua penulis perempuan itu adalah istri Abu Muhammad Adnan.

Penulis berikutnya Raja Ali Kelana. Beliau menghasilkan karya dalam bidang bahasa yaitu *Bughiat al-Ani Fi Huruf al-Ma'ani*. Karyanya yang lain ialah *Pohon Perhimpunan, Perhimpunan Pelakat, Rencana Madah, Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas, dan Percakapan Si Bakhil*.

Cendekiawan perempuan yang paling cemerlang adalah Aisyah Sulaiman. Cucu Raja Ali Haji ini menulis (1) *Syair Khadamuddin*, (2) *Syair Seligi Tajam Bertimbal*, (3) *Syamsul Anwar*, dan (4) *Hikayat Shariful Akhtar*. Karya-karya beliau tak hanya menempatkannya sebagai pejuang emansipasi perempuan, tetapi juga pelopor kesusastraan modern Melayu-Indonesia.

7. Perhimpunan Pelanjut Perjuangan

Untuk mengoptimalkan kreativitas intelektual dan kultural mereka, para cendekiawan, sastrawan, dan budayawan Kerajaan Riau-Lingga mendirikan pula Rusydiyah Kelab pada 1885. Rusydiyah Kelab merupakan perkumpulan cendekiawan Riau-Lingga, tempat mereka membahas pelbagai hal yang berkaitan dengan ihwal pekerjaan mereka, baik sebagai pengarang, cendekiawan, maupun politisi. Tokoh-tokohnya berwawasan dunia seperti yang dapat disimak dari karya yang mereka hasilkan. Di antara mereka itu ialah Raja Ali Kelana, Khalid Hitam, dan Sayid Syekh Al-Hadi.

Dunia kepengarangan tak akan berkembang tanpa percetakan. Oleh sebab itu, kerajaan mendirikan percetakan (1) Rumah Cap Kerajaan di Lingga, (2) Mathba'at Al-Riauwiyah di Penyengat, dan (3) Al-Ahmadiyah Press di Singapura. Dengan adanya ketiga percetakan itu,

karya-karya Riau-Lingga itu dapat dicetak dengan baik, yang pada gilirannya disebarluaskan ke seluruh nusantara.

Rusydiyah Kelab juga menjadi sponsor penerbitan berkala atau majalah. Segala perkembangan dunia kala itu ditungkan dalam berkala *Al-Imam*, nama majalah yang didanai oleh persatuan cendekiawan, yang tak salah kalau disebut sebagai pelopor persatuan Indonesia prakemerdekaan itu. Pasal, anggota Rusydiyah Kelab berasal dari pelbagai daerah di nusantara ini. Dan, yang pasti, perjuangan mereka menentang penjajah membuat Pemerintah Hindia-Belanda makan tak sedap, tidur tak lena.

Yang juga menarik adalah untuk menyokong kegiatan intelektual dan kebudayaan yang ditekuni anggotanya, Rusydiyah Kelab mendirikan perusahaan bisnis. Di Batam mereka mendirikan *Batam Brickworks* yang berusaha dalam produksi dan perdagangan batu bata. Selain itu, mereka juga mendirikan koperasi yang diberi nama Syarikat Dagang Al-Ahmadiyah yang bergerak dalam bidang perdagangan kopra. Koperasi yang didirikan itu merupakan koperasi pertama yang didirikan di Indonesia, sebelum merdeka lagi. Dari koperasi itu pulalah dikembangkan percetakan Al-Ahmadiyah Press di Singapura.

Tradisi intelektual dan kepengarangan di Kerajaan Riau-Lingga telah menghasilkan karya dalam pelbagai bidang. Dari tradisi Riau-Lingga itu telah wujud karya-karya dalam bidang ilmu bahasa, sastra, sejarah, ilmu agama Islam, ilmu perobatan, ilmu hukum dan pemerintahan, ilmu politik, dan lain-lain.

Begitulah aktivitas intelektual terus berlanjutan di kawasan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, yang sekarang meliputi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kegiatan memajukan tamadun Melayu itu terus berkesinambungan sampailah ke generasi yang hidup pada masa kini. Semua benihnya telah disemai dengan baik oleh Sultan Mahmud Riayat Syah melalui diri Raja Ahmad Engku Haji Tua ibni Raja Haji Fisabilillah, yang memang telah dipersiapkan oleh Baginda Sultan dengan mengamati bakat yang dimiliki oleh adindanya itu.

8. Simpulan

Tamadun Melayu telah berwujud dalam waktu yang sangat panjang. Puncak pertama tamadun Melayu terjadi pada masa Kerajaan Sriwijaya yang dikenal dengan tamadun Melayu-

Budha. Puncak kedua tamadun Melayu terjadi pada masa Kerajaan Melaka yang telah menjadi tamadun Melayu Islam. Tamadun Melayu-Islam mencapai puncaknya yang paling gemilang pada masa Kerajaan Riau-Lingga.

Perintis perjuangan memajukan tamadun Melayu pada masa Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang adalah Sultan Mahmud Riayat Syah. Pada masa pemerintahan Baginda, bahasa Melayu telah mencapai taraf kemajuan yang sama dengan bahasa-bahasa Eropah sebagaimana diakui oleh pengamat Barat. Kesemuanya itu berkat diterapkannya adab, santun, dan disiplin berbahasa sebagai bagian dari ketinggian budi pekerti bagi seluruh rakyat di dalam kerajaan yang diterajuinya. Baginda telah membangun kawasan yang aman, damai, tenang, serta sarana dan prasarana yang sangat baik, baik di Lingga maupun di Pulau Penyengat Inderasakti. Begitu pula capaian kemakmuran negeri dan kesejahteraan rakyat memungkinkan para cendekiawan kerajaan dapat beraktivitas dengan maksimal. Melalui diri seorang Raja Ahmad Engku Haji Tua ibni Raja Haji Fisabilillah yang Baginda didik sejak kecil, bibit pengembangan ilmu pengetahuan dan aktivitas kepengarangan itu ditanamkan oleh Baginda Sultan. Dalam pandangan Baginda yang arif sebagai pemimpin negeri, Raja Ahmad Engku Haji Tua memang memiliki bakat dan kecerdasan di atas rata-rata untuk melaksanakan aktivitas intelektual dan mengembangkan tamadun Melayu-Islam.

Dari generasi Raja Ahmad Engku Haji Tua itu aktivitas intelektual dan pengembangan tamadun terus mengalir ke generasi keponakan Baginda Sultan yang juga putra Raja Ahmad yaitu Raja Ali Haji. Teruslah kegiatan intelektual itu berlanjut sampai ke generasi cicit Baginda yaitu Aisyah Sulaiman. Dari merekalah generasi masa kini mewarisi tamadun Melayu sebagai bagian dari kebudayaan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap diperhitungkan di antara tamadun-tamadun bangsa-bangsa sedunia ini.

Begitu besar jasa Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dalam memperjuangkan dan membangun tamadun Melayu pada masa Baginda memerintah, yang kesinambungannya dilanjutkan pula oleh generasi anak-cucu Baginda dengan mewarisi semangat perjuangan yang Baginda tauladankan. Bahkan, Baginda memperjuangkan kesemuanya itu ketika tanah airnya berada dalam ancaman penjajahan oleh Belanda, yang terus dilawannya dengan segenap jiwa-raganya. Perlawanan tanpa pernah mengenal kata menyerah, baik secara fisik maupun secara intelektual melalui siasat politik yang sangat mengagumkan. Kini, setelah merdeka, kita bangsa Indonesia dapat mewarisi

tamadun Melayu sebagai bagian dari tamadun bangsa Indonesia yang besar ini. Bahkan, dari tamadun Melayu itu kita memperoleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dengan adanya bahasa persatuan itulah, kita sebagai bangsa Indonesia menjadi kokoh sebagai bangsa yang merdeka sampai kini. Dengan demikian, ditinjau dari perspektif kemajuan tamadun, Sultan Mahmud Ri'ayat Syah tak diragukan lagi telah membaktikan seluruh masa hidupnya sebagai seorang tokoh pejuang dan pahlawan sejati.

PERAN SULTAN MAHMUD RI'AYAT SYAH DALAM PERKEMBANGAN ISLAM

1. Istilah Sultan dalam Kerajaan di Nusantara

Bagian ini dimulai dengan melihat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara, yang lebih khusus di nusantara. Dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (5)* dijelaskan, Islam di Asia Tenggara sangat kompleks. Kompleksitas itu berkaitan setidaknya dengan tiga faktor pokok: pertama, lokasi geografis yang terletak jauh dari Arabia, tempat Islam kali pertama muncul dan berkembang; kedua, sejarah penyebaran dan islamisasinya; dan ketiga, realitas keagamaan sosial-budaya yang dimulai Islam di nusantara. Semua faktor ini pada gilirannya memberikan kontribusi bagi pembentukan corak dan tradisi Islam yang khas *vis-à-vis* Islam di wilayah-wilayah lain, khususnya di Arabia atau wilayah yang kini umum dikenal sebagai Timur Tengah (Taufik, dkk., 2005:1).

Pada gilirannya, beberapa kerajaan di nusantara menjadikan Islam sebagai agama utama. Sebagaimana diketahui, pada abad ke-7 Masehi, agama Islam sudah masuk ke nusantara. Dalam *Ensiklopedi Islam (2)*, dijelaskan bahwa sejak abad ke-7 diduga keras para musafir dan pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India (*Gujarat) telah memperkenalkan Islam di Nusantara. Hal ini dimungkinkan karena sejak abad ke-5 Samudera Hindia telah menjadi kawasan yang berbahasa Arab dan jalan dagang Teluk Persia-Tiongkok yang terus berlanjut sampai beberapa abad kemudian. Pada abad ke-10 Malaka telah menjadi pelabuhan penting bagi perdagangan muslim di Asia. Islam datang ke negeri ini dengan jalan damai. Para *mubalig melangsungkan perkawinan dengan penduduk setempat dan Islam berkembang secara turun-temurun. J.C. van Leur dalam bukunya *Indonesian Trade and Society* (Den Haag: W. van Hoeve Publisher Ltd., 1967) berpendapat bahwa karena yang membawanya adalah para pedagang maka agama Islam

lebih menarik daripada agama penduduk sebelumnya (Hindu dan Budha).(Dasuki, dkk., 1994: 215).

Menurut Prof. A. Hasymi dalam *Sejarah Islam Masuk ke Nusantara* (1981), kerajaan Islam pertama di nusantara adalah Kerajaan Perlak, yang berdiri pada abad ke-3 Hijriah. Sebagai buktinya, pada 173 H. sebuah kapal layar telah berlabuh di Bandar Perlak membawa angkatan dakwah di bawah Nakhoda Khalifah, yang datang dari Teluk Kambay Gujarat. Pada 1 Muharram 225 H. Kerajaan Perlak diproklamasikan menjadi sebuah kerajaan Islam dan Sayid Abdul Aziz dilantik menjadi raja dengan gelar Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah. Dijelaskan oleh Hasymi lebih lanjut, pada akhirnya penyebaran Islam dari daerah ke daerah mengalami perkembangan yang pesat. Sejumlah kerajaan seperti Kerajaan Pasai, Aceh sampai ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Pariaman juga menerima Islam. (<http://www.yaisra.com>).

Islam yang sudah menjadi agama sebagian besar penduduk di Nusantara, pada akhirnya ikut mempengaruhi para pemimpin kerajaan-kerajaan di Nusantara pula. Sebelumnya mereka dikenal sebagai Raja, tetapi kemudian seiring Islam itu lalu menukarnya dengan sebutan Sultan. Itu semua tentulah mengadopsi atau mengikuti cara atau sistem pemerintahan sultan yang berlangsung di Arab (Timur Tengah) dengan dasar pemerintahan adalah agama Islam. Tentang sultan ini menurut penjelasan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah raja; baginda. Selanjutnya, kesultanan adalah kawasan (daerah) yang diperintah oleh sultan; kerajaan; dan bermakna istana (1990:866). Adanya gelar raja dengan sultan dapat dikatakan sebagai wujud langsung seiring masuknya Islam di Nusantara. Raja-raja yang sudah beragama Islam ternyata berpengaruh langsung terhadap agama petinggi kerajaan dan rakyatnya. Dalam hal ini, mereka juga memeluk agama Islam. Suatu wujudnya pula, raja-raja yang sudah menganut agama Islam tersebut tak hanya puas sampai memeluk atau menganut agama Islam, tetapi juga tampil langsung di tengah rakyat atau masyarakatnya di dalam menyiarkan agama akhirul zaman itu. Tak jarang di antara raja-raja tersebut dikenal pula sebagai ulama atau sekurang-kurangnya sebagai tokoh agama (orang alim atau shaleh).

Berkaitan dengan gelar sultan ini dapat dipahami dari penjelasan dalam *Ensiklopedi Islam (4)*, bahwa gelar ini untuk pertama kali dipakai dalam Islam pada zaman pemerintahan Dinasti *Abbasiyah (750-1258). Pada mulanya kekuasaan sultan terbatas dan berada di bawah

khalifah, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan sultan makin besar, bahkan melebihi kekuasaan khalifah. Kekuasaan politik dan militer berada di tangan sultan. Khalifah hanya sekedar simbol, sementara jalannya pemerintahan ditentukan oleh sultan. Dalam perkembangan berikutnya, sultan betul-betul berkuasa penuh atas daerah dan wilayahnya dan tidak berada di bawah khalifah mana pun. Dalam kedudukan seperti ini sultan adalah raja sehingga istilah “sultan” digunakan sebagai gelar bagi seorang raja yang muslim.

Masih mengikuti penjelasan *Ensiklopedi Islam (4)* bahwa di Nusantara (Indonesia) gelar sultan kali pertama dipakai oleh *Malik Shah (w.699 H./1297 M.), raja pertama dan pendiri Kerajaan *Samudera Pasai. Gelar tersebut diberikan oleh Syekh Ismail, seorang pengajar agama Islam yang diutus oleh Syarif Makah. Setelah itu, raja-raja di Kerajaan Islam Indonesia pada umumnya memakai gelar sultan. Misalnya, Raden *Fatah (memerintah lebih kurang 1500—1518) bergelar Sultan Syah Alam Akbar al-Fatah, Pangeran Samudera, raja Banjar I (Kesultanan *Banjar), bergelar Sultan Suriyansyah (memerintah 1540—1565). Demikian pula halnya dengan kerajaan-kerajaan Islam Indonesia lainnya seperti *Mataram, Luwu, *Goa, dan *Ternate (Dasuki, dkk., 1994:291).

Peran sultan di kerajaan-kerajaan nusantara amat berkait erat dengan peran yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan para khalifah Islam. Dalam kaitan ini, acuan di dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan ajaran Islam. Seorang sultan menjalankan kewajibannya dengan tujuan melaksanakan perintah-perintah Allah, sebagai khalifah di muka bumi, dan mencapai ridha Allah, yang pada akhirnya kelak di yaumul mahsyar akan diminta pertanggungjawabannya. Dengan demikian, sultan-sultan yang menjadikan Islam sebagai ciri kerajaan tentulah sedapat-dapatnya mengupayakan keberadaan kerajaan (kesultanan) sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dengan kata lain, setiap sultan semestinya berupaya roda pemerintahan dan pembangunan kerajaan dalam derap *amar ma'ruf wa nahi munkar*. Sultan akan memaknakan kesultannya dengan ukuran ajaran Islam.²⁹

Dalam kaitan ini, mengikuti keterangan dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (5)*, pada akhirnya kaum muslimin merupakan mayoritas penduduk Asia Tenggara—khususnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia, Malaysia, Patani (Thailand Selatan), dan Brunei—yang jauh

²⁹ Mengikuti keterangan *Ensiklopedi Islam (4)*, di dalam Al Quran kata “sultan” disebut sebanyak 34 kali dengan pengertian yang bermacam-macam, antara lain: kekuasaan, berkuasa, bukti, hujah (tanda, bukti, alasan), ilmu pentetahuan, dan kekuatan (1994:291-292).

dari tempat awal perkembangan Islam merupakan kasus konvensi keagamaan yang cukup unik. Oleh sebab itu, proses konvensi masal penduduk Dunia Melayu-Indonesia (nusantara) ke dalam Islam, yang secara umum berlangsung secara damai. Karena perkembangan politik dan perubahan demografis, kaum muslimin kemudian menjadi komunitas keagamaan minoritas di Pattani (Thailand Selatan), Singapura, dan Filipina Selatan. Dalam kaitan ini, perlu dipahami bahwa pada akhirnya peran raja (sultan, *Pen.*) dan kerajaan muslim di dunia Melayu-Indonesia dalam islamisasi serta pembentukan institusi Islam berkaitan banyak dengan hakikat dan karakter raja dan kerajaan Muslim itu sendiri. Raja memandang diri mereka sebagai *zill Allah fi al-Ardh* (bayang-bayang Allah di muka bumi), dengan karakter yang cenderung sufistik. Mereka merasa memiliki tanggung jawab langsung kepada Tuhan untuk memelihara dan mengembangkan Islam. Oleh karena itu, mereka terlibat langsung bukan hanya dalam pembentukan lembaga Islam, melainkan juga dalam wacana dan aktivitas keagamaan (Abdullah, dkk., 2005:1—3).

Sebagaimana diketahui di Nusantara terdapat banyak kerajaan. Di antaranya, terdapat beberapa buah kerajaan Melayu seperti Kerajaan Bintan. Kerajaan ini pada awalnya belum bergama Islam, tetapi menjadi cakal-bakal berdirinya Kerajaan Malaka. Dari Bintan kerajaan berpindah ke Temasik (Singapura), terus ke Malaka, dan kembali lagi ke Bintan. Penjelasan ini, antara lain, disebutkan dalam *Sejarah Kerajaan Melayu Siak Sri Indra Pura* (1979), Kerajaan Melayu yang bermula di Bintan dalam masa 1100—1158. Setelah itu, Kerajaan Melayu berpusat di Temasik, yang bernama baru Singapura (1158—1384). Selanjutnya, berpindah Malaka (1384—1511), dan kembali lagi meneruskan Kerajaan Melayu di Bintan. Dari Bintan ke Kampar, yang kemudian berlanjut ke Johor tatkala Kerajaan Melaka berakhir setelah ditaklukkan oleh Portugis. Sesudah itu kembali ke Bintan lagi, tetapi Portugis kembali menyerang, lalu berpindah ke Kampar. Dari Johorlah kerajaan ini kemudian berkembang. Selanjutnya, berkedudukan di Hulu Sungai Carang atau dikenal dengan sebutan Hulu Riau, dengan nama terkenal adalah Riau. Selanjutnya kerajaan berkedudukan pula di Pahang. Maka dikenallah Kerajaan ini bernama Riau-Johor-Pahang (1528—1824), yang sebagai petinggi berpengaruh dan tersohor adalah Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Syah III yang bergelar Sultan Mahmud Riayat Syah (1761—12 Januari 1812). Kerajaan ini kelak dikenal pula dengan nama Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang.

2. Islam dari Kerajaan Melayu Malaka sehingga Riau-Johor

Sejarah mencatat bahwa Malaka sudah sejak lama menjadi pusat bandar perdagangan dunia. Karena itulah, berbagai negara di dunia melakukan hubungan perdagangan, yang antara lain melalui pelabuhan di Malaka itu. Kedudukannya yang strategis itu telah menarik perhatian raja Kerajaan Melayu yang perpusat di Temasik (Singapura). Di dalam *Sejarah Kerajaan Melayu Siak Sri Indra Pura* disebutkan bahwa rajanya yang terakhir, yakni Perameswara Raja Kecil Besar berpindah ke Malaka dan menjadi raja pertama di Malaka dalam kurun waktu 1384—1414 M. Raja ini selanjutnya masuk Islam dan bernama Sultan Muhammad (1972:12).

Masuknya Islam ke Malaka menjadi jelas berlanjut ke Bintan, yang selanjutnya di Kerajaan Johor, yang kelak menjadi Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Dijelaskan dalam *Kitab Tawarikh Melayu* oleh R.O. Winstedt (diterjemahkan Zainal Abidin bin Ahmad), syahdan berkenaan dengan negeri Malaka pula masuk Islam boleh kita dapati sedikit keterangannya daripada kitab yang dikarangkan oleh Wizurai Portugis yang bernama Alfonso d'Alburqueque itu, ialah yang telah mengalahkan negeri Malaka dalam tahun Masehi 1511; dan daripada hikayat *Sejarah Melayu*, dan daripada tawarikh yang dikarangkan oleh orang China. Akan tetapi, tarikh orang Malaka masuk ugama Islam itu tiadalah dapat kita ketahui dengan sah. Maka kalau mengingat tawarikh China, adalah tersebut katanya bahawa pada tahun masehi 1409 orang-orang Malaka telah masuk ugama Nabi Muhammad, *salla'Ilahu alaihi wasallam*; dan Raja Malaka yang mula-mula masuk ugama itu *Permaisura* gelarnya, telah mengambil nama Sultan Muhammad Shah³⁰ apabila masuk Islam; dan baginda itu naik takhta kerajaan pada tahun Masehi 1403; dan pada tahun Masehi 1414 baginda itu mangkat kembali karahmatu'llah.

Bahawa adalah dari zaman akhir kurun yang ketiga belas negeri Pasai telah menggantikan kemajuan negeri Kedah, ia-itu menjadi Bandar yang besar; maka apabila Malaka telah dibuka pada akhir kurun yang keempat-belas, atau pada permulaan kurun yang kelima-

³⁰ Dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (5)*, menjelaskan, Malaka ada kaitannya dengan Samudera Pasai. Hubungan antara Samudera Pasai dan Malaka, yang melibatkan para pedagang muslim dan juga disertai para mubaligh dan guru sufi, selain menambah ramainya Bandar Malaka, juga menyebabkan raja Malaka memeluk agama Islam. Raja Malaka yang pertama, Parameswara, setelah memeluk agama Islam lalu berganti nama dengan gelar Sultan Megat Iskandar Syah. Ia melakukan pernikahan dengan putri dari Kerajaan Samudera Pasai. Sejak awal abad ke-15, di Asia Tenggara secara nyata muncul kerajaan Islam yang besar setelah Kerajaan Samudera Pasai. Pengaruhnya besar pula bagi perkembangan pelayaran dan perdagangan di daerah lainnya di Asia Tenggara (Abdullah, dkk., 2005:13).

belas, maka Malaka-lah pula menggantikan Pasai menjadi terlebih ramai dan ma'mor, lagi pun dilawati oleh beberapa 'ulama dan saudagar serta orang-orang dagang juga (Winstedt, 1925:44-45). Adapun Malaka yang dikaitkan pula dengan Muar, terletak tak jauh dari Malaka, kata Slamet Muljana pada tahun 1414, raja Muar yang bernama Parameswara dan beristerikan putri dari Pasai, atas bujukan sang permaisuri, masuk agama Islam dan bergelar Megat Iskandar Syah. Peristiwa tersebut memberikan dorongan yang terlalu kuat untuk persebaran agama Islam di kalangan rakyat Malaka khususnya, dan di kalangan penduduk pedalaman Malaya pada umumnya (Muljana, 2009:147).

Islam yang telah menjadi agama resmi Kerajaan Malaka terus berkembang dan menjadi ciri kemajuan kerajaan. Setelah Melaka menjadi Kerajaan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (5)*, para pedagang, mubalig, dan guru sufi dari negeri Timur Tengah dan India makin ramai mendatangi Bandar Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Dari kedua ibukota kerajaan inilah, Islam dibawa ke Pattani dan tempat lainnya di Semenanjung, seperti Pahang, Johor, dan Perak. (Abdullah, 2005: 13). Adapun Kerajaan Johor adalah kelanjutan dari Kerajaan Melayu yang berpusat Bintan, di Temasik (Singapura), dan Malaka. Dari Malaka, kembali lagi ke Bintan. Adalah Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah I dengan putranya, Sultan Ahmad Shah, berhadapan dengan Portugis sehingga terjadilah kekacauan di Malaka. Ini tidak lain karena kedatangan Portugis yang menyerang Kerajaan Melaka (1511). Akibatnya kata Buyong Adil, pada Januari 1513 Sultan Mahmud Shah I serta pengikut-pengikut Baginda dari Muar, telah berasal semula di Bentan (Bintan); Baginda bersemayam di tempat yang bernama Kopak. Dari 1513 itu hingga 1519 tetaplah Baginda bersemayam di Bentan. Dan, sejak Sultan Mahmud Shah berkerajaan di Bentan, tempat-tempat yang dahulunya di bawah kuasa atau pengaruh Kerajaan Malaka tetap juga bertuanku Baginda, yaitu seperti Kuala Muar, Pagoh (dalam negeri Johor sekarang), Beruas (Kuala Selangor), Lingga, dan Inderagiri. Portugis tiada pernah senang dan tenang dengan keberadaan Sultan Mahmud Shah I. Beberapa kali Portugis melakukan penyerangan, tetapi berbuah kekalahan. Sampailah suatu masa terjadilah pertempuran di pusat Kerajaan Bentan, Kota Kara dan Kopak. Sejumlah pembesar kerajaan meminta Sultan Mahmud Shah I meninggalkan medan perang dan berundur ke Kampar. Dan, Kerajaan Melayu Bentan itu jatuh ke tangan Portugis pada 1526. Dari Kampar Sultan Mahmud pindah pula ke Johor. Namun kemudian balik lagi ke Kampar dan meninggal pada 1528

dan dimakamkan di Kampar (disebut dengan gelar Marhum Kampar). Putra Baginda dari pernikahan dengan Tun Fatimah, yakni Sultan Muda naik tahta menjadi sultan dengan gelar Sultan Alaudin Riayat Shah (II) dan disebut-sebut Sultan Muda (Adil, 1971:6—7).

Kerajaan Johor selanjutnya berpusat di Pulau Bintan, yang bernama Sungai Carang. Menurut Shaharom Husain kawasan baru itu dibuka oleh Sultan Ibrahim Syah yang dibantu oleh Laksemama Tun Abdul Jamil pada 1673. Sultan Ibrahim Syah adalah Sultan Johor VIII. Pada 1678 Sultan ini berkedudukan di Hulu Sungai Carang, yang dikenal dengan sebutan Riau. Akhirnya Kerajaan Johor dikenal dengan nama Kerajaan Riau-Johor-Pahang-Lingga. Baginda mangkat di Riau pada 1685 (Husain, 1995:22). Dan sampailah suatu masa Kerajaan Melayu Riau-Johor-Pahang-Lingga dipimpin oleh Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, yang dilantik pada 4 Oktober 1673, berkedudukan di Hulu Sungai Carang, Riau. Sejalan dengan itu, dalam pemerintahan Kerajaan ini, di samping Sultan sebagai Yang Dipertuan Besar, dikenal pula jabatan baru yakni Yang Dipertuan Muda, yang kedudukannya sebagai “pembantu” Sultan atau Yang Dipertuan Besar. Yang dilantik sebagai Yang Dipertuan Muda I adalah Daeng Marewah. Sampai suatu masa yang menjadi Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang adalah Raja Mahmud yang selanjutnya dikenal dengan nama Sultan Mahmud Syah III, yang bergelar Sultan Mahmud Ri’ayat Syah (berkuasa sejak usia sekitar dua tahun, rentang masa 1761—1812). Adapun Yang Dipertuan Muda semasa Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang diperintah oleh Sultan Mahmud Ri’ayat Syah adalah (1) Daeng Kamboja (Yang Dipertuan Muda III, 1745—1777), (2) Raja Haji ibni Daeng Celak (1777—1784), (3) Raja Ali ibni Daeng Kamboja (1784—1806), dan (4) Raja Jaafar ibni Raja Haji (1806—1831).

Sebagaimana dijelaskan di atas, Kerajaan Islam Malaka selanjutnya mengukuhkan pusat kerajaannya di Johor-Pahang-Riau-Lingga. Niscaya lah pertumbuhan Islam pun terjadi dan berlanjut di Kerajaan Riau-Johor-Pahang-Lingga, mulai dari Sultan Ibrahim Syah I, Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah sampai Sultan Mahmud Ri’ayat Syah. Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang ini termasuk sebuah kerajaan besar di Nusantara yang ibukotanya berada di pesisir pantai. Sedangkan Islam pada masa-masa awal dan kelanjutannya sudah masuk dan menyebar ke seluruh kerajaan Islam yang berada di pesisir Nusantara, yang tentu di antaranya adalah Riau-Lingga-Johor dan Pahang, puncak kejayaannya ketika berpusat di Hulu Sungai Carang-Bintan, yang dikenal dengan Kota Raja (Kota Lama) dan berlanjut kedudukannya di Lingga serta Pulau

Penyengat. Agama Islam di dalam kerajaan ini bukan hanya sebagai agama penduduk dan raja-raja (Sultan)nya, melainkan menjadi ciri khas pemerintahan kerajaan. Tentang hal ini dapat kita kaitkan dengan penadapat dalam *Ensiklopedi Islam (2)* yang menjelaskan bahwa agama Islam tersebar dengan daya tarik dakwah melalui perdagangan. Sejak abad ke-17 dapat dikatakan bahwa Islam telah menyebar ke seluruh Nusantara melalui berbagai saluran seperti perdagangan, perkawinan, birokrasi pemerintahan, pendidikan (pesantren), mistik, cabang-cabang seni, dan lain-lain. (Abdullah, dkk., 1994: 216).

Islam telah menjadi agama kerajaan. Sebagai wujud Islam dalam kerajaan, menurut Helmiati, Islam juga mempunyai tempat yang khusus dalam urusan pemerintahan mulai dari penggunaan sebutan kehormatan dan gelar yang bernapaskan Islam sampai kepada pengadopsian unsur-unsur hukum Islam dalam perundang-undangan negara. Dalam kaitan itu, sultan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan untuk memelihara dan mengembangkan agama Islam. Maka, mereka tak hanya terlibat langsung dalam pembentukan lembaga Islam, tetapi juga dalam wacana dan aktivitas keagamaan yang mengkristalkan budaya Melayu. Di samping itu, tak jarang entitas politik yang biasanya disebut *kerajaan* diubah sebutannya menjadi *kesultanan* (Helmiati, 2011:94—95).

3. Perkembangan Islam di Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang

Perkembangan dan kemajuan Islam di Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sangat berkaitan dengan Malaka. Perkaitannya terjadi karena Raja Malaka, Parameswara, yang merupakan garis keturunan raja-raja Bintan dan Temasik, akhirnya beragama Islam dan demikian pula dengan segenap pembesar dan penduduk Malaka. Agama Islam dapat diterima dengan mudah dan baik di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, khususnya Melayu, karena agama itu dapat membawa umat manusia kepada kemajuan dalam segala bidang. Dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern (Jilid 4)* dijelaskan bahwa Islam diterima oleh penduduk setempat, yang tertarik pada gagasannya tentang persamaan dan demokrasi. Penguasa lokal mengadopsi agama baru karena melihat bahwa di dalam bagian ritual dan filosofinya terkandung cara baru untuk mendukung otoritas mereka dan dengan mudah menyerap gagasan bahwa penguasa adalah

bayang-bayang Tuhan di muka bumi dan “manusia sempurna”, sebuah konsep yang dikembangkan di kerajaan-kerajaan Muslim di Asia Tenggara (Esposito, dkk., 2002:43).

Setelah diserang Portugis, Sultan Malaka berhijrah kembali ke Bintan, ke Kampar, dan selanjutnya ke Johor. Malaka telah menjalankan pemerintahan kerajaan dengan agama Islam sebagai agama kerajaan dan rakyatnya. Dengan demikian, suatu hal yang amat masuk akal bahwa setiap sultan Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang dari masa ke masa tentulah berpegang kepada apa-apa yang sudah diterapkan di Malaka, termasuk menjalankan roda pemerintahan kesultanan dengan berpegang dan berpedoman secara teguh kepada agama Islam. Dalam kaitan ini dapat kita tegaskan lagi bahwa tatkala Islam di Malaka sebagaimana dijelaskan *Sejarah Melayu* dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (5)*, seorang raja Malaka, yakni Sultan Muhammad Syah segera memerintahkan seluruh pegawai kerajaan dan masyarakat agar memeluk agama Islam setelah dia sendiri beralih menjadi seorang muslim. Akhirnya Raja Melayu tak hanya berhasil membawa kerajaan mencapai kemajuan yang sangat berarti di bidang ekonomi dan politik, tetapi sekaligus tampil sebagai pusat perkembangan Islam di Nusantara. Segala urusannya berdasarkan peraturan, yang dikenal dengan *Undang-Undang Malaka*, teks berisi seperangkat aturan hukum di Kesultanan Melaka (Abdullah, dkk., 2005:63-64).

Kerajaan Johor-Riau-Pahang-Lingga yang telah menjalankan roda pemerintahan kerajaan sebagaimana diterapkan di Malaka selanjutnya tatkala berpusat di Pahang membuat lagi sebuah peraturan untuk kerajaan dan rakyatnya. Dijelaskan dalam ensiklopedi yang sama bahwa sebuah teks berisi ketetapan hukum di Pahang (*The Pahang Digest*) disusun untuk penguasa Kerajaan Pahang pada 1592. Undang-undang ini memperlihatkan unsur Islam sangat kuat. Bahkan hampir separuh dari seluruh pasal dalam undang-undang tersebut merupakan terjemahan dari teks hukum Islam dari mazhab Syafi'i. Lagi-lagi undang-undang itu menempatkan Raja Pahang sebagai khalifah, yang bertanggung jawab dalam penerapan hukum Islam di dalam masyarakat kerajaan (Abdullah, dkk., 2005:71).

Agama Islam yang tumbuh dan berkembang di dalam kawasan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dapat dipastikan sebagai kelanjutan pertumbuhkembangan Islam di Malaka. Penguatan awalnya di Johor, kemudian semakin menampakkan wujudnya ketika pusat kerajaan berkedudukan di Pahang. Pengembangan puncaknya ketika kerajaan pusat kedudukan ibukota di Riau. Dengan demikian dapat diyakini pula, agama Islam yang berkembang di Malaka

itulah yang semakin mencapai kemajuannya di Pahang-Johor-Riau. Dalam hal ini, dapat dipahami dari penjelasan Slamet Muljana, agama Islam yang berkembang di Malaka adalah agama Islam/Syafi'i. Selat Malaka juga merupakan pintu keluar agama Islam. Politik ekspansi Malaka membawa juga akibat persebaran agama Islam madzhab Syafi'i di sepanjang pantai barat Malaya, sepanjang pantai timur Sumatera, sepanjang pantai timur Malaya, serta pedalaman semenanjung Melayu dan Kepulauan Lingga-Riau (Muljana, 2009:152-153).

Islam di Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sebagai kelanjutan dari Kerajaan Islam Malaka dan mencapai kemajuannya ketika berpusat di Hulu Riau, Sungai Carang, Bintan dan Lingga pada masa Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (1761-1812) adalah suatu keniscayaan. Menurut M.C. Ricklefs dalam bukunya *Sejarah Indonesia Modern* di Nusantara bagian barat budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat sebagian besar negara Sumatera dan Semenanjung Malaya. Dengan berbagai cara Sultan Malaka meletakkan norma-norma budaya bagi negara-negara tersebut (Ricklefs, 1999:77). Helmiati menjelaskan juga kaitan kerajaan tersebut. Kesultanan Johor yang terkadang disebut juga sebagai Johor-Riau atau Johor-Riau-Lingga adalah kerajaan yang didirikan pada 1528 oleh Sultan Alauddin Ri'ayat Syah, putra sultan terakhir Malaka Mahmud Syah (Mahmud Syah I, *Pen.*). Sebelumnya daerah Johor-Riau merupakan bagian dari Kesultanan Malaka yang runtuh akibat serangan Portugis pada 1511. Pada puncak kejayaannya Kesultanan Johor-Riau mencakup wilayah Johor sekarang, Singapura, Kepulauan Riau, dan daerah-daerah di Sumatera seperti Riau Daratan dan Jambi (Helmiati, 2011:72-73). Daerah lainnya adalah Sukadana-Kalimantan Barat, Pahang, Selangor, dan lainnya.

Islam di kerajaan ini akhirnya memberi napas, citra, warna, dan bentuk terhadap budaya Melayu sehingga dikenallah budaya Melayu-Islam. Salah satu caranya adalah dipadukannya melalui nikah kawin antarsuku Melayu dengan Bugis, baik di kalangan istana maupun rakyat luas. Begitu pula dengan suku-bangsa lainnya. Inilah wujud perbauran kebangsaan, yang disimpai oleh agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Menurut UU Hamidy setelah terjadi nikah-kawin antara pihak Melayu dengan Bugis dalam Kerajaan Riau itu, pihak Bugis melebur segala aspek budayanya ke dalam liku dan adat resam budaya Melayu sehingga keturunan mereka memperlihatkan diri sebagai orang Melayu dengan semangat Bugis. Inilah yang menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan budaya Melayu dalam citra Islam berkembang begitu baik pada abad ke-19 sampai seperempat abad ke-20 di Riau (Hamidy, 1990:21).

Berkaitan dengan penjelasan di atas, menurut A. Hasyimi dalam *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaan*, kedatangan agama Islam ke nusantara membawa perubahan yang cepat di segala bidang. Kebudayaan Islam adalah penjelmaan iman dan amal bagi manusia untuk mengabdikan dan menghambakan diri kepada Allah dan munculnya Islam berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat Melayu. Para ulama Islam membina dan menyempurnakan bahasa dan sastra Melayu di Riau melalui aksara Arab Melayu. Dengan pula media bahasa dan sastra Melayu berperan dalam pengembangan dan penyebaran dakwah Islam di nusantara. Agama Islam telah berjasa besar dalam membina bahasa dan kesusastraan Melayu di rantau Asia Tenggara, bahkan melewati batas-batasnya, sebagaimana halnya bahwa bahasa dan sastra Melayu telah berjasa besar dalam mengembangkan dan menyiarkan dakwah Islamiyah di gugusan kepulauan nusantara, bahkan Asia Tenggara. Bahasa dan kesusastraan Melayu yang dipakai sebagai media telah berperan amat penting dalam pengembangan dan penyiaran dakwah Islamiyah di kepulauan nusantara, bahkan di Asia Tenggara. Dengan menggunakan bahasa dan kesusastraan Melayu, para juru dakwah dengan mudah mengembangkan Islam di Kepulauan Indonesia (Santoso, dkk., 1986:98-90).

Dengan kata lain, ada kekuatan perekat antara budaya Melayu dan Islam, yang perekat utamanya itu ialah bahasa dan sastra Melayu. Apakah rahasianya? Jawabnya, antara lain dapat dipahami dari penjelasan dalam *Esiklopedi Oxford Dunia Islam Modern (Jilid 4)*, Islam dikaitkan dengan bahasa Melayu; ia dianggap sebagai bahasa terbaik untuk membaca dan menulis Al-Quran, hadis, hukum, dan pengetahuan (Esposito, 2002:35). Bahasa dan sastra Melayu itu tumbuh, berkembang, dan mulai mendapat pembinaan secara baik di dalam pemakaiannya, baik secara lisan (ucap) maupun tulisan (aksara) di Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang sewaktu Yang Dipertuan Besar, Sultan Mahmud Riayat Syah. Karena kemajuan yang dicapai Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang ketika berpusat di Lingga, di antaranya berkembangnya kebudayaan, maka Lingga pun digelar sebagai *Bunda Tanah Melayu*. Menurut Ahmad Jamaan dalam *Daik Bonda Tanah Melayu*, Daik adalah sebuah negeri yang bertamadun tinggi, memiliki taji sejarah yang tajam dan panjang. Penuturan bahasa yang halus, lentik, dan indah bergetah. Daik, menurut Yurmar, adalah benteng lidah Melayu sekaligus benteng tamadun. Di Daik Bonda Tanah Melayu ini pula pernah terkenal imperium kebudayaan yang lebih

mengutamakan keperkasaan otak ketimbang kilauan kapak seperti yang berhadap-hadapan dengan keseharian kita beberapa periode kebelakang ini (Rejab F.I., 2000:32-38).

Kenyataan yang wujud di tengah bangsa bahwa buah atau hasil dari pembinaan tahap-tahap awal yang digagas dan dilakukan oleh Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah dalam bidang kebudayaan dan tamadun Melayu itulah yang kemudian melahirkan nama pengarang, yakni Raja Ahmad bin Raja Haji dan Engku Puteri Raja Hamidah binti Raja Haji, yang mencapai puncaknya di Pulau Penyengat, dengan tokoh utamanya Raja Ali Haji dan Datuk Kaya Muda Riau Haji Ibrahim.

4. Penguatan Pembinaan Agama Islam

Menurut penjelasan *Tuhfat al-Nafis*, Islam telah tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam istana dan segenap rakyat. Islam telah menjadi sendi-sendi kehidupan kerajaan dan segenap lapisan masyarakat. Islam tak sekadar agama untuk diyakini dan diamalkan apa-apa yang sudah diwajibkan, tetapi mewarnai dan mencitrakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Karena itulah, tumbuh dan berkembang perbuatan menginfakkan harta di jalan Allah, yang dikenal dengan zakat dan sedekah yang begitu besar. Kaitannya dengan Islam, segala tuan-tuan syed pun banyaklah datang dari tanah Arab apalagi lebai Jawa hingga penuh tumpatlah di rumah wakaf dan masjid dan segenap surau orang besar-besar itu dan orang kaya-kaya itu. Apalagi malam Jumat berkumpul ke dalam semuanya maulud nabi (Matheson Hooker, 1991:389).

Dari keterangan *Tuhfat al-Nafis* dapat kita pahami bahwa ketika itu tak hanya amal-ibadah secara Islam yang baik di tengah masyarakat, tetapi perayaan-perayaan berkaitan dengan ajaran Islam pun dilaksanakan. Misalnya diadakan kegiatan dan peringatan yang berkaitan dengan maulud Nabi Muhammad s.a.w. Penguatan Islam kepada kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, termasuk Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, khususnya rentang masa Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (1761—1812), tak terlepas dari *riwayat damai* datang dan masuknya Islam ke nusantara. Dedi Supriyadi menyebutkan dalam *Sejarah Peradaban Islam*, Islam sebagai agama yang memberi corak kultur bangsa Indonesia (dulu nusantara, *Pen.*) dan sebagai kekuatan politik yang menguasai struktur pemerintahan sebelum

datangnya Belanda. Di Sumatera kerajaan Islam telah memosisikan Islam sebagai agama dan sebagai kekuatan politik yang mewarnai corak social-budayanya (Supriyadi, 2008:193).

Islam di Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang telah mencapai puncaknya tatkala pemerintahan diterajui oleh Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Dalam kaitan ini, menurut Jajat Burhanudin dalam *Esiklopedi Tematis Dunia Islam (Jilid 5)*, jatuhnya Kesultanan Melaka ke tangan Portugis pada 1511 membawa pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di nusantara. Penaklukan Portugis justeru menjadi pendorong bagi munculnya situasi sosial-politik dan keagamaan yang menjadi basis bagi berlangsungnya proses islamisasi yang kian intensif dan melebar. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan lahirnya pusat-pusat kekuatan Islam baru, yang tak hanya terkonsentrasi di pantai utara Sumatera dan selat Melaka, tetapi tersebar di wilayah-wilayah lain di nusantara.

Lebih lanjut dijelaskan Jajat Burhanudin, di belahan barat nusantara juga berdiri kerajaan-kerajaan Islam sejalan dengan arus perdagangan maritim setelah kejatuhan Melaka pada 1511. Salah satu yang terpenting yang terpenting dan kerap menjadi kekuatan tandingan Kesultanan Aceh adalah Kesultanan Johor-Riau di belahan selatan Semenanjung Malaka. Penguasa Johor-Riau adalah pewaris langsung Kesultanan Malaka. Akhirnya, Johor-Riau dalam banyak aspek juga berkembang menjadi kerajaan Islam terkemuka di nusantara. Perkembangan ini berlangsung terutama setelah kerajaan tersebut memperoleh akses memasuki perdagangan maritim internasional. Dalam perdagangan maritim kala itu ada kekuatan Barat, yakni Portugis di Melaka dan Belanda di Batavia. Namun, terlepas dari pengaruh dua kekuatan Barat tersebut, Johor-Riau mencapai perkembangan dan kemajuan penting sebagai sebuah kerajaan Islam di nusantara (Abdullah, dkk., 2005:45).

Jelaslah bahwa penguatan pembinaan Islam yang sudah bermula di Kerajaan Malaka berlanjut pesat di kerajaan-kerajaan Melayu lainnya. Wujudnya budaya Melayu bersebuti dengan Islam. Bazrul bin Bahaman dalam *Alam Melayu* mengatakan bahwa budaya Melayu-Islam sudah kukuh di negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Melaka. Seterusnya, bila Melaka jatuh, budaya Melayu-Islam terus berkembang dan bergerak selaras dengan perkembangan dakwah Islam itu sendiri. Ini ditambah lagi dengan budaya Islam yang menggalakkan pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya, di zaman Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang telah berkembang tradisi intelektual dengan pesatnya. Kegiatan intelektual mulai dari ilmu agama Islam, sejarah, sastra,

geografi, biografi, dan politik. Selanjutnya, dari Lingga kegiatan itu tumbuh dan berkembanglah dengan pesat di Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat kemudian didirikan percetakan pertama di nusantara. Kebesaran Penyengat adalah menjadi pusat kebudayaan Melayu. Penyengat menjadi pusat intelektual yang unggul di Asia Tenggara ketika itu. Sinar yang dipancarkan pulau ini sampai ke seluruh nusantara (Rahman, dkk., 2003:15-16).

Pengukuhan Islam di Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dapat pula ditangkap dari penjelasan Virginia Matheson Hooker dalam *Kandil Akal di Pelantar Budi*. Menurutnya, banyakkah bahan dalam bentuk teks tertulis mengenai kehidupan keagamaan di kawasan tersebut, dan khususnya informasi yang rinci untuk abad ke-19. Werner Kraus telah mengkaji Tarikat Nakshabandiyah dan Martin van Bruinessen telah membentangkan kepada kita gambaran sistematis yang pertama tentang pola dan alat-alat pengajaran Islam. Juga ada tradisi *membayar kaul nazar* (Al-Azhar, dkk., 2001:58).

Dengan demikian, penguatan Islam di kerajaan dan masyarakat Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dilakukan oleh Sultan, yang paling utama adalah mendirikan masjid, surau, langgar, dan rumah wakaf. Di rumah-rumah ibadah itulah secara keseluruhan ajaran Islam dapat diajarkan kepada anak-anak di lingkungan kerajaan dan anak-anak berbagai lapisan masyarakat. Di Lingga pekerjaan utama yang dilakukan Sultan Mahmud Riayat Syah adalah membangun masjid yang bernama Masjid Jamik Sultan Lingga, yang menurut M. Amin Yacob adalah dibangun oleh Sultan Mahmud Syah III di pusat kota Daik pada awal pemerintahannya di Lingga 1787. Pada mulanya, masjid ini hanya mampu menampung 40 orang dan kemudian diganti dengan bangunan beton yang dibina tanpa tiang sebagai penyangga dan dapat memuat sekitar 400 orang jemaah. Skrin Mimbar Masjid Jamik Sultan Lingga dibuat oleh para pengukir di kawasan Jawa Tengah. Dalam ukiran tersebut tertera catatan 12 Rabiul Awal, Senin 1212 sanah Hijriyah Nabi Muhammad s.a.w. (1792 M.) (Yakob, 2004:101).

Tentang upaya nyata yang dilakukan Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah dalam membangun pasilitas agama Islam, utamanya masjid dapat diikuti pula penjelasan (Adil, 1971:151). Masjid Sultan Mahmud Syah III yang bersejarah dan tentunya sudah menjadi Benda Cagar Budaya (BCB) tersebut, jika dihitung usianya dari mulai berdirinya priode pertama 1787, maka sudah berusia 225 tahun. Dan kalau dihitung sejak berdirinya sebagai bangunan beton, 1792, maka sudah berusia 220 Tahun. Sampai setakat ini masjid tersebut masih berdiri kokoh di

Lingga dan dimanfaatkan oleh umat Islam Lingga. Setelah membangun Lingga, pada 1803 Sultan Mahmud Riayat Syah membangun pula Pulau Penyengat—yang menjadi emas kawin Engku Puteri Raja Hamidah—dengan berbagai bangunan, sarana dan prasarana, antara lain istana dan masjid, sehingga pulau itu menjadi sebuah kota. Setelah kota itu lengkap, Sultan Mahmud menjadikannya sebagai tempat kediaman Engku Puteri Raja Hamidah, permaisurinya dan sekaligus tempat kedudukan Yang Dipertuan Muda VI Riau, Raja Jaafar. Penjelasan ini antara lain dikemukakan juga oleh Tengku Ahmad Abubakar & Hasan Junus dalam *Sekelumit Kesan Peninggalan Sejarah Riau* (Abubakar, 1972:28-29).

Sultan Mahmud Riayat Syah telah menempatkan dirinya sebagai Yang Dipertuan Besar, Sultan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang itu orang yang amanah. Teguh pendirian akan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, janjinya adalah janji karena Allah. Bagaimana Raja Haji beramanah kepadanya menjelang berkecamuknya berperangan di Teluk Ketapang, Melaka, Baginda tunaikan, yakni menjaga keutuhan kerajaan dan persaudaraan. Sultan Mahmud adalah seorang pemimpin besar dunia Melayu, yang wilayahnya Asia Tenggara dewasa ini, yang nyata adanya sebagai orang yang berilmu tinggi. Kata Reid & David Marr, Riau demikian beruntung dipimpin oleh orang-orang yang berilmu, yang diperolehnya, *ilmu* dan *akal* sebagai karunia Allah. Lewat kebijaksanaan mereka perdamaian dapat dikembalikan lagi dengan dilaksanakannya sumpah setia antara orang Bugis dan Melayu dalam rangka mengontrol *bantahan* (fitnah). Masing-masing bersumpah tak akan mengkhianati pihak lainnya dan menyatakan bahwa barang siapa mengingkari sumpahnya akan dihancurkan Allah, terbuang dari masyarakat (orang) yang beriman dan dikutuk di akhirat nanti. Pengulangan sumpah pada waktu-waktu krisis meluruskan jalannya sejarah dengan menahan hawa nafsu dan meletakkan kembali keadaan yang seimbang di negeri tersebut (Reid, 1983:109-110).

Pada bagian lain Sultan Mahmud telah berupaya pula untuk menjadikan pusat Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang di Lingga itu terdapat banyak ulama. Para ulama dimaksud tak hanya berasal dari kalangan luar istana, tetapi dari dalam istana sendiri. Anandanya Tengku Abdul Rahman diberikan pendidikan agama dari berbagai ulama dan guru agama Islam. Sultan Mahmud Riayat Syah sangat bercita-cita dan merencanakan anandanya itu menjadi ulama besar. Untuk itu Tengku Abdul Rahman direncanakan akan ke Timur Tengah, di samping naik haji ke Makah juga memperdalam agama Islam. Menurut Buyong Adil sebenarnya Sultan Mahmud

Syah III dalam tahun 1811 sudah berwasiat kepada anaknya yang kedua, Tengku Abdul Rahman agar menjadi ulama. Katanya kepada anaknya tersebut, “Oleh sebab engkau cenderung dalam perkara ugama, beramal ibadat, hendaklah engkau jadi orang alim, dan eloklah engkau bersiap-siap pergi ke Makkah (Adil, 1971:155).

Namun sayang menjelang keberangkatan Sultan Mahmud dan rombongan ke Timur Tengah, yang antara lain untuk mengantarkan Tengku Abdul Rahman melanjutkan studi sehingga kelak akan menjadi ulama besar, takdir Allah s.w.t. menentukan lain. Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, pada 1812, wafat di Lingga. Akhirnya Yang Dipertuan Muda VI Riau Raja Jaafar, menabalkan Tengku Abdul Rahman menjadi Yang Dipertuan Besar Sultan Riau-Lingga-Johor-dan Pahang menggantikan ayahandanya yang mangkat itu. Nyatalah begitu hebat gagasan dan sangat kuat upaya Sultan Mahmud Riayat Syah untuk menguatkan (mengukuhkan) Islam di Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang.

PENUTUP KALAM BAGI SULTAN MAHMUD RI'AYATSYAH SEBAGAI PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA

Kehandalan seorang pemimpin dapat dilihat dari visi kepemimpinan yang dia jalankan. Bagaimana dia membuat keputusan dan bagaimana dia bertanggungjawab atas dampak dari keputusan yang dia buat. Kepemimpinan yang demikian itu, selain merupakan bakat dari lahir, juga hasil dari pendidikan, pengaruh lingkungan tempat dia tumbuh dan dibesarkan, serta tauladan yang dia lihat dari para pemimpin yang diidolakannya. Demikian halnya dengan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, Yang Dipertuan Besar Riau-Lingga (1761—1812). Dia memiliki dan berada dalam semua kondisi demikian itu, yang kemudian membentuk dirinya menjadi pemimpin yang handal, visioner, dan berkarakter.

Ketika dia ditabalkan sebagai Sultan (Yang Dipertuan Besar) Kerajaan Riau-Lingga, pada 1761, dia memang masih sangat muda, sekitar 2 (dua) tahun usianya. Akan tetapi, dia seorang putra mahkota yang dibesarkan dalam tradisi dan lingkungan kerajaan yang sudah berkembang baik dan mempunyai sejarah panjang dalam politik dan pemerintahan, yaitu kerajaan Johor-Riau-Pahang (1527—1699). Moyangnya Sultan Abdul Jalil Ri'ayat Syah I adalah Sultan Johor pertama (1699—1722) yang membangun dinasti Tun Abdul Jalil, Bendahara Kerajaan Melayu yang pertama menjadi sultan. Datuknya, Sulaiman Badrul Alamsyah (1722—1761) adalah Sultan Riau-Johor yang pertama dan sultan pertama yang memakai gelar Yang Dipertuan Besar (YDB), gelar kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Riau-Johor, berdasarkan Sumpah Setia Melayu-Bugis. Ayahandanya, Sultan Abdul Jalil Syah I (1761) adalah YDB II Riau, meskipun tidak sampai setahun memerintah karena meninggal diracun. Dalam pada itu, ibundanya, Raja Putih, adalah peranakan Bugis-Melayu yang terdidik dalam hidup yang disiplin, putri dari Daeng Celak, Yang Dipertuan Muda II Riau-Lingga yang menikahi Tengku Mandak,

putri Sultan Johor Abdul Jalil Riayat Syah I. Dengan demikian, Sultan Mahmud Riayat Syah berdarah biru yang memang dipersiapkan untuk menjadi YDB.

Selain lingkungan istana dan tradisi berkerajaan yang membentuk karakternya, Mamud Ri'ayat Syah juga tumbuh dan berkembang dalam lingkungan orang-orang yang sangat terkenal kukuh dalam mempetahankan harga diri, harkat dan martabat kaum, dan kerajaannya. Tangguh dalam berperang dan menjadi pahlawan di Kerajaan Riau-Johor-Pahang . Yang pertama adalah Daeng Kamboja, YDM III Riau-Johor-Pahang (1748—1777), seorang yang sangat keras dan tak pernah mau mengalah. *Tuhfat al-Nafis* mencatat bagaimana tegarnya dia ketika merajakan Mahmud sebagai sultan di tengah-tengah pertentangan kaum antara pihak Melayu dan pihak Bugis. Sambil memangku Mahmud, dia mencabut halemangnyadan menantang semua pihak yang menentang dan tidak bersetuju dengan pelantikan itu untuk berhadapan dengannya. Selama hampir 15 tahun Mahmud dibina dan dibimbingnya sebagai YDB dan menjadi harapan pihak Bugis.

Ketika Daeng Kamboja wafat, dia digantikan oleh Raja Haji sebagai YDM IV (1777—1784). Raja Haji pun seorang yang sangat keras, berjiwa pejuang, dan semenjak muda sangat anti kepada penjajahan. Dia kukuh menegakkan harkat dan martabat kerajaannya dan tak kenal takut. Dia ahli dalam berperang dan digelar Raja di Laut. Raja Haji-lah yang berani menyerang VOC (Belanda) dan nyaris mengalahkan mereka dalam Perang Riau (1782—1784). Keperkasaan dan kepahlawanan Raja Haji yang kemudian bergelar *Fisabilillah* itu ikut menempa sifat dan karakter Mahmud. Meskipun mereka bersamahnya sekitar 7 tahun, peran Raja Haji sebagai YDM dalam membangun karakter Mahmud sangat dominan dan sangat mempengaruhi berbagai keputusan yang dibuatnya. Mereka pasangan penguasa yang sangat handal dan ditakuti sekaligus dibenci oleh Belanda dan kekuatan asing lainnya di Selat Malaka.

Dalam rentang waktu 51 tahun memerintah, Mahmud Ri'ayat Syah telah menunjukkan dengan jelas jejak dan perannya dalam mempertahankan kedaulatan, marwah, dan eksistensi kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang (1761—1812). Banyak keputusan pentingnya yang menjadi bukti betapa visionernya dia sebagai pemimpin dan bagaimana strategisnya keputusannya untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Riau-Johor-Pahang itu.

Peran penting pertama yang dia tunjukkan ketika sebagai sultan yang masih muda, sekitar 21 tahun, dia bersetuju dan tak takut mendukung pamannya Raja Haji, YDM IV, untuk

berperang melawan Belanda. Perang ini terkenal sebagai Perang Riau (1782—1784) dan merupakan salah satu perang laut yang paling hebat di kawasan Nusantara. Sultan Mahmud Ri'ayat Syah, bukan hanya bersetuju untuk bertempur mempertatahkan pusat pemerintahannya di Riau terhadap gempuran Belanda, melainkan dia juga bersetuju dan mendorong pamannya untuk menyerang Belanda di Malaka ketika mereka telah memenangkan pertempuran di Teluk Riau dan meneggelamkan kapal bendera Belanda, Malacca Walvaren. Bahkan, dia ikut berangkat bersama armada perang YDM Raja Haji menuju Malaka.

Keputusan kedua yang menunjukkan visi kepemimpinan dan ketajaman analisisnya sebagai YDBadalah ketika dia harus memutuskan siapa yang dia setujui sebagai YDM menggantikan YDM Daeng Kamboja. Raja Ali, putera Daeng Kamboja, atau Raja Haji, pamannya. Pihak Bugis menginginkan Raja Ali karena masih berdarah Bugis. Akan tetapi pihak Melayu menginginkan Raja Haji, yang masih ada darah Melayunya atau campuran Melayu-Bugis. Akan tetapi, Mamud sudah tahu siapa dan bagaimana Raja Haji yang sebenarnya. Mahmud Ri'ayat Syah akhirnya memilih Raja Haji karena pada sosok pamannya itulah dia melihat semangat, keberanian, dan ketangguhan seorang pemimpin yang diperlukannya untuk membantunya di dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dia berangkat ke Pahang, ketika mendengar Raja Haji ada disana, dan menjemput pamannya itu untuk kembali ke Riau dan menjadi YDM. Dia sangat mendukung keputusan Bendahara Pahang yang melantik Raja Haji sebagai YDM Riau mengganti Daeng Kamboja.

Keputusannya sangat tepatkarena dalam era mereka berdua inilah kerajaan Riau-Johor-Pahang mencapai puncak kebesarannya. Di dalam *Tuhfat al-Nafis* diceritakan betapa makmur dan sejahteranya Riau waktu itu. Perahu dagang berjejer berlabuh di muara Sungai Riau. Perdagangan sangat maju dan orang asing berdatangan. Raja Haji dan Mahmud Riayat Syah membangun istana mereka yang mewah dan cemerlang di Sungai Batang dan di Biram Dewa, Pulau Bintan.

Visi kepemimpinan Mahmud Ri'ayat Syah juga terlihat ketika dia dan pamannya Raja Haji memutuskan membangun tiga kubu pertahanan ketika Perang Riau berkecamuk dan mereka meluru Belanda di Malaka. Raja Haji sebagai YDM dan panglima perangnya membangun pertahanan dan pusat penyerangan di Teluk Ketapang, Tanjung Palas, di seberang Bandar Malaka. Dari sanalah mereka menyerbu dan mengepung Malaka. Dalam pada itu, Mahmud

Riayat Syah sebagai YDB, berkubu di Muar, Johor, dan mengendalikan pemerintahan Riau dari sana. Kubu ketiga adalah Ulu Riau, ibukota Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, tempat sejumlah pembesar dan kerabatnya tetap bertahan disana. Kedua pembesar itu bersepakat bahwa kalau ternyata mereka kalah, dan salah seorang terbunuh, maka kekuasaan Riau harus tetap tegak. Kedaulatan Riau harus tetap dipegang. Kalau Teluk Ketapang jatuh, Muar akan jadi pusat perlawanan. Kalau Muar juga diserang, mereka akan mundur ke Ulu Riau dan bertahan disana. Dan, itulah akhirnya yang terjadi. Raja Haji tewas di Teluk Ketapang, 1784, tetapi Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang tetap tegak karena Mahmud Ri'ayat Syah masih memerintah dari Muar. Ketika Belanda mengejanya ke Muar, dia berundur ke Ulu Riau dan bertahan disana. Raja Ali, salah satu panglima andalan Riau, menyingkir ke Sukadana (Kalimantan Barat) dan menggalang dukungan dari pamannya Daeng Manambun dan Daeng Kemasi, para keturunan Bugis yang sudah membangun kerajaan disana. Meskipun Belanda mengirim armada perangnya dibawah pimpinan Laksamana Jacob van Braam ke Riau untuk menaklukkan Mahmud Riayat Syah, Sultan yang gagah perkasa itu tetap bertahan di Ulu Riau.

Riau memang akhirnya menandatangani perjanjian kalah perang dengan Belanda di kapal Utrecht, 1784, tetapi Belanda tak dapat menjalankan akal liciknya untuk menawan Mahmud Riayat Syah. Pasal, yang datang menandatangani rekapitulasi itu adalah Bendahara, Temenggung, dan Indra Bungsu. Sementara Sultan Mahmud Ri'ayat Syah tidak pernah menandatangani perjanjian itu. Malahan Mahmud Ri'ayat Syah sendiri tetap duduk sebagai sultan di Ulu Riau. Dengan strategi demikian itu, meskipun Riau sudah dianggap menjadi daerah taklukan Belanda, Mahmud Riayat Syah masih dapat secara sembunyi-sembunyi melakukan perlawanan. Dia telah mengirim surat dan utusannya menemui para sahabatnya, pemimpin illanun di perairan Kalimantan dan Kepulauan Zulu, untuk mengusir Belanda dari Riau. Para illanun itu, dengan dukungan sisa-sisa pasukan Riau dibawah pimpinan Raja Ali, terus mengganggu keberadaan Belanda di Selat Malaka dan di Riau. Bahkan, pada tahun 1787, para illanun itu berhasil menghancurkan pusat keresidenan Belanda di Pulau Bayan dan Tanjungpinang dan mengusir residennya, David Ruhde, kembali ke Malaka.

Keputusan strategis dan demi mempertahankan kedaulatan negerinya juga dilakukan oleh Mahmud Ri'ayat Syah dengan memindahkan pusat pemerintahannya dari Ulu Riau di Pulau Bintan ke Daik di Pulau Lingga. Pemindahan ini semakin menyulitkan Belanda untuk menyerang

Kerajaan Riau karena Daik yang jadi ibukota kerajaan berada di satu kawasan di bahagian hulu sungai Daik, yang muara dan sungainya sangat sulit ditembus musuh. Di pulau Mepar, di muara sungai Daik itu, mereka pasang benteng dan meriam sehingga jika armada Belanda datang menyerang, mereka akan dihujani meriam dan perlawan laskar Kerajaan Riau-Lingga. Dengan strategi pemindahan pusat pemerintahan ini, praktis Riau-Lingga sudah tak terganggu lagi oleh armada-armada perang Belanda yang terus mencarinya karena menuduh Mahmud Ri'ayat Syahlah yang jadi biang keladi serangan-serangan lanun atas armada pelayaran Belanda di Selat Malaka. Oleh karena itu, menurut mereka, Mahmud Ri'ayat Syah harus dihukum.

Tindakan lain yang historis dan penting bagi upaya Riau-Lingga mempertahankan kedaulatannya adalah pada 1795. Mahmud Ri'ayat Syah dengan cerdas memanfaatkan momentum pengembalian kedaulatan Kerajaan Riau-Lingga melalui tangan penjajah Inggris yang bermarkas di Calcutta ketika Belanda kalah dalam Perang Eropa dan harus menyerahkan semua daerah jajahannya di Hindia Belanda kepada Inggris. Mayor Farquhar, Gubernur Inggris di Pulau Pinang, yang cerdas, segera datang ke Daik dan mengembalikan kedaulatan Riau-Lingga ke tangan Mahmud Ri'ayat Syah mendahului utusan Belanda. Dan, Mahmud Ri'ayat Syah, begitu menerima pengembalian kedaulatan, langsung menugasi Tengku Muda Muhammad, yang sejak 1785 telah dilantiknya sebagai Yang Dipertuan Muda Riau-Lingga-Johor-Pahang, menggantikan Raja Haji Fisabilillah, untuk membangun pusat pemerintahan YDM sebagai Wakil Sultan di Tanjung Unggat dan mengambil alih kekuasaan keresidenan Belanda berikut peralatan perangnya di Tanjungpinang. Pengambilalihan Tanjungpinang ini bermakna sangat simbolis dalam perjuangan Mahmud Ri'ayat Syah untuk merebut kembali kedaulatan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang dari Belanda. Alhasil, ketika utusan Belanda datang ke Daik, juga untuk menyerahkan surat keputusan pengembalian kedaulatan, keputusan itu sudah bermakna lain. Bukan lagi pengembalian kedaulatan, tetapi *pengakuan kedaulatan* atas Kerajaan Riau-Lingga karena Riau-Lingga telah lebih dahulu merebut kedaulatannya melalui tangan Inggris. Meskipun begitu, Mahmud Ri'ayat Syah tetap mengirimkan surat ucapan terimakasih kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia atas surat keputusan pengembalian wilayah kekuasaan Riau-Lingga tersebut, tetapi tindakan itu lebih kepada sopan-santun politik, strategi untuk tetap memberi kesempatan Riau-Lingga membangun kekuatannya, dan tidak menambah musuh baru.

Keputusan Mahmud Ri'ayat Syah melantik Tengku Muda Muhammad sebagai YDM, 1785, memang menambah keruh dan tajam pertentangan kepentingan antara pihak Melayu dan Bugis di kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Bahkan, sempat meletus perang saudara antara Tengku Muda Muhammad bersama pendukungnya dari pihak Melayu dengan Raja Ali dengan pendukung dari pihak Bugis. Pertikaian ini sudah sangat berbahaya bagi kedaulatan Riau-Lingga waktu itu. Pasalnya di dalam konflik itu telah ikut bermain tangan-tangan politik Belanda yang mendukung puak Melayu dan Inggris yang memihak orang-orang Bugis. Sudah terlihat tanda-tanda Riau-Lingga akan pecah dan terbelah. Saat inilah, akhirnya, Mahmud Ri'ayat Syah kembali menunjukkan kehandalannya sebagai seorang pemimpin, sebagai sultan, sebagai politikus, yang dalam posisi yang sangat sulit dan kritis, masih didengar oleh para pembesar dan rakyatnya (sebelumnya Sultan Selangor, Sultan Ibrahim yang jadi pemimpin pihak Bugis, dan Bendahara Pahang yang jadi pemimpin pihak Melayu, tak berhasil mendamaikan kedua pihak yang bertikai). Akhirnya, Mahmud Ri'ayat Syah datang ke Pulau Bulang dan membuat keputusan, yang dalam sejarah jatuh-bangunnya Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, akan berdampak sangat jauh pada keberadaan kerajaan ini dan politik pemerintahan di kerajaan ini pada waktu-waktu setelah itu.

Perdamaian Bulang, 1803, begitulah jalan damai yang diputuskan Mahmud Ri'ayat Syah. Agar hak Yang Dipertuan Besar tetap ada ditangan pihak Melayu, sebagaimana diputuskan pada Sumpah Setia Melayu Bugis (1722), maka Mahmud mengawinkan putera mahkotanya Tengku Husin dengan Tengku Buntat, anak Tengku Muda Muhammad, cucu Temenggung Johor. Artinya, kelak siapapun keturunan dari mereka ini akan berhak atas tahta Kerajaan Melayu Riau. Dalam pada itu, hak untuk jabatan Yang Dipertuan Muda, yang menurut Sumpah Setia Melayu Bugis adalah hak pihak Bugis, dikembalikan kepada Raja Ali, anak Daeng Kamboja, dan jadilah dia YDM VI Riau-Lingga, menurut versi orang Melayu—karena Tengku Muda Muhammad dianggap YDM V—atau YDM V menurut versi Bugis. Tengku Muda Muhammad pula ditunjuk menjadi Temenggung Johor, jabatan yang selama ini menjadi hak pihak Melayu, menggantikan ayahandanya Temenggung Abdul Jamal. Untuk tetap mempertahankan pertalian darah antara pihak Melayu dan pihak Bugis, sebagaimana dilakukan oleh Daeng Perani (salah satu dari lima bersaudara Upu-Upu Bugis dari Luwu yang merantau ke Semenanjung Malaka) dengan Tengku Tengah, (puteri tertua Sultan Abdul Jalil Ri'ayat Syah, Sultan Johor I) atau Daeng Celak (salah

seorang dari Upu lima bersaudara itu) dengan Tengku Mandak (putri Sultan Abdul Jalil Syah nomor dua), Mahmud yang berdarah Melayu itu, memperisteri Raja Hamidah, sepupunya, putri Raja Haji yang berdarah Bugis. Maskawinnya adalah Pulau Penyengat. Dan, dia menjadikan Raja Hamidah yang kemudian bergelar Engku Puteri itu sebagai permaisurinya.

Perdamaian Bulang ini memang sangat historis dan juga sangat strategis bagi Mahmud Ri'ayat Syah dalam mempertahankan kedaulatan negerinya. Bukan saja secara politis, melainkan juga secara ekonomi dan kultural. Meskipun dari perdamaian ini, ada yang sangat kecewa, seperti Tengku Muda Muhammad patah arang dan menolak diangkat menjadi Temengung Riau-Lingga, atau Raja Djaafar, putra Raja Haji Fisabilillah, calon Yang Dipertuan Muda Riau-Lingga yang didukung pihak Melayu, tetapi melalui perdamaian ini, Mahmud meletakkan kerangka sistem pemerintahan kerajaan Riau-Lingga yang lebih adil bagi pihak-pihak yang bertikai, terutama dalam bidang kehidupan ekonomi dan kesejahteraan yang selalu menjadi salah satu punca konflik.

Dia membagi Kerajaan Riau-Lingga ke dalam tiga wilayah kehidupan ekonomi dan pembangunan. Wilayah pertama adalah Pulau Lingga, Singkep, dan sekitarnya yang menjadi daerah kekuasaan Mahmud Ri'ayat Syah, anak-anak, dan kerabatnya. Di sini selain ada perkebunan sagu, juga ada tambang timah, di Pulau Singkep, yang sejak 1801 sudah mulai ditambang. Daerah kekuasaan ekonomi kedua adalah Pulau Bulang, Singapura, Johor, dan Pahang, yang menjadi daerah ekonomi pihak Melayu dan penduduknya dibawah kendali Bendahara dan Temenggung. Dan, yang ketiga adalah Pulau Bintan, Penyengat, Batam, Karimun, dan Natuna yang jadi daerah “permakanan”—begitu istilah pembagian rezeki kerajaan Riau Lingga pada masa itu—untuk pihak Bugis dan kaumnya dibawah kendali Raja Hamidah, Sang Permaisuri.

Pembagian wilayah permakanan ini kemudian berdampak penting pada pembangunan wilayah ekonomi, budaya, dan politik sehingga Riau-Lingga sulit ditaklukkan. Walaupun keputusan inilah juga yang kemudian menyebabkan ketika konflik politik muncul setelah Mahmud Ri'ayat Syah wafat pada 1812, dan Riau-Lingga-Johor-Pahang kembali terancam pecah, Riau-Lingga tak mudah ditaklukkan. Perlu 100 tahun waktu baru Belanda berhasil menghapus kerajaan ini dari peta kekuasaan mereka, melalui pemakzulan Sultan Abdurrahman Muazam Syah, pada 1913. Dan itu, karena mereka tak setia pada kebijakan politik yang

diwariskan Mahmud Ri'ayat Syah dengan memindahkan kekuasaan ke Pulau Penyengat, di depan hidung Belanda. Kalau saja tetap di Daik, mungkinkah Kesultanan Riau-Lingga itu begitu mudah ditaklukkan?

Itulah jejak-jejak bijak Sultan Mahmud Ri'ayat Syah. Itulah peran penting yang telah dia mainkan ketika menjadi pemimpin dan sultan di Kerajaan Melayu Riau-Lingga. Itulah bukti betapa dia berhasil menjaga harkat, martaabat, dan kedaulatan negerinya dari tangan-tangan kekuatan politik dari luar. Kehandalannya dapat dikatakan di atas raja-raja Melayu Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang. Raja Haji dikenal sebagai pahlawan dan pemimpin dalam perang. Dan, Mahmud Ri'ayat Syah adalah pemimpin politik dan ahli pemerintahan. Dia adalah sultan yang berani berhadapan dengan kekuasaan asing dan melawan secara politis. Sehingga di alam Indonesia merdeka ini, tertanam pula budi jasanya yang yang tercatat oleh tinta emas, takkan terlupakan, menjadi kebanggaan dan spirit anak bangsa untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara sebagaimana patutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (Ketua Dewan Editor). 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdul Malik dan Hasan Junus. 2000. *Studi tentang Himpunan Karya Raja Ali Haji*. Pekanbaru: Bappeda Propinsi Riau dan PPKK, Unri.
- Abdul Malik, dkk. (Penyunting) dan Abdul Kadir Ibrahim (Penanggungjawab). 2010. *Revitalisasi Budaya Melayu: Filosofi Dunia Melayu Pluralistik Budaya dan Kebangkitan Sastra*. Tanjungpinang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang.
- Abdul Malik, Hasan Junus, dan Auzar Thaher. 2003. *Kepulauan Riau sebagai Cagar Budaya Melayu*. Pekanbaru: Unri Press.
- Abdul Malik. 1992. *Perkembangan Bahasa Melayu Masa Kini: Kasus Indonesia*. Makalah Seminar Internasional Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pergaulan Bangsa Asean dan Bangsa Serumpun, Tanjungpinang, 7—10 September 1992.
- Abdul Malik. 2009. *Memelihara Warisan yang Agung*. Yogyakarta: Akar Indonesia.
- Abdul Malik. 2012. *Menjemput Tuah Menjunjung Marwah*. Jakarta: Komodo Books.
- Abdullah Hasan. 2010. *Menggagas dan Mewujudkan Prasasti Bahasa Melayu Kepulauan Riau sebagai Asal Bahasa Nasional Indonesia*. Makalah Seminar Bahasa Melayu, Konvensyen XI Dunia Melayu Dunia Islam, Batam, 10 November 2010.
- Abu Bakar, Abdul Latiff. 2010. *Kepulauan Riau sebagai Pusat Kebudayaan dan Tamadun Melayu*. Makalah Seminar Bahasa Melayu, Konvensyen XI Dunia Melayu Dunia Islam, Batam, 10 November 2010.
- Abubakar, Tengku Ahmad & Hasan Junus. 1972. *Sekehमित Kesan Peninggalan Sejarah Riau*. Daik-Lingga, Asmar Ras.
- Abrus, Rustam S., dkk. (Penyunting). 1988. *Sejarah Perjuangan Raja Haji Fisabilillah dalam Perang Riau Melawan Belanda (1782—1784)*. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

- Adil, Haji Buyong. 1971. *Sejarah Johor*. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Ahmad, A. Samad (Penyelenggara). 1985. *Kerajaan Johor-Riau*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Al-Azhar & Rahman, Emustian (Penyelenggara). 2001. *Kandil Akal di Pelantar Budi*. Pekanbaru, Masyarakat Pernaskahan Nusantara Riau & Yayasan Kata.
- Andaya, B.W. 1987. *Kerajaan Johor 1641-1728 Pembangunan Ekonomi Dan Politik*. Terj. Shamsuddin Jaafar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Andaya, B.W. 1997. *Recreating a Vision, Daratan and Kepulauan in Historical Context, Bijdragen tot de Taal,- Land-en Volkenkunde*, Vol. 153, hlm. 483—508.
- Arda, Fitra, dkk. 2007. *Panduan Benda Cagar Budaya dan Situs Kota Tanjungpinang*. BP3 Batusangkar dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang.
- Adnan, Gusti & Zulkarnain (Penyelenggara). 2008. *Mengabdikan Ilmu dan Profesi Sejarah Demi Daerah & Bangsa (Pesembahan 70 Tahun Prof. Suwardi MS)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- A.W. Widjaya. *Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan*, CV. Akademika Pressindo.
- Budisantoso, S., dkk. (Penyunting). 1986. *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*. Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
- Buletin Arkeologi Amoghapasa*. 2004. BP3 Batusangkar.
- Buletin Arkeologi Amoghapasa*. 2005. BP3 Batusangkar.
- Buletin Cagar Budaya*. 1999. Edisi pertama, Vol. I, No 2, September 1999
- Dasuki, A. Hafizah (Pemimpin Redaksi). 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve.
- Depdikbud. 1986. *Sejarah Daerah Riau*. Cetakan ke-2. Pekanbaru: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

- D. Rahman, Jamal, dkk. 2010. *Dermaga Sastra Indonesia*. Depok, Komodo Books & Pemko Tanjungpinang.
- Esposito, John L. 2002. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern(3)*. Bandung, Mizan.
- F. I., Rejab. 2000. *Daik Bonda Tanah Melayu*. Kuala Lumpur, Pusat Penyelidikan Ensiklopedia Malaysia.
- Fitri, Raja Suzana (Editor). 2002. *Bahana Ilmu Setinggi Kata (Kumpulan Cakap Rampai Raja Hamzah Yunus)*. Tanjungpinang, Bagian Organisasi Pemda Kepulauan Riau.
- Galba, Sindu, dkk. 2001. *Sejarah Kerajaan Riau Lingga*, Tanjungpinang, Bappeda Kabupaten Kepulauan Riau dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang.
- Galba, Sindu, dkk. 2001. *Asal-Usul Nama Tempat Bersejarah di Bintan, Daik Lingga, dan Singkep*. Tanjungpinang: Bappeda Kabupaten Kepulauan Riau dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang.
- Galba, Sindu, dkk. 2001. *Pelabuhan Riau: Hubungan dan Peranannya dengan Daerah Hinterland 1700-1973*. Tanjungpinang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang.
- Ghalib, Wan, dkk. (Penerjemah). 2002. *Belanda di Johor dan Siak 1602-1865 Lukisan Sejarah*. Siak, Pemerintah Kabupaten Siak & Yayasan Arkeologi dan Sejarah “Bina Pusaka”.
- Ghazali, Abdullah Zakaria. 1997. *Istana dan Politik Johor (1835-1885)*, Kuala Lumpur, Yayasan Penataran Ilmu.
- Haji Salleh, Siti Hawa. 2009. *Kelopak Pemikiran Sastera Melayu*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Hamidy, UU. 1990. *Masyarakat dan Kebudayaan di Daerah Riau*. Pekanbaru, Zamrad.
- Harun Mat Piah *et.al.* 2006. *Kesusasteraan Melayu Tradisional*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hasyim, Muhammad Yusoff. 1993. *Hikayat Siak*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Helmiati. 2011. *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru-Riau, Zanafa.

- Hooker, Virginia Matheson. 1991. *Tuhfat Al-Nafis Sejarah Melayu-Islam*. Penterjemah Pengenalan Ahmad Fauzi Basri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Husain, Shaharom. 1995. *Sejarah Johor Kaitannya dengan Negeri Melayu*, Kuala Lumpur, Fajar Bakti SDN.BHD.
- Ibrahim, Abdul Kadir, Said Parpan & Yussuwadinata. 2004. *Aisyah Sulaiman Riau Pengarang dan Pejuang Perempuan*, Pekanbaru, Unri Press.
- Ibrahim, Abdul Kadir, Yussuwadinata, Raja Malik Hafrizal & T.M. Fuad. 2007. *Riwayat Singkat Pahlawan Nasional Raja Haji Fisabilillah*. Tanjungpinang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata-Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- Ibrahim, Abdul Kadir, Yussuwadinata, Raja Malik Hafrizal & T.M. Fuar, 2007. *Riwayat Singkat Pahlawan Nasional Raja Ali Haji*. Pemerintah Kota Tanjungpinang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tanjungpinang.
- Ibrahim, Abdul Kadir. *Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Syah III*. Makalah disampaikan dalam Seminar Sejarah: “Menemukenali Ketokohan Sultan Mahmud Syah III” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang, di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, 14 Juni 2012.
- Junus, Hasan, dkk. 2004. *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji sebagai Bapak Bahasa Indonesia*. Pekanbaru, Unri Press & Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- Junus, Hasan. 2002. *Engku Puteri Raja Hamidah Pemegang Regalia Kerajaan Riau*. Pekanbaru, Unri Press.
- Junus, Hasan. 2002. *Karena Emas di Bunga Lautan*. Pekanbaru, Unri Press.
- Junus, Hasan. 2000. *Raja Haji Fisabilillah Hanibal dari Riau*. Tanjungpinang, Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kepulauan Riau.
- Kadir, Daud, dkk., 2007. *Sejarah Kebesaran Kesultanan Lingga-Riau*. Lingga, Pemerintah Kabupaten Lingga.
- Karim, Nik Sapiah. 2003. *Tatabahasa Dewan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1978. *Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta.
- Koestoro, Lucas Partanda. Tt. *Dapur Gambir Di Kebun Lama Cina, Jejak Kegiatan Perekonomian Masa Lalu Sebagai Potensi Sumber Daya Arkeologi Pulau Lingga*.

- Kong Yuan Zhi. 1993. *Bahasa Kunlun dalam Sejarah Bahasa Melayu*, makalah Simposium Internasional Ilmu-Ilmu Humaniora II: Bidang Sejarah dan Linguistik, Fakultas Sastra, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26—27 April 1993.
- Liamsi, Rida K. 2007. *Bulang Cahaya*, Pekanbaru, Yayasan Sagang.
- Liamsi, Rida K. 2009. *Engku Puteri (Part III)* dalam <http://www.erdeka.com>.
- Liamsi, Rida. K. 1989. *Tanjungpinang Kota Bestari*. Tanjungpinang: Pemerintah Kotif Tanjungpinang dan Lembaga Studi Sosial Budaya Tanjungpinang.
- Lutfi, Muchtar. 1997. *Sejarah Riau*. Pekanbaru: Pemda Tingkat I Riau.
- Matheson, Virginia. 1982. “Pengenalan,” dalam Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, *Tuhfat al-Nafis*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
- Matheson Hooker, Virginia (Penerjemah Pengenalan, Ahmad Fauzi Basri). 1991. *Tuhfat Al Nafis Selarah Melayu-Islam*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-UpayaPemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moch. Nasir. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohd. Zuhdi Marsuki. 2006. *Tamadun Islam dan Tamadun Melayu: Konsep Tamadun*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
- Mohd. Koharuddin Mohd. Balwi. 2005. *Peradaban Melayu*. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
- MS, Suwardi & Ridwan Melay (Pengkaji naskah kuna dengan pengarangnya Anonim). *Syair Sultan Mahmud*. 1990, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jnderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara).
- MS, Suwardi. 2008. *Dari Melayu ke Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- MS, Suwardi. 1991. *Budaya Melayu dalam Perjalanannya Menuju Masa Depan*. Pekanbaru, Pusat Penelitian Universitas Eiau.
- Muljana, Slamet. 2009. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*, Yogyakarta, LKis Yogyakarta.
- Mulyana, Slamet. 1981. *Kuntala, Sriwijaya dan Swarnabhumi*, Jakarta: Yayasan Idayu.

- Munoz, Paul Michel. 2009. *Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia*. Yogyakarta, Mitra Abadi.
- Netscher, E. 1870. *De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 tot 1865*. Batavia: Bruijning en Wijt.
- Netscher, E (Penerjemah: Wan Ghalib). 2002. *Belanda di Johor dan Siak 1602-1865*, Kabupaten Siak, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak & Yayasan Arkeologi dan Sejarah “Bina Pusaka”.
- Nordin, Mardiana. 2008. *Politik Kerajaan Johor 1718-1862*. Johor Bahru, Yayasan Warisan Johor.
- Oetomo, Repelita Wahyu. *Benteng Tanah di Pulau Lingga*. Medan: Balar Medan.
- Pemerintah Propinsi Riau. 1993. *Dari Kesultanan Melayu Johor Riau ke Kesultanan Melayu Lingga Riau*. Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Riau.
- Pemerintah Kota Tanjungpinang. 2006. *Tanjungpinang Land of Malay History*. Tanjungpinang: Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- Perret, Daniel. 1998. *Sejarah Johor-Riau-Lingga sehingga 1914: Sebuah Esei Bibliografi*. Ecole francaise d'Extreme-Orient: Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan Malaysia.
- Rahman, Elmustian, Tien Marni, dan Zulkarnain (Eds). 2003. *Alam Melayu: Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan*. Pekanbaru: Unri Press.
- Raja Ahmad dan Raja Ali Haji. 1982. *Tuhfat al-Nafis*, dalam Virginia Matheson (Ed.). Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Reid, Anthony & David Marr (Editor). 1983. *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka*, Jakarta, Temprint.
- Ricklefs, M.C (Gadjah Mada University Press). 1999. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rousseau, J.J. 2007. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Visimedia.

- Samad, Raja Sofyan. 2010. *Negara dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shahrudin Hassim, Ahmad Zulhusny bin Rozali, dan Puan Norshabihah Ahmad. 2010. *Memperkasa Bahasa Melayu di Arena Antarabangsa*, makalah Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa, Perlis, 2010.
- Shihab, M. Quraish. 1994. "*Membumikan*" *Al-Quran*. Bandung, Mizan.
- Slamet, Margono, tt. *Kelompok Organisasi dan Kepemimpinan*. Bogor: Fak. Pascasarjana IPB.
- Sujitno, Sutedjo. 2007. *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia abad ke 18- Abad ke 20*, Pangkal Pinang, Bangka, PT. Timah (Tbk).
- Sutopo, Marsis, dkk. 2006. *Studi Master Plan Kawasan Kepurbakalaan Daik*.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung, Pustaka Setia.
- Swastiwi, Anastasia Wiwik. 2002. *Kerajaan Johor Riau-Lingga Pada Masa Pemerintahan Sultan Mahmud Syah III dalam Naskah Kuno: Sumber Ilmu yang Terabaikan (Telaah terhadap Beberapa Naskah Kuno)*. Tanjungpinang: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Swastiwi, Anastasia Wiwik. 2002. *Istana Kota Pring (1777—1787): Aset S*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan*. 2010. Jakarta, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan*. 2010. Jakarta, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI.

(www.prihatin.net).

(<http://www.yaisra.com>).